

DISERTASI

DIFUSI INOVASI PERTANIAN

**Suatu Kajian tentang
Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat Lokal
Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Politik**

KKB
KK-2
338.16
Sum
d



Disertasi / Eksisat / Sumartono

SUMARTONO

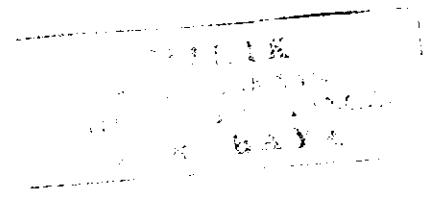
3000032013151

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

DIFUSI INOVASI PERTANIAN
Suatu Kajian tentang
Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat Lokal
Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Politik

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
dan telah dipertahankan di hadapan
Dewan Ujian Doktor Terbuka
Pada Hari : Senin
Tanggal 31 Juli 2000
Pukul 10.00 WIB.



Oleh :

SUMARTONO
NIM : 099512045 D

Telah diuji pada ujian tertutup

Tanggal : 17 Juni 2000

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof.Dr.Kabul Santoso MS (Ketua)
Anggota : 1. Prof H. Soetandyo Wignjosoebroto,MPA
2. Prof. A.Ramlan Surbakti, MA PhD.
3. Prof.Dr. H.Soedarmanto Ir. MEd.
4. Prof. Dr. Sunyoto Usman
5. Dr. Bustami Rachman
6. Widodo J.P.,dr.,MS.,MPH.,Dr.PH
7. Dr. Daniel T.Sparringa

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor: 5487/JO3/PP/2000
Tanggal : 26 Juni 2000

*Untuk
Bapak-Babuk
Guruh-Ratoh*

*Ku hadiahkan untuk
Anisha, Aisha dan Aziza Anakku
serta Sri Redjeki isteriku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa puji syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga atas perkenannya, akhirnya saya dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penyelesaian disertasi ini tidak luput dari peran Prof.H.Soetandyo Wignjosoebroto MPA . Selaku promotor beliau banyak memberikan bimbingan dan dorongan moral, meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan arahan yang tak terduga nilainya bagi saya. Kepada beliau saya sampaikan terima kasih. Jika ada arahan yang mungkin tidak tertangkap perkenan saya mohon maaf.

Prof.A. Ramlan Surbakti MA.PhD. selaku ko-promotor telah menempe, mendidik dan menunjukkan kepada saya bagaimana seorang akademisi berkarya. Untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih atas segala bimbingannya.

Dengan selesainya disertasi ini perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang besar-besarnya kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof.H. Soedarto,dr.,DTM &H.,Ph.D., dan Prof.dr.H. Bambang Rahino Setokoesumo selaku mantan rektor yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program doktor.

Direktur Program Pascasarjana Prof.Dr.H. Muhammad Amin, dr. dan Prof.Dr Soedijono,dr., selaku mantan Direktur Program Pascasarjana telah memberi fasilitas dan kemudahan studi. Beliau selalu mengingatkan dan

mendorong saya untuk segera menyelesaikan program doktor ini. Atas segala bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Demikian juga rasa terima kasih ini saya tujukan kepada Rektor UPN “Veteran” Surabaya, Brigadir Jenderal Suparyo Sri Indratoro MPKn yang telah menyediakan dana untuk mengikuti dan menyelesaikan program doktor ini. Beliau juga ikut serta mendorong semangat dan dukungan moral bagi saya sekeluarga.

Ucapan terimakasih kasih yang sangat besar juga disampaikan kepada para guru saya Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto MPA, Prof. A. Ramlan Surbakti, MA PhD., Prof. Abdoel Gani, SH., MS, Prof. Dr. Josef Glinka SVD, Widodo J. Pujirahardjo, dr., MS., MPH., Dr. PH., Dr. Sarmanu, Dede Utomo, PhD., Dr. Zainuddin, Apt., Daniel Sparingga Ph.D., Prof. Dr. Soedarmanto Ir. M. Ed, Dr. Kusnadi Ir. MS, Prof. Dr. Kabul Santoso MS., Prof. Dr. Sunyoto Usman, dan Dr. Bustami Rachman, MSc. Dari beliau-beliau saya banyak menimba ilmu, arahan, saran, komentar dan kritik demi penyempurnaan disertasi ini.

Saya merasa berhutang budi kepada guruku Prof. Dr. Ir. Moeljadi Banoewidjojo (Alm) yang telah membimbingku ketika masih di S-1 dan S-2. Walaupun beliau tidak sempat membaca disertasi ini izinkanlah saya mengucapkan banyak terimakasih atas segala didikan yang ditanamkan pada diri saya. Kepada Ir. Moegiyanto juga disampaikan terimakasih atas dorongannya.

Ramanda Abd.Rachman Eman Sastraprawira (Alm) dan Ibunda Moani, juga ramanda H. Hafiloeddin serta Ibunda Hajjah Moenarti Roeslani, di samping sebagai orang tua juga adalah guru yang kuhormati. Yang saya peroleh kali ini adalah berkat benih-benih yang ditanam beliau. Dia berjasa membuka mata dan hati saya untuk memilah dan memilih secara arif. Terima kasih orang tuaku.

Kepada rekan sejawat khususnya Dr. Nurinwa, Dr. Hari Y., Dr. Bambang S., Dr Setyo. Y., Dr Djazuli, Ismail N., Tajur R., Burhan B., Isbondo dan Djabbar A., saya tidak akan melupakannya. Kepada rekan Hayat saya sampaikan terima kasih karena tangan trampil anda ikut menyertai penataan disertasi ini.

Dan last but not least, perhatian khusus saya sampaikan kepada Sri Rejeki Isteriku dan ananda bertiga, Anissa, Aisha dan Aziza. Bapak minta maaf karena selama ini bapak banyak menyita kesenangan kalian. Engkau telah menyisihkan sebagian hakmu demi kepentingan bapak. Namun patut diingat anakku, ketika kejenuhan ini mulai hinggap di hati, di samping kalian acapkali bertanya: “kapan bapak selesai sekolahnya”, justru berkat engkaulah semangat ini timbul kembali. Engkau banyak memberikan inspirasi bagi cita-cita bapak. Terima kasih anakku.

Terima kasih

RINGKASAN

Penelitian ini berawal dari perdebatan siapa yang menjadi aktor dalam difusi inovasi. Semenjak dekade 60-an sampai paruh 90-an, peran pemerintah sangat dominan. Kini terdapat fenomena baru di mana pasar mampu mengendalikan inovasi. Kekuasaannya sudah melampaui sekat-sekat teritorial negara. Akibatnya masyarakat lokal yang secara geografis dipinggirkan, pola pikirnya berubah menjadi komersial (Collier, et al, 1996:82). Intervensi negara juga ikut andil. Adanya dukungan negara terhadap penetrasi kapital selain menimbulkan ketergantungan, juga netralitasnya menjadi kabur. Bahkan konflik yang terjadi, melekat pada struktur kekuasaan (Bachriadi, 1995:171). Di dalamnya mencakup wacana ekonomi politik yang mengandung unsur kekuatan, dominasi dan legitimasi kekuasaan antara negara, pasar dan masyarakat.

Kini pemahaman difusi inovasi mencakup liberalisasi. Permasalahannya adalah: apakah negara, pasar dan masyarakat dapat independen dalam mendifusikan dan mengadopsi inovasi. Jika tidak independen, kondisi yang bagaimana dan kekuatan apa yang mempengaruhinya. Bagaimana hubungan di antara ketiganya dalam hubungan difusi inovasi tersebut.

Kajian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu (1) Untuk menjelaskan karakteristik petani sebagai masyarakat lokal dan bagaimana hubungannya dengan adopsi inovasi. (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana posisi negara dan pasar sebagai sumber inovasi dan posisi masyarakat sebagai pengguna inovasi. (3) Untuk memahami bagaimana makna difusi inovasi tersebut jika di interpretasikan ke dalam kerangka hubungan negara, masyarakat dan pasar. Juga bagaimana hubungan yang terjadi jika dihadapkan pada posisi dan ranah kepentingan yang berbeda. Untuk menjawab tujuan dimaksud pengamatan terhadap difusi inovasi dipakai sebagai objek kajian. Adapun subjek kajian tentang hubungan negara, masyarakat lokal dan pasar dipergunakan perspektif ekonomi politik.

Permasalahan ini di dasarkan pemikiran karena pada awalnya krisis pangan yang diikuti timbulnya krisis ekonomi dan stabilitas politik, mendorong pemerintah untuk mengembangkan inovasi pertanian dan mendifusikannya kepada masyarakat. Karena sarat dengan

nilai dan kepentingan pemerintah, inovasi yang didifusikan selalu dianggap lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi, pada azasnya fenomena difusi menganut mazhab modernisasi. Selanjutnya, walaupun dengan difusi inovasi pertukaran ide dipercepat, juga berpotensi terjadinya konsentrasi kekuasaan dan dominasi pemerintah.

Kajian ini berasumsi bahwa keterkaitan antara negara, pasar dan masyarakat yang menyangkut fenomena ekonomi politik yang dapat berpengaruh terhadap substansi inovasi. Oleh karena itu untuk membahas fenomena difusi inovasi digunakan pendekatan ekonomi politik. Alasannya : pendekatan ekonomi politik terkait dengan sejarah Bimas masa lampau dimana peran pemerintah sangat dominan sehingga terjadi kontaminasi antara isu ekonomi dengan isu politik. Akibatnya tujuan idealisme (politik) terkait dengan tujuan ekonomis. Pasar selain berfungsi sebagai institusi ekonomi juga dipakai sebagai institusi politik. Disamping itu masih terdapat perdebatan apakah intervensi pemerintah masih diperlukan ataukah dibatasi. Dengan perspektif ini maka akan terdapat 3 kemungkinan yaitu: inovasi demi kepentingan politik pemerintah, demi kepentingan ekonomi pasar atau demi kepentingan masyarakat.

Secara empirik pengamatan dilakukan di dua wilayah di kabupaten Malang. Keduanya sudah mengenal komersialisasi pertanian. Perbedaannya, di dataran tinggi didominasi komoditas hortikultura dengan fasilitas pemerintah yang terbatas sedangkan di dataran rendah didominasi komoditas pangan dengan fasilitas pemerintah yang relatif lebih tinggi. Pokok permasalahan yang diamati adalah bagaimana adopsi inovasi masyarakat dan bagaimana difusi inovasi yang dilakukan negara, pasar dan masyarakat. Pendekatan analisis dilakukan melalui 2 pendekatan. Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik masyarakat dengan adopsi inovasi digunakan data kuantitatif yang dianalisis secara uji statistik. Untuk data kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan mempergunakan perspektif ekonomi politik dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan adanya 2 pola hubungan difusi inovasi. Prinsip dasar dari kedua pola adalah sama. Pola pertama, dalam proses produksi terjadi kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan

petani. Pada pola kedua, kerjasama hanya terjadi antara pengusaha dengan petani. Adapun tingkat adopsi pola pertama lebih tinggi dari pola kedua.

Posisi petani ketika berhadapan dengan pemerintah maupun pasar berubah-ubah sesuai konteks yang berlangsung di masyarakat. Pada tahap pra-produksi posisi petani bersifat independen. Penguasaan tanah dipakai sebagai *bargaining-position*. Pengusaha walaupun menguasai inovasi dan pemerintah sebagai pemegang otoritas wilayah tidak dapat menekan petani. Tetapi pada tahap proses produksi dan pasca produksi posisi petani selalu dependen terhadap kepentingan pengusaha. Pemerintah memposisikan sebagai fasilitator antara kepentingan pengusaha dan kepentingan petani. Di samping itu peran utama pemerintah adalah untuk mengamankan target dan kebijaksanaan pemerintah pusat serta melakukan *food security*.

Posisi pemerintah acapkali tidak konsisten. Pada tahap pra-produksi posisi negara bersifat netral. Adapun pada tahap berikutnya posisi negara lebih berpihak dan menyesuaikan dengan kepentingan pengusaha. Dengan adanya keterikatan dengan sentralisasi kebijaksanaan, pemerintah daerah tidak dapat independen. Akibatnya antara pemerintah dengan pasar saling-tergantung (*interdependensi*). Pasar tidak sepenuhnya mengatur pemerintah. Dengan demikian maka posisi pemerintah selain memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pasar juga tidak memposisikan masyarakat menjadi dependen kepada pemerintah.

Kecuali demi kepentingan ekonomis, posisi pengusaha tidak mengenal "kebaikan bersama" berdasar nilai budaya dan ideologis negara. Akibatnya negara tidak dapat memaksakan nilai ideologis sebagai kepentingan bersama. Pengusaha menginginkan agar peran negara sebatas memberikan layanan serta melindungi masyarakat. Tujuan pengusaha adalah tercapainya efisiensi, daya saing dan nilai tambah. Oleh karenanya kualitas inovasi menjadi tantangan.

Mekanisme diadopsinya inovasi karena adanya keterpaduan dan kepentingan ekonomi yang saling mendukung. Petani mempunyai tanah, tenaga kerja dan pengalaman. Pengusaha mampu menyimak peluang pasar dan permodalan. Adapun pemerintah sebagai administrator kebijakan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang

kohesif, walaupun dalam difusi terselip dominasi, petani tidak mampu merasakannya. Akibatnya, difusi inovasi yang awalnya bermakna mendistribusikan sebagian kekuasaan, justru yang terjadi adanya akumulasi kekuasaan bagi struktur yang dominan. Oleh karenanya dalam penelitian memperoleh suatu temuan bahwa : " Terjadinya difusi inovasi akan berbanding lurus dengan terjadinya akumulasi kekuasaan. Akibatnya semakin luas difusi inovasi yang dilakukan maka akan semakin besar kekuasaan yang akan diterima " .

Makna dari temuan ini adalah, walaupun sekilas pengusaha banyak membantu masyarakat namun yang tersirat di dalamnya adalah akan membawa petani kedalam pengaruh kekuasaan dan dependen pada pengusaha. Dengan demikian difusi inovasi memberikan dukungan teoretis terhadap dominasi kapitalis dengan dalih memajukan masyarakat serta memberikan dukungan terhadap intervensi negara guna mengimbangi kekuatan kapitalis. Akibatnya, difusi inovasi mempunyai makna ganda. Disamping mempercepat arus inovasi juga menyebabkan terjadinya akumulasi kekuasaan. Jika difusi inovasi sedemikian berlangsung lama independensi masyarakat juga akan terhambat.

Posisi negara dan pasar yang independen ketika berhadapan dengan masyarakat berakibat preferensi masyarakat harus tunduk dan dependen pada tindakan negara dan pasar. Ini berarti, perspektif radikal dimana masyarakat dapat mempengaruhi negara tidak nampak. Secara teoretis peran negara dan pasar menjadi lebih penting. Jika perspektif liberal dipakai sebagai acuan, negara yang di reposisikan sebagai stelsel pasif hanya akan melakukan intervensi jika diperlukan. Oleh karena itu posisi negara tidak terhambat oleh faktor ekonomi. Tetapi jika perspektif konservatif dipakai sebagai acuan maka negara berhak mengatur mekanisme pasar dan pasar akan bernuansa menyetujui peran negara yang besar dengan memperoleh layanan dari negara. Mekanisme ini menjadikan negara menyesuaikan dengan kepentingan pengusaha dan pengusaha tidak sepenuhnya independen.

Karakteristik hubungan negara, masyarakat lokal dan pasar dalam konteks difusi inovasi memperlihatkan terjadinya interdependensi menuju terciptanya sinergi. Ini ditunjukkan adanya upaya untuk saling memadukan potensi, saling terikat dan saling memberdaya..

Implikasinya akumulasi kekuatan tidak lagi statis, tetapi menjadi dinamis. Temuan ini nampak kontradiktif dengan pengamatan Anderson (1991:52) tentang konsep kekuasaan dalam budaya Jawa. Temuan kedua dalam penelitian ini adalah : " *Jika negara, pasar dan masyarakat melakukan sinergi dengan saling memberdaya dalam kekuatan yang berimbang maka total kekuasaannya akan bersifat dinamis sehingga menjadi positive-sum.*"

Kesimpulannya adalah: pada mulanya difusi inovasi termasuk dalam kategori berperspektif konservatif karena menekankan pada pentingnya peran negara, yang akhirnya menimbulkan terjadinya dependensi. Pada tahapan berikutnya difusi inovasi tidak semata-mata idealisme. Di dalamnya mengandung aspek material yang mendukung dominasi kapitalis dan mendukung intervensi negara walaupun tidak semata-mata mendukung kepentingan pengusaha. Temuan terjadinya sinergi antara negara, pasar dan masyarakat termasuk dalam perspektif liberal modern. Pemerintah berada di antara 2 kepentingan (kapitalis yang individualis dan pluralis yang menekankan kesetaraan). Implikasi aksiologis dari temuan ini hanya akan diminati perspektif liberal sedangkan bagi penganut perspektif konservatif (status-quo) kurang diminati karena dianggap sebagai ancaman.

ABSTRACT

This research has several objectives. Firstly, to explain the farmer characteristics as the local society and how is the influences to the adoption of innovation. Secondly, to describe how is the government position and the market as the source of the innovation, and the society as the users of the innovation. Lastly, to comprehend how is the mean of the innovation, if the innovation does not interpret to the frame of relationship among the government, the people and the market and also how is the relationship if it has been confront to the different position and interest.

This research argue that the relationship among the government, the market and the society concern political economic phenomenon which could affect the innovation substantial. Hence, in discussing the phenomenon of the diffusion of innovation apply the political economic approach. By this approach, could be make three possibilities, namely: the innovation for the government political interest for the market economic and for the society interest.

The farmers position, when were dealt with the government or the market could be fluctuated agree with the context that occur in the society. In the pre-production stage the farmer's positions is independence. In the post-production stage, the farmer's position are always dependent on the businessmen interest. The government is take the position as the facilitator between the businessmen and the farmers interest. In the pre-production stage the government position is neutral. Between the government and the market is inter-dependence. The government position besides concerning the equality of interest between the society and the market also does not take the position that the society is the dependence variable.

The businessmen position does not recognize *the collective goodness*, based on the culture value and certain ideology, but economic interest. The diffusion of innovation that in the beginning have a mean distributing a part of power specifically is the accumulation of power for the dominance structure. This finding could be express as the proposition 1: *The diffusion of innovation is directed proportionate to the accumulation of power. Consequently, the wider diffusion of innovation the higher power acceptance.*

The relationship among the government, the market and the local society in the process of the diffusion of innovation shows the synergy. Thus, accumulation of power is not static any more, and becomes dynamic. This finding merely contradiction by Anderson observation (1991:52) regarding the power concept in Java culture. Based on these finding could be express as the proposition 2: *If those three structure (the government, the market and the society) do synergy by using the equal power mutually, so the total power would be dynamic and becomes positive sum.*

Conclusion, in the beginning the diffusion theory include to the conservative perspective, because emphasize to importance of the government role, but at the end arise the dependence. The diffusion of innovation is not only idealism and has material aspect that supports the capitals dominance and the businessmen interest. The most important finding is the synergy among the government, the market and the society, so that include to the modern liberal perspective. The government is in the middle way between two interests. There is individualistic and pluralistic

capital, which emphasize the equality. The implication of this finding would only interested liberal perspective, while for the conservative perspective is less interested because assume as the threat.

*Key Words: Diffusion of innovation
State - Market - Local society*

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Persetujuan	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Ringkasan	ix
Abstrak	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	19
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Kegunaan Penelitian	24
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	27
2.1 Difusi Inovasi	27
2.1.1 Hubungan Inovasi dengan Petani...	42
2.1.2 Hubungan Sumber Inovasi dengan Pengguna Inovasi	48
2.2 Kerangka Pemikiran	52
2.3 Hipotesis	70
2.4 Rangkuman	72
BAB 3 METODE PENELITIAN	74
3.1 Variabel Yang Diamati	75
3.2 Lokasi Penelitian	80
3.3 Pengambilan Sampel Responden	85
3.4 Pengumpulan Data	88
3.5 Operasionalisasi Konsep	94
3.6 Metode Analisis	98

BAB 4	INOVASI PERTANIAN DALAM SEJARAH...	105
4.1	Perkembangan Inovasi Pertanian	105
4.2	Konteks Zaman dan Perubahan Perspektif	116
BAB 5	DIFUSI INOVASI PERTANIAN DI TINGKAT LOKAL	122
5.1	Proses Difusi Inovasi di Tulungrejo	
5.1.1	Potensi Wilayah Untuk Komoditas Hortikultura	122
5.1.2	Pengalaman Pemerintah dalam Difusi Inovasi yang Bervariasi	130
5.1.3	Pengalaman Pengusaha Agribisnis ..	138
5.1.4	Mekanisme Difusi Inovasi dari Pengusaha ke Masyarakat	143
5.1.5	Pengalaman Petani dalam Mengadopsi dan Mendifusikan Inovasi	147
5.2	Potensi Karakteristik Petani Wortel....	159
5.3.2	Difusi Inovasi di Sumber Pucung ...	161
5.3.1	Potensi Wilayah Untuk Komoditas Pangan	159
5.3.2	Difusi Inovasi dari Pemerintah ...	161
5.3.3	Pengalaman Pengusaha Agribisnis ...	170
5.3.4	Mekanisme Difusi Inovasi dari Pengusaha ke Petani dan Pemerintah.	179
5.3.5	Pengalaman Petani: Macam Inovasi dan Asal Inovasi.....	185
5.4	Karakteristik Petani Jagung.....	190
BAB 6	BAHASAN TERHADAP DIFUSI INOVASI ..	195
6.1	Kendala dalam Difusi Inovasi	195
6.2	Menyimak Inovasi yang Bersumber dari Pengusaha	197
6.3	Implikasi Mekanisme Difusi dan Reposisi Pengusaha	204
6.4	Timbulnya Dominasi Pengusaha	216
6.5	Dampak Kerjasama Pemerintah, Pengusaha Dan Petani.....	219
6.6	Rangkuman	224

BAB 7	POSISI NEGARA, PASAR DAN MASYARAKAT.	233
7.1	Posisi Masyarakat.....	233
7.2	Posisi Negara	245
7.3	Posisi Pengusaha	253
7.4	Pembahasan terhadap Posisi Negara, Pasar dan Masyarakat	263
7.5	Rangkuman	274
BAB 8	MELEMAHNYA DOMINASI DAN POSISI: NEGARA, PASAR DAN MASYARAKAT	281
8.1	Perdebatan Posisi Negara, Pasar dan Masyarakat	281
8.2	Terciptanya Sinergi antara Negara, Pasar dan Masyarakat	289
8.2.1	Pertukaran Inovasi dan Interdependensi Inovasi	290
8.2.2	Sinergi antara Negara, Pasar dan Masyarakat	298
8.3	Implikasi Teoretik	303
8.4	Implikasi Praktis	314
8.5	Rangkuman	322
BAB 9.	KESIMPULAN	325
9.1	Kesimpulan	325
9.2	Implikasi Teoretik	331
9.3	Implikasi Aksiologis.....	334
DAFTAR PUSTAKA	336
LAMPIRAN	341

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tiga Pendekatan Difusi Inovasi.....	56
Tabel 3.1 : Populasi Petani dan Sampel Petani di Sumber Pucung dan Tulungrejo...	86
Tabel 5.1 : Frekuensi Distribusi Penggarapan Tanah di Tulungrejo (n=30).....	155
Tabel 5.2 : Frekuensi Distribusi Pengalaman Bertani di Tulungrejo(n=30).....	157
Tabel 5.3 : Frekuensi Distribusi Status Petani di Tulungrejo	158
Tabel 5.4 : Frekuensi Distribusi Penggarapan Tanah di Sumber Pucung (n=30).....	192
Tabel 5.5 : Frekuensi Distribusi Pengalaman Bertani di Sumber Pucung	193
Tabel 5.6 : Frekuensi Distribusi Status Petani di Sumber Pucung	193
Tabel 6.1 : Perbedaan antara Pioner dan Indofood	208
Tabel 6.2 : Matrik Korelasi Luas Lahan, Status Petani dan Pengalaman Bertani pada Petani di Tulungrejo dan Sumber Pucung	213
Tabel 6.3 : Matrik Korelasi Luas Lahan, Status Petani dan Pengalaman Bertani pada Petani yang Mengusahakan Komoditas Jagung	213
Tabel 6.4 : Matrik Korelasi Luas Lahan, Status Petani dan Pengalaman Bertani pada Petani yang mengusahakan komoditas Hortikultura	214
Tabel 6.5 : Frekuensi Distribusi Adopsi Inovasi di Sumber Pucung dan Tulungrejo.....	215
Tabel 7.1 : Matrikulasi Posisi Negara, Pasar dan Masyarakat	238

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	67
Gambar 6.1.A Korelasi antar Faktor terhadap Adopsi Inovasi	210
Gambar 6.1.B Korelasi antar Faktor terhadap Adopsi Inovasi pada Pola Pioneer	210
Gambar 6.1.C Korelasi antar faktor terhadap Adopsi Inovasi pada Pola Indofood	210
Gambar 6.2 Skema Hubungan Difusi Pola Indofood	231
Gambar 6.3 Skema Hubungan Difusi Pola Pioneer	232
Gambar 7.1 Hubungan Negara, Pasar Dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Politik	334

DAFTAR LAMPIRAN

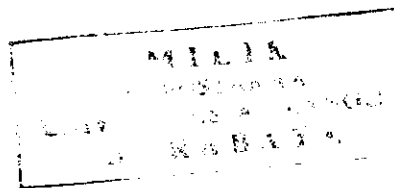
	Halaman
Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama antara Pengusaha dan Petani.....	341

BAB 1

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Globalisasi dan keterbukaan informasi inovasi, yang kini dikendalikan oleh bisnis dan bahkan telah mengabaikan batas teritorial kekuasaan negara, telah menimbulkan dampak yang tidak terelakkan (Kennedy, 1993:17). Adanya revolusi komunikasi dan transportasi, dunia seolah semakin menyempit (*the shrinking world*). Sebagai akibatnya, hubungan antar manusia dan antar budaya batasannya seakan semakin menipis.

Dalam situasi yang tanpa batas (*borderless*) ini, informasi pasar menjadi mudah ditangkap masyarakat pedesaan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya jaringan informasi yang tidak kasat mata bagaikan *cyberspace* (Luke, 1995: 91). Bahkan dalam anggapan Berger (Evers, 1988:39), jika setiap individu selalu dijejali informasi berarti "*pikiran seseorang diperluas*", meskipun di sisi yang lain



juga menyebabkan terjadinya penurunan integritas "*dunia rumah seseorang*".

Dampak dari keterbukaan ini masyarakat lokal tidak lagi dengan mudah untuk dipinggirkan. Bahkan masyarakat ini telah menjadi bagian dari sistem negara. Adanya "*globalisasi*", juga telah menjadi bagian dari proses "*penduniaan*" tersebut. Oleh karenanya dalam pandangan *Wallerstein* (Evers, 1988:30), kemampuan manusia untuk berperan serta dengan baik, evolusi sistemnya tergantung dari kemampuannya dalam memahami seluruh sistem yang ada. Sebagai akibatnya, dikotomi antara desa dan kota menjadi kabur. Jika seandainya masyarakat lokal sudah dapat memanfaatkan situasi ini, maka *glokalisasi* di tingkat masyarakat lokal juga bisa terwujud. Dalam artian, walaupun masyarakat lokal secara geografis terletak di pedesaan yang marginal, namun pola pemikirannya sudah bisa meng-global (*think globally act locally* (Robertson, 1995:28)).

Ilustrasi ini ditunjukkan oleh masuknya inovasi ke pedesaan. Akibat adanya rasionalitas penduduk dalam menanggapi isyarat pasar, menjadikan

stereotipe petani bukan lagi seperti "orang desa" yang ada dalam benak "orang kota". Demikian juga, petani bukanlah sekedar masyarakat lokal yang selalu mengandalkan hidupnya dari pertanian tradisional, tidak memakai perhitungan ekonomis dan anggapan negatif lainnya. Pemikiran petani telah berubah dari pola subsisten menjadi komersial.

Gejala yang ada ini sangat positif, karena akan memperkuat posisi masyarakat lokal dan bahkan akan menyebabkan terjadinya *hybridization* dalam berbagai aspek budaya di masyarakat. Proses ini juga berpeluang untuk memarginalkan nilai lama, yang kemudian digantikannya dengan mengadopsi nilai baru di luar lingkungannya untuk selanjutnya memodifikasikannya kedalam nilai yang baru sama sekali (Pieterse, 1995:62). Nampaknya, efek dari globalisasi akan dapat menjadikan masyarakat lebih independen, bebas dan mandiri dalam menentukan kepentingannya menuju masyarakat yang egaliter seperti tertuang dalam konsep *Hegelian*.

Oleh karenanya, dalam melakukan pendekatan, petani harus dihargai sebagai petani moderen yang komersial, sebagai manusia yang telah berpendidi-

kan, menggunakan prasarana desa yang telah maju yang diukur oleh mengalirnya informasi yang telah masuk ke desa. Juga sebagai masyarakat yang rasional dan tanggap terhadap isyarat pasar (Collier, *et al.*, 1996:82-83).

Kesemuanya tidak lepas dari intervensi negara dalam bentuk pengaturan kebijaksanaan dan pemberian layanan publik. Jika saja dana yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat tidak mencukupi, pemerintah bisa juga memperoleh dukungan dana dari pihak di luar pemerintah. Namun dilemanya, adanya penetrasi kapital telah menimbulkan hubungan ketergantungan dan terjadinya kesenjangan antara petani dan pemilik modal. Netralitas negara juga menjadi kabur. Bahkan, lembaga negara sangat dominan untuk melakukan penekanan kepada masyarakat agar mereka mau menerima program yang ditawarkan.

Implementasi hubungan antara negara dan masyarakat ini selain mengandung makna adanya hubungan ekonomis juga bernuansa politis. Di dalamnya selain terjadi konflik antara kepentingan masyarakat dan pemilik modal juga adanya konflik antara kepentingan masyarakat dan negara yang

melekat pada struktur kekuasaan (*power structure*) (Bachriadi, 1995:171-180). Akhirnya masyarakat tidak hanya berhadapan dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan negara. Konflik yang terjadi akibat intervensi kapital di pedesaan tidak hanya bersifat horisontal antar aktor yang menguasai alat produksi, tetapi juga bergeser menjadi konflik vertikal antara masyarakat dan negara.

Dengan mempertimbangkan atas terjadinya fenomena ekonomi dan fenomena politik di atas, kajian ini difokuskan pada isu utama, yakni "bagaimana hubungan yang terjadi antara negara, pasar dan masyarakat jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik, khususnya yang terjadi pada kasus difusi inovasi pertanian".

Isu ini sengaja diangkat berdasarkan pertimbangan terjadinya fenomena ekonomi dan fenomena politik di lapangan dan mengingat pandangan teoretisi difusi yang lebih tertarik dan terfokus pada mekanisme terjadinya difusi. Secara proporsional jarang diamati bagaimana keterlibatan negara dan pasar sebagai sumber inovasi yang

kadangkala secara otoriter ikut berkepentingan dalam penentuan inovasi. Fenomena ini diduga dapat terjadi, karena konsep difusi yang semula bersifat persuasif agar secara sadar petani mau melaksanakan inovasi yang ditawarkan akhirnya dikaburkan dan diabaikan.

Kritik terhadap asumsi mekanisme difusi di atas, juga dilontarkan oleh de Fleur (1995:3-15) yang berargumentasi bahwa dalam teori difusi, prinsip-prinsip komunikasi terlalu dianggap sebagai faktor determinan yang parsial. Implikasi dari asumsi yang dipakai ini, adanya faktor yang dapat memperkuat pengaruh difusi (*intervening factor*) menjadi diabaikan. Faktor tersebut mencakup struktur sosial seperti perbedaan individu, penggolongan sosial, hubungan sosial dan norma budaya. Alasan yang lain, adalah terdapatnya fenomena di mana teori difusi yang merupakan salah satu tipe dari teori komunikasi, nampaknya tidak akan mampu menyibak misteri terjadinya kesenjangan antara sumber inovasi dan pengguna inovasi.

Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah hampir empat dasawarsa mengomandoi pembangunan

pertanian melalui sistem bimbingan massal (Bimas). Hasilnya, kelangkaan pangan terus berlangsung. Walaupun ada yang berpendapat, bahwa di sektor pertanian berbagai kemajuan telah bisa dicapai, namun sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti oleh adanya kemajuan di sektor yang lain.

Boleh jadi memang demikian. Namun, akselerasi kesenjangan tidak akan terlepas dari ketiga struktur aktor difusi inovasi yaitu pemerintah, pasar dan masyarakat. Faktor struktur yang dimaksud adalah terjadinya pertarungan kekuatan dan kekuasaan yang terpusat pada pemerintah dan pasar yang di interpretasikan sebagai sumber inovasi dan masyarakat sebagai pengguna inovasi. Pada tahapan selanjutnya, masyarakat kemudian di sub-ordinasikan di bawah dominasi pemerintah dan pasar.

Karena alasan-alasan inilah, maka fenomena ekonomi dan fenomena politik dari difusi inovasi perlu dicari dalam perspektif ekonomi politik dan di dalam tataran teori strukturalis. Analisis tidak dilakukan pada tataran individual yang secara konvensional telah dilakukan teoretisi difusionis sebelumnya. Struktur yang dimaksud mencakup

konfigurasi hubungan antara negara dan masyarakat, negara dan pasar serta masyarakat dan pasar. Dalam kajian ini pula, kesetaraan berbagai kelompok kepentingan juga dipertimbangkan. Oleh karenanya, orientasi analisis ditekankan pada peran struktur sebagai aktor dalam difusi inovasi.

Dalam kajian sosial, difusi inovasi merupakan kekuatan, dominasi dan legitimasi kekuasaan antara sumber inovasi dan pengguna inovasi. Ini memberi pertanda, bahwa sejak semula memang telah terjadi adanya silang pendapat. Mazhab *Parsonian* berpendapat bahwa di dalam difusi akan terjalin adanya pertukaran ide yang serasi dan sejalan menuju kemajuan. Pendapat ini ternyata kontradiktif dengan mazhab *Sahlin dan Servise* yang lebih realistis, dimana difusi bernaung di bawah sayap dominasi dan eksploitasi yang berjalan secara halus (Hoogvelt, 1995:18).

Kajian difusi dari sudut pandang kajian sosial di atas ternyata berbeda dengan kajian difusi di tinjau dari sudut pandang teknis. Dalam sudut pandang secara teknis, difusi inovasi bertumpu pada mekanisme terjadinya proses yang dimulai dari

sumber inovasi sampai ke pengguna inovasi. Selama berlangsungnya proses, komunikasi mempunyai peran sentral (Rogers dan Shoemaker, 1971:23). Individu yang mulanya tidak mengenal adanya suatu inovasi, oleh karena proses difusi maka keberadaan suatu inovasi menjadi lebih dikenal. Bahkan pada tahapan selanjutnya, individu mudah menjadi terpicat dan terikat untuk dapat mengadopsinya.

Demikian juga, inovasi sendiri dalam pandangan teknis dianggapnya lebih bersifat netral sehingga tidak mempermasalahkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Disamping itu, kesenjangan akibat terjadinya difusi juga diabaikan. Apabila selama berlangsungnya proses difusi terdapat kekurangan sempurnaan, maka diharapkan kekurangannya tertutup oleh arus difusi pada tahapan berikutnya. Akibat yang terjadi, difusi inovasi itu sendiri telah menciptakan kesenjangan. Ini disebabkan karena tidak selamanya inovasi yang telah di adopsi dapat memberikan nilai tambah. Bahkan, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terjadinya akumulasi penguasaan produksi bagi pemilik modal.

Fenomena yang kontradiktif ini menurut

pandangan Wright (1985:9) memang dimungkinkan terjadi. Alasannya, sebagai konsekuensi aktivitas sosial, difusi inovasi disamping memberikan fungsi nyata (*manifest function*) sesuai yang di inginkan, juga memberikan fungsi tersembunyi (*latent function*) yang memang tidak diharapkan. Dengan demikian, konsep difusi ini nampaknya memberi indikasi untuk menafikan gejala sosial. Implikasinya, jika suatu inovasi ditolak masyarakat, yang akan dikorbankan adalah justru "kondisi sosial" karena dianggapnya sebagai determinan penghambat diadopsinya suatu inovasi.

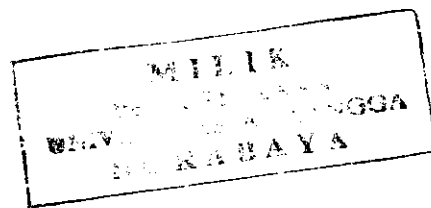
Realitas ini merupakan akibat dari model analisis difusi yang kurang peka terhadap konteks. Kondisi sosial ekonomi yang memperkuat dan terkait dengan inovasi yang selanjutnya dapat menentukan adopsi inovasi kurang mendapat kajian. Juga, adanya asumsi bahwa inovasi bersifat netral adalah kurang realistis mengingat fenomena pemilihan inovasi selain pertimbangan teknis, keterikatan dengan masalah sosial, budaya dan ekonomi serta politik ikut menentukan meluasnya penggunaan inovasi (Giessen,1993:250).

Jika dipandang dari kajian sosial, inovasi merupakan kekuatan yang secara empiris akan memihak salah satu kelompok masyarakat. Jika hal ini direduksi dari pandangan *Marx* maka inovasi akan memihak dan menjadi alat kelompok elite yang dominan. Jadi, inovasi hanyalah alat untuk memenuhi kepentingan aktor yang menguasai inovasi. Akibatnya, inovasi akan dipengaruhi oleh dunia materiil sebagai infra-struktur. Pandangan ini berbeda dengan pandangan *pluralistik* yang menolak eksistensi keberpihakan pada kelompok dominan. Inovasi menurut pandangan mazhab *pluralistik*, dapat melayani dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat yang beragam.

Bukti secara empiris terjadinya kesenjangan yang diakibatkan oleh adanya difusi, pada mulanya dikemukakan oleh *Tichenor* (Rogers, 1989:7). Menurut pendapatnya, penyebab terjadinya kesenjangan ini dikarenakan oleh fokus difusi yang hanya terpaku pada petani maju. Asumsi yang dipakai dalam difusi inovasi ini adalah, petani maju ini secara mudah akan membantu memecahkan masalah petani kecil. Sebagai akibatnya selanjutnya maka penguasaan

inovasi antara petani maju dan petani yang tradisional menjadi tidak merata.

Pengamatan di Jawa telah membuktikan, bahwa dengan adanya revolusi hijau yang diaplikasikan kedalam penggunaan varietas unggul padi, di satu sisi ternyata berhasil meningkatkan pendapatan petani. Namun disisi yang lain dengan adanya difusi padi varietas unggul, justru menyulut timbulnya ketegangan sosial baru, berkurangnya kesempatan kerja dan terjadinya ketimpangan (Collier *et al.* 1974:13-30; Hayami dan Kikuchi, 1987:267-271). Keadaan yang serupa di Jawa, juga terjadi di India (Smale *et al.*, 1994:535-546). Namun demikian Benad (1993:266-267) mengingatkan, walaupun inovasi yang didifusikan itu memberikan tambahan manfaat, namun hal tersebut tidak selalu signifikan. Dengan diadakannya suatu difusi tidak ada jaminan bahwa inovasi tersebut akan selalu di adopsi. Menurut pendapatnya, inovasi janganlah selalu dianggap "berguna". Diterima atau ditolakny suatu inovasi sangat tergantung pada konteks yang berhubungan dengan perilaku masyarakat. Oleh karenanya, dalam mendifusikan suatu inovasi, karakteristik dan minat



masyarakat sebagai pengguna inovasi perlu mendapat perhatian dan kajian.

Pandangan adanya inovasi yang bersifat netral dan tidak netral juga mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap sumber inovasi. Jika inovasi bersifat tidak netral, maka inovasi itu cenderung dikuasai para elite pengusaha yang mudah mengakses informasi tentang adanya inovasi.

Kebijakan pembangunan yang terjadi saat ini banyak memberi insentif kepada petani yang mempunyai kriteria seperti di atas (petani maju). Yang diharapkan dari pola difusi ini adalah, dengan adanya pemberian prioritas inovasi kepada petani yang termasuk kategori "atas", maka inovasi secara sinambung akan terdifusi secara otomatis pada petani kategori "bawah" (Feder *et al.*, 1987:676-686). Dampak dari adopsi inovasi adalah terjadinya peningkatan produksi dan akumulasi ekonomi. Selanjutnya karena alasan ekonomis, petani menjadi lebih terangsang untuk melakukan ekstensifikasi dengan cara menguasai tanah milik petani yang lain, mengimport inovasi secara mandiri, melakukan efisiensi dengan cara menggunakan mekanisasi yang

dapat mengurangi kesempatan kerja dan upah kerja, yang kemudian mengakibatkan terjadinya stratifikasi dan polarisasi (Hayami dan Kikuchi, 1987:268;Desai, 1990:723-749). Realitas ini nampaknya terdapat keselarasan dengan teori surplus *Lenksi* (Sanderson, 1991:157-161), bahwa dengan adanya kemajuan inovasi akan dapat meningkatkan produktivitas dan surplus ekonomi. Individu dan kelompok akan terangsang untuk bersaing dan menguasai perolehan surplus ekonomi, yang selanjutnya akan timbul stratifikasi.

Dalam kajian sosial (Wright,1985:72-77), materi memang penting untuk mengakses inovasi, tetapi penguasaan material, pengetahuan dan kedudukan dalam masyarakat dapat mempengaruhi rentang inovasi dan kualitas adopsi. Penyebabnya "kelas atas" mampu menerima pesan lebih cepat, lebih banyak menggunakan sumber inovasi serta lebih sadar akan manfaat inovasi baru daripada "kelas bawah". Oleh karena itu, pesan inovasi relatif lebih banyak mempengaruhi "kelas atas" daripada "kelas bawah" (Soewardi,1976:95;Rogers, 1989:175). Statemen ini tidak bermaksud untuk menafikan bahwa "kelas bawah" tidak mampu menerima

inovasi. Shingi dan Mody (1989:90-116) telah membuktikannya, bahwa antara petani yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan petani yang berada pada status sosial yang rendah, di dalam mengakses ke siaran pertanian di televisi tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan. Rendahnya akses ke sumber inovasi hanya karena alasan usia tua, rendahnya pendidikan dan partisipasi, kekurang mampuan petani dalam memanfaatkan mass media serta jarangny melakukan kontak dengan agen pembaharu.

Upaya untuk mengatasi masalah di atas, secara partisipasif telah dilakukan dengan cara melibatkan petani dalam memutuskan penggunaan inovasi. Pemerintah selain dilibatkan juga dapat mengamati apa yang menjadi minat petani (Ashby dan Sperling, 1995:753-770), di samping itu juga pemerintah harus dapat melakukan pelatihan dan kunjungan (Birkhaeuser *et al.*, 1991:607; *Feder et al.*, 1994: 234-255).

Dari pembuktian secara empiris ini timbul suatu fenomena yang sama, yaitu persoalan penting dari difusi inovasi adalah terjadinya ketimpangan

inovasi. Masalah yang terberat bukanlah terletak pada kelangkaan sumberdaya (inovasi) seperti yang umum dikemukakan oleh ekonom. Sumberdaya daya inovasi sebenarnya sudah tersedia, namun tidak semua orang dapat mengakses ke sumber daya inovasi tersebut. Sebagai akibatnya, inovasi terdifusi secara tidak merata atau informasi tentang inovasi tersebut tidak sempurna sehingga perlu didifusikan. Persoalan selanjutnya adalah siapa yang menguasai inovasi tersebut dan inovasi apa yang dikusainya.

Dalam tiga dasawarsa terakhir ini, kajian tentang keikutsertaan negara selalu dianggap penting dalam perubahan sosial ekonomi. Modernisasi selalu dianggap berasal dari negara. Negara selalu diasumsikan sebagai aktor yang menentukan masyarakat. Adapun masyarakat itu sendiri diasumsikan tidak berdaya dan atau dibuat tidak berdaya sehingga setiap kegiatannya selalu menggantungkan terhadap kebijakan negara.

Pola pandang sedemikian kemudian direduksi dan direvisi oleh pandangan *liberal*. Dari sisi perspektif liberal modern terdapat argumentasi bahwasanya, adalah kurang tepat jika menganggap

kekuatan negara yang otonom ini mengabaikan pasar dan masyarakat. Kekuasaan negara tetap diperlukan namun harus lebih mampu bekerjasama dengan kekuatan pasar dan masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara, keberadaan pasar dan masyarakat tetap diperlukan. Negara harus terikat kepada pasar dan masyarakat sehingga antara ketiganya saling kait-mengkait dan saling memberdaya. Dengan adanya interaksi antara negara, pasar dan masyarakat maka peningkatan kekuatan di antara ketiganya (negara, pasar dan masyarakat) juga akan tercipta (Xu Wang,1998: 31).

Kini, isu untuk saling memberdaya dalam struktur masyarakat nampak sangat penting oleh karena pemerintahan di negara berkembang mempunyai tugas ganda. Peran pemerintah, di samping harus mampu untuk mendorong tranformasi ekonomi, secara politis juga harus mampu untuk melakukan pembaharuan masyarakat secara serentak. Dilemanya, disatu sisi untuk membangun ekonomi, diperlukan negara yang kuat. Secara politis negara harus mampu untuk mengontrol berbagai kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Adapun di sisi yang lain,

negara harus dapat menumbuhkan kekuatan masyarakat secara mandiri.

Namun demikian, di negara berkembang upaya pemerintah dalam pembaharuan masyarakat dan hasil yang diperoleh darinya justru berlaku sebaliknya. Upaya pembaharuan masyarakat justru mengarah dan mengakibatkan melemahnya eksistensi kekuatan negara. Jika ini yang terjadi maka dikuatirkan, efek dari masyarakat yang menguat dan negara yang melemah akan berdampak negatif, yaitu terbentuknya kekuatan ekonomi yang juga akan melemah. Demikian juga selanjutnya, jika kekuatan ekonomi negara lemah maka negara akan semakin terpuruk.

Konflik pemikiran ini akan melatar belakangi argumentasi pentingnya sinergi (*synergy*) antara negara, masyarakat dan pasar. Keikutsertaan masyarakat tidak harus dengan mengurangi peran negara dan melemahkan kekuatan infrastruktur yang telah ada. Akan tetapi justru sebaliknya, yaitu memberi kesempatan kepada negara, pasar dan masyarakat yang kuat untuk saling terkait, efisien dan fleksibel. Namun demikian, secara teoretis persoalan yang dihadapi adalah kekuatan apakah di

bidang difusi inovasi yang dapat dipadukan dan ditingkatkan, pada kondisi apa hal tersebut dapat dicapai dan bagaimana interaksinya.

1.2 Permasalahan

Uraian di atas melahirkan adanya *dugaan awal* yaitu, bahwa ditinjau dari perspektif ekonomi politik, pilihan terhadap suatu inovasi tergantung dari kondisi negara dan kondisi pasar sebagai "sumber inovasi" serta kondisi masyarakat sebagai "pengguna inovasi". Inovasi yang sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat serta ditunjang oleh adanya dukungan dari pemerintah dan pasar yang memadai, maka adopsi inovasi semakin tinggi.

Seandainya praduga di atas dapat dibuktikan, masih terdapat permasalahan utama yang perlu dijawab. Pertanyaannya adalah:

Pertama, apakah masyarakat lokal (petani) untuk mengadopsi inovasi pertanian, bersifat independen ketika bertindak sebagai pengguna inovasi. Seandainya tidak independen, kondisi sosial ekonomi yang bagaimana dan kekuatan apa yang mempengaruhi independensinya.

Kedua, apakah negara (pejabat dan pegawai pemerintah) bersikap independen ketika bertindak sebagai sumber inovasi.

Ketiga, apakah pasar (pengusaha) independen dalam bertindak sebagai sumber inovasi.

Keempat, bagaimana hubungan dari ketiganya (negara, masyarakat lokal dan pasar) dalam proses difusi dan adopsi inovasi pertanian.

Klasifikasi permasalahan di atas mengacu pada analogi dikotomi pemikiran Berger (1988:36), di mana di satu sisi sumber inovasi merupakan kegiatan negara dan pasar, sedangkan di sisi yang lain pengguna inovasi merupakan kegiatan masyarakat.

Fenomena hubungan negara, pasar dan masyarakat ini semakin menarik dalam penelitian sosiologis karena adanya dominasi negara (Hikam, 1996:86; Budiman, 1996:118). Informasi dari negara tidak hanya sekedar sebagai panutan dalam berbangsa dan bernegara, tetapi dapat juga dipakai sebagai referensi sikap dan tindakan yang harus dipatuhi masyarakat. Negara untuk melegitimasi kewibawaannya membentuk kekuatan dengan meng-subordinasikan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kualitas hubungan antara negara dan masyarakat menyangkut makna apakah pemerintah dapat memenuhi kepentingan masyarakat sehingga masyarakat bersedia melegitimasi pemerintah. Apabila hal ini direduksikan ke dalam masyarakat pertanian, akan selaras dengan pertanyaan: Apakah pemerintah dapat memberi peluang kepada petani untuk mengadopsi inovasi sesuai dengan kepentingannya.

Pertanyaan ini perlu di munculkan oleh karena petani sebagai masyarakat mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih inovasi. Kemampuannya akan menentukan bobot adopsi dan kredibilitas petani sebagai pengguna inovasi. Dampaknya ada dugaan bahwa rendahnya adopsi inovasi dapat dikarenakan oleh terlalu kuatnya dominasi negara dan pasar dalam difusi inovasi, apalagi jika petani tidak mempunyai pilihan. Bobot adopsi inovasi terlalu ditekankan pada pentingnya difusi inovasi yang diberikan negara dan pasar, bukan kepada kepentingan petani sebagai pengguna inovasi. Fenomena ini akan timbul jika kesetaraan kepentingan antara petani dengan negara dan pasar belum selaras dan berimbang. Petani akan lebih mudah mengadopsi,

hanya jika inovasi yang didifusikan lebih banyak memberikan manfaat bagi kepentingan ekonomi petani, bukan dari mana inovasi tersebut berasal.

Menyimak dari fenomena di atas, adalah cukup beralasan seandainya mempertanyakan bagaimana pentingnya independensi masyarakat lokal (petani) sebagai pengguna inovasi dan bagaimana independensi pemerintah dan pasar sebagai sumber inovasi. Kajian ini perlu dilakukan mengingat kajian difusi hanya bersifat parsial dan terfokus pada sumber inovasi, pesan, saluran dan penerima serta efek yang terjadi. Bagaimana keterkaitan secara mendalam, antara negara maupun pasar sebagai pihak yang menguasai sumber inovasi dan masyarakat sebagai pengguna inovasi kurang banyak dikaji. Oleh karena itu, sebagai reaksi terhadap perspektif liberalisme, maka sangat penting untuk mengkaji bagaimana keterkaitan di antara ketiganya (negara, pasar dan masyarakat) dalam difusi inovasi.

Logika di atas akan menghantarkan pada suatu pemahaman baru yang lebih kontekstual mengenai orientasi hubungan antara negara, pasar dan masyarakat. Jika masyarakat diberdayakan dan diberi

kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, niscaya pasar akan berkompetisi dengan negara untuk memberikan layanan inovasi yang terbaik. Dengan cara demikian masyarakat tidak akan serta-merta di dominasi oleh negara.

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan berbagai argumen mengapa penelitian ini perlu dilakukan, serta didukung oleh berbagai latar belakang yang mendahuluinya, di samping adanya berbagai pertanyaan yang harus dicari bagaimana jawabannya, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan karakteristik petani sebagai pengguna inovasi dalam hal: pengalaman dalam bertani, kedudukan petani dalam masyarakat, penguasaan terhadap sumber ekonomi serta bagaimana hubungan antara karakteristik tersebut dengan adopsi inovasi.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana posisi pemerintah dan pasar dalam menyediakan sumber inovasi serta bagaimana posisi petani sebagai



pengguna inovasi. Untuk selanjutnya, akan di deskripsikan juga bagaimana hubungan antara pemerintah dan pasar sebagai sumber inovasi serta masyarakat sebagai pengguna inovasi sehingga inovasi tersebut dapat di adopsi oleh petani.

3. Untuk memahami bagaimana makna hubungan antara sumber inovasi dan pengguna inovasi jika di interpretasikan ke dalam kerangka hubungan negara, pasar dan masyarakat. Juga, bagaimana hubungan yang terjadi, jika dihadapkan pada posisi dan ranah kepentingan yang berbeda?

1.4 Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan di atas telah tercapai, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh. Manfaat tersebut adalah:

Pertama, secara teoretis dapat memberikan kontribusi pemikiran bahwa melalui rekontruksi, difusi inovasi tidak hanya sebatas kajian mekanisme arus informasi semata. Teori difusi dapat dimasukkan ke dalam ranah teoretik sosial dimana paradigma fakta sosial dan teori struktural ikut serta berperan. Dengan demikian, dalam difusi inovasi

juga menyangkut gejala sosial. Dengan landasan ini maka harapan secara teoretik dari penelitian ini adalah untuk merefleksikan pemahaman mengenai hubungan antar struktur dari negara, pasar dan masyarakat akibat adanya arus difusi inovasi.

Kedua, dalam kajian mekanisme arus informasi, teoretisi difusi masih terbatas mengungkap isi pesan yang disampaikan dan saluran apa yang dipakai untuk menyampaikan pesan tersebut. Adalah masih sangat langka untuk mengungkapkan, bahwa dalam difusi terkandung unsur ekonomi politik yang di dalamnya tercakup kekuatan, dominasi dan legitimasi kekuasaan antara sumber inovasi (negara dan pasar) dan pengguna inovasi (masyarakat). Demikian pula, secara teoretis juga jarang diungkapkan, bahwa di dalam difusi telah terjadi adanya ambivalensi. Di satu sisi dengan difusi akan terjalin adanya pertukaran ide dan terjadinya interdependensi antara satu struktur dengan struktur yang lain. Adapun dari sisi yang lain, dari hubungan antar struktur tersebut, terselip adanya dominasi dan eksploitasi walaupun berjalan secara halus sehingga tidak kasat mata.

Ketiga, secara praktis argumen teoretis ini diharapkan akan dapat memberikan peluang dan mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah, pasar dan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak harus dengan mengurangi peran negara dan melemahkan kekuatan infrastruktur yang telah ada. Akan tetapi sebaliknya, yang diperlukan dalam suatu sinergi adalah adanya suatu pemahaman bahwa antara masyarakat yang kuat dan negara yang kuat harus saling memberdaya dan saling kait-mengkait satu sama lain, atas dasar efisiensi dan fleksibilitas.

BAB 2

BAB 2.**TINJAUAN TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN****2.1 Difusi Inovasi**

Difusi merupakan tipe khusus dari proses komunikasi, yang ditandai oleh adanya penyebaran inovasi dari sumber ke individu atau kelompok masyarakat dalam suatu sistem sosial (Rogers dan Shoemaker, 1971:12). Unsur-unsurnya terdiri dari sumber (*source*), pesan (*message*), saluran (*channel*), penerima (*receiver*) dan efek (*effect*). Teori difusi ini muncul sebagai alternatif dari perkembangan teori evolusi (Laurer, 1993:398).

Sebelum masehi, inovasi pertanian dan matematika serta pemerintahan menyebar dari Timur Tengah ke Eropah melalui proses difusi budaya yang berlangsung secara mulus. Antara sumber inovasi dan penerima inovasi saling melakukan pertukaran ide. Interaksi ini dapat terjadi karena adanya upaya dengan cara memanfaatkan suasana budaya.

Perkembangan berikutnya, masyarakat yang mempunyai kultur tinggi lebih mudah dan mampu terdifusi secara lebih luas dan cepat dari pada masyarakat yang mempunyai kultur lebih rendah. Akibatnya dalam difusi, terdapat kecenderungan untuk mengarah terhadap terjadinya pemusatan peradaban yang lebih besar. Keragaman kultur menjadi semakin kecil. Sebaliknya, keseragaman kultur semakin besar. Bahkan di dalamnya terselip wujud dominasi dan eksploitasi yang berjalan secara halus (Hoogvelt, 1995:18). Adapun disisi yang lain terdapat tendensi adanya upaya pembatasan dan pencegahan agar difusi tidak berlangsung secara sempurna. Ini dimaksudkan agar difusi kultur tetap dikuasai masyarakat yang lebih tinggi peradabannya.

Sebagai ide yang dianggap baru, inovasi harus memenuhi berbagai persyaratan diantaranya: (1) Harus lebih menguntungkan (*relative advantage*) dan mempunyai nilai komparatif dengan praktek atau kebiasaan yang telah ada. (2) Adanya keserasian dan keselarasan (*compatibility*) dengan nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. (3) Sederhana, akrab dan mudah dalam

pemakaian (*simplicity*). (4) Memberi peluang bagi masyarakat untuk mencoba dan mengerjakan sesuai dengan situasi yang dikehendakinya (*trialibility*). (5) Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat, membuktikan dan mengamati keberhasilannya sesuai lingkungan yang ada (*observability*) (Rogers dan Shoemaker, 1971:102).

Untuk mengadopsi, kemampuan dan kecepatan masyarakat untuk menerima inovasi tidak sama. Oleh karena itu untuk dapat mengadopsi diperlukan tenggang waktu. Lionberger (1968:3-4) membaginya dalam lima tahapan yaitu: (1) Tahap tergugah kesadaran, yaitu tahapan dimana pada saat itu masyarakat baru mengenal inovasi yang ditawarkan. Masyarakat belum bisa memberikan reaksi terhadap inovasi tersebut, kecuali hanya mulai berpikir bahwa telah ada sesuatu yang baru. (2) Tahapan dimana masyarakat mulai memberikan reaksi positif dan menaruh minat serta tertarik terhadap manfaat yang mungkin diperoleh. (3) Tahapan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari inovasi baru jika dibandingkan dengan inovasi yang telah ada sebelumnya. Apabila keyakinan mulai muncul barulah

timbul tahapan ke (4) yaitu untuk mencoba. Jika dari hasil percobaan tersebut yakin akan keberhasilannya, maka barulah sampai pada tahapan yang terakhir (5) yaitu tahapan untuk mengadopsi.

Namun demikian masyarakat yang telah mengadopsi inovasi ini masih terdapat dua kemungkinan yaitu: *pertama*, masyarakat akan terus melanjutkan adopsinya. Adapun kemungkinan *kedua*, setelah mereka mengadopsi justru timbul ketidak yakinan dan menambah ketidak percayaan. Jadi, untuk mengadopsi inovasi diperlukan tiga proses yaitu proses untuk mempelajari, proses terjadinya perubahan sikap, baru kemudian memutuskan apakah menerima atau menolaknya. Keputusan untuk menerima ini selain tergantung dari inovasi yang ditawarkan, juga masih tergantung dari norma dan nilai yang relevan dengan masyarakat. Di samping itu, sistem sosial yang berlaku juga ikut menentukan.

Hal ini dapat berarti bahwa kemampuan dan kecepatan masyarakat untuk mengadopsi inovasi tidak sama. Oleh karenanya peran komunikator sangat penting. Di antara berbagai hal yang harus diketahui komunikator adalah (1) harus bisa

mengerti dan menghayati norma yang dimiliki klien, (2) mengetahui apa kebutuhannya, (3) memperhatikan siapa yang menjadi pemuka masyarakat (*opini leaders*) serta (4) dapatnya mengantisipasi konsekuensi apa yang akan terjadi dari inovasi yang diperkenalkan (Rogers dan Shoemaker (1971: 145-148) .

Inovasi yang sekiranya menimbulkan konflik dengan norma yang berlaku di masyarakat, selayaknya dihindari (Lauer, 1993:236). Terjadinya resistensi terhadap inovasi yang ditawarkan sangat memungkinkan karena adanya kepentingan yang kontradiktif antara yang merasa diuntungkan dan yang merasa dirugikan oleh inovasi yang baru tersebut. Oleh karena itu pengguna inovasi harus diberi harapan. Dampak negatif sedapat mungkin dikontrol dan dieleminir sekecil mungkin. Namun demikian diakui, bahwa untuk menaksir konsekuensi yang akan terjadi dari diadopsinya suatu inovasi tidaklah mudah (Rogers dan Shoemaker, 1971:319).Teori difusi ini

Teori difusi ini memberi indikasi bahwa:
Pertama, model difusi sarat dengan nilai. Inovasi yang didifusikan selalu dianggap lebih baik dan

sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pada hal pada berbagai studi menunjukkan bahwa dalam berbagai kondisi, inovasi tidak selamanya "baik" dan "netral". Adopsi inovasi bisa saja melahirkan konsekuensi negatif yang tidak pernah diramalkan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi struktural, sosial maupun personal ikut menentukan nilai relatif inovasi. Yang dianggap fungsional dalam suatu konteks mungkin saja menimbulkan guncangan dalam konteks yang lain.

Kedua, kajian difusi terfokus pada individu sebagai pembuat keputusan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan struktur masyarakat setempat. Jika ini yang terjadi, berarti teori difusi meng-kondisikan untuk membelenggu kreativitas individu dalam mencari alternatif lain. Oleh karena itu maka nilai inovasi itu sendiri dapat dipertanyakan karena acapkali keputusannya ditentukan dari "atas" (sumber inovasi) tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna inovasi. Bias inovasi ini dapat ditunjukkan oleh banyaknya institusi yang berminat untuk mengembangkan inovasi.

Revolusi hijau yang semula diharapkan dapat mengatasi masalah pangan tidak terlintas akan timbulnya kesenjangan sosial baru dan lemahnya posisi tawar-menawar bagi petani. Efek sosial yang tidak kasat mata tidak pernah diperhitungkan. Pertimbangannya hanya di dasarkan pada prinsip ekonomis bahwa setiap upaya untuk meningkatkan produksi selalu disertai peningkatan permodalan. Oleh karena itu, paradigma difusi yang hanya menekankan pada proses penyebaran perlu dilakukan penyempurnaan (*re-invention*) karena di dalamnya tercakup adanya kekuatan (*power*) baik yang berasal kekuatan inovasi tersebut maupun kekuatan yang berasal dari struktur yang menguasai sumber inovasi.

Dalam pandangan Kennedy (1993:331-332), kekuatan teknologi (*power of technology*) itu mampu untuk (1) mengubah daya pikir manusia (*human mind*) menemukan cara-cara baru dalam melakukan kegiatan, menciptakan perangkat baru (*new device*, mengorganisir produk dalam bentuk yang baru, mempercepat mobilitas barang dan gagasan serta menstimulir cara pendekatan baru untuk menyelesaikan-

kan masalah lama. Disamping itu (2) kekuatan teknologi mampu membangkitkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, keberhasilan dari difusi inovasi tidak hanya tergantung dari pendidikan yang dikuasai masyarakat tetapi kemauan para pemimpin politik (*political leadership*) juga ikut serta menentukan.

Dengan terdapatnya dua titik kelemahan dari teori difusi ini (syarat nilai dan terfokus pada individu) , dituntut adanya perubahan secara teoretis. Setidaknya perspektif baru ini nantinya dapat berguna sebagai alat analisis untuk menemukan fenomena negara dan pasar ketika berhadapan dengan masyarakat .

Dewasa ini salah satu dampak dari ekonomi pasar yang amat pesat di Indonesia, ditandai oleh adanya komersialisasi pertanian. Keadaan sedemikian menyebabkan terjadinya perubahan dan pergeseran orientasi dari pertanian subsisten menjadi pertanian komersial. Proses produksi berorientasi kepada kepentingan dan permintaan pasar. Jadi, ekonomi pasar merupakan suatu sistem ekonomi dimana produksi dan alokasi sumberdaya diatur dan

ditentukan oleh mekanisme pasar yang kompetitif. Orientasi komersialisasi ini, tujuannya semata-mata demi kepentingan profit yang bersifat privat. Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah pengagungan terhadap kapitalisme.

Sejarah komersialisme pertanian saat ini, nampaknya tidak akan terlepas dari perkembangan pertanian sebelumnya, khususnya perkembangan sejarah kolonial yang menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Sejak tahun 1830 sampai dengan tahun 1870 sistem tanam paksa ini nampaknya lebih mengacu pada makna politis daripada makna ekonomis. Kebijakan pemerintahan kolonial saat itu, adalah kebijakan politis pemerintah Belanda dalam bidang perekonomian. Prioritasnya, peningkatan produksi komoditas komersial dikerjakan oleh penduduk pribumi. Program ini mirip paket kerja yang berupa sistem wajib tanam dimana penduduk tanah jajahan wajib menyediakan tanah dan tenaga kerjanya. Akibat sulitnya memaknakan pengertian wajib tanam dalam konteks ini, maka berbagai kepustakaan lebih mengenalnya dengan sebutan tanam paksa.

Sebagaimana dinyatakan oleh Geertz (1983:56), pada masa tanam paksa, tanaman semusim (tebu, nila, dan tembakau) diusahakan di atas tanah sawah secara pola bergiliran dengan tanaman padi. Namun, untuk tanaman tahunan (kopi, teh, karet dan kina) dilakukan di tanah kering. Kategori tanaman tersebut selain berbeda dari segi tempat penanaman dan pola pergiliran tanamannya, juga memiliki karakteristik yang berbeda dari segi sosial dan ekonomi politik. Tanaman pangan lebih ditujukan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat sedangkan tanaman perdagangan lebih ditujukan untuk mendukung pendapatan negara kolonial (Geertz, 1983:60).

Teori difusi ini jika ditinjau dari sudut pandang struktural materialis, akan lebih disibukkan pada penelusuran bagaimana sumber inovasi yang langka dan mempunyai nilai ekonomis ini mampu mengendalikan pengguna inovasi dimana masyarakat terperangkap dalam ketergantungan. Pada akhirnya pengendalian sumber inovasi ini akan menterjemahkan diri ke dalam kekuasaan.

Pola dominan dibawah kapitalisme pasar dan terutama cara masyarakat melakukan penyesuaian dengan konteks, tidak hanya berfungsi sebagai titik tolak analisis tetapi juga menjadi titik fokus pandangan struktural. Para aktor dan pengendali difusi inovasi adalah pejabat pemerintah maupun pengusaha. Kebangsaan pengendali pasar (asing atau domestik) tidak lagi menjadi permasalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kemampuan pengusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat. Termasuk di dalamnya mengapa pengusaha tidak memerlukan adanya kerjasama. Tak kalah pentingnya dan menarik untuk dikaji adalah bagaimana netralitas negara maupun pasar sebagai aktor serta bagaimana mekanismenya. Ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kepentingan maupun kekuatan aktor yang berhubungan dengan kemampuannya memberlakukan inovasi sebagai komoditas.

Perdebatan teoretik di dalam teori difusi inovasi akan terletak pada kontradiksi pemikiran antara idealisme dan struktur materialisme. Mazhab konservatif yang idealis berpandangan bahwa, difusi

inovasi adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Dengan demikian maka pemerintah merupakan aktor.

Realisasi pemikiran ini diwujudkan oleh mazhab modernisasi yang beranggapan bahwa keterbelakangan masyarakat dapat diatasi melalui difusi inovasi, dalam arti negara mentransformasikan nilai inovasi ke masyarakat lokal. Sebagai akibat dari mekanisme yang sedemikian, masyarakat lokal terbawa kedalam pengaruh kekuasaan negara. Agar hal ini lebih berhasil, pada tahapan berikutnya timbul pemikiran bahwa difusi inovasi dari negara ke masyarakat lokal tidak hanya dilakukan secara persuasif tetapi untuk mempercepatnya disertai dengan cara pemaksaan (*coercion*).

Untuk merealisasikan pandangan tersebut maka pemerintah melalui Departemen Pertanian membentuk dinas ("*dients*") yang tugasnya pengabdian guna memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa sedikitpun ada motif ekonomis. Bahkan, secara hirarkis di departemen dibentuk direktorat penyuluhan yang tugasnya memberikan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat. Di samping itu, agar

pola bimbingan ini terkoordinir, maka dibentuk Badan Pengendali Bimas di tingkat nasional, Adapun di tingkat propinsi dan kabupaten dibentuk Badan Pembina Bimas dan Badan Pelaksana Bimas. Pada masing-masing tingkat hirarki di ketuai oleh Menteri, Gubernur dan Bupati. Dewasa ini timbul adanya pemikiran yang kritis dan mengajukan konsep agar lembaga penyuluhan tidak lagi di kelola oleh pemerintah tetapi oleh badan swasta yang komersial. Namun nampaknya konsep tersebut belum terealisasi karena adanya benturan dengan kebijaksanaan pemerintah.

Penganut mazhab liberal berpandangan, bahwa mekanisme difusi inovasi harus disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Dengan demikian yang bertindak sebagai aktor adalah pasar (pengusaha). Inovasi bukan lagi sekadar proses produksi tetapi didalamnya telah mencakup komoditas yang mempunyai kadar nilai ekonomis. Oleh karenanya inovasi yang mempunyai nilai ekonomis tidak serta-merta harus didifusikan. Adapun sebaliknya, inovasi itu sendiri harus di kuasai. Disinilah nilai dan hukum ekonomis berlaku, sedangkan untuk merebut inovasi itu harus

dikuasai melalui prinsip ekonomis.

Secara pragmatis, kedua konsep di atas memungkinkan untuk digabungkan melalui perombakan struktur. Namun kendalanya, teori difusi yang berasal dari negara barat kemudian di belokkan menjadi suatu ideologi guna menutupi dominasi negara. Di samping itu, perspektif difusi mengandung kelemahan karena memberikan dukungan teoretis dan ber-aliansi untuk mempertahankan dominasi kapitalisme dengan berkedok untuk memajukan masyarakat oleh negara. Aspek eksploitatif sengaja disembunyikan di bawah pengayoman sistim produksi kapitalis negara. Namun demikian, teoretisi difusi melakukan pembenaran teoretis terhadap intervensi politik dan manipulasi negara terhadap masyarakat dengan berkedok dan bersembunyi di balik strategi pemberian bantuan. Alat pembenar ini nampak sangat bernilai dan perlu untuk tetap dipertahankan, karena perspektif difusionisme adalah juga untuk mengimbangi kelemahan dalam pendekatan liberal.

Ilustrasi di atas dibuktikan oleh Burgess (1997:127-149) yang alur pemikirannya menggunakan

konsep *Bates*. Di Zimbabwe dan Kenya keberhasilan pembangunan dimulai dengan mengubah dominasi dari negara penjajah ke pergerakan nasional. Kemampuan masyarakat lokal di tingkatkan secara mandiri. Asosiasi-asosiasi masyarakat yang di dasarkan pada kelompok kepentingan juga di bentuk dan dikembangkan. Di samping itu, pemerintah juga memberikan kebebasan bagi masyarakat menyalurkan aspirasinya untuk menjadi petani komersial. Untuk selanjutnya, pasar lokal terus dikembangkan dengan cara menyediakan fasilitas dan jasanya secara mandiri.

Namun demikian, walaupun dalam teori difusi terdapat beberapa hal yang positif namun tetap tidak luput dari kritik. Teoritisi dependensi memberikan kritikan karena teoritisi difusi dianggapnya kurang berhasil dan kurangnya mempertimbangkan konteks struktural yang cenderung mengasumsikan kekuasaan negara yang netral. Pada saat yang sama, juga kurang berhasil untuk mempertimbangkan pengaruh struktur eksternal terhadap kewenangan negara. Teoretisi dependensi berpendapat, bahwa terjadinya kesenjangan merupakan derivasi dari dependensi konteks struktural dan

eksploitasi antara pusat dan pinggiran.

Teori dependensi ini dipengaruhi pemikiran *Marx*, yang berfokus pada hubungan negara dan masyarakat. Fenomena dominasi antara pusat dan pinggiran bukan hanya sebagai hubungan ekonomi tetapi juga hubungan struktural (Kim,1994:60). Oleh karenanya tesis dasar dari pandangan strukturalis adalah bahwa fungsi masyarakat akan ditentukan oleh negara, sedangkan negara itu sendiri akan ditentukan oleh orang yang menempati posisi sebagai penguasa negara.

2.1.1 Hubungan Inovasi dengan Petani

Pada pendekatan struktural yang seringkali dianggap bersumber pada konsep *Marx* (Sanderson, 1993:60; Budiman,1995:42) pada dasarnya menekankan bahwa, infra-struktur material dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Inovasi yang dapat dikategorikan sebagai sub-unit infrastruktur material dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, jika inovasi mengalami perubahan, maka tingkahlaku masyarakat juga akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, jika inovasi merupakan faktor yang independen, maka faktor kekuatan

(power) dari suatu inovasi perlu dipertimbangkan.

Mekanisme terjadinya perubahan oleh kekuatan inovasi berlangsung sebagai berikut: pada mulanya inovasi menawarkan alternatif efisiensi. Ketika masyarakat yakin akan manfaat inovasi yang ditawarkan maka berakibat interaksi masyarakat terhadap inovasi juga mengalami peningkatan. Selanjutnya masyarakat menyesuaikan dengan pola inovasi yang baru.

Dengan demikian jika suatu inovasi telah dikuasai, maka sesungguhnya pola masyarakat itu dapat dibentuk sesuai dengan kepentingan penguasa inovasi itu sendiri. Akibatnya, dominasi dan subordinasi dalam penguasaan inovasi mempunyai peranan penting. Prinsip determinan dari inovasi sebagai infrastruktur mempengaruhi tingkat adopsi. Namun demikian, hubungan kausal antar struktur (negara, pasar dan masyarakat) juga ikut serta mempengaruhinya.

Kajian struktural ini agaknya terdapat sedikit perbedaan dengan paradigma fungsional tradisional *Merton* yang hanya menekankan pada "konsekuensi" terjadinya perubahan, tanpa banyak memperhatikan

"penyebab" atau "historis" mengapa perubahan itu terjadi. Dalam kajian struktural ini diutarakan, jika faktor sejarah ditiadakan, dikuatirkan adanya faktor penyebab timbulnya perubahan akan menjadi kurang dipahami (Zeitlin,1995:20). Oleh karenanya dalam kajian ini, faktor sejarah juga akan diungkapkan sebagai latar untuk membantu didalam menjelaskan terjadinya fenomena hubungan difusi inovasi antara negara, pasar dan masyarakat.

Namun demikian, terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat tidaklah mungkin kalau hanya disebabkan oleh pengaruh satu faktor semata. Adanya perubahan pada masyarakat itu sendiri, juga terjadi karena adanya perubahan pada infrastruktur yang telah berlangsung sebelumnya. Bahkan, bisa juga antara infrastruktur dan struktur memiliki independensi serta inter-dependensi di antara keduanya. Oleh karenanya menurut *Haris* (Sanderson, 1993:74), jika hubungan kausal antara infrastruktur dengan struktur tidak dapat diungkapkan, maka kondisi struktural dapat dipakai sebagai determinan gejala perubahan sosial. Namun demikian, pada umumnya pengaruh infrastruktur lebih dominan daripa-

da pengaruh struktur.

Terkait dengan problema di atas, hubungan kausal tidak hanya terjadi antara infrastruktur (inovasi) dengan struktur sosial (petani). Hubungan kausal bisa juga terjadi antar intra-infrastruktur dan intra-struktur sosial. Hubungan kausal ini oleh *Cancian* disebut model "inter-aksionis" (Zeitlin, 1995:11).

Demikian pula, apabila hubungan antar struktur menimbulkan terjadinya konflik, maka patut di duga hal tersebut dimungkinkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Di samping itu ada pula tendensi, bahwa pada masing-masing struktur berkecenderungan untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri-sendiri. Namun demikian dalam kondisi tertentu, peluang terjadinya konflik dapat diredam dengan cara melakukan pendekatan secara dialogis untuk dicarikan solusinya. Tercapainya titik kesamaan yang dilakukan secara mufakat mendorong upaya pemberdayaan bersama.

Hasil positif yang diharapkan dan diperoleh jika menggunakan landasan pemikiran *Marx* (Laurer, 1993:99) dalam konsep ini adalah,

tercapainya fleksibilitas dan adanya upaya untuk menghindari dikotomi kaku antara determinisme dan indeterminisme. Namun demikian, kepada masing-masing infrastruktur dan struktur atau bagi antar struktur masih diberi peluang untuk saling mempengaruhi. Walaupun diakui, bahwa tindakan masyarakat tidak akan menentukan secara mutlak.

Pendekatan melalui pola pemikiran yang sedemikian ini nampak berbeda dengan konsep pemikiran *Spencer* yang menghendaki terciptanya masyarakat yang independen (*laissez fair society*), dimana manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Hak-hak terhadap individu dihormati dan selanjutnya ketergantungan masyarakat pada negara juga dikurangi. (Gordon, 1991:433).

Objek hubungan antara infrastruktur dan struktur adalah kekuasaan (*power*). Oleh karena hubungan antara faktor material dan faktor kekuasaan sangat erat, maka penguasaan terhadap sumber materi menentukan terjadinya diferensiasi kekuasaan. Dengan demikian, jika kekuasaan untuk mengontrol sumber materi semakin besar, maka semakin banyak pula sumber materi yang akan

dikuasai. Oleh karenanya, untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, dapat dilakukan dengan cara sentralisasi alat pengontrol penguasaan materi.

Penguasaan materi merupakan perkembangan dari pola pemilikan. Dalam kapitalisme modern (Waters, 1994:226), pemilik saham adalah kelompok penguasa. Oleh karena itu, dalam pemikiran kontemporer sudah tidak lagi dipentingkan bagaimana upaya memiliki sarana produksi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menguasai dan mengontrol sarana produksi tersebut. Asumsi yang dipakai adalah, penguasaan materi kedudukannya jauh lebih penting dari pada memiliki materi. Oleh karena pemilik itu harus tunduk kepada yang menguasai.

Kedudukan individu di masyarakat menurut konsep *Marxian* (Sanderson, 1993:267) ditentukan oleh jabatan. Kelas sosial, merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai hak istimewa dan prestise yang sama, berdasar peran dan struktur jabatan. Penentuan kelas ini dibagi berdasar pembagian kerja dan ketidaksamaan pendapatan.

Pendidikan dipakai sebagai sistem budaya atau

konstruksi sosial yang bersifat formal dan semi formal. Menurut *Parkin* (Sanderson, 1993:284), dalam masyarakat modern, pendidikan digunakan sebagai pembatas sosial. Pendidikan telah menjadi model materi baru. Oleh karena itu, menurut *Inkeles dan Smith* (Budiman, 1995:35) pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk mengubah manusia menjadi manusia modern. Oleh sebab itu pendidikan termasuk lingkungan material. Penyuluhan sebagai pendidikan yang informal termasuk kategori ini. Adanya penyuluhan mendorong petani menjadi petani rasional dan komersial yang berbeda dengan petani tradisional yang irrasional.

2.1.2 Hubungan Sumber Inovasi dengan Pengguna Inovasi

Dalam difusi inovasi, yang pada tahapan selanjutnya akan diikuti oleh terciptanya adopsi inovasi, dapat terjadi karena adanya dua kutub kekuatan yaitu adanya sumber inovasi di satu sisi dan pengguna inovasi di sisi yang lain. Sumber inovasi ini dapat dipersentasikan sebagai struktur negara dan struktur pasar, sedangkan pengguna inovasi dipersentasikan sebagai struktur masyarakat lokal. Dalam wacana difusi, selayaknya antara

sumber inovasi (negara dan pasar) dan pengguna inovasi (masyarakat) saling terkait dan saling tergantung (*inter-dependensi*) serta memiliki kekuasaan yang seimbang. Di antara keduanya tidak perlu ada yang berstatus sentral dan berstatus marginal. Dengan perimbangan kekuatan yang sedemikian, maka diharapkan terwujudnya kebijaksanaan negara dan pasar yang merefleksikan kemauan atau berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Argumen yang dipakai tentang perlunya perimbangan dan pemberdayaan bersama antara sumber inovasi (negara dan pasar) dan pengguna inovasi (masyarakat lokal) di dasarkan pada pemikiran bahwa jumlah netto kekuasaan yang ada di dalam masyarakat bukanlah merupakan netto yang tetap (*zero-sum*) seperti yang terdapat dalam budaya Jawa (Anderson, 1991:52). Akan tetapi, netto yang ada dapat bersifat dinamis sehingga perpaduan antara dua kekuatan yang ada dapat diperbesar (*eksponensial*).

Konsep ini pada awalnya merupakan kritik

Parsons terhadap konsep *zero-sum*. Menurut *Parsons* yang dikutip Xu Wang (1998:233) dikatakan, bahwa kekuasaan jika ditinjau dari sosiologi politik Weberian dan juga ditinjau dari tujuannya, maka antara yang menguasai dan yang dikuasai itu seharusnya dapat saling menguntungkan (*mutually exclusive*). Aktor yang merasa menguasai ataupun merasa dikuasai, di dalam hubungan sosial ini harus sama-sama merasa memiliki kekuasaan, sejauhmana dia bisa memenuhi keinginannya sendiri di atas pengorbanan keinginan orang lain. Hubungan kekuasaan ini hanya akan merupakan *zero-sum*, jika pendistribusian kekuasaan kepada orang lain itu (di mana adanya keuntungan di satu pihak) akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi orang lain. Pengertian ini hanya mengacu pada suatu asumsi, bahwa penggunaan kekuasaan itu harus ditujukan untuk melayani kepentingan pihak lain. Oleh sebab itu maka, kekuasaan itu pada dasarnya merupakan kemampuan dari suatu sistem sosial untuk memperoleh manfaat yang dilakukan demi kepentingan dan tujuan bersama (kolektif). Dalam kata-katanya:

" Kekuasaan itu adalah kemampuan yang digeneralisir untuk menjamin kinerja. Kewajiban-

nya adalah mengikat unit-unit di dalam suatu sistem organisasi kolektif. Jika kewajiban-kewajibannya memperoleh pengesahan, dasar pertanggungjawaban mereka demi tujuan kolektif".

Berdasar konsep kekuasaan ini, maka nilai tambah (*value added*) seperti tertuang didalam prinsip ekonomi berlaku. Adanya dukungan dari pengguna inovasi terhadap sumber inovasi, disebabkan oleh diterimanya nilai tambah yang diperoleh pengguna inovasi. Walaupun disadari, kekuasaan dari pengguna inovasi masih tergantung kesediaan pemberian kekuasaan dari sumber inovasi. Oleh karena itu maka, netto kekuasaan tidak lagi merupakan *zero-sum*, tetapi hubungan di antara keduanya bisa saling mendapatkan keuntungan yang lebih besar (*positive-sum*).

Dengan adanya pembagian kekuasaan yang sedemikian, maka tidak perlu lagi mensub-ordinasikan yang dikuasai dari yang menguasai. Walaupun di antara keduanya terjadi konflik, dengan pembagian kekuasaan menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan kedua belah pihak. Dengan demikian maka penggabungan kekuasaan ini dapat diperluas jika masyarakat yang menjalin kerjasama memperoleh

peningkatan kekuatan.

Konsep kekuasaan "*positive-sum*" ini akhirnya melahirkan mazhab pemberdayaan bersama antara negara, pasar dan masyarakat. Usaha untuk memberdayakan masyarakat tidak perlu dengan melemahkan kekuatan negara. Bahkan, jika kelompok kepentingan yang ada di masyarakat ini mendapat dorongan dari negara, maka masyarakat akan dengan sertamerta ikut serta meningkatkan peran negara untuk mempercepat difusi inovasi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kajian difusi inovasi juga menyangkut kesaling-terkaitan dan interaksi antara negara, pasar dan masyarakat. Oleh karena di dalamnya menyangkut adanya fenomena politik dan fenomena ekonomi, maka untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi dipergunakan pendekatan ekonomi politik. Disini ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi. Adapun politik didefinisikan sebagai sekumpulan institusi dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.

Asumsi yang dipakai adalah, difusi inovasi selain berfungsi sebagai alat ekonomi juga dipakai sebagai alat politis. Oleh karenanya maka proses difusi ikut menentukan konteks ekonomi politik inovasi. Bagaimana inovasi itu diperoleh dan didifusikan serta bagaimana pengaruh substansi inovasi itu akan berpengaruh terhadap proses pemilihan strategi.

Argumen yang dipakai terhadap penggunaan pendekatan ekonomi politis di dalam memecahkan masalah difusi inovasi adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan difusi inovasi, pada akhirnya selain ditujukan untuk mewujudkan terjadinya perubahan teknologi, juga ditujukan untuk peningkatan ekonomis. Sementara disisi yang lain terjadi pertentangan orientasi antara mazhab idealis yang menekankan bahwa difusi inovasi secara politis merupakan tugas pemerintah dan mazhab yang liberal menyatakan bahwa inovasi telah mempunyai nilai ekonomis sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu di dalam difusi inovasi juga terdapat kesaling terkaitan antara fenomena ekonomi dan fenomena politik.

Kedua, dalam sistem ekonomi politik terdapat sintesa bahwa antara pemerintah dan pasar merupakan dua sisi yang terkait. Jika diantara keduanya dilakukan pemisahan maka akan diperoleh pemahaman yang parsial dan bahkan terdistorsi dari suatu sistem sosial (Clark,1991:19). Hal ini karena pasar selain berfungsi sebagai institusi ekonomi juga berfungsi sebagai institusi politik. Sebaliknya, negara selain berfungsi sebagai institusi politik juga berfungsi sebagai institusi ekonomi.

Ketiga, dalam pendekatan ekonomi politik masih terdapat silang pendapat tentang bagaimana pemerintah dan pasar dapat terintegrasi. Pada satu sisi terdapat gagasan yang mendukung jika pemerintah melakukan intervensi secara minimal terhadap masyarakat, sementara kalangan yang lain menginginkan adanya intervensi yang ketat terhadap pasar. Namun demikian diantara kedua gagasan yang ekstrem tersebut masih terdapat peluang untuk mengkombinasikan antara kepentingan negara, pasar dan masyarakat.

Keempat, penggunaan pendekatan ekonomi politik

tidak terlepas dari kilas sejarah difusi inovasi pertanian, khususnya sistem Bimas. Di masa orde baru peran pemerintah sangat dominan. Pada masa itu isu pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan telah tertransformasi dari isu ekonomi menjadi isu politik. Akibatnya batasan antara kepentingan privat dan kepentingan publik menjadi kabur. Selanjutnya, kepentingan politik (domain politik) mengekspansi ranah ekonomik, sehingga pertautan diantara keduanya tidak dapat diprediksi.

Pengertian perspektif yang dipakai di sini sering juga disebut paradigma diartikan sebagai konsep atau asumsi pokok yang melandasi penjelasan teoretik. Dengan mereduksi dari konsep Mas'ood (1994:30) tentang ekonomi politik pemberdayaan rakyat, maka dalam pemikiran difusi inovasi terdapat tiga pola pendekatan yang berbeda yang masing-masing disebut Politik Sebagai Panglima (PSP), Ekonomi Sebagai Panglima (ESP) dan Moral Sebagai Panglima (MSP) (Tabel 2.1)

Tabel 2.1 Tiga Pendekatan Difusi Inovasi

	PSP	ESP	MSP
Aktor	Negara (Birokrat)	Pasar (Pengusaha)	Masyarakat Lokal (Petani)
Mekanisme	Kekuasaan Politik	Kekuasaan Ekonomi	Kekuasaan Rakyat
Ideologi	Statisme (Konservatif)	Liberal	Populis

Sumber: Direduksi dari Mas'ood (1994:30)

Pendekatan PSP memprioritaskan pertimbangan politik dalam difusi inovasi dan menekankan peran negara, yang diwakili aparat pemerintah sebagai aktor. Negara yang didukung mekanisme kekuasaan politik dan dituntun ideologi *statist*, dipandang mampu dan absah melakukan intervensi. Jadi yang dibutuhkan dalam PSP adalah pengorganisasian dominasi kekuatan negara.

Landasan pandangan ini adalah *organic state-ism*, dimana negara menguasai masyarakat. Pandangannya dijiwai konsep *Grotius* maupun *Hobbes* pada abad 16, yang kemudian dikembangkan *Hegel* (Budiman, 1996:16-17). Negara sebagai institusi, berhak mendominasi dan menguasai sumber daya ekonomi dan politik, mengatur serta memaksakan keinginannya kepada masyarakat. Negara memiliki pandangan

menyeluruh terhadap tata kehidupan masyarakat dari sesuatu yang ideal dan universal. Adapun masyarakat dengan mematuhi negara tidak perlu memperjuangkan kepentingannya.

Pendekatan ESP mengutamakan dominasi peran pengusaha dan korporasi. Pengusaha sebagai aktor dibayangkan mampu mengalokasikan sumberdaya dan membuat keputusan berdasar pertimbangan pasar dengan mengikuti dinamika kekuatan permintaan dan penawaran. Ideologis ESP adalah liberal (*free market liberalism*) yang tidak banyak memerlukan intervensi pemerintah. Jika seandainya pemerintah melakukan intervensi tujuannya hanya untuk memperbaiki kondisi, yang diperlukan untuk mengakumulasi dan mereproduksi kapital.

Pandangan *free market liberalism* ini beranggapan bahwa negara adalah institusi yang hanya mengatur masyarakat jika diperlukan. Asumsinya, masyarakat bersifat independen sehingga bisa mengatur dirinya sendiri. Akar pandangan ini liberal. Dalam perekonomian, pasar diatur oleh kekuatan pasar dimana permintaan dan penawaran saling berinteraksi. Dengan demikian, negara tidak

perlu ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, negara harus tunduk dan menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat .

Pendekatan MSP menekankan pentingnya kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri (*people's power*). Ideologi yang dipakai MSP adalah (*nationalis populis*) yang mengandalkan pengorganisasian sosial. Pandangan *nationalis populis* ini menentang *organic stateism* dan *free market liberalism*. Alasannya, jika mekanisme pasar boleh mengatur kehidupan ekonomi dan politik, maka yang kuat akan mendominasi yang lemah. Akibatnya yang lemah akan tersisih dan termarginalkan sehingga selanjutnya muncul monopoli ekonomi dan politik. Oleh karenanya, kekuasaan negara harus dibatasi. Alasannya, negara sebetulnya berada di bawah masyarakat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.

Namun demikian, hubungan antara negara dan masyarakat tidak mudah diprediksikan karena menurut pandangan Weber (Karim, 1997:12-13), masyarakat merupakan konsep budaya, sedangkan negara merupakan konsep kekuasaan. Masalahnya akan jadi rumit apakah

orang harus loyal pada negara atau harus loyal pada masyarakat. Juga mengapa negara yang dominan dan tidak netral bisa diterima masyarakat.

Dalam konteks perkembangan masyarakat, terdapat tendensi yang menjurus terjadinya konfigurasi hubungan segitiga antara dualitas yang saling terkait yaitu negara dengan masyarakat, negara dengan pasar dan pasar dengan masyarakat (Janvray, *et al.*, 1994: 569). Negara bertugas untuk melakukan regulasi kebijaksanaan dan melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan yang disepakati. Pasar diharapkan tanggap terhadap terjadinya perubahan harga. Adapun masyarakat melakukan kegiatan tawar menawar dan melakukan kerjasama. Jika negara tidak dapat menyediakan layanan publik, masyarakat juga diharapkan mempunyai kemampuan untuk menggantikan peran negara dan pasar. Jika pasar tidak dapat mengatur perubahan harga, kekuatan lembaga diambil dari organisasi masyarakat. Demikian juga, jika masyarakat ingin berperan aktif dan efektif untuk saling melengkapi peran negara dan pasar, organisasi masyarakat sangat dibutuhkan pemberdayaannya. Intervensi

pemerintah (Thorbecke,1994:591) juga memberikan manfaat dan memberikan efek pada konfigurasi pasar dan non pasar. Namun demikian kelemahan dari adanya intervensi ini akan berdampak negatif terhadap menurunnya kewirausahaan, walaupun telah tercipta adanya pasar. Legitimasi intervensi ini menurut *Stiglitz* (Thorbecke, 1994:595) akan dilakukan jika pasar tidak mampu memberikan layanan seperti (kredit, barang publik,informasi) serta adanya monopoli di pasar tradisional dan faktor eksternal lainnya.

Dengan berkembangnya mazhab liberalisasi, kajian hubungan negara dengan pasar semakin menonjol. Penyebabnya, pasar (terutama pasar bebas) merupakan salah satu faktor yang mendorong lahirnya teori dependensi. Pembangunan sudah tidak lagi tergantung pada negara, tetapi mekanismenya sudah diatur oleh pasar. Dengan mekanisme sedemikian maka pasar secara kontinyu akan memainkan peran penting dan dinamis dalam perekonomian.

Di negara berkembang, gejala terjadinya hubungan antara negara dan pasar ini mulai banyak diteliti (Schneider,1998:101). Kesimpulan yang

diperoleh adalah, bahwa hubungan antara negara dan pasar penting untuk menjelaskan bentuk pembangunan di akhir abad 20. Di Asia juga ditemukan, bahwa penghambat otonomi dan peningkatan kemampuan negara tidak ditentukan oleh kekuasaan negara, tetapi faktor penghambatnya lebih banyak ditentukan oleh jaringan hubungan negara dan pasar. Di Asia Tenggara ditengarai, hubungan negara dan pasar merupakan kunci di dalam menjelaskan perkembangan ekonomi.

Dengan mengutip pengamatan *Silva, Schneider* (1998:101) mengatakan bahwa pembaharuan neo-liberal di Chili tidak bisa semata-mata akibat rezime autoritarian yang memaksakan kehendaknya kepada masyarakat sipil yang tidak berdaya. Akan tetapi, terciptanya pembaharuan masih juga tergantung sifat hubungan yang terjadi antara negara dengan pasar. Tetapi dalam pengamatan *Evans* (*Schneider*, 1998:102), di Korea intervensi pemerintah tetap diperlukan karena merupakan komponen penting untuk mempercepat laju perekonomian. Peran negara, di antaranya melakukan regulasi terhadap peraturan yang telah dibuat sebelumnya, perusahaan negara

memproduksi barang-barang yang dibutuhkan untuk kepentingan publik, mengembangkan usaha privat dan mendorong tumbuhnya perusahaan inti.

Hubungan yang efektif antara negara dan pasar akan terjadi jika terdapat adanya "otonomi melekat" (*embedded autonomy*), dimana masing-masing pihak tidak hanya bersifat otonom tetapi di antara keduanya juga saling tergantung (*inter-dependensi*). Disamping itu juga, perlu ada upaya agar di antara keduanya saling memberdayakan satu sama lain. Oleh karena itu, terjadinya pertukaran (inovasi) ataupun adanya independensi antara negara dan pasar dapat pula menciptakan perubahan perilaku pasar (pengusaha) dan ataupun negara (pejabat pemerintah).

Pemikiran pentingnya otonomi melekat ini nampaknya lebih aktual dan lebih maju daripada konsep sebelumnya, dimana konsep dikotomi negara-pasar atau negara-masyarakat berlandaskan konsep dependensi.

Mengenai hubungan antara negara, pasar dan masyarakat dalam konteks difusi inovasi terdapat dua hal yang menjadi bahan pertimbangan analisis

yaitu:

Pertama, adalah bahwa dalam difusi inovasi juga melibatkan proses produksi, konsumsi dan distribusi. Makna yang terkandung dalam proses tersebut, adalah adanya dominasi nilai yang di dasari mekanisme bisnis yaitu kapitalisme-liberalisme. Jadi logika dibalik difusi inovasi tersebut adalah logika produksi demi profit.

Kedua, adanya teknologi difusi dan ketidak sempurnaan pasar inovasi, memberi peluang bagi inovasi untuk terdifusi di berbagai tempat. Dalam kaitan ini institusi yang sangat berkepentingan adalah pemerintah dan pengusaha. Dengan demikian, hal penting dalam menganalisis difusi inovasi adalah adanya liberalisasi dan sentralisasi dalam pengendalian inovasi. Berkaitan dengan fenomena politik maka penguasaan inovasi dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dalam analisis ekonomi politik berikutnya menggunakan pendekatan perspektif liberal. Prinsip liberalisme (Clark, 1991:48-49) yang dipakai adalah: Manusia, lebih mementingkan dirinya dan mampu bertindak

otonom serta efisien guna memenuhi kebutuhannya. Masyarakat, sebagai agregasi individual tidak memiliki tujuan dan kehendak secara mandiri. Masyarakat memberi peluang bagi individu mengejar kepentingannya. Pemerintah diciptakan untuk melindungi hak-hak individu. Oleh karenanya intervensi pemerintah seyogyanya dilakukan seminim mungkin. Secara moraliti, individu mempunyai kebebasan menentukan baik buruknya berdasar preferensi personal. Kebebasan, diartikan hilangnya paksaan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan ini sinonim dengan otonomi dan independensi. Otoritas, adalah penyerahan secara sukarela sebagian otonominya kepada pemimpin. Kesetaraan, adalah pemberian kesempatan yang sama bagi individu untuk berperan dalam perekonomian dan memperoleh perlindungan hak yang sama dalam konstitusi. Keadilan, adalah perlindungan hak-hak menurut konstitusi dan menghukum bagi pelanggar hak orang lain. Efisiensi, adalah situasi dimana individu untuk mencapai hasil yang terbaik dilakukan tanpa merugikan hak orang lain.

Asumsi difusi inovasi yang dipakai dalam

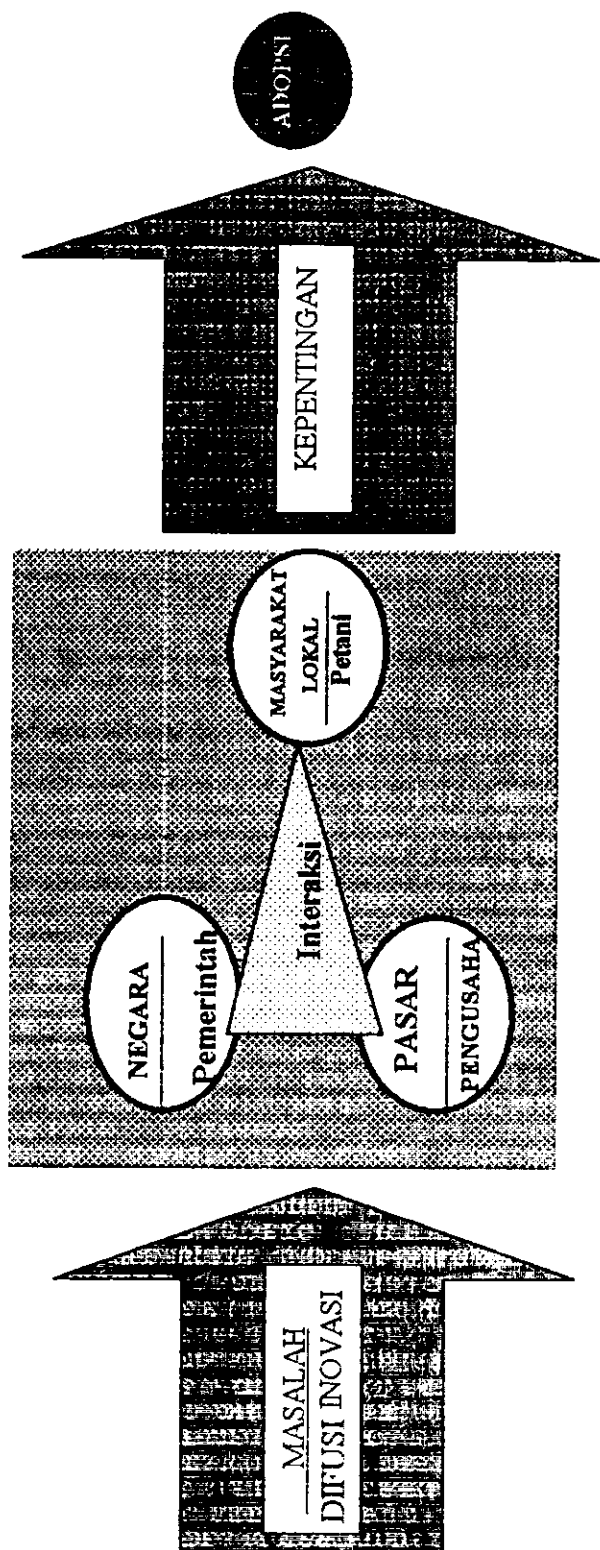
prinsip liberal ini adalah : pertukaran inovasi berlangsung secara bebas, pengusaha berperan sebagai aktor utama atas dasar tindakan rasional guna memaksimalkan profitnya. Kemungkinan timbulnya konflik diabaikan. Sebaliknya, hubungan hubungan ekonomi yang terjadi pada setiap struktur bersifat harmonis menuju tercapainya sosial order yang saling menguntungkan berdasar keselarasan kepentingan. Keputusan pelaku ekonomi didasarkan pertimbangan keunggulan komparatif (*comparatif advantage*). Adapun peran negara dibatasi dan hanya diarahkan untuk memperlancar mekanisme pasar. Dengan demikian hubungan antara negara, pasar dan masyarakat dapat menjadi *positive-sum* dalam artian, adanya mekanisme hubungan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan ekonomi walaupun porsinya tidak sama besar.

Pendekatan yang dipakai untuk menganalisis hubungan negara, pasar dan masyarakat diajukan argumentasi bahwa karakteristik struktur difusi, identik dengan model hubungan dominasi dan dependensi yang menunjukkan fenomena ketimpangan dalam hubungan antar aktor. Negara dan pasar

sebagai sumber inovasi dan masyarakat sebagai pengguna inovasi dijadikan pangkal kajian, karena memiliki tujuan, kepentingan dan kekuasaan yang berbeda (Gambar 2.1).

Akibat logis pendekatan ini, maka kajian difusi yang selama ini hanya menekankan pada arus (*flow*) difusi dilakukan penyempurnaan karena di dalamnya tercakup kepentingan kekuasaan.

Dalam kajian ini, difusi inovasi di tempatkan dalam kerangka pikir strukturalis dengan menempatkan negara dan pasar sebagai struktur sumber inovasi dalam suatu sistem sosial. Adapun masyarakat di dudukkan sebagai struktur pengguna inovasi. Ditinjau dari kacamata kapitalisme, yang ditandai oleh adanya suatu sistem produksi dan organisasi sosial, terdapat pertanda adanya ketidaksimetrisan kekuasaan yang ekstrem antara sumber inovasi dan pengguna inovasi. Dalam perspektif liberalis, peran masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitas perekonomian relatif terbatas. Sebaliknya peran modal adalah sangat penting, bahkan dapat menentukan struktur masyarakat.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Adalah suatu hal yang ironis dan mengerikan, jika penguasaan modal akhirnya dapat melahirkan suatu ketergantungan. Bila ini terjadi, kemungkinan timbulnya konflik tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih jika penguasaan modal tersebut sampai memutus mata rantai kebutuhan material atau kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pengendalian langsung terhadap beberapa sumberdaya yang dibutuhkannya.

Dengan situasi yang sedemikian ini, bisa dimaklumi jika Winters (1999:viii) memandang, betapa besar peran pengusaha dalam penguasaan kapital di dalam suatu kehidupan. Dalam kata-katanya ia mengatakan :

" The power of capital controllers is deep, structural, and daunting, but it is also contingent ---incessantly contested and remade in the daily conflicts that arise when the material needs or demand of a community are divorced from direct control over resources necessary to meet them."

Dimensi struktural dari kekuatan pasar di fokuskan pada respon pasar (pengusaha) untuk mengendalikan modal atau mempertimbangkannya kembali jika terjadi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Kekuatan pasar

ini ditunjukkan dengan cara menahan diri apabila terjadi ketidak puasan terhadap iklim kebijakan yang ada. Namun demikian, pengusaha akan selalu terus mempertimbangkannya menjadi suatu pasar yang lebih luas berupa investasi yang potensial. Dengan cara sedemikian, maka pengusaha pada hakekatnya bersifat mobil dan mudah berpindah-pindah.

Kekuatan struktural pengusaha terhadap masyarakat terletak pada kemampuannya untuk menyediakan atau bahkan menolak memberikan modal maupun inovasi ketika masyarakat membutuhkannya. Akibat kekuatan dan kekuasaan pengusaha yang sedemikian, masyarakat akan selalu tergantung pada pasar dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Bagi pengusaha, kedua kekuatan ini merupakan hal penting dan merupakan alat penekan dalam melakukan persaingan.

Terhadap struktur yang ada dalam masyarakat, yang dipakai sebagai asumsi dalam kajian ini adalah, masyarakat telah berorientasi komersial sehingga dapat berinteraksi dengan negara dan pasar serta pula bersifat independen dalam memilih inovasi sesuai kepentingannya. Konsep ini juga

mengacu pada konsep Weber (Budiman,1995:35) tentang manusia modern yang terbuka terhadap ide baru, berorientasi ke masa depan serta menguasai alam. Oleh karenanya, manusia itu pada dasarnya dapat melakukan perubahan walaupun berada pada lingkungan masyarakat yang tradisional.

Konsekuensi logis dari pendekatan analisis ini, adalah memberikan perhatian serius terhadap independensi dan interdependensi antara sumber inovasi dan pengguna inovasi. Pada unit analisis yang lebih tinggi dapat dipakai untuk mengkaji hubungan antara negara, masyarakat lokal dan pasar.

2.3 Hipotesis

Atas dasar pertimbangan teoretis dan kerangka pemikiran, yang selanjutnya di aplikasikan ke dalam konteks difusi inovasi pertanian maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis pertama; Difusi inovasi melibatkan terjadinya proses produksi. Untuk mengadopsi inovasi kemampuan masyarakat tidak sama. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara internal (status, pengalaman, penguasaan material)

berkorelasi positif dengan tingkat adopsi. Keterkaitan masyarakat dengan struktur eksternal ikut serta menentukan tingkat adopsi. Masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha, tingkat adopsinya lebih tinggi daripada tingkat adopsi masyarakat yang hanya bekerjasama dengan pengusaha.

Hipotesis kedua; Difusi terhadap suatu inovasi tergantung atas dasar pertimbangan dan kepentingan ekonomi pengusaha selaku sumber inovasi. Oleh karena itu maka pasar akan bersifat independen dalam menyediakan inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Adapun pemerintah maupun masyarakat bersifat dependen. Inovasinya menyesuaikan dengan kepentingan pasar. Namun demikian, independensi pasar ini tidak berlaku secara dominan dengan cara meminggirkan kepentingan petani. Hal ini disebabkan karena dalam mengadopsi suatu inovasi, kesediaan masyarakat itu sendiri sebagai struktur pengguna inovasi ikut menentukan. Jika pemerintah ikut serta melakukan intervensi guna mendorong difusi inovasi, maka pengusaha akan lebih aktif dan dinamis dalam mendifusikan inovasi sehingga dapat meningkatkan

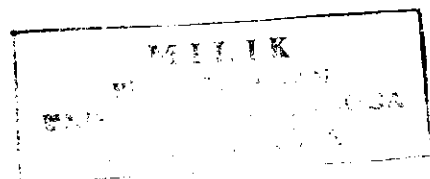
adopsi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Hipotesis ketiga; Pemerintah bersikap independen terhadap kepentingan petani. Namun bagi petani tidak menimbulkan hubungan dependensi kepada pemerintah. Yang terjadi adalah integrasi antara kepentingan negara, pasar dan masyarakat. Jalinan kepentingan ekonomi pengusaha dan kepentingan politik pemerintah mengarah timbulnya sinergi yang akan meningkatkan adopsi inovasi masyarakat selaku pengguna inovasi.

2.4 Rangkuman

Dengan memperhatikan kerangka pemikiran di atas, maka hubungan antara negara, pasar dan masyarakat dijadikan sebagai subjek tataran teoretik, sedangkan difusi dan adopsi inovasi dijadikan sebagai objek tataran data.

Dari perspektif liberal, pemerintah akan mempunyai fungsi yang paling baik jika tidak banyak memerintah". Minimasi peran pemerintah dan *laissez fair* dilandasi pandangan bahwa pemerintah hanyalah "wasit" untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak privat. Namun demikian dalam hal



pelayanan publik, kehadiran pemerintah tetap diperlukan. Liberalisme hanya alat untuk menciptakan kebebasan bagi individu dan sebagai senjata ideologik untuk menyingkirkan penyalahgunaan kekuasaan politik.

Fokus kajian mempertimbangkan dari empat posisi yaitu dari posisi negara, posisi pasar, posisi masyarakat serta interdependensi dari ketiganya. Asumsi yang dipakai adalah bahwa pasar mempunyai otonomi relatif yang lebih besar. Dalam kaitan ini pendekatan teori fungsionalisme-struktural dipakai untuk menjelaskan paradigma fakta sosial (Ritzer, 1992:24). Tekanannya adalah menuju terciptanya keteraturan (order) agar dalam masyarakat terjadi keseimbangan. Adapun kemungkinan timbulnya konflik diabaikan. Dengan demikian, pembedaan trikotomi antara ketiga struktur tidak ditujukan untuk mempertajam trikotomi, tetapi hanya dipakai sebagai pola pikir. Yang diharapkan dari pola ini adalah, bagaimana agar dari ketiga struktur tercipta interdependensi yang selanjutnya dipakai sebagai alat menuju terciptanya sinergi.

BAB 3

BAB 3**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara kombinasi antara penelitian ekplanasi (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ekplanasi, pada dasarnya ditujukan untuk menerangkan dan menguji terjadinya hubungan antar variabel, baik yang berperan sebagai variabel deterministik maupun sebagai variabel in-deterministik.

Walaupun penelitian ini terfokus pada terjadinya hubungan antar variabel, namun dalam uraian berikutnya juga mengandung deskripsi. Dengan adanya penelitian deskriptif ini diharapkan, memberikan klarifikasi tentang adanya gejala sosial tertentu dalam kaitannya dengan gejala sosial lain yang tidak dapat dicapai dan diungkap dalam penelitian ekplanasi. Sebagai misal, mungkin saja terjadi bahwa masyarakat yang diamati secara kasat mata telah menunjukkan tanda-tanda bahwa

inovasi itu telah diadopsi. Namun yang tersirat justru sebaliknya, yaitu objek yang diamati justru menolak inovasi yang didifusikan. Maraknya perubahan orientasi antara kepentingan negara, kepentingan pasar dan kepentingan masyarakat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Komponen yang saling menjalin sedemikian merupakan gejala sosial yang hanya dimengerti manakala fakta sosial tersebut dipahami berdasarkan konteksnya di mana posisi yang diamati berada.

Format penelitian terhadap informasi individu seperti tertuang dalam tujuan pertama, cara pengumpulannya dilakukan secara survai sampel. Untuk tujuan kedua dan ketiga dilakukan survai kelompok karena menyangkut hal-hal yang bersifat pendapat umum.

3.1 Variabel yang Diamati

Sebagian besar istilah dan konsep variabel yang digunakan di definisikan sepanjang pembahasan. Namun demikian, beberapa istilah dan konsep dari 3 variabel utama akan dijelaskan lebih awal untuk menghindari kerancuan. Dari suatu konteks, nampak jelas kapan istilah negara dipakai dan kapan

istilah pemerintah yang mengacu kepada para pelaksana negara juga dipakai. Demikian halnya dengan istilah masyarakat lokal dan petani. Istilah pasar juga digunakan berselang-seling dengan istilah pengusaha dan pebisnis.

Variabel utama yang diamati adalah negara yang dioperasionalkan kepada pejabat dan atau pegawai pemerintah, pasar (pengusaha) dan masyarakat lokal (petani). Negara secara subjektif dirumuskan kedalam peringkat analisis individual yaitu para individu yang menduduki posisi dan memiliki kewenangan untuk membuat serta melaksanakan keputusan yang mengikat semua pihak dalam suatu wilayah. Termasuk dalam kategori ini, pejabat atau pegawai pemerintah yang ada kaitannya dengan difusi inovasi pertanian.

Preferensi negara dilukiskan dalam tindakan, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pejabat pemerintah yang tidak terlibat langsung dengan difusi inovasi, para birokrat yang berkepentingan secara langsung dalam difusi inovasi, informasi dan pengalaman yang pernah berlangsung sebelumnya dalam difusi inovasi serta juga adanya

beberapa gagasan pribadi yang berorientasi demi kepentingan publik. Sasaran tindakan, menyangkut semua aspek hubungan antara negara dan masyarakat serta antara negara dan kepentingan pasar. Alasan yang dipakai atas penggunaan cara ini adalah, karena pejabat pemerintah dapat memiliki berbagai alternatif kebijakan dan bertindak atas pilihannya sendiri. Karena banyaknya pejabat pemerintah, negara dalam artian ini adalah setiap individu yang homogen dan independen dalam preferensi juga dalam kepentingan yang sama.

Pasar yang dimaksud dalam variabel ini adalah para pelaku pasar atau pengusaha. Bisa juga yang diamati adalah para pegawai suatu usaha bisnis yang ikut serta dalam pengembangan inovasi pertanian. Bentuk kegiatan hubungan ini merupakan keterpaduan dan kerjasama, dimana pihak perusahaan menyediakan inovasi, modal dan pasar. Adapun pihak petani menyediakan tanah, tenaga kerja dan melakukan pengelolaan lahan. Bentuk kerjasama ini, bisa juga dilakukan bersama antara pengusaha, petani dan pemerintah yang menyediakan berbagai perangkat kebijakan.

Masyarakat lokal yang dimaksud, adalah para petani yang menjalin hubungan dengan pemerintah atau pasar. Pandangan ini berdasarkan asumsi adanya kausalitas di antara ketiga variabel tersebut. Karena adopsi inovasi berkenaan dengan sikap dan tingkahlaku individu, walaupun aspek sosial yang lain ikut mempengaruhinya, maka unit yang diamati adalah individu. Namun, berdasar pertimbangan bahwa sistem sosial yang dikaji adalah masyarakat petani (*farmer society*) di mana petani dalam usahanya dikelola oleh unit rumah tangga secara keseluruhan, maka unit pengamatan individu yang dimaksud adalah unit keluarga petani yang selanjutnya diagregasikan pada tingkat masyarakat. Jadi konsep rumah tangga akan punya arti, jika dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi serta kultur masyarakat setempat.

Independensi variabel di ukur dari sejauh mana masing-masing variabel mempunyai kemandirian dan integritas yang tegas serta bebas dari pengaruh variabel yang lain. Dengan demikian, institusi variabel dalam artian independen bersifat otonom sehingga tidak sekedar menjadi terompet kepentingan

kelompok.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka hubungan antara negara, pasar dan masyarakat dipakai sebagai subjek tataran teoretik. Adapun difusi inovasi dijadikan sebagai objek dalam tataran data. Data tentang difusi inovasi ini dipakai sebagai objek dari fakta sosial yang dinyatakan sebagai sesuatu barang (*thing*) yang berbeda dengan ide. Oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran peneliti.

Dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai, maka fakta sosial yang diperoleh terdiri dari dua macam yaitu: *Pertama*, fakta sosial dalam bentuk material seperti karakteristik petani dalam hal pengalaman dalam bertani, status sosial yang mereka miliki, sumber-sumber ekonomi yang dikuasai serta adopsinya. Bentuk materi seperti tertuang dalam tujuan pertama tersebut di atas dapat disimak, ditangkap dan juga di observasi. *Kedua*, adalah fakta sosial dalam bentuk non-material. Walaupun fakta sosial ini bukan merupakan sesuatu yang nyata namun bisa dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, fakta sosial ini merupakan

fenomena yang bersifat *inter-subjective* yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia. Posisi negara, posisi pasar dan posisi masyarakat serta makna yang terkandung di dalamnya seperti yang tercantum dalam tujuan yang kedua dan ketiga termasuk dalam kategori ini.

Pokok persoalan yang diteliti dari fakta sosial ini adalah struktur difusi inovasi, yang terdiri dari negara dan pasar sebagai sumber inovasi dan struktur masyarakat sebagai pengguna inovasi dipakai sasaran penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh kejelasan mengenai objek yang diamati yaitu difusi inovasi pertanian, perhatian ditekankan pada subjek penelitian yaitu pemerintah daerah, pengusaha dan petani yang berlokasi di kabupaten Malang. Corak masyarakat lokal pada wilayah geografis yang bervariasi ini bukan hanya ditandai perbedaan struktur yang tertutup tetapi juga ditandai oleh struktur masyarakat yang maju dan adanya keterjalinan yang semakin dalam dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan lain mengacu pada konsep Sanderson (1993:85) tentang per-

kembangan masyarakat berdasarkan perkembangan inovasi dengan pola hortikulturalis intensif, yang aktif menggunakan inovasi serta lebih berorientasi komersial.

Atas pertimbangan di atas, prosedur penentuan lokasi dilakukan secara *area sampling*. Mekanismenya dilakukan secara bertahap atas dasar strata (*multi stage probability stratified random sampling*) sebagai berikut: Populasi yang diamati dilakukan pada masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) Brantas. Asumsi yang dipakai adalah, masyarakat yang berada dalam suatu wilayah (DAS) Brantas itu bersifat homogen karena berada pada suatu wilayah agroekosistem. Jika wilayah agroekosistem ini dipilah secara vertikal, maka akan terdapat masyarakat yang berada di wilayah agroekosistem dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di wilayah agroekosistem dataran rendah. Kategori yang dipakai sebagai wilayah agroekosistem dataran tinggi jika ketinggian tempat rata-rata di atas 1200 meter di atas permukaan air laut. Adapun kategori agroekosistem dataran rendah jika berada di wilayah ketinggian kurang dari 1200 meter.

Tentunya agroekosistem di antara kedua kategori tersebut selain terdapat kesamaan juga terdapat perbedaan baik secara fisik, biologis, sarana dan prasarana maupun karakteristik masyarakat yang terdapat di dalamnya. Bahkan, juga dimungkinkan antara kedua agroekosistem tersebut terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif.

Di dataran rendah, inovasi pertanian cukup banyak tersedia. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai fasilitas yang ikut mendukung. Salah satunya, tanaman pangan sebagai komoditas andalan dataran rendah menurut pemerintah perlu dijaga kelestarian dan stabilitasnya. Oleh karena padi sebagai komoditas pangan memerlukan irigasi, maka pengembangan lahan persawahan lebih banyak memperoleh prioritas daripada lahan kering yang berada di dataran tinggi. Faktor lain yang ikut mendukung pengembangan inovasi di dataran rendah, adalah karena letak topografis yang datar membuat sarana transportasi menjadi relatif murah dan mudah bila dibandingkan dengan transportasi di dataran tinggi. Adanya lembaga penelitian juga ikut menentukan. Peran yang diembannya bukan sekedar

mencari dan menguji inovasi baru. Lembaga penelitian ini juga ikut berfungsi sebagai pusat inovasi, pusat pendidikan dan pusat informasi bagi petani.

Di dataran tinggi, yang terjadi justru sebaliknya. Inovasi yang tersedia lebih terbatas. Rehabilitasi lahan walaupun menjadi masalah yang krusial, realisasi pemecahannya sangat terbatas. Bahkan karena petani membutuhkan lahan untuk pertanian, sering kali petani mengadakan ekspansi di lahan kritis yang secara teknis sudah tidak memenuhi persyaratan untuk usaha pertanian. Dampaknya, erosi merupakan fenomena yang kritis. Akibat yang ditimbulkannya bukan hanya berdampak negatif bagi dataran tinggi yang bersangkutan, tetapi akibat yang ditimbulkannya juga dirasakan di dataran rendah berupa banjir dan sedimen.

Karena terdapatnya perbedaan fisik di antara kedua lokasi, maka pola masyarakatpun juga mengalami perbedaan. Pada umumnya masyarakat di dataran tinggi relatif lebih tertutup sedangkan masyarakat di dataran rendah relatif lebih terbuka. Adanya perbedaan masyarakat di kedua lokasi, maka

dengan cara ini juga dapat dilakukan pemilahan secara fisik antara kecamatan yang berada di dataran tinggi dan kecamatan yang berada di dataran rendah. Untuk selanjutnya dilakukan pemilihan secara bertahap yang dimulai dari pemilihan kecamatan sampai dengan pemilihan desa.

Untuk memperoleh akurasi data, upaya lain yang dilakukan adalah ditempuh dengan cara mencari informasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah yang telah banyak mendalami dan memahami tentang struktur masyarakat setempat. Informasi juga diperoleh dari Dinas Pertanian Rakyat, Balai Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian. Juga berbagai lembaga atau individu yang pernah mengadakan penelitian di lokasi yang diamati, juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Atas berbagai pertimbangan tersebut di atas maka lokasi yang terpilih untuk diteliti adalah desa Tulungrejo kecamatan Bumiaji untuk mewakili masyarakat hortikulturalis dataran tinggi dengan PT Indofood Sukses Makmur sebagai penyedia inovasi. Desa Sumber Pucung kecamatan Sumber Pucung, mewakili masyarakat agraris dataran rendah denga

PT Pioneer Hibrida Indonesia sebagai penyedia inovasi tanaman pangan khususnya jagung.

3.3 Pengambilan Sampel Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan konteks unit sosial yang mencakup rumah tangga petani serta lembaga yang ikut serta menyediakan sumber inovasi baik yang berada di desa maupun yang berada diluar desa. Petani yang dipilih sebagai sampel ditentukan secara *Equal Allocation Method* (Parel, tanpa tahun:30) pada petani yang melakukan kerjasama dengan PT Indofood atau PT Pioneer. Penentuan petani komersial sebagai fokus berangkat dari asumsi, bahwa petani komersial tidak berangkat dari "titik nol" yang berciri tradisional, tetapi petani Jawa yang telah melewati masa subsisten yang bercirikan *peasant* menuju petani komersial (*farmer*) (Collier, et al, 1996:82-83), walaupun belum sepenuhnya mencapai ciri modern. Petani Jawa yang diamati ini, kini sedang dalam masa transisi menuju pertanian komersial karena adanya revolusi hijau, revolusi angkutan dan revolusi komunikasi serta informasi.

Walaupun istilah desa identik dengan pertanian ternyata dari 2 desa yang diamati hanya 30.9 % yang bekerja sebagai penggarap tanah pertanian. Sisanya sebesar 69.1 % bekerja sebagai buruh tani, pedagang, pertukangan, PNS dan Abri serta yang lain-lain termasuk di antaranya wanita dan anak-anak. Namun demikian petani yang melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan jumlahnya hanya 6.1 % dari populasi petani (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Populasi Petani dan Sampel Petani di Sumber Pucung dan Tulungrejo

Uraian	SumberPucung	Tulungrejo	Total
a. Populasi penduduk	10660	9701	20361
b. Populasi petani	1875	4422	6297
Rasio (b/a)	(0.176)	(0.456)	(0.309)
c. Populasi peserta proyek (N)	210	180	390
Rasio (c/b)	(0.112)	(0.040)	(0.061)
d. Sampel yang diamati(n)	30	30	60
Rasio (d/c)	(0.142)	(0.166)	(0.153)

Dari informasi yang diperoleh dinyatakan, bahwa rendahnya persentase petani untuk menjadi peserta proyek (kerjasama dengan pengusaha) ternyata ada 2 alasan yang berbeda. Pada usaha penangkaran jagung, kendala utamanya adalah karena

terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang mempengaruhi penyediaan modal usaha. Disamping itu karena adanya stok bibit (di gudang) yang masih mencukupi menjadikan usaha penangkaran bibit untuk sementara waktu diadakan pembatasan. Juga sebagai akibat terbatasnya petani yang menggunakan bibit unggul dan rendahnya daya beli petani untuk menggunakan bibit unggul menjadikan stok bibit masih tersedia di gudang. Rendahnya jumlah petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan agribis (Indofood) karena usaha pengembangan komoditas wortel memang relatif baru (tahun 1997), dimana komoditas utama yang sebelumnya dikembangkan adalah kentang.

Teknik penentuan sampel petani ini, pada prinsipnya dilakukan secara selektif dan atas pertimbangan khusus dimana informasi diperoleh. Setiap lapisan masyarakat diberi kesempatan untuk terpilih sebagai anggota populasi. Ini dimaksudkan agar setiap individu pada setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dasar yang dipakai strata adalah luas penguasaan lahan. Alasannya, tanah merupakan modal

utama dalam usaha pertanian (Sayogyo, 1978:3).

Pejabat atau pegawai pemerintah yang diamati adalah mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta terlibat dalam difusi inovasi seperti pejabat Dinas Pertanian, pejabat Pemerintah Daerah serta peneli di Lembaga Penelitian. Pengusaha yang bisa memberikan informasi adalah manajer lapangan, petugas lapangan dan pengawas lapangan ataupun pegawai dari perusahaan yang secara langsung ikut membina para petani.

3.4 Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data diusahakan secara fleksibel dengan menyesuaikan dengan tujuan penelitian dan macam data yang diperlukan. Atas dasar pertimbangan ini, maka akan terdapat dua macam cara untuk mengumpulkan data yaitu:

Pertama, data fakta sosial yang berbentuk material seperti karakteristik petani dalam hal pengalaman dalam bertani, status sosial yang mereka miliki, sumber-sumber ekonomi yang dikuasai beserta adopsinya karena dapat disimak, maka pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner dan interviu.

Mekanisme metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: Metoda wawancara dilakukan terhadap data individual. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*, baik yang dibuat secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur guna memberi kesempatan untuk mengantisipasi adanya perkembangan informasi yang dibutuhkan. Fungsi kuesioner ini selain untuk menggambarkan struktur sosial, juga sebagai alat ukur bagi variabel yang di teliti. Untuk menghindari adanya kehilangan data yang berharga, alat rekam berupa tape recorder juga dipergunakan.

Mulanya peneliti agak ragu menggunakan alat perekam ini karena pada umumnya masyarakat pedesaan sangat sensitip, terutama jika di wawancarai oleh pendatang baru. Realitas yang terjadi justru berbalikan dengan perkiraan semula yang sempat dikuatirkan. Penggunaan alat rekam sudah tidak lagi sensitip bagi mereka. Bahkan masyarakat cukup antusias agar suara mereka bisa di dengar pihak lain. Mereka berpandangan, sudah saatnya petani bisa bersuara. Namun demikian, jika sudah menyangkut hal yang sangat sensitip, walaupun suara

mereka mau direkam, masih juga ada rasa sungkan. Di antaranya mereka mengusulkan agar identitas pribadi seperti nama tidak perlu disebutkan dalam pelaporan.

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data secara interviu dan kuesioner adalah adanya himpitan antara data fakta sosial dengan data fakta individu. Mungkin saja individu dapat memberikan informasi tentang fakta sosial seperti yang diinginkan peneliti. Namun keterangan yang diberikan bisa juga sudah diwarnai oleh kaca mata individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat sehingga informasi yang dikumpulkan dari kuesioner terkontaminasi oleh unsur subjektivitas informan. Untuk menghindari kendala tersebut, maka strategi yang dipakai peneliti adalah dengan cara tetap menyandarkan diri kepada informasi responden. Kemudian juga dilakukan cross-check (pertanyaan berulang) dalam suatu konteks yang berbeda dengan cara menanyakan persepsi terhadap informasi yang diberikan. Dari informasi tersebut peneliti dapat menemukan parameter yang dipakai informan yang selanjutnya peneliti dapat memberikan kesimpulan

dari gambaran fakta sosial tersebut.

Kedua, data fakta sosial dalam bentuk non-material karena telah dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan merupakan fenomena yang bersifat *inter-subjective* yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia seperti posisi negara, pasar dan masyarakat serta makna yang terkandung di dalamnya, maka metode yang dipakai adalah menggunakan metode observasi. Alasan yang dipakai dalam penggunaan metode ini karena data yang diharapkan tidak dapat diamati secara langsung dan aktual, kecuali dengan cara pemahaman (*interpretative understanding*). Metoda observasi ini juga dipakai untuk melihat perilaku, menangkap persepsi dan makna simbolik baik yang dilakukan negara, pasar maupun masyarakat dalam suatu konteks tertentu. Juga untuk menangkap penyebab terjadinya fakta sosial serta mengidentifikasi keteraturannya.

Agar metode ini terwujud, strategi yang ditempuh dilakukan sebagai berikut:

Pertama, selain dilakukan secara interviu dan kuesioner, fokus penelitian juga diarahkan kepada observasi dengan mengamati berbagai posisi dari

negara dan pasar ketika berperan sebagai sumber inovasi dan juga bagaimana posisi petani ketika bertindak sebagai pengguna inovasi. Dengan mengamati terhadap apa yang menjadi perbincangan di masyarakat baik yang dilakukan dalam forum formal maupun dalam forum informal seperti dalam perbincangan sehari-hari antar petani, antar pejabat pemerintah maupun antar pengusaha dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi antara negara, pasar dan masyarakat serta apa pula makna yang terkandung dalam hubungan tersebut. Dengan merekam terhadap isi pembicaraan, ungkapan maupun refleksi pemikiran informan, peneliti dapat memilah dan memilih akurasi informasi serta memberikan uraian dan kesimpulan secara subjektif terhadap fakta yang terjadi di masyarakat.

Kedua, informasi yang menurut pandangan peneliti telah dianggap benar masih digali lebih mendalam melalui *indepth interview*. Kesimpulan yang diperoleh peneliti di komfirmasikan ulang terhadap responden untuk menjaga tingkat kebenarannya.

Ketiga, kegiatan sedemikian dapat dilakukan berulang sampai peneliti yakin akan kebenarannya.

Cara pengumpulan data ini disesuaikan dengan karakter dan konteks yang ada di masyarakat. Sebagai bahan analisis, pengumpulan data di dekati secara "triangulasi" antara data kuantitatif untuk mengungkapkan hubungan antar variabel dan data kualitatif untuk mengungkapkan pemahaman secara menyeluruh dan tuntas terhadap struktur. Konsekuensinya, dari pendekatan ini akan diperoleh data kuantitatif dan data kualitatif.

Jika variabel fakta sosial mempunyai lebih dari satu nilai, maka variabel fakta sosial dinilai dengan angka. Variabel ini masih bisa dipilah menjadi variabel kuantitatif diskret dan variabel kuantitatif kontinyu. Variabel kualitatif dalam bentuk kategorik ada yang dapat di kuantifikasikan dan ada yang tidak dapat di kuantifikasikan (Tan,1985: 253-254).

Sumber data diperoleh dari petani sebagai data primer, seperti tingkat pendidikan, status sosial, penguasaan lahan, tingkat adopsi serta kemandiriannya. Data diperoleh pada kondisi, situasi, proses dan perilaku petani tertentu. Untuk melengkapi informasi secara menyeluruh, juga dibutuhkan

informasi dari kelompok masyarakat. Kepada tokoh kunci ditanyakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan inovasi pertanian seperti bagaimana pelayanan yang ada dan macam inovasi yang dibutuhkan. Kepada pejabat pemerintah juga ditanyakan mengenai kebijakan yang telah dibuat dalam kaitannya dengan masyarakat dan pengusaha. Kepada pengusaha terkait dengan pertanyaan, bagaimana kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat.

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, lembaga pemerintah dan lembaga yang terkait dengan penyediaan sarana inovasi pertanian.

3.5 Operasionalisasi Konsep

Negara dinyatakan independen apabila memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan otoritatif atau negara dapat menyusun dan melaksanakan kebijaksanaannya tanpa campur tangan atau bebas dari pengaruh masyarakat atau pasar (Surbakti, 1998:9). Kadar negara yang tinggi ditandai oleh adanya sifat otonom, kohesif dan berkemampuan memerintah yang tinggi. Adapun negara berkadar rendah ditandai oleh tidak adanya sifat otonom dan kohesi yang lemah

serta kemampuan untuk memerintah juga rendah . Operasionalisasi konsep ini akan terlihat ketika pejabat pemerintah dipandang sebagai penentu kepentingan dan kekuasaan yang melaksanakan fungsi lembaga negara.

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kekuasaan negara, juga mencakup adanya kepatuhan dan tindakan dari pihak yang dikuasai. Oleh karena itu besarnya kekuasaan yang tercakup dalam suatu hubungan akan di ukur dengan membandingkan antara yang mau menerima dengan yang tidak mau menerima isyarat kekuasaan atau reputasi maksimal yang dapat diperoleh (Martin,1993:94). Perbedaan ini juga dilihat dari isyarat yang dimilikinya untuk memberikan sanksi atau menghukum bagi kelompok yang dikuasainya. Sumberdaya ini termasuk inovasi, yang kemampuannya diukur dari tingkat adopsinya. Adapun tingkat adopsi di ukur dari rasio antara luas areal inovasi baru dengan luas areal inovasi yang berlaku sebelumnya.

Konseptualisasi yang mengidentifikasi negara berada di atas masyarakat atau pasar, instrumen yang dipakai adalah hak otonomi negara dan monopoli

kewenangan untuk memaksa tetapi mendapat legitimasi dari masyarakat. Ini berarti negara punya kewajiban untuk mengatur berbagai kepentingan yang berbeda di masyarakat.

Konseptualisasi yang dipakai bahwa pasar bersifat independen adalah jika pengusaha sebagai pelaksana pasar mampu menentukan dan memilih inovasi sesuai kepentingan pengusaha yang berorientasi pada profit. Dasar yang dipakai pengusaha adalah, inovasi yang dipilih selalu berorientasi kepada peluang pasar yang paling menguntungkan tanpa adanya ketergantungan kepada pemerintah. Seandainya pemerintah melakukan intervensi hal tersebut hanya terbatas pada regulasi pengaturan kebijaksanaan yang bersifat umum.

Ukuran lain yang dipakai adalah, jika petani sebagai mitra pengusaha mau menerima inovasi yang ditawarkan. Termasuk didalamnya tunduk terhadap peraturan yang dibuat perusahaan baik yang dibuat seperti yang tertera dalam surat perjanjian maupun tanpa surat perjanjian. Jika perjanjian ini telah disepakati berarti petani telah tunduk terhadap kepentingan pengusaha yang selanjutnya petani akan

selalu tergantung kepada kepentingan pengusaha. Dengan demikian petani di dominasi pengusaha jika pengusaha mampu menciptakan ketergantungan bagi petani. Ketergantungan dimaksud selain macam inovasi juga waktu kapan inovasi tersebut diusahakan, dimana harus ditanam, berapa produk yang harus dihasilkan, bagaimana cara pembagian hasilnya, kemana harus menjualnya dan berapa harganya.

Kriteria bahwa petani bersifat independen jika petani dengan kesadaran dan keyakinannya secara sendiri mampu memutuskan secara mandiri inovasi yang dipilih, tanpa adanya ketergantungan kepada pengusaha ataupun paksaan dari pemerintah. Ini tidak berarti inovasi yang digunakan petani harus berbeda dengan inovasi yang ditawarkan pengusaha. Bisa saja ada kesepahaman antara inovasi yang dipilih petani dengan inovasi yang diminati pengusaha, karena peluang pasar memang memberikan harapan. Hanya saja jika petani mampu melakukan tawar-menawar (*bargaining-position*) hal ini telah dikategorikan sebagai mampu untuk independen.

3.6 Metoda Analisis

Analisis yang didasarkan pendekatan perspektif liberal di fokuskan pada posisi negara, posisi pasar, posisi masyarakat dan interdependensi dari ketiga posisi.

Asumsi yang dipakai pada sisi negara adalah, walaupun negara mempunyai otonomi relatif yang lebih besar namun untuk mengintervensi dilakukan secara terbatas dan hanya jika diperlukan masyarakat. Negara bukan sekedar melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat serta penengah konflik sosial, tetapi negara juga independen dan aktif mendorong dinamika masyarakat. Dalam kaitan ini pendekatan institusional-struktural dipakai untuk menjelaskan fenomena. Perubahan pendekatan dari yang berpusat pada negara menjadi berpusat pada kekuatan pasar ini dapat mencerminkan terjadinya perubahan dari pendekatan konservatif menjadi pendekatan liberal.

Pendekatan dari sisi kekuatan masyarakat menunjukkan wujud liberalisasi, misalnya melalui pembentukan kelompok masyarakat. Analisis di tekankan pada hak individual masyarakat sebagai

variabel independen. Asumsinya, masyarakat mampu ber-interaksi dengan negara maupun pasar serta dapat memilih inovasi sesuai kepentingannya (Fleur, 1995:5). Oleh karenanya, masyarakat pada dasarnya dapat mengubah diri walaupun berada pada lingkungan masyarakat lokal yang tradisional. Mampu memperhatikan kepentingan dirinya secara rasional dan efisien guna memenuhi kebutuhannya.

Dengan munculnya mazhab liberal maka pasar juga dijadikan sebagai variabel independen, sedangkan fungsi negara tidak lagi dominan. Asumsi yang dipakai dalam pendekatan terhadap posisi pasar ini adalah adanya dorongan intervensi pasar (lokal maupun global) ke dalam netralitas negara sejak akhir tahun 80-an. Keberadaan pengusaha ini, dapat pula merupakan bagian dari *civil society* yang dianggap berperan secara signifikan. Penekanan pada peran pengusaha ini, menunjukkan terjadinya pergeseran analisis yang semula terfokus pada masyarakat yang kulturalis (era 60-an) ke faktor elite masyarakat. Perilaku variabel pengusaha sebagai elite masyarakat menjadi variabel independen diasumsikan sebagai faktor pendorong

yang signifikan dalam menjelaskan transisi ke liberalisasi yang dipersepsikan sebagai bentuk kapitalisme. Asumsi bahwa pasar (pengusaha) mempunyai kemampuan memobilisasi dukungan, tidak hanya berasal dari lingkungan domestik belaka tetapi juga dari dukungan global. Oleh karenanya, pasar (pengusaha) sebagai bagian dari *civil society* dianalisis dalam pengamatan.

Penekanan pada peran serta masyarakat menimbulkan kesamaan dengan analisis difusi yang menekankan pada pendekatan pengguna inovasi. Faktor struktural yang sebelumnya menjadi pusat kajian bergeser ke faktor elite masyarakat (pengusaha). Perubahan ini menjadi variabel yang signifikan dalam menjelaskan transisi ke liberalisasi untuk menumbangkan otoritas sumber inovasi. Dengan menggunakan argumen ini pada dasarnya terdapat paralelitas dan kesamaan dengan argumen aliran kulturalis yang sebelumnya pernah dikritik.

Klasifikasi antara negara (pejabat dan pegawai pemerintah), pasar (pengusaha) dan masyarakat lokal (petani) tidak ditujukan untuk mempertajam dikotomi, tetapi hanya sebagai model untuk alat

analisis. Dengan model ini, dari ketiga variabel tersebut nantinya akan terjadi hubungan inter-dependensi, saling memberdayakan dan saling memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan bersama.

Posisi pengusaha ketika berhadapan dengan pemerintah maupun petani tidak dianggap sebagai dua dikotomi yang antagonis yang saling mematikan, tetapi diasumsikan sebagai *sparing partner* untuk meningkatkan kekuatan diantara keduanya. Oleh karenanya pengertian struktur disini tidak diartikan sebagai lawan yang bertentangan, tetapi merupakan oposisi yang loyal (*loyal-opposition*). Jika seandainya baik pemerintah, pasar maupun masyarakat tidak independen dalam tindakannya, yang diuraikan nantinya adalah mengapa hal itu terjadi. Ini tidak dimaksudkan untuk menafikan struktur ataupun melegitimasi serta mentolerir sikap struktur yang otoriter responsif.

Analisis dalam perspektif liberal ini menekankan pada independensi dan inter-dependensi serta sinergi dari hubungan yang terjalin antara negara dan pasar sebagai sumber inovasi dan masyarakat

lokal sebagai pengguna inovasi. Analisis independensi menempatkan *power relationship* sebagai alat analisis sedangkan interdependensi dan sinergi tidak menggunakan *power relationship* sebagai alat analisis.

Untuk mendukung analisis deskriptif, juga dipergunakan analisis statistik dengan memanfaatkan microstat. Rumusan yang dipakai untuk menguji hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara karakteristik petani dengan adopsi inovasi yang diperoleh, rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$r_{xi.yi} = \frac{\sum xi.yi}{\sqrt{(\sum xi^2)} \cdot \sqrt{(\sum yi^2)}}$$

(Mustafa, 1990:129)

dimana $xi = X - \bar{X}_i$

$yi = Y - \bar{Y}_i$

$$\sum xi^2 = \sum xi^2 - \frac{(\sum xi)^2}{n}$$

$$\sum yi^2 = \sum yi^2 - \frac{(\sum yi)^2}{n}$$

$$\sum xi.yi = \sum xi.yi - \frac{(\sum xi)(\sum yi)}{n}$$

Kaidah penentuan keputusan :

Jika : (a) r hitung $>$ critical value (2-tail,0.05)

berarti terdapat korelasi signifikan

(b) r hitung $<$ critical value (2-tail,0.05)

berarti korelasi tidak signifikan

2. Untuk menguji perbedaan rata-rata adopsi antara kerjasama petani-pengusaha-pemerintah dan kerjasama petani-pengusaha model komputasinya adalah:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/n}}$$

(Mustafa, 1990:92)

X_1 adalah tingkat adopsi petani yang melakukan kerjasama dengan pengusaha dan pemerintah

X_2 adalah tingkat adopsi petani yang melakukan kerjasama dengan pengusaha.

σ_i^2 = varian

Kaidah penentuan keputusan :

Jika Z hitung $>$ Z tabel \rightarrow kerjasama pemerintah, pengusaha dan petani signifikan.

Z hitung $<$ Z tabel \rightarrow kerjasama pemerintah.

Adopsi diukur dari rasio antara luas areal yang menggunakan inovasi baru dengan luas areal yang menggunakan inovasi sebelumnya.

BAB 4

BAB 4

INOVASI PERTANIAN DALAM SEJARAH

Bab ini akan mendeskripsikan secara ringkas perkembangan difusi inovasi pertanian semenjak zaman kolonial, zaman kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Dengan deskripsi ini diharapkan dapat memberi petunjuk, bahwa dalam difusi inovasi memerlukan proses jangka waktu.

4.1 Perkembangan Inovasi Pertanian

Pada zaman kolonial, kebijakan tanam paksa atau *Cultuurstelsel* (1830-1870) telah berhasil mendongkrak pendapatan Belanda. Antara tahun 1830 hingga 1860, sekitar 20 % pendapatan Belanda diperoleh dari kebijaksanaan tanam paksa ini (Forbes, 1985:10). Sebagai reaksi penduduk pribumi terhadap pelaksanaan tanam paksa yang selanjutnya melahirkan terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah di tanah air, maka pemerintah kolonial mencetuskan lahirnya *Agraris Wet* pada tahun 1870.



Mulai saat itu inovasi pertanian terus berkembang dengan ditandai liberalisme perusahaan perkebunan oleh perusahaan swasta Belanda (1870-1910).

Untuk memperkuat pemerintahan kolonial, pengusaha swasta (Belanda) diberi hak *erpach* guna mengelola tanah pertanian selama 40 tahun. Perusahaan perkebunan yang khusus mengelola komoditas yang laku di pasar internasional (kopi dan teh di dataran tinggi dan tembakau serta tebu di dataran rendah) mulai tumbuh. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan komersial oleh manajer kolonial. Di dataran tinggi kopi dan teh merupakan komoditas ekspor yang diprioritaskan. Hanya saja kendalanya terbentur kurangnya tenaga kerja. Sebagai jawabannya imigran dari dataran rendah mulai merambah ke dataran tinggi. Dalam sekejap perusahaan perkebunan menjadi meluas. Transformasi tenaga kerja ini menyebabkan rapuhnya lingkungan. Di dukung oleh meluasnya penyakit daun (1930), kebun-kebun mulai rusak dan produksi kopi jatuh. Sebagai akibatnya erosi tidak dapat dihindari.

Untuk menunjang keberlanjutan inovasi khususnya komoditas tebu, pada tahun 1887 pemerintah kolonial mendirikan *Proof Station of Java* (sekarang P3GI) di Pasuruan. Balai ini merupakan Balai Penelitian Gula ke 2 di dunia setelah Havana. Perkembangannya memang menakjubkan karena Indonesia menjadi pengeksport gula terbesar di dunia. Penyakit *steam borer* dan sereh pada dekade 30-an sempat merusakkan pertanaman tebu. Namun berkat ditemukannya varietas POJ-41 dari lembaga penelitian di Pasuruan, masalah tersebut bisa teratasi.

Dampak kebijaksanaan yang sedemikian, inovasi pertanian terpecah menjadi dua pola yaitu: pola pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh petani tradisional dan pola perkebunan yang komersial dilakukan oleh pengusaha swasta Belanda.

Kedatangan Jepang dengan tanam paksa tahap II, melahirkan inspirasi usaha perbaikan cara bercocok tanam khususnya untuk tanaman pangan, yang saat itu dikenal dengan sebutan *verbeterde culture methode*. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, upaya yang dilakukan tidak hanya dengan penggunaan varietas unggul. Perkebunan yang tidak produktif

juga di rusak dan di babat yang kemudian ditanami dengan tanaman pangan.

Ketika Indonesia merdeka, struktur kemasyarakatan agraris dan perusahaan kolonial masih bertahan. Dengan diakuinya kekuasaan pemerintah secara politis, mulai tahun 1948 sampai dengan tahun 1950 pemerintah mengadakan program *Plan Kasimo* yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang pada itu keadaannya memang belum menggembirakan. Karena pemerintah masih disibukkan oleh revolusi fisik berakibat program yang direncanakan terbengkalai. Namun demikian, walaupun *Plan Kasimo* ini belum sempat dilaksanakan dengan baik, rencana ini telah memberikan sumbangan pemikiran pada perencanaan pembangunan berikutnya, khususnya setelah tahun 1949 ketika Indonesia secara politik mendapatkan pengakuan kedaulatan sebagai negara Republik Indonesia.

Tahun 1950 rencana baru tersebut kemudian dinamakan *Rencana Wicaksono*. Tahun berikutnya, terdapat ide untuk menggabungkan ide *Plan Kasimo* dengan *Rencana Wicaksono* yang kemudian dinamakan

Rencana Kesejahteraan Istimewa. Rencana ini ditetapkan pertama kali pada tahun 1950 dan direncanakan berakhir pada tahun 1955. Kemudian tahap kedua direncanakan tahun 1955-1960.

Program-program yang diupayakan pada perencanaan tersebut antara lain: memperbanyak produksi benih unggul, khususnya padi dan palawija tertentu, memperluas dan memperbanyak jumlah Balai Benih dan Kebun Bibit sebagai sumber inovasi, memperluas dan memperbaiki jaringan pengairan pedesaan, meningkatkan kualitas inovasi melalui penggunaan pupuk terutama pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman padi serta meningkatkan penggunaan pupuk untuk tanaman yang lain, meningkatkan pemberantasan hama dan penyakit serta memperlancar penyaluran obat-obatan dan alat-alat pertanian, meningkatkan pencegahan erosi, meningkatkan pendidikan masyarakat pedesaan dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Pedesaan (BPMD) di tiap kecamatan. Balai ini dimaksudkan sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di samping fungsi yang lain seperti kebun percontohan dan sarana penyuluhan guna memberdayakan

masyarakat, khususnya di pedesaan. Pada akhirnya di upayakan adanya intensifikasi pemakaian tanah kering dengan realisasi pada tahap awal mengadakan Kebun Percobaan Perusahaan Tanah Kering (KPPTK) di tiap kabupaten. Selanjutnya *Rencana Kesejahteraan Istimewa* ini juga mengalami perubahan dan diganti serta disesuaikan dengan perkembangan di sektor yang lain.

Negara yang semula hanya memiliki kekuatan politis ini, baru mempunyai kekuatan secara ekonomis setelah terjadinya nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1957. Perusahaan perkebunan kolonial (konsesi asing), kemudian dikuasai dan dikelola oleh negara menjadi perusahaan negara. Modal, keuntungan dan kerugian perusahaan pada saat itu dihubungkan dengan "keuangan negara" (yang berlainan dengan bank). Sebagai akibatnya, karena kurang profesionalnya manajemen pengelolaan, maka keberadaan perusahaan perkebunan tetap menjadi beban keuangan negara. Sebagai upaya untuk mengatasinya maka pada tahun-tahun berikutnya, beberapa perusahaan perkebunan diserahkan kembali kepada pengelola semula (pemegang konsesi). Sejak

saat itu, kerugian keuangan negara berkurang.

Realisasi program kerjasama antara pemerintah dan pengusaha mulai berkembang menjelang dekade 60-an. Tahun 1959, kerjasama pemerintah dengan swasta dilakukan secara besar-besaran melalui program *Padi Sentra* dimana petani padi khususnya, mendapat subsidi pupuk. Namun yang terjadi, petani belum siap menerimanya sehingga subsidi pupuk yang seharusnya digunakan untuk komoditas padi akhirnya dialihkan kepada komoditas yang lain sehingga akhirnya *Padi Sentra* di bubarkan.

Pada tahun 1960, *Rencana Kesejahteraan Istimewa* digantikan oleh program perencanaan pembangunan pertanian yang bersifat massal untuk komoditas yang strategis. Setelah tahun 1960, diperkenalkan program yang disebut *Gerakan Swasembada Beras (SSB)*. Karena saat itu sistem perekonomian mengikuti pola " *Ekonomi Terpimpin* " yang sentralistik dimana segala sesuatunya dibawah pengaturan negara, maka berakibat pola SSB yang dipergunakan juga mengikuti pola tersebut. Pola SSB kemudian dilaksanakan melalui gerakan terpimpin yang dikenal dengan istilah *Komando Operasi*

Gerakan Makmur atau disingkat KOGM. Program KOGM ini berjalan sampai tahun 1963. Karena program ini juga dilaksanakan pada komoditas selain beras maka namanya berubah menjadi program *Swasembada Bahan Makanan* atau SSBM.

Penyempurnaan dari program SSBM, kemudian direalisasikan menjadi pilot proyek yang disebut *Demonstrasi Massal Swasembada Bahan Makanan* (Demas SSBM). Pada awalnya, pada tahun 1962 perhatian terfokus pada kerjasama langsung antara pemerintah dan petani melalui sistim bimbingan massal (Bimas). Agar program pola tersebut terealisasi, pemerintah menyediakan tenaga penyuluh untuk membimbing petani guna meningkatkan produktivitas petani. Pemerintah membantu menyediakan kredit biaya sarana produksi seperti bibit, pupuk dan obat-obatan. Di samping itu juga, pemerintah menyediakan bantuan biaya hidup. Oleh karena peserta program Bimas semakin lama semakin meningkat, maka dana yang diperlukan untuk program tersebut juga semakin besar sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam pendanaannya. Selanjutnya, pemerintah membuat kebijaksanaan baru dimana petani yang sudah mandiri baik dalam

keterampilan maupun dalam permodalannya, tidak dibantu lagi dalam penyediaan sarana produksinya. Petani demikian kemudian disebut petani intensifikasi massal (Inmas). Begitulah selanjutnya, dalam perjalannya istilah Bimas terus mengalami perubahan dan penyesuaian sehingga ada istilah Bimas Berdikari dimana segala modal yang diperlukan untuk proyek tersebut memperoleh dana sepenuhnya dari pemerintah. Kemudian, juga ada istilah Bimas Biasa dan Bimas baru.

Menjelang dekade 70-an, terjadi pola kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta (asing) dalam penyediaan pupuk dan obat-obatan, sehingga namanya berganti menjadi Bimas Hoegst. Ketika perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah semakin banyak, maka namanya berubah menjadi Bimas Gotongroyong. Dalam pola ini, walaupun perusahaan melakukan kerjasama dengan pemerintah, tetapi secara langsung tidak melakukan proses produksi serta juga tidak melakukan kontak langsung dengan petani. Hubungan secara langsung hanya terjadi antara pemerintah dan petani.

Berdasar dari pengalaman Bimas sebelumnya, maka pada awal tahun 1970 lahir gagasan perlunya kelengkapan Bimas. Pola ini diberi nama Bimas Nasional Yang Disempurnakan (BND). Pemerintah menyediakan unit pemasaran melalui Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) pada tahun 1975. Saat itu peran pemerintah sangat dominan. Petani diwajibkan menanam padi maupun jagung varietas unggul. Petani tebu juga diwajibkan melakukan intensifikasi dalam komoditas tebu yang kemudian dikenal dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui perangkat Undang Undang No.9/1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi. Salah satu tujuan dari undang-undang yang dimaksud, adalah untuk meningkatkan produktivitas gula nasional, menjaga kontinuitas pasokan tebu bagi pabrik gula serta mengubah pengelolaan komoditas dari pengelolaan oleh pabrik menjadi dikelola sendiri oleh petani.

Namun demikian, secara bertahap lambat laun peran dan dominasi pemerintah semakin menurun. Perhatian berikutnya terfokus pada kerjasama kelompok dan mengaktualisasikan petani menjadi

peserta aktif dalam program Bimas. Petani diberdayakan melalui kerjasama kelompok tani, kelompok pendengar pembaca dan pirsawan (Kelompok-pir). Asosiasi petani juga dikembangkan melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Organisasi ini berorientasi untuk menampung kepentingan petani dan menjadi penyambung suara kepada pemerintah maupun kepada lembaga legislatif. Adapun pemerintah secara kontinyu terus memberikan fasilitas dalam program Insus (Intensifikasi Khusus) pada tahun 1985 dan Supra Insus pada awal tahun 1990.

Di samping program pengembangan komoditas tanaman pangan, masih terdapat program lain khususnya di bidang komoditas non-pangan (perkebunan, perikanan dan peternakan). Pada program ini pihak perusahaan aktif melakukan kerjasama dengan petani. Adapun pemerintah, hanya berperan sebagai fasilitator yang kemudian dikenal dengan nama program PIR (Perusahaan Inti Rakyat) atau NES (*Nucleus Estate Smallholder*).

Pada dekade 90-an dengan munculnya liberalisasi ekonomi sebagai lawan dari pembangunan

yang dipimpin oleh negara, maka pembangunan di bidang pertanian dimotori oleh agribisnis. Agroindustri diupayakan menopang perkembangan produksi pertanian. Produk pertanian tidak hanya sampai pada produksi bahan mentah tetapi yang ada dapat mengelolanya menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Upaya ini secara sinambung diharapkan ikut memainkan peran penting dan dinamis dalam perekonomian nasional dan internasional serta perubahan ekonomi bangsa-bangsa yang besar.

Liberalisasi pertanian ini diwujudkan dengan lahirnya UU No.12/1992. Dalam undang-undang itu dikatakan bahwa petani diberi kebebasan untuk mengusahakan dan memilih komoditas tanpa harus diatur oleh pemerintah. Apabila karena sesuatu hal, ketentuan tersebut tidak terwujud karena adanya ketentuan dari pemerintah, maka pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.

Namun demikian, wujud sosialisasi undang-undang nomor 12/1992 tersebut belum banyak diketahui petani. Salah satu penyebabnya, adalah terjadinya gesekan antar berbagai kepentingan. Puncaknya

adalah lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1997, dimana TRI menurut undang-undang ini masih tetap diatur oleh pemerintah. Namun karena bertentangan dengan undang-undang nomor 12/1992, maka melalui undang-undang nomor 5/1998 bulan Januari 1998, undang-undang nomor 5/1997 terpaksa dicabut kembali.

4.2 Konteks Zaman dan Perubahan Perspektif

Abstraksi perkembangan difusi inovasi di Indonesia dapat dibuat dalam 3 periode perkembangan.

Pertama, pada zaman sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda lebih menekankan kekuatan struktural pasar dalam pengendalian inovasi. Adapun masyarakat, sama sekali tidak diikutsertakan dan bahkan hampir tidak mempunyai peran sama sekali. Difusi inovasi pertanian ditujukan untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial, dengan memberi prioritas pada komoditas tanaman perkebunan yang laku di pasar Eropah.

Menjelang kemerdekaan, Jepang mulai mempromosikan tanaman pangan. Adanya perubahan komoditas ini oleh karena Jepang melihat meningkat-

nya kebutuhan akan komoditas pangan serta meluasnya bahaya kelaparan. Kekuatan pemerintah Jepang sangat dominan untuk melakukan tanam paksa khususnya komoditas tanaman pangan. Masyarakat dipaksa dan terpaksa mendukung program yang diajukan pemerintahan Jepang. Struktur pasar hampir tidak berperan sama sekali karena rusaknya sarana produksi.

Kedua, di awal kemerdekaan peran pemerintah mulai menonjol dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan perusahaan swasta asing (kolonial) pada akhir dekade 50-an mulai di nasionalisir menjadi perusahaan negara. Pada masa pasca kemerdekaan, kekuatan negara semakin dominan selama dekade 60-an hingga dekade 70-an. Difusi inovasi pertanian mulai terprogram. Secara intensif difusi inovasi dilakukan setelah adanya program Bimas pada tahun 1962/1963 untuk pengembangan tanaman pangan. Dalam program tersebut, pemerintah di posisikan sebagai pengendali utama. Namun, semenjak awal dekade 80-an dominasi pemerintah untuk komoditas tertentu mulai berkurang sedangkan struktur pasar mulai ditonjolkan.

Ketiga, sejak pertengahan tahun 1980-an pemerintah semakin lugas memilih perspektif liberal, walaupun tidak pernah dinyatakan secara formal. Secara sederhana terlihat dari strategi kebijaksanaannya yang anti Keynesianisme (dengan mengurangi peran pemerintah dalam proses produksi dan investasi), pro moneteris (paket kebijaksanaan moneter). Ekonomi Indonesia diintegrasikan kedalam kapitalis internasional dalam bentuk liberalisasi perdagangan luar negeri dan industrialisasi yang berorientasi ekspor. Menggalakkan sektor swasta dengan mentolerir konglomerat melakukan konsentrasi dan diversifikasi, yang kesemuanya di dasarkan pada aliansi ideologi politik yang bersifat neo-konservatif (Mas'ood, 1994:102). Sejak dekade 90-an, keterbukaan terhadap inovasi mulai nampak. Pengusaha maupun petani di ikutsertakan dalam program difusi inovasi di berbagai bidang pertanian dalam arti yang luas. Bahkan saat ini negara dan pasar dapat berkompetisi untuk melakukan difusi inovasi kepada masyarakat.

Runtun perkembangan inovasi ini sengaja di paparkan guna menghindari adanya kealpaan

masyarakat tentang "masa silam" yang pernah menyesatkan dalam memandang masyarakat Indonesia. Seorang ahli kolonial yang hanya mengenal masyarakat Indonesia secara simtomatis saja, telah menelorkan pandangannya yang menyesatkan di tahun 1949. Ia menyangsikan kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya menjadi perekonomian yang dinamis. Dalam pandangan Boeke (1983:26), petani-petani Indonesia berwatak statis, hidup dalam perekonomian "pra kapitalis" yang serasi dengan statisnya masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya, petani Indonesia akan sulit untuk merubah diri ke alam dan sistem perekonomian kapitalis yang bersifat dinamis. Oleh karena masyarakat desa sama sekali tidak berkemampuan untuk mengadaptasikan, menerima atau merubah dirinya sendiri. Sistem perekonomian ini hanya akan merusakkan seluruh sendi kehidupan masyarakat desa.

Pendapat ini kemudian dibantah oleh Geertz (1974:155). Dikatakannya, bahwa statisnya masyarakat Jawa itu dapat disebabkan oleh adanya resultante dari dua hal yaitu: karena pengaruh pola ekologi sawah dan karena adanya kebijaksanaan

pemerintah kolonial. Pengaruh ekologi sawah terkait dengan daya tampung untuk mendukung kepadatan penduduk sehingga berakibat negatif terhadap produktivitas, penggunaan tenaga kerja dan efisiensi investasi. Adapun pengaruh kebijaksanaan pemerintah kolonial saat itu, adalah menciptakan "industrialisasi pertanian" yang dihimpitkan (*super-imposed*) di atas pola ekologi sawah. Akibatnya, tenaga kerja di tanah Jawa "yang kelebihan", melalui pemimpin masyarakat Jawa dan disesuaikan dengan suasana budaya yang berlaku, telah dipergunakan serta di letakkan di bawah kepentingan pengelolaan kolonial untuk menghasilkan komoditas yang laku di pasaran Eropah, tanpa membawa masyarakat Jawa masuk ke dalam dunia komersial. Namun demikian kata Geertz (1974:154), kehadiran pemerintah jajahan kolonial tetap menjadi parameter yang penting, karena hal itu berarti pemerintah kolonial telah mendorong tumbuhnya potensi yang ada pada ekonomi Jawa yang tradisional.

Potensi tenaga kerja dan potensi produktivitas sawah tidak dipergunakan untuk mengembangkan Jawa (atau Indonesia), melainkan demi kepentingan negeri

Belanda. Dengan demikian maka, kebijaksanaan pemerintah kolonial telah dapat mempengaruhi dan merubah bentuk masyarakat yang secara implisit mendorong menuju tercapainya masyarakat yang berorientasi pada industri pertanian modern.

BAB 5

BAB 5

DIFUSI INOVASI DI TINGKAT LOKAL

Pada bagian ini di deskripsikan difusi inovasi yang terjadi di tingkat lokal. Fenomena empirik ini dibagi dalam 2 sub-kategori yaitu: kasus yang pertama dideskripsikan difusi inovasi yang terjadi di Tulungrejo. Adapun pada kasus kedua, di deskripsikan difusi inovasi yang terjadi di Sumber Pucung. Keduanya berada di wilayah kabupaten Malang.

5.1 Proses Difusi Inovasi di Tulung Rejo

5.1.1 Potensi Wilayah untuk Komoditas Hortikultura

Secara geografis Tulungrejo merupakan daerah pegunungan dataran tinggi yang terletak di wilayah sumber Brantas. Lokasinya berada pada jarak 30 Km dari Malang atau 12 Km dari Batu menuju arah barat laut pada ketinggian 1200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Permukaan tanah bergelombang sampai sangat curam. Kepadatan penduduk termasuk dalam

kategori sedang dengan kepadatan penduduk rata-rata 873 penduduk tiap 1 Km². Namun demikian jumlah pemukiman ini masih relatif lebih jarang jika dibandingkan dengan penduduk di dataran rendah. Dampak dari kepadatan penduduk yang relatif jarang ini maka interaksi antar penduduk juga menjadi relatif kecil. Namun demikian jika dibandingkan dengan dataran tinggi disekitarnya, perkembangannya jauh lebih maju baik ditinjau dari keadaan perekonomian maupun adanya ketersediaan fasilitas umum.

Menurut sejarahnya, desa Tulungrejo ini pada tahun 1935 masih tertutup hutan. Pada awalnya tahun 1939 Belanda mulai membuka hutan untuk perkebunan teh. Kemudian ketika Jepang datang di tahun 1942 kebun-kebun dirusaknya. Karena adanya kebutuhan pangan yang mendesak Jepang kemudian menggantinya dengan komoditas pangan terutama jagung yang umumnya berumur panjang (sampai 5 bulan). Mulai saat itulah pemukiman penduduk dimulai.

Setelah kemerdekaan (1945-1947), disamping tanaman jagung tanaman kentang dan kobis mulai diperkenalkan kepada petani. Tahun 1961 pola

pemilikan tanah juga mengalami perubahan dimana setiap kepala keluarga dari 66 KK penduduk menerima tanah seluas 2 hektar. Ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 56 tahun 1960. Akhir dekade 60-an pemerintah melakukan kebijaksanaan dengan membuat relokasi pemukiman yang kemudian lebih dikenal dengan nama Transmigrasi Lokal (Translok) seluas 180.20 Ha bagi keluarga ABRI yang pensiun maupun yang masih aktif. Dari 101,8 Ha tanah diantaranya ditempati pensiunan AURI sebanyak 180 KK dan 78,4 Ha di tempati 69 KK dari Korem. Di bagian atas ada juga tanah (14,2 Ha) yang dipakai untuk kebun percobaan. Dengan perkembangan penduduk maka intensitas komoditas kentang dan kobis semakin meluas dan bahkan mulai saat itu persewaan tanah mulai timbul.

Tahun 1981 komoditas hortikultura yang lain juga semakin meluas bahkan juga rumput gajah untuk keperluan pakan ternak sudah mulai diintrodusir petani. Penyuluh konservasi tanah ikut andil. Inovasi teras bangku secara efektif dapat mengurangi aliran air (*run-of*) sehingga mampu mengurangi erosi tanah. Rumput gajah selain dapat

dipakai untuk konservasi tanah juga dapat memenuhi permintaan pakan ternak yang semakin meningkat. Adanya komoditas rumput gajah juga menjadi komoditas alternatif disamping komoditas hortikultura.

Sebelum tahun 1997, luas penanaman kentang bisa mencapai 722 Ha. Oleh karenanya disebut komoditas primadona. Dalam pertimbangan petani komoditas ini mempunyai nilai ekonomis tinggi serta dapat tumbuh dua kali setahun. Adapun bawang putih dijadikan sebagai komoditas prioritas kedua dengan luas penanaman 499 Ha, wortel (127 Ha), apel (299Ha). Komoditas sayuran lain yang dianggap sebagai pelengkap adalah asparagus, buncis, kubis dan leek (bawang prei).

Dalam pengelolaannya, komoditas kentang tersebut tidak diusahakan secara mandiri oleh masyarakat. Pengusahaannya justru dilakukan oleh petani kota sebagai pemodal yang berasal dari Malang dan Surabaya. Petani justru menjadi buruh di ladangnya sendiri karena tanahnya disewakan kepada pengusaha. Akibat situasi yang sedemikian, petani lokal menjadi kurang berminat lagi untuk menanam

komoditas kentang, di samping masih adanya faktor yang lain yaitu ketidakmampuan petani dalam mengatur harga pasar, padahal di sisi yang lain petani sangat membutuhkan uang tunai. Situasi yang kurang menguntungkan bagi petani ini lebih mendorong untuk mengalihkannya pada komoditas peternakan sapi perah.

Perkembangan peternakan sapi perah terus meningkat berkat tersedianya pakan ternak. Kotoran yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk pelengkap disamping pupuk kimia untuk pertumbuhan kentang yang sebelumnya di datangkan dari daerah lain. Akibatnya usaha peternakan dijadikan komoditas pelengkap dan sampingan bagi kegiatan keluarga.

Untuk mendorong petani mengembangkan peternakan, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk Banpres peternakan yang selanjutnya dapat melahirkan koperasi. Pemasaran susu dilakukan oleh KUD dengan ketetapan harga yang juga ditentukan pemerintah. Adapun petani tidak diizinkan untuk memasarkan hasilnya sendiri secara bebas dan menentukan harga produk sesuai harapannya sendiri. Namun kemudian terdapat anggapan dari petani adanya

penggunaan pestisida yang tinggi untuk kentang dan sayuran telah mempengaruhi dan memberikan efek yang negatif bagi perkembangan ternak.

Atas dasar pengalaman sebelumnya, dari kalangan petani masih terdapat keyakinan bahwa komoditas kentang masih tetap lebih menguntungkan daripada komoditas yang lain. Akibatnya, dengan memanfaatkan kredit peternakan dari pemerintah secara diam-diam petani mengalihkannya kembali menjadi mengusahakan komoditas kentang tanpa melakukan kerjasama dengan pengusaha. Karena situasi yang sedemikian ini maka perkembangan peternakan menjadi terhambat sedangkan pengusaha komoditas kentang berkembang kembali. Fenomena ini memberi petunjuk bahwa dilihat dari kepentingannya, petani masih tertarik untuk mengusahakan komoditas kentang daripada peternakan.

Tahun 1997 tanaman kentang mulai menurun dan tanaman wortel semakin meluas. Sejak tahun 1997 mulai terjadi pergeseran dimana areal komoditas kentang mulai terjadi penurunan. Pada tahun 1999 areal tanaman kentang hanya tinggal 275 Ha. Sebaliknya, areal komoditas wortel terjadi peningkatan

sehingga areal penanamannya mencapai hingga 622 Ha.

Disamping adanya perkembangan komoditas pertanian, perkembangan yang lainpun juga mengikutinya. Diantaranya pengembangan fasilitas jalan (perluasan dan peningkatan kualitas jalan). Peningkatan sarana transportasi dan komunikasi juga telah banyak mendapat perhatian dari pemerintah dalam pembangunannya. Akibat situasi yang demikian ini maka mobilitas masyarakat dapat menjadi lebih tinggi dan lebih terbuka untuk mengakses ke pasar, baik di pasar tingkat desa, kecamatan maupun ke pasar tingkat kabupaten.

Kondisi iklim dan cuaca ikut mewarnai kondisi dan aktivitas petani. Salah satu konsekwensi dari temperatur yang dingin, petani memerlukan tungku pemanas untuk dipakai sehari-hari disamping untuk keperluan memasak di dapur. Permintaan kayu bakar semakin meningkat. Umumnya kayu bakar diperoleh dari hutan terdekat disekitar desa. Di tiap-tiap keluarga diperlukan 1 pikul kayu untuk 3 sampai 4 hari. Jika hutan disekitar desa tidak mencukupi kayu juga diambilkan dari hutan di luar desa.

Walaupun situasi masyarakat dataran tinggi yang pada umumnya bersifat tertutup, namun terdapat pengecualian karena dalam realitanya situasi masyarakat di desa Tulungrejo tetap terbuka bagai layaknya petani di dataran rendah. Dengan semakin tingginya aktivitas pertanian sedangkan ketersediaan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan jumlahnya terbatas, acapkali untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang terus meningkat, kebutuhan tenaga kerja dipenuhi dengan cara mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain. Umumnya berasal dari kecamatan Karang Ploso sebagai tetangga terdekat yang lokasinya lebih rendah. Kedatangan tenaga kerja wanita lebih disukai daripada tenaga kerja laki-laki. Menurut persepsi masyarakat setempat, tenaga kerja wanita ini lebih mudah diatur, lebih terampil dan rajin.

Penguasaan tanah terbagi dalam 2 golongan. Tanah negara dipakai untuk keperluan hutan lindung dan kebun percobaan. Tanah privat dipakai untuk pemukiman dan perladangan. Petani yang menguasai perladangan ini masih dapat dipilah menjadi 2 golongan yaitu 25 % bermukim di desa dan 75 % dari

orang yang menguasai tanah bertempat tinggal di tempat lain (luar desa).

Jika kemudian penduduk yang tinggal di desa dipilah lagi maka akan nampak petani yang masih tradisional dalam arti inovasi yang mereka lakukan tidak mengalami perubahan, masih tradisional dan tanpa ada pertanda untuk melakukan pembaharuan. Sebagian lagi ada petani yang berpotensi maju atau ingin maju. Inovasinya biasanya menggunakan inovasi yang terbaru dan berorientasi kepada pasar. Penguasaan tanah disamping luas karena pemilikan atau penyewaan, juga ada yang penguasaan tanahnya sempit. Dari cara pengusahaan tanah ada yang dapat mengusahakan modalnya secara mandiri, bekerjasama dengan pemodal lokal maupun dari luar desa dan juga ada yang melakukan kemitraan dengan pengusaha besar.

5.1.2 Pengalaman Pemerintah dalam Difusi Inovasi yang Bervariasi

Hingga saat ini pemerintah telah banyak dan terus melakukan pengujian dan percobaan penggunaan inovasi unggul. Selain untuk tujuan penelitian,

lembaga penelitian juga dapat berfungsi sebagai sarana informasi bagi petani. Namun dengan adanya perkembangan komersialisasi dan liberalisasi pasar, kini petani ada yang sudah dapat berkomunikasi tentang inovasi varietas unggul dari berbagai sumber inovasi baik lokal maupun dari mitra kerja di luar negeri.

Penuturan salah seorang pejabat pemerintah tentang bagaimana berlangsungnya difusi inovasi dapat dilihat dari pengalamannya sebagai berikut:

"Pak DW" (sebagai Pejabat Pemerintah)

Latar pengalaman

Secara formal dia adalah seorang peneliti senior dari Balai Penelitian Hortikultura (Balihorti). Spesialisasinya di bidang komoditas kentang. Sejak dekade 70-an sudah sering mengadakan penelitian karena sebagian kebun Balihorti berada di Tulungrejo. Tulisannya yang banyak dimuat di jurnal-jurnal acapkali dipakai sebagai referensi bagi kalangan peneliti dan praktisi.

Di masyarakat, secara tidak formal (atau mungkin masyarakat memang tidak tahu) seringkali ia

lebih dianggapnya sebagai penyuluh daripada peneliti. Akibatnya banyak petani maupun pengusaha sering bertanya dan berdiskusi dengan dia. Ia menyadari, jika petani mempunyai anggapan yang sedemikian sebetulnya petani tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena realitanya penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang khusus menangani komoditas hortikultura memang tidak ada.

Cara kerja penyuluh pertanian lapangan (PPL)

Secara formal di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Batu, penyuluh (PPL) ini sebetulnya sudah ada. Sayangnya institusi pemerintah (pertanian) ini merekrut PPL yang berasal dari penyuluh tanaman pangan yang kurang menguasai komoditas hortikultura yang sesuai dengan kondisi setempat. Akibat yang terjadi, ketika PPL mengunjungi petani ia bukannya memberikan penyuluhan atau menjadi tempat tumpuan bertanya bagi petani. Yang terjadi justru sebaliknya, PPL inilah yang sering bertanya dan banyak belajar dari petani. Inilah yang berakibat kepercayaan petani pada PPL menjadi berkurang.

Saya katanya, memang bukan petugas penyuluh tetapi sebagai peneliti. Akan tetapi secara diam-

diam sebetulnya juga banyak mengamati bagaimana pengalaman petani setempat. Pengamatan ini kemudian digabungkan dengan profesi yang saya miliki. Inilah yang kemudian, saya dianggapnya lebih banyak tahu dari pada petani.

Penyuluhan konservasi tanah

Pada pertengahan dekade 80-an sudah ada penyuluh (PPL) dari Balai Rehabilitasi Tanah dan Konservasi Lahan (BRLKT). Penyuluh ini tidak terlibat langsung dengan penyuluhan komoditas hortikultura. Secara khusus penyuluh ini terlibat dalam Unit Pengawetan Sumber daya Alam (UPSA). Inovasi yang diberikan kepada petani adalah bagaimana agar kelestarian alam dapat sinambung karena komoditas kentang cenderung mendorong laju erosi yang semakin tinggi.

Macam inovasi yang diberikan diantaranya teknik pembuatan teras bangku agar tanah tidak tererosi. Penanaman calyandra untuk menahan erosi. Penanaman rumput gajah untuk penguat terasering. Perkembangan selanjutnya nampaknya pengembangan rumput gajah ini terdapat keterkaitan dengan meluasnya peternakan sapi perah.

Disamping itu, PPL-UPSA juga memberikan penyuluhan agar petani tidak terus menerus membuka hutan untuk keperluan kayu bakar. Petani sering memberi alasan, perambahan kayu hutan ini hanya dilakukan sebagai bahan untuk pemanas tungku guna mengurangi rasa dingin. Petani kurang menyadari bahwa karena tindakannya lingkungan menjadi rusak. Ini ditunjukkan ketika kayu hutan dirambah, tanahnya kemudian diolah untuk kegiatan perladangan. Sayangnya pada akhir dekade 90-an penyuluh ini sepertinya tidak muncul lagi. Jadi fungsi institusi pemerintah ini hanyalah memberikan dorongan (support) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada petani.

Melihat petani dari kaca mata pejabat pemerintah

Dalam pandangannya, ia juga tertarik pada petani di Tulungrejo yang berorientasi pada bisnis. Petani disini sepertinya seenaknya sendiri, bebas dan tidak mau diatur. Termasuk tidak mau terikat dengan aturan formal pemerintah. Tetapi anehnya, petani yang ada sering bertanya pada pejabat pemerintah sebagai individu. Kemudian aplikasinya petani mengembangkannya sendiri. Mereka juga tidak

fanatis terhadap suatu komoditas tertentu. Yang terpenting bagi petani yang ia lakukan mempunyai nilai ekonomis.

Walaupun demikian komoditas kentang dan kobis tetap dipilih sebagai komoditas primadona. Sebagian yang lain menanam wortel, asparagus, bawang putih dan bawang prei. Terhadap macam varietas, ada tendensi adanya persaingan dan pacuan untuk mencari inovasi yang terbaru. Ukuran yang dipakai selain nilai ekonomis juga produktivitas yang tinggi.

Kendalanya, adakalanya penggunaan inovasi baru ini acapkali dituntut oleh meningkatnya penggunaan input yang lain. Di samping itu resiko terhadap kegagalan panen juga semakin meninggi. Sebagai contoh kentang dan kobis sangat rentan terhadap hama dan penyakit daun. Ini berbeda dengan varietas lokal yang sudah resisten terhadap hama dan penyakit karena sudah adaptif dengan lingkungan yang ada. Biaya produksi juga lebih rendah dan produktivitasnya juga rendah. Varietas ini acapkali menjadi pilihan bagi petani tradisional dan tidak punya modal.

Ini berbalikan dengan petani yang berorientasi bisnis. Bagi yang modalnya terbatas upaya yang dilakukan adalah dengan cara meminjam dari pemilik modal atau mencari mitra bisnis. Adapun petani yang sudah mempunyai modal besar untuk memperluas usahanya dilakukan dengan cara menyewa tanah dari petani yang lain. Bahkan dalam hal pengenalan inovasi, terdapat tokoh tani yang dapat langsung memperoleh bibit kentang dari Cipanas Jawa barat atau langsung dari luar negeri. Kontak dengan luar negeri ini dimulai ketika Balihorti kedatangan konsultan yang kemudian melakukan peninjauan dengan membawa contoh inovasi bibit kentang yang baru. Untuk selanjutnya jika petani membutuhkan bibit dapat berkomunikasi langsung atau melalui perwakilannya yang ada di Jakarta.

Ini memang menjadi tantangan bagi peneliti di institusi pemerintah (Balihorti), karena bisa terjadi inovasi yang diperoleh petani lebih cepat dan lebih baru dari pada inovasi yang dilakukan di Balai Penelitian.

Perkembangan komoditas wortel

Ia tidak banyak berkomentar terhadap terjadinya perubahan dan pergeseran tanaman yang dilakukan petani. Kini sedang terjadi perubahan peta komoditas unggulan. Areal kentang yang sebelum tahun 1995 dapat mencapai 722 Ha setelah tahun 1997 tinggal 275 Ha. Adapun wortel berkembang dari 270 Ha menjadi 622 Ha. Hanya saja dikatakan, dalam kebijakan pemerintah, wortel bukanlah komoditas prioritas untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Berbeda dengan kentang yang pasarnya sudah jelas. Perkembangan wortel hanya jangka pendek selama pasar yang menyerapnya masih ada.

Peran ganda lembaga penelitian dalam difusi inovasi

Sebagai kesimpulan dikatakannya, Balihorti secara formal tidak ditujukan untuk mendifusikan inovasi kepada petani karena hanya untuk meneliti atau menguji adanya kesesuaian inovasi baru dengan kondisi lokal. Akan tetapi secara tidak formal lembaga ini ternyata berfungsi sebagai percontohan untuk ditiru petani karena adanya hal-hal yang baru dan sesuai dengan kepentingan petani. Dengan demikian secara individu dan informal peneliti juga

dianggap sebagai sumber informasi dan penyuluh bagi petani.

5.1.3 Pengalaman Pengusaha Agribisnis

Di Tulungrejo perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis adalah PT Indofood Sukses Makmur. Salah satu kegiatannya adalah unit produksi pertanian (agribisnis) dan pabrik pengolahan (agroindustri) sayur kering yang digunakan untuk bahan campuran mie instan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Macam sayuran yang diolah menjadi sayur kering di antaranya adalah wortel, seledri dan leek (bawang prei).

Bagaimana pengalaman perusahaan dalam mendifusikan komoditas wortel sehingga sebagai inovasi yang baru dapat diterima masyarakat dapat diutarakan sebagai berikut:

"Pak RS" sebagai Koordinator Agrifield

Mengapa harus wortel

Tata kerja perusahaan tidak berangkat dari bagaimana menanam wortel. Pola yang dipakai dimulai dari adanya kerjasama kongsi (*corporate*) perusahaan yang melihat adanya peluang pasar. Satu diantaranya industri mie instan mempunyai peluang pasar yang

kuat. Kendala saat itu, bahan baku industri berasal dari produk pertanian yang acapkali sangat fluktuatif baik dari segi harga maupun kontinuitas pasokannya. Saat ini bahan baku yang diperlukan guna bahan campuran adalah wortel, seledri dan bawang prei dengan kuantitas yang tidak sama. Di Jawa Timur sentra produksi wortel berada di Tulungrejo yang umumnya di jual kepasar Batu, Malang atau ke Surabaya.

Beberapa pertimbangan yang dikaji saat itu adalah: sesuai dengan pertimbangan dan kapasitas pabrik pengolahan, kualitas wortel yang ada umumnya terlalu kecil sehingga diperlukan adanya inovasi yang lebih baru dan lebih berkualitas. Jika perusahaan harus menyerap dari pasar yang telah ada dikuatirkan merusak sistem pasar yang telah berlaku sebelumnya. Termasuk diantaranya kontinuitas produk yang diperlukan pabrik dan stabilitas harga. Jika perusahaan harus menanam sendiri agar pasokan pabrik terjamin, adalah tidak akan memungkinkan karena perusahaan tidak punya tanah.

Upaya yang paling rasional adalah melakukan kerjasama dengan petani. Inovasi yang dipilih

dicarikan varietas yang lebih unggul dari varietas yang ada sebelumnya terutama produktivitas dan kualitas yang sesuai permintaan industri. Penyertaan modal perusahaan diusahakan sekecil mungkin dan terbatas pada bibit. Biaya yang lain (tanah, biaya usahatani) dan resiko diserahkan sepenuhnya pada petani.

Uji coba lapangan

Tahun 1995 perusahaan melakukan percobaan yang melibatkan 4 orang petani sebagai pelaksananya untuk menanam wortel (*Daucus Carota L.*) dengan kode varietas C-1 yang di introdusir dari Jerman. Petani yang dipilih bukannya petani yang sudah mempunyai nama besar karena sudah menjadi pengusaha atau mempunyai tanah yang luas. Bukan juga petani tradisional yang kurang antusias terhadap inovasi yang baru. Tetapi yang dipilih adalah petani yang berada diantara kedua golongan tersebut yaitu golongan menengah yang berkeinginan maju. Walaupun ia tidak punya modal namun masih tetap disegani di masyarakat.

Hasilnya cukup menggembirakan karena diperoleh hasil yang berbeda dengan varietas lokal. Produkti-

vitanya lebih tinggi karena bisa mencapai 14-18 ton sedangkan varietas lokal hanya 8-9 ton tiap hektar. Ukuran umbinya 7-12 cm, jadi lebih besar dari varietas lokal yang hanya 7-9 cm. Warna lebih jingga dan rasa yang lebih manis, tidak mudah busuk sehingga mudah disimpan lebih lama. Umbi lebih keras tetapi mudah empuk jika dimasak. Ciri yang terakhir ini kurang diminati konsumen tetapi sangat penting bagi industri.

Sejak tahun itulah pihak perusahaan mempromosikan dan memprioritaskan komoditas wortel sebagai andalan. Dasar pertimbangan yang dipakai perusahaan karena secara teknis wortel C-1 produktivitasnya lebih tinggi. Dari nilai ekonomis lebih menguntungkan. Adapun dipandang dari sudut sosial dapat diterima masyarakat setempat. Difusi Wortel C-1 ternyata mudah untuk diadopsi karena adanya kesesuaian dengan pengalaman bertani sebelumnya serta kultur masyarakat setempat. Dalam hal-hal tertentu disadari bahwa secara teknis masih memerlukan perlakuan yang lebih intensif. Keadaan ini mendorong terjadinya pergeseran terhadap komoditas yang lain seperti kentang dan bawang

putih.

Kerjasama dengan petani

Upaya kerjasama perusahaan dengan mengikutsertakan petani ini pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik. Maksudnya agar supaya pasokan industri terjamin, sinambung dan perusahaan memperoleh bahan baku yang berkualitas. Atas pertimbangan sedemikian, perusahaan juga mengintrodusir benih impor yang sesuai dengan iklim tropis lokal. Benih kemudian didifusikan secara cuma-cuma kepada petani. Adapun produk yang diperoleh harus dijual kepada pihak perusahaan dengan harga jual yang telah disepakati bersama.

Tujuan lain dari pola kerjasama antara perusahaan dengan petani karena adanya beberapa kepentingan. Selain untuk jaminan kontinuitas pasokan bahan baku, perusahaan juga menjaga dan mengatur stabilitas harga. Sesuai kebijakan pemerintah perusahaan diharapkan ikut serta membantu program penanaman peningkatan produksi dalam negeri tanpa harus menggeser macam dan kualitas komoditas lokal. Caranya dengan meningkat-

kan kerjasama dalam mendifusikan inovasi bibit unggul.

5.1.4 Mekanisme Difusi Inovasi dari Pengusaha ke Masyarakat

Mekanisme terjadinya difusi inovasi dari pengusaha ke petani, berlangsung karena kerjasama informal antara keduanya. Pemerintah oleh pengusaha sengaja tidak dilibatkan dalam kerjasama ini karena dianggap kurang diperlukan disamping pengusaha itu sendiri sudah melakukan komunikasi langsung dengan petani.

Setelah dipertimbangkan secara ekonomis komoditas wortel dapat dilakukan, pengusaha melakukan pendekatan secara informal kepada tokoh masyarakat. Pola penyuluhan tidak dilakukan secara massal tetapi secara tatap muka dan kekeluargaan.

Agar inovasi mudah di adopsi, perusahaan mengawalinya dengan melakukan pendekatan dan memprioritaskan pada 5 orang petani yang telah berpengalaman untuk mencoba menanam wortel varietas C-1. Kepada kelima petani percontohan ini perusahaan memberikan kepercayaan untuk mewakili perusahaan guna menarik minat bagi petani yang lain. Disamping itu dan juga merekomendasikannya

kepada perusahaan jika ada petani yang berminat. Dengan rekomendasi ini petani percontohan dapat mengajukan permohonan pemberian benih untuk selanjutnya diserahkan kepada petani baru yang direkomendasikan. Baru kemudian setelah mendapat kepercayaan dari petani yang melakukan percobaan tersebut, difusi inovasi berikutnya diberikan kepada petani lain secara selektif yang selanjutnya terus meningkat menjadi kelompok petani yang lebih besar.

Hubungan kerjasama antara perusahaan dengan petani ini mulai intensif sejak tahun 1995 ketika peluang permintaan wortel mulai meningkat sedangkan terhadap komoditas kentang petani mulai jenuh. Kerjasama yang dilakukan secara informal, meliputi penyediaan benih wortel varietas C-1 dimana teknologi dan sarannya disediakan perusahaan. Petani hanya menyiapkan lahan pertanian dan tenaga kerja. Di samping itu, petani juga bersedia melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan.

Dalam kontrak kerjasama disebutkan bahwa pihak perusahaan berkewajiban menyediakan bibit secara gratis sebanyak 3-4 Kg/perhektar. Produk dijual

keperusahaan dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp750.-/Kg. Tanaman sudah dipanen setelah berumur 4-5 bulan. Adapun biaya pemeliharaan dan biaya panen sepenuhnya ditanggung petani. Jadwal panen dilakukan berdasar hasil kesepakatan. Transportasi dari gudang petani ke perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan. Produk yang dihasilkan harus sesuai standar mutu diantaranya panjang wortel harus lebih besar dari 10 Cm. Diameter bagian bawah lebih besar dari 1.5 Cm. Tidak pecah dan bercabang serta kebusukannya kurang 20 %.

Hak-hak yang dimiliki petani diantaranya memperoleh kualitas bibit yang baik dan mendapatkan bimbingan usahatani, memberikan saran dan pendapat kepada perusahaan serta mendapatkan uang panen. Kewajibannya adalah memelihara tanaman sesuai anjuran, menghasilkan kualitas dan kuantitas produksi yang optimal serta bersedia mematuhi segala peraturan perusahaan.

Hak perusahaan adalah menentukan harga produk, memperoleh produk sesuai standar mutu, juga memberi sanksi jika petani menjual kepada pihak lain. Kewajibannya adalah memberikan fasilitas yang dita-

warkan kepada petani, memberi pelayanan dan mempertimbangkan saran petani.

Bentuk kontrak kerjasama tidak dilakukan secara tertulis, hanya dalam bentuk saling percaya. Ini dimaksudkan agar kerjasama di antara keduanya fleksibel dan tidak kaku. Jika karena sesuatu hal terdapat perselisihan diupayakan adanya pemecahan secara musyawarah. Seperti misalnya jika terjadi kelebihan produk. Alternatif pemecahannya dilakukan dengan penundaan panen (sepanjang memungkinkan) atau dijual ke pasar sesuai harga standar kontrak. Walaupun realita menunjukkan, selera pasar umum kurang berminat terhadap varietas C-1 ini. Alternatif yang lain dilakukan dengan membeli dengan harga murah atau dengan memutuskan hubungan kerja.

Cara pengembalian kredit dilakukan dengan cara pemotongan penerimaan secara langsung pada saat panen. Pihak perusahaan masih juga berkewajiban menyerap seluruh produk yang dihasilkan serta menjamin adanya pasar. Oleh karena itu maka, petani mempunyai kewajiban untuk menjerahkan seluruh produknya kepada perusahaan tanpa sedikitpun petani

diizinkan mengambil produk yang diperolehnya. Bahkan penentuan panen dan pelaksanaan pemanenan harus sepengetahuan pihak perusahaan. Oleh karenanya petani harus bersedia tunduk terhadap peraturan perusahaan.

5.1.5 Pengalaman Petani dalam Mengadopsi dan Mendifusikan Inovasi

"Pak KD" sebagai petani andalan

Sebetulnya ia bukanlah penduduk asli setempat. Seperti halnya penduduk yang lain ia juga termasuk penduduk pendatang yang awalnya juga membuka hutan. Namun karena sudah lama tinggal di sini orang seringkali menganggapnya sebagai penduduk asli.

Asal mula berkembangnya komoditas pertanian

Waktu itu tidak ada jalan. Yang ada hanya jalan setapak. Baru setelah adanya pemukiman transmigrasi lokal (Translok) daerah ini mulai ramai dan jalan sudah berbatu. Kedatangan transmigrasi merupakan awal kemajuan di daerah. Orang luar banyak keluar masuk bahkan banyak memberikan sesuatu yang baru. Lalulintas semakin ramai. Kedatangan transmigrasi lokal juga mengurangi perebutan tanah negara di

kawasan yang lebih atas.

Saat itu kendaraan yang mampu mencapai desa ini untuk mengangkut sayuran hanya kendaraan jenis power dan jeep. Awal 70-an kendaraan jeep kanvas juga mulai masuk. Kini segala jenis kendaraan sudah bisa masuk. Bahkan melalui desa ini dipakai jalan pintas melalui Cangar menuju ke Pacet Mojokerto.

Mulanya ia menanam kobis dan kentang yang diambil dari bibit lokal yang telah ada. Bibit kentang lokal ini mempunyai beberapa ciri diantaranya produktivitasnya lebih rendah, ukuran umbi lebih lebih kecil dan agak bulat. Keunggulan yang lain seandainya petani tidak punya modal sehingga terpaksa tidak di pupuk, itupun masih bisa berproduksi. Yang lebih penting lagi, varietas lokal ini tidak perlu dilakukan penyemprotan karena jarang terserang hama dan penyakit.

Mulai mengadopsi inovasi dengan bibit unggul dan mendifusikan kepada petani yang lain

Ini berbeda dengan bibit unggul yang baru seperti DTO-28, DTO-3, Red Pontiac, Cosima, 77-052, maupun Cipanas. Bibit kentang ini bisa diperoleh dari Balai Penelitian Hortikultura dengan cara

meniru teknologi yang ada di kebun. Atau dapat juga dengan cara membeli bibit dari Cipanas. Kadang kala juga mendapat hadiah bibit ketika ada kunjungan tamu dari luar negeri atau juga mendapat kiriman setelah tamu asing tersebut telah sampai di negara asalnya.

Ia juga menuturkan bahwa pada mulanya untuk mencoba bibit yang diterima luar negeri agak ragu. Dilihat dari tampilan fisiknya menurut ukuran yang biasa dilakukan termasuk kategori jelek (selain kecil juga keriput dan mengering). Umumnya jenis bibit yang sering dipilih, dicari yang besar dan segar.

Ketika ditangkarkan ternyata hasilnya jauh berbeda dimana produktivitasnya lebih tinggi dan juga kualitasnya lebih baik. Biasanya sampai turunan yang ketiga (F3) bibit ini masih dipakai sendiri. Baru pada turunan yang ke 4 bibit ini didifusikan ke masyarakat. Bahkan yang ia melihat ada juga petani yang menanam dengan turunan yang tidak jelas tingkatannya. Akibatnya petani sering memberi penilaian bahwa tangan dia ini "dingin" dalam arti kalau menanam hasilnya selalu baik. Pada

hal rahasianya terletak pada kualitas bibit. Ini yang dia rahasiakan dan memang disengaja di pertahankan. Baru kemudian didifusikannya jika anda pertanda produktivitasnya sudah mulai menurun.

Kini bibit ini tidak hanya tersebar di daerah Batu tetapi juga petani dari Bromo (Tosari dan Ngadas) sudah banyak mencari bibit dari daerah ini. Umumnya seperti halnya petani di Tulungrejo mereka lebih menyukai jenis Cosima.

Jadi, seringkali inovasi yang diketahui masyarakat tidak harus dengan mencari informasi dari tempat lain. Inovator yang datang sendiri cukup banyak bahkan dia sendiri acapkali diberi dan disuruh mencobanya. Itulah yang seringkali dia ditertawakan kerabatnya karena dianggapnya nyeleneh bahkan tidak jarang juga rugi.

Inovasi alternatif

Pertengahan dekade 80-an dari salah seorang pengusaha ia ditawarkan untuk mencoba menanam asparagus. Ternyata nilai ekonomisnya juga tinggi dan prospeknya juga bagus terutama untuk permintaan di kota besar seperti di Malang dan Surabaya. Untuk konsumen lokal agak jarang. Karena pemasarannya

agak terbatas dibanding komoditas kentang, maka petani yang menanam komoditas asparagus ini lebih sedikit.

Berkat pengalaman dan ketokohnya di kalangan petani, kemudian oleh pemerintah ia diangkat sebagai petani teladan tingkat nasional disamping ia menjadi pengurus HKTI.

Penilaian terhadap sesama petani

Petani yang ada di Tulungrejo dalam penilaiannya ada bermacam-macam. Ada yang memang susah untuk diajak maju. Mereka sepertinya sudah puas terhadap apa yang dilakukan dan apa yang diperoleh selama ini. Dibanding tempo dulu jumlahnya kini lebih sedikit. Yang ingin maju dan selalu ingin memperoleh inovasi yang terbaru diyakini lebih banyak. Petani yang bisa maju ini ada yang masih kekurangan modal tetapi ada yang sudah berkecukupan karena disamping bertani juga melakukan kegiatan yang lain seperti menjadi pedagang. Golongan petani ini banyak memberikan andil dan memberikan lapangan kerja bagi petani yang lain.

Reaksi terhadap meluasnya komoditas wortel

Terhadap menurunnya areal kentang yang kemudian diikuti meluasnya komoditas wortel tidak perlu dipermasalahkan. Setiap petani bebas untuk memilih komoditi. Saya juga menanam wortel tetapi varietasnya berbeda dengan Indofood. Pangsa pasarnya juga berbeda dan saya rasa setiap pengusaha akan mempunyai pangsa pasar tersendiri. Oleh karena itu pangsa pasar yang saya punyai ini tetap saya pertahankan. Jika ada pengusaha (besar) ingin bermitra dengan petani, itu memang baik sepanjang tidak merugikan petani atau dengan memanfaatkan kelemahan (kekurangan) permodalan yang memang menjadi kendala bagi petani. Oleh karena ia berpendapat, siapa saja boleh bekerjasama dengan petani asalkan tidak dengan mengikat. Berikanlah petani kebebasan tetapi bantulah petani jika memang menghadapi kendala. Informasi inovasi bisa diterima dan berasal dari siapa saja. Petani sudah bisa memilih mana terbaik buat dirinya. Petani disini juga siap membantu petani di daerah lain atau siapa saja selama yang kami berikan dianggap berguna bagi orang lain.

Dia seringkali di undang di berbagai pertemuan baik tingkat lokal maupun nasional. Dia menuturkan: " Saya sebetulnya tidak punya ilmu seperti para ilmuwan. Bekal yang saya punyai hanya berangkat dari pengalaman. Itulah yang bisa saya ceritakan kepada orang lain. Tetapi justru mereka mempercayai saya".

5.2 Karakteristik Petani Wortel

Pada uraian ini di deskripsikan secara lebih spesifik tentang karakteristik petani sebagai pengguna inovasi. Deskripsi ini perlu diungkapkan, mengingat dalam difusi inovasi hal penting tidak hanya terbatas pada mekanisme arus difusi. Namun yang juga penting adalah bagaimana karakteristik petani sebagai pengguna inovasi, juga ikut berperan dan menentukan terjadinya adopsi inovasi.

Bahasan tentang karakteristik petani hanya di fokuskan pada 3 faktor pokok yaitu luas tanah garapan, status sosial-ekonomi dan pengalaman bertani. Walaupun pemilikan tanah dalam penelitian sebelumnya seringkali dipakai sebagai alat untuk mencirikan karakteristik petani, namun dalam kajian ini tidak dipergunakan. Alasannya, penguasaan

masyarakat tidak lagi ditentukan oleh pemilikan tanah, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan untuk menguasai atau mengontrol tanah. Bisa jadi petani yang sedemikian tidak memiliki tanah garapan, tetapi yang tersirat di dalamnya mereka dapat mengatur apa yang harus di tanam, kapan harus menanam dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya, bisa jadi mereka secara yuridis formal adalah pemilik atas tanah yang bersangkutan, namun secara faktual mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun tanah tersebut miliknya sendiri. Segala sesuatu yang terkait pengelolaan lahan tersebut tergantung pada pihak yang lain. Atas dasar pertimbangan itulah, maka pengelolaan tanah di dasarkan pada luas garapan sebagai indikator.

Gambaran secara rinci penguasaan tanah dapat dilihat pada Tabel 5.1

Dari Tabel 5.1 ini digambarkan bahwa 76.66 % dari petani yang diamati hanya mempunyai luas garapan di bawah 1.0 Ha. Untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, petani melakukan ekspansi lahan pada lokasi yang secara teknis sudah tidak layak untuk tanaman semusim. Petani hanya memberikan

alasan, mereka masih butuh lahan di samping juga faktor kebutuhan secara ekonomis turut mengikutinya. Alasan yang bersifat ekonomis disadarinya kontradiktif dengan daya dukung lingkungan seperti yang dilakukan pada lereng yang secara teknis sudah tidak diizinkan karena dapat berakibat terjadinya erosi. Masyarakat walaupun menyadari akan dampaknya terhadap lingkungan. Namun karena lahan sudah banyak dikuasai oleh "orang kota", seringkali kepedulian mereka terhadap fenomena yang ada, kurang menjadi perhatian yang serius.

Tabel 5.1 Frekuensi Distribusi Penggarapan Tanah di Tulungrejo (n=30)

Interval (Ha)	Frekuensi (%)
< 0.5	33.33
0.5 < 1.0	43.33
1.0 < 1.5	20.00
1.5 < 2.0	0.00
2.0 < 2.5	3.33
	100

Pejabat pemerintah juga menyadari terhadap dampak yang akan terjadi, namun tidak dapat berbuat banyak. Alasan yang sering dikemukakan adalah, kemampuan untuk memantau terbatas. Apalagi di

dukung oleh kondisi lapangan yang memang tidak memungkinkan dilakukan pemantauan setiap waktu. Alasan yang lain petugas lapangan tidak mempunyai kendaraan bermotor. Akibatnya pejabat pemerintah hanya memberikan penyuluhan apa adanya kepada petani. Secara praktis seperti percontohan sebagai alat peraga dan bantuan sarana produksi tidak dapat dilakukan. Ini menjadi kendala yang tersendiri.

Dengan mulai terbatasnya ekspansi lahan, pilihan petani hanya melakukan intensifikasi dengan menggunakan inovasi varietas unggul, baik yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya ataupun dengan mengintrodusir inovasi baru. Diakuinya, untuk mendapatkan inovasi baru merupakan kendala tersendiri karena selain biayanya lebih mahal juga untuk mengaksesnya juga tidak mudah, kecuali dengan melakukan kerjasama dengan pengusaha besar.

Dalam hal pengalaman sebagai petani wortel, rata-rata baru mencapai 7.43 tahun (Tabel 5.2). Adapun sebagai petani hortikultura mereka telah melakukannya sejak masih kecil. Komunikasi dengan pejabat pemerintah juga relatif lebih terbatas karena memang program pengembangan tanaman

hortilkultura yang dibina langsung pemerintah sangat terbatas. Prioritas pengembangan pertanian oleh pemerintah masih terfokus pada tanaman pangan (padi dan polowijo). Adapun pengembangan tanaman komersial seperti hortikultura, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Tabel 5.2 Frekuensi Distribusi Pengalaman Bertani di Tulungrejo (n=30)

Interval (tahun)	Frekuensi (%)
0 < 5	46.67
5 < 10	16.67
10 < 15	23.33
15 < 20	6.67
20 < 25	6.67
	100

Berdasar statusnya, petani yang diamati sebagian besar adalah sebagai petani murni. Mereka sepenuhnya berasal dan bekerja sebagai petani tanpa ada jabatan atau sumber ekonomi lain yang menyertainya. Adapun yang kedua adalah petani yang mempunyai fungsi ganda. Selain sebagai petani, ia juga ikut bekerja sebagai pedagang. Adapun petani yang mempunyai pekerjaan rangkap sebagai pamong desa ataupun pegawai negeri jumlahnya juga terbatas (3.33%). (Tabel 5.3).

Tabel 5.3 Frekuensi Distribusi Status Petani di Tulungrejo

Interval	Frekuensi (%)
Petani Biasa	76.67
Petani-Pegawai/ Pamong	3.33
Petani-Pedagang	16.67
Petani-pegawai/ pamong/pedagang	3.33
	100

Petani juga menyatakan bahwa adanya inovasi baru sangat dibutuhkan untuk memperoleh variasi usaha dan peningkatan pendapatan. Namun walaupun inovasi tersebut cukup bermanfaat, petani sebagai pengusaha dan pemilik lahan masih merasakan adanya kendala karena merasa tidak berhak atas komoditas tersebut. Situasi yang sedemikian ditunjukkan ketika mereka membutuhkan bibit dari produk yang dihasilkannya..Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan terpaksa petani harus mampu membeli bibit varietas lain dari pasar bebas yang harganya masih mahal. Yang diharapkan petani adalah, selain mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk uang mereka juga sangat membutuhkan persentase hasil dalam bentuk natura (bibit).

5.3 Difusi Inovasi di Sumber Pucung

5.3.1 Potensi Wilayah untuk Komoditas Pangan

Desa Sumber Pucung berada di daerah aliran sungai (DAS) Brantas tengah. Desa ini berjarak 30 Km dari kota Malang menuju ke arah selatan. Lokasi berada pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Permukaan tanah relatif datar sehingga keseluruhan wilayah mudah di jangkau masyarakat. Fasilitas umum, mobilitas penduduk, kepadatan penduduk dan interaksi masyarakat juga sudah tinggi karena lokasi desa berada pada jalur lalu lintas utama yang mudah dilalui kendaraan umum dan kereta api. Dengan kondisi yang sedemikian maka masyarakat mudah dan terbuka untuk mengakses ke pasar.

Menurut sejarahnya, daerah ini sejak semula memang merupakan daerah komoditas pangan. Komoditas utama yang diusahakan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubijalar dan ubi kayu. Kesemuanya di tanam di tanah tegalan dan sawah tadah hujan dengan dua kali panen dalam setahun.

Dengan selesainya pembangunan waduk Karang Kates pada dekade 60-an dan waduk Lahor pada dekade

70-an maka kini sebagian dari desa ini terasip oleh genangan air kedua bedungan tersebut yaitu genangan karang kates disebelah selatan dan lahor di sebelah /utara. Intensitas penanaman berubah dari dua kali panen menjadi tiga kali panen. Peta penggunaan lahan maupun komoditas juga mengalami perubahan. Ini dapat ditunjukkan dari data desa yang luasnya 609 Ha, 361.5 Ha dipakai areal pertanian, 21 Ha untuk perkebunan, genangan karangkates dan lahor 126 Ha untuk daerah genangan dan perikanan, 81.5 Ha untuk pekarangan sedangkan sisanya 19 Ha untuk bangunan pemukiman.

Kadaan ini didukung oleh faktor geografis. Sebagian besar tanahnya berstruktur lempung berpasir, remah dengan warna coklat muda. Jenis tanah termasuk tanah aluvial. Kondisi yang sedemikian cocok untuk pertumbuhan komoditas tanaman pangan. Komoditas pertanian yang utama adalah tanaman pangan seperti jagung (93 Ha), padi (82 Ha), ubi jalar (76 Ha), kedele (48 Ha), ubi jalar (42.5 Ha) dan kacang tanah (20 Ha).

Kondisi pertanian ini didukung oleh keberadaan penduduk dimana dari 4781 penduduk yang ada 73,35 %

bekerja di sektor pertanian (39.25 sebagai petani pemilik penggarap dan 34.10 % sebagai buruh tani), sedangkan sisanya bekerja pada sektor yang lain seperti pedagang (10.3 %), pegawai negeri 4.02 %, pertukangan (3.16 %), Abri (0.31% dan lain-lain (9%). Dilihat dari tingkat pendidikannya 5 % belum sekolah, 35,94 % tamatan SD, 36.57 % tamatan SMP, 18.59 % tamatan SLTA dan perguruan tinggi 3.85 %.

5.3.2 Difusi Inovasi dari Pemerintah

Perkembangan inovasi pertanian tidak semata dilakukan oleh satu dinas (pertanian). Perkembangan yang dilakukan pemerintah terkait dengan kerjasama antar sektor dan antar departemen. Di antaranya dinas pengairan, koperasi, perbankan dan juga departemen dalam negeri. Bagaimana hal tersebut terjadi bisa disimak dari penuturan salah seorang penyuluh pertanian.

"Pak DS" (sebagai Penyuluh)

Penyuluhan sebagai suatu institusi

Pengalamannya sebagai penyuluh cukup lumayan karena pengangkatannya bersamaan dengan pertama kali diadakannya program penyuluhan pada akhir dekade 60-an. Dalam program Bimas penyuluh ini

kemudian dikenal dengan nama PPL untuk penyuluh lapangan, PPM untuk penyuluh madya sebagai koordinator PPL dan PPS untuk penyuluh spesialis. Tugas utamanya, sesuai yang ditetapkan departemen pertanian adalah mendifusikan informasi, mengajarkan keterampilan, memberikan rekomendasi, mengupayakan kemudahan bagi petani dan mendorong timbulnya swadaya dan swadana dari petani.

Sebagai pejabat fungsional tugasnya hanya khusus memberikan penyuluhan kepada petani sehingga berbeda dengan jabatan struktural yang ada di dinas pertanian. Walaupun demikian, kini penyuluh tidak sekedar melakukan tugas fungsional tetapi juga dibebani tugas administratif. Untuk memudahkan koordinasi, penyuluh ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dari balai inilah semua program direncanakan, digerakkan dan juga dilakukan pemantauan.

Bagaimana inovasi didifusikan

Sebagai penyuluh ha-hal yang disampaikan kepada petani menyangkut bagaimana meningkatkan produksi, memelihara lahan agar tetap subur, perlakuan pasca panen, pentingnya kerjasama

kelompok, upaya meningkatkan pendapatan dan bagaimana ikut serta dalam kegiatan pedesaan.

Agar inovasi yang disampaikan kepada petani mudah di adopsi, ada dua cara yang dilakukan: *pertama*, penyuluh yang ada di BPP membuat program: diantaranya Demonstrasi Area (pada kawasan yang luas), Demonstrasi Farm (pada beberapa kelompok tani) dan Demonstrasi Plot bagi lahan tertentu. Selanjutnya PPL bekerjasama dengan kelompok tani menginformasikan demonstrasi tersebut kepada petani yang lain dengan melakukan kunjungan ke petani baik di sawah atau di rumah. Juga dilakukan pertemuan yang diadakan di balai desa, pendopo kecamatan atau di BPP. Biasanya jika pertemuan dilakukan di balai desa seluruh pamong ikut hadir. Demikian halnya jika dilakukan di pendopo kecamatan selain kepala desa hadir, juga ikut di undang pejabat tingkat kecamatan (Muspika) seperti Camat, Kapolsek, Koramil. Terutama jika terkait dengan kebijaksanaan pemerintah yang baru. Cara yang *kedua*, setelah BPP membuat rekomendasi terhadap program yang dibuat penyuluh, petani kemudian diberi pelatihan di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) tentang program yang

di rencanakan. Jika dianggap perlu pelatihan juga dilakukan di tempat lain. Dengan cara demikian inovasi yang ada di BPP dengan mudah dan secara cepat terdifusi kepada petani yang lain.

Awal berlangsungnya program penyuluhan

Sejak dilangsungkannya program Bimas padi pada pertengahan dekade 60-an, difusi inovasi pertanian mulai berlangsung. Tekanannya terletak pada difusi inovasi pancausaha tanaman padi yang meliputi penggunaan varietas unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan dan perbaikan cara bercocok tanam. Varietas unggul lokal mulai digantikan oleh unggul baru seperti PB5 dan PB8 tahun 1968. Kemudian berturut-turut ada IR-21 dan IR-22, kemudian IR-36, C-4/63, IR- 64 dan varietas yang lain. Varietas unggul lokal dan unggul nasional seperti "bengawan" yang rasanya lebih enak dan harganya lebih mahal, juga beras ketan mulai tersingkir.

Secara diam-diam kadangkala masih juga ada petani yang menanam beras lokal tersebut. Agar program pemerintah tersebut terealisasi, pola yang dilakukan penyuluh tidak semata-mata dengan cara

persuasif (sesuai prinsip penyuluhan yang selalu didasarkan pada kesadaran dan kerelaan), namun seringkali dilakukan secara paksaan. Bahkan sesuai hierarki wewenangnya camat dapat memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak bersedia melaksanakan. Sistem target areal Bimas bagi setiap pejabat daerah diberlakukan. Keberhasilan (rapor) pejabat daerah dilihat dari keberhasilannya dalam memenuhi target Bimas. Hasilnya menunjukkan, secara bertahap komoditas pertanian terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adanya perluasan jaringan irigasi karena selesainya bendungan, ikut serta mendukung program penyuluhan. Intensitas pertanaman meningkat dari dua kali menjadi 3 kali dalam setahun. Namun bersamaan itu pula hama dan penyakit tanaman yang baru ikut menyertainya. Hama wereng dan ganjur juga menjadi momok yang menakutkan. Akibatnya pemerintah secara periodik melakukan perubahan-perubahan terhadap inovasi varietas yang didifusikan.

Inovasi baru mengenai manajemen penanggulangan hama juga didifusikan. Pola ini kemudian dikenal dengan penanggulangan hama terpadu (PHT). Upaya

yang dilakukan tidak hanya dengan inovasi cara penyemprotan hama yang dilakukan secara serentak tetapi juga dengan cara memotong siklus perkembangan hama dengan melakukan pola pergiliran tanaman yang tidak sejenis. Jadi inovasi baru tidak sekedar mencari varietas yang baru tetapi juga inovasi pola pergiliran tanam diberlakukan. Pola tanam tidak lagi dilakukan secara terus menerus terus akan tetapi dilakukan secara bergantian dengan komoditas yang lain.

Inovasi rekayasa sosial

Perkembangan jaringan irigasi dan penyuluhan pertanian melahirkan inovasi rekayasa sosial. Petani di organisir dalam kelompok tani yang di pimpin oleh ketua kelompok atau kontak tani. Program sedemikian kemudian melatarbelakangi timbulnya inovasi Bimas Insus dan Bimas Supra Insus pada akhir dekade 80-an. Pembinaan petani tidak lagi didasarkan kepada petani secara individu tetapi lebih ditekankan kepada petani sebagai suatu kelompok.

Berdasar kelompoknya kelompok tani yang tergabung dalam pengelolaan air membentuk Himpunan

Petani Pemakai Air (HIPPA). Yang tergabung dalam kelompok pembaca koran dan pendengar radio serta televisi mendirikan Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa (KELOMPENCAPIR). Pembentukan dan pembinaan organisasi dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) bersama-sama pamong desa.

Komersialisasi komoditas jagung

Perkembangan inovasi tidak terbatas pada komoditas padi. Komoditas yang lain juga mengikutinya. Adanya Proyek Bimas jagung pada pertengahan dekade 70-an merupakan langkah awal perkembangan tanaman jagung. Varietas unggul baru yang kini banyak dipakai di masyarakat adalah varietas P-4 dari Pioneer, Varietas BISI I dari BISI, juga ada varietas C-3 dari Perum Sang Hyang Seri. Kesemuanya sudah diadopsi masyarakat.

Dengan berkembangnya sarana informasi dan komunikasi, maka komoditas pangan yang dilakukan secara komersial juga ikut berkembang. Petani sudah dibiasakan untuk dapat memilih komoditas dengan nilai ekonomis tinggi. Satu diantaranya adalah perusahaan komoditas jagung yang tidak lagi ditujukan untuk keperluan konsumtif, akan tetapi

pengusahaan tanaman jagung tersebut ditujukan guna keperluan penangkaran serta penyediaan bibit yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Untuk merealisasikan usaha tani tersebut pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan pertanian khususnya PT Pioneer yang bergerak di bidang penangkaran benih.

Fasilitas yang diberikan pemerintah

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian berkepentingan untuk melakukan kemitraan melalui pola perkebunan inti rakyat (*nucleus estate small holder*) dengan perusahaan dan atau dengan petani dalam bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dilakukan dapat berdampak dan terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan perusahaan maupun petani.

Di antara kebijaksanaan yang langsung, adalah membantu meningkatkan pendapatan petani melalui difusi inovasi komoditas alternatif. Bisa jadi komoditas ini tetap sama dengan komoditas yang biasa dilakukan saat ini tetapi dengan varietas alternatif yang lebih unggul. Komoditas tradisional yang telah lama di budidayakan tetap dipertahankan,

akan tetapi kualitasnya bisa ditingkatkan. Di samping itu pula, pemerintah melakukan pembinaan dan peningkatan keahlian kepada petani serta menyediakan dan menyalurkan kredit usaha tani melalui paket kebijaksanaan seperti kredit usahatani (KUT).

Kebijaksanaan yang tidak langsung diantaranya mencarikan pemodal yang bersedia menanamkan modalnya di agribisnis. Satu diantaranya PT Pioneer yang bersedia melakukan kerjasama dengan menyediakan modal kepada petani. Adapun pemerintah sebagai fasilitatornya.

Dalam hal kebijaksanaan, penyuluh tidak mampu berbuat banyak karena hanya melaksanakan perintah dan mengamankan kebijaksanaan dari atas (pemerintah pusat). Yang dilaksanakan di tingkat pelaksana hanyalah menyesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang dibuat dari atas. Termasuk di dalamnya inovasi apa yang akan didifusikan dan bagaimana mekanismenya. Umumnya dalam pelaksanaannya dibuat seragam dengan pola yang ada di tempat lain.

Dalam hal tanggung jawab, penyuluhan yang dilakukan bersama ini lebih enak daripada dilakukan

secara mandiri oleh PPL. Hanya saja dari segi kontrol memang lebih berat karena penyuluh juga dipantau oleh perusahaan selain ada pantauan tersendiri dari atas. Keuntungan yang lain bagi penyuluh adanya tambahan insentif dari perusahaan. Beda dengan penyuluh secara murni yang sudah menjadi tugasnya.

5.3.3 Pengalaman Pengusaha Agribisnis

Di Sumber Pucung tiga komoditas andalan diantaranya adalah jagung, padi dan ubi jalar. Komoditas ubi jalar ini walaupun belum diproses secara komersial namun di pasar namanya cukup terkenal karena identik dengan nama "telo kawi" (nama lokal) yang mempunyai ciri spesifik sebagai varietas lokal. Komoditas padi dan jagung selain untuk tujuan komersial juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hanya saja untuk komoditas jagung terdapat persaingan varietas yang disponsori BISI dan Sang Hyang Seri untuk jagung konsumsi dan Pioneer untuk usaha penangkaran..pa

"Pak SW" sebagai field operations supervisor (FOS)
Sejarah perusahaan

Pioneer merupakan salah satu perusahaan agribisnis yang bergerak dibidang penangkaran benih jagung hibrida. Dalam skala internasional perusahaan Pioneer ini berpusat di Iowa Amerika Serikat. Pioneer pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1986 dengan nama PT Pioneer Hibrida Indonesia. Mulanya perusahaan ini bekerjasama dengan PT Gunungsewu sebagai mitra, tetapi hanya bertahan selama 2 tahun. Pada tahun 1988, perusahaan ini mendapat lisensi dari pemerintah untuk menjadi perusahaan breeder nasional yang berdiri sendiri dan dapat melakukan verifikasi benih secara otonom tanpa harus mendapat izin lagi dari pemerintah dalam hal pendifusian benih kepada masyarakat.

Lisensi ini ditandai dengan berdirinya pabrik pengolahan di Gondanglegi Malang. Tugasnya adalah menampung produk yang diperoleh dari unit produksi, kemudian diolah untuk menjadi benih yang selanjutnya siap untuk dipasarkan. Adapun unit produksi di Sumber Pucung mulai beroperasi sejak tahun 1994. Salah satu misinya adalah menanam dan menyediakan bibit jagung hibrida guna memenuhi kebutuhan bibit

jagung nasional. Dipilihnya kabupaten Malang karena secara geografis dan topografis di wilayah ini sangat sesuai untuk pengembangan benih jagung.

Organisasi

Secara organisatoris, hierarki organisasi terdiri dari Direktur PT Pioneer Hibrida Indonesia yang berada di Jakarta. Kantor administrasi untuk pelayanan dan operasi berada di Surabaya. Manajer produksi dan pengolahan berada di Gondanglegi Malang. Salah satu unit operasi yang terdiri dari manajer lapangan, supervisor lapangan, dan petugas lapangan berada di Sumber Pucung.

Manajer produksi bertugas sebagai pengelola operasional pabrikasi dan pengolahan. Manajer lapangan sebagai unit produksi bertugas untuk melakukan bimbingan teknis kepada ketua kelompok tani disamping juga untuk mengkoordinir para supervisor lapangan. Supervisor lapangan bertugas untuk menentukan jadwal waktu tanam dan kapan tanaman sudah dapat dipanen. Petugas lapangan adalah mereka yang setiap saat dan langsung melakukan kerjasama dengan petani, membimbing

petani dengan melakukan kerjasama dengan PPL dari Balai Penyuluhan Pertanian (pemerintah), juga melakukan pengawasan terhadap teknik penanaman agar produktivitas tetap terjamin. Hierarki organisasi sedemikian dimaksudkan agar produksi yang dilakukan petani dapat terjamin kualitasnya.

Fungsi perusahaan (Pioneer) adalah sebagai salah satu mitra pemerintah dalam hal pengadaan benih jagung dengan inovasi andalan varietas P(4-9). Di samping Pioneer sebetulnya masih terdapat mitra yang lain seperti Perum Sang Hyang Seri yang mengandalkan inovasi varietas C-3, dan BISI dengan mengandalkan inovasi varietas BISI (I-III) dan CP(I-II)

Kerjasama dengan petani dan pemerintah

Untuk dapatnya menjalin kerjasama dengan petani, pihak perusahaan mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam bidang penyuluhan serta Pemerintah Daerah dalam bidang administrasi dan pembinaan wilayah.

Pola kerjasama yang dilakukan Pioneer ini memiliki beberapa kesamaan dengan pola perkebunan

inti rakyat (PIR). Pioneer sebagai inti menyediakan kredit sarana produksi dan teknologi. Adapun petani sebagai plasma mempersiapkan tenaga kerja dan lahan. Hanya saja terdapat juga sedikit perbedaan, dimana pada sistim ini pihak Pioneer sebagai perusahaan ikut terlibat langsung dalam pembinaan. Kebijakan ini terpaksa dilakukan perusahaan guna menghindari ataupun mengurangi resiko yang mungkin terjadi karena kegagalannya atau kesalahan dalam mengelola tanaman.

Untuk mengawasi pelaksanaan penanaman, perusahaan mempersiapkan petugas lapang (penyuluh) khusus dari pihak perusahaan untuk menuntun petani agar lebih terampil. Disamping itu pula, petani masih mendapatkan bantuan penyuluhan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari pemerintah.

Kendala yang dihadapi perusahaan

Secara teknis kendala yang dihadapi pengusaha hampir tidak ada. Petani sudah terampil dan berpengalaman dalam melakukan usahatani. Bahkan mereka sudah terbiasa menggunakan varietas unggul. Hanya saja perusahaan pernah mendengar adanya keluhan dari petani bahwa peraturan dan pengawasan yang

dilakukan perusahaan terlalu ketat sehingga petani menganggap adanya kekurangan kepercayaan dari perusahaan. Padahal perusahaan menganggap, pengawasan yang ketat merupakan cara yang terbaik agar kualitas produk dapat terjamin.

Hanya saja kendala yang agak menonjol dan ini juga di luar kemampuan petani adalah luas tanah garapan yang sempit (rata-rata 0.45 Ha). Secara teknis ini akan mempengaruhi efisiensi usaha. Disamping itu petani yang harus diawasi perusahaan juga akan bertambah besar. Untuk mengatasinya petani dibuat berkelompok. Ketua kelompok wajib bertanggung jawab terhadap keberadaan anggotanya. Termasuk juga besarnya kredit yang diterima anggota (petani), ketua kelompok ikut bertanggung jawab karena yang menandatangani kredit hanya ketua kelompok. Dengan cara ini yang mendapat pembinaan langsung dari penyuluh hanyalah ketua kelompok. Hanya dalam keadaan yang khusus penyuluh memberikan bimbingan secara langsung kepada petani.

Namun demikian, walaupun program ini telah tertata secara rapi, ternyata dengan adanya program komersiliasi usaha pertanian tidak semua petani

dapat menerima keberadaan program secara langsung. Bahkan ada yang secara langsung justru menolaknya. Dari 1875 petani yang ada hanya 411 petani (22 %) yang mengusahakan komoditas jagung.

Jika petani jagung ini dipilah menurut lokasi tempat tinggal, maka 196 orang berada di dusun Pakel, 120 orang di dusun Krajan dan 95 orang di dusun Suko. Dari 411 petani jagung ini hanya 210 petani (51 %) yang menyatakan bersedia mengikuti program penangkaran. Adapun petani jagung yang lain (49%) masih ragu-ragu, pikir-pikir dan bahkan ada yang secara langsung menolaknya.

"Pak SG" (Breeder) BUMN

Bagaimana menetapkan "harga" benih sebagai inovasi

Di adopsinya suatu inovasi (benih) tidak hanya terkait dengan bagaimana mekanisme pendifusiannya tetapi juga akan terkait dengan pilihan harga dari inovasi tersebut. Bisa terjadi suatu inovasi dengan kualitas yang sama harganya berbeda. Atau sebaliknya, bisa juga dalam harga yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda.

Benih yang diserap pasar (khususnya yang dibeli pemerintah) penentuan harganya selain

diajukan pengusaha juga harus sepengetahuan pemerintah. Jika tidak demikian (mematuhi), pemerintah tidak akan memberikan rekomendasi terhadap inovasi baru tersebut. Dalam kualitas benih yang sama, produk benih yang dihasilkan breeder BUMN, oleh pemerintah harganya dinilai lebih murah dari harga benih dari breeder Swasta. Akan tetapi harga yang ditentukan pengusaha secara lebih tinggi ini tetap mau dibeli pemerintah.

Sebagai contoh produk C-3 dari Sang Hyang Sri (BUMN) kualitasnya setaraf dengan produk P-5 dari Pioneer dan CP1 dan CP2 serta BISI-1 dan BISI-2 dari BISI (semuanya swasta). Akan tetapi dari sisi harga, produk C-3 oleh pemerintah ditentukan lebih rendah dari P-5, CP maupun BISI. Pada tahun 1997, harga pokok penjualan (HPP) C-3 ditetapkan sebesar Rp 4500,-. Bagi pengusaha swasta HPP P-4 bisa mencapai Rp 9000,- /Kg.

Jadi mekanisme penentuan harga menurut mekanisme pasar bebas tidak berlaku secara mutlak. Intervensi pemerintah bukan ditujukan untuk memberikan subsidi atau menurunkan harga tetapi sebaliknya mengizinkan dan bersepakat untuk menaik-

kan harga benih yang dikelola pengusaha (breeder) swasta.

Mekanisme penentuan harga dapat dijelaskan sebagai berikut: Pemerintah menentukan komponen harga pokok penjualan (HPP) yang terdiri dari harga pokok benih ditambah profit perusahaan. Untuk pengusaha swasta diwajibkan menambah komponen "fee". Adapun bagi pengusaha BUMN komponen "fee" tidak berlaku. Sebagai imbalannya, jika "fee" yang ditawarkan perusahaan semakin besar maka komponen profit yang diizinkan akan semakin besar. Sebagai akibatnya HPP juga semakin lebih besar. Oleh karena itu penentuan besarnya "fee" dijadikan sebagai komoditas dan dipakai sebagai alat "tawar menawar" antara pengusaha swasta dengan pejabat pemerintah. Namun demikian cara ini tidak berlaku bagi pengusaha BUMN.

Dengan mekanisme ini sebetulnya juga memberi arti, BUMN tidak diizinkan memperoleh profit sesuai mekanisme pasar. Akan tetapi disisi yang lain, pemerintah melakukan intervensi dengan mengatur mekanisme pasar untuk memberi kesempatan bagi swasta untuk memaksimalkan profitnya.

5.3.4. Mekanisme Difusi Inovasi dari Pengusaha ke Petani dan Pemerintah

Mekanisme terjadinya kerjasama antara pengusaha dan pemerintah untuk melakukan difusi inovasi sebagai berikut: Dengan adanya kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat khususnya komoditas jagung, pemerintah melakukan program intensifikasi. Salah satu input yang masih menjadi kendala bahkan langka adalah tersedianya kualitas dan kuantitas benih. Balai Pembenihan dan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) milik pemerintah serta Balai Pembenihan (BUMN) tidak mampu untuk memenuhinya. Untuk pemecahannya, pemerintah dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk bekerjasama dalam program pengadaan benih.

Mulanya pada tahun 1992 perusahaan Pioneer memperoleh kontrak dari pemerintah untuk menangkan benih sebar (BS) jagung seluas 600 Ha di kabupaten Malang. Penanam dilakukan pada wilayah II yang meliputi kecamatan Kepanjen dan kecamatan Sumber Pucung. Benih yang dihasilkan selain untuk memenuhi permintaan benih jagung di Jawa Timur,

pendistribusiannya juga untuk memenuhi permintaan di kawasan Indonesia bagian timur.

Dalam hal pemasarannya, selain dapat dilakukan secara mandiri juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah khususnya untuk memenuhi permintaan dan dalam pendistribusian keluar Jawa. Untuk tidak mengganggu kerjasama dengan pemerintah, jika penyediaan stok benih jagung dalam negeri tidak dapat terpenuhi, pihak perusahaan juga melakukan kebijaksanaan dengan mengimport benih dari pabrik Pioneer yang lain seperti yang ada di Thailand dan Filipina. Namun demikian untuk memenuhi permintaan, tercukupinya benih dari stok dari dalam negeri tetap mendapat prioritas utama.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat dan dapatnya memenuhi kontrak dengan pemerintah, perusahaan mempunyai kendala karena tidak mempunyai kebun sendiri untuk ditanami jagung. Upaya yang dapat dilakukan hanyalah mengadakan kerjasama dengan petani pemilik lahan dan mengikutsertakan pemerintah daerah untuk bekerjasama.

Setelah pihak perusahaan (Pioneer) mem-

pertimbangkan dan memutuskan tentang lokasi yang sesuai, baik ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial serta budaya setempat, maka perusahaan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan lahan dan lokasi usaha. Di samping itu pihak perusahaan juga memberikan penyuluhan kepada aparat desa serta pelayanan administratif lainnya tentang tujuan dan manfaat program serta apa persyaratannya.

Secara teknis, pemerintah melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) diikutsertakan untuk memberikan penyuluhan kepada petani. Akan tetapi dalam rangka pembinaan terhadap petani, pihak pemerintah tidak secara langsung melakukannya sendiri, akan tetapi tetap mengikut sertakan penyuluh dari perusahaan.

Hubungan kerjasama antara perusahaan (Pioneer) dengan Dinas Pertanian (Diperta) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Malang ini mulai intensif sejak tahun 1992. Kerjasama yang dilakukan meliputi penyediaan benih jagung hibrida kualitas prima (P4-P7), di mana teknologi dan sarannya disediakan perusahaan.

Pemerintah daerah diberi tugas untuk menyiapkan lahan untuk penanaman jagung seluas 600 Ha, dengan disertai perangkat petani yang mampu untuk mengelola usaha penangkaran jagung tersebut. Di samping itu, petani yang dipilih juga harus bersedia untuk melakukan kerjasama dalam bidang inovasi dengan pihak perusahaan. Dinas pertanian diberi tugas untuk mempersiapkan perangkat teknisi untuk diberi tugas sebagai penyuluh pertanian lapangan (PPL). Adapun manajer lapangan tetap dikoordinir pihak perusahaan.

Dengan adanya respon dan kesediaan petani mengikuti program penangkaran benih maka kerjasama antara petani dengan pengusaha diatur melalui kontrak kerja yang dibuat secara formal dan tertulis dengan disetujui kedua belah pihak. Pihak perusahaan diwakili manajer produksi sedangkan pihak petani diwakili ketua kelompok. Untuk memperkuat kerjasama, penandatanganan dilakukan di kantor kecamatan. Surat perjanjian juga di tandatangi oleh lurah, mantri tani, petugas BPP dan juga camat.

Masa berlakunya kontrak hanya satu kali musim tanam. Bagi yang berhasil dan berminat, kontrak diperbaharui kembali pada musim tanam berikutnya. Terhadap penyimpangan yang diakibatkan oleh perubahan kondisi dan situasi, isi kontrak tidak fleksibel. Oleh karenanya semua yang tertuang dalam pasal-pasal kontrak harus dipatuhi.

Modal yang diberikan dapat berbentuk bibit yang diberikan secara gratis sesuai luasan lahan yang dipunyai. Modal kredit terdiri dari pupuk 550 Kg (urea 350 kg, TSP 100 kg dan KCl 50 kg), insektisida cair 2 liter, insektisida granula 8 Kg, marshall 4 bungkus dan biaya tenaga kerja sebesar Rp 300.000,-. Kredit diserahkan tanpa bunga. Pengembalian kredit dilakukan dengan cara pemotongan langsung pada saat pembayaran hasil panen. Biasanya pembayaran dilakukan paling lama 1 minggu setelah panen.

Pengolahan lahan sepenuhnya dilakukan petani, termasuk kerugian yang mungkin timbul juga menjadi tanggungjawabnya. Untuk mencegahnya, perusahaan secara kontinyu melakukan pengawasan dan petani

berkewajiban mengikuti peraturan yang dibuat perusahaan termasuk didalamnya teknik pemeliharaan dan pemanenan serta kapan teknologi tersebut harus dipakai.

Pihak perusahaan berkewajiban untuk menyerap seluruh produk serta menjamin adanya pasar. Adapun petani mempunyai kewajiban untuk menjual seluruh produknya kepada perusahaan. Sebagai akibatnya, dalam hal pemasaran tidak mengenal istilah "over product" karena semua produk akan diserap perusahaan.

Saat pemanenan dibawah pengawasan perusahaan dan produk harus langsung diserahkan kepada perusahaan. Petani tidak sedikitpun diizinkan membawa produk yang dihasilkan dibawa pulang kerumah. Jika terbukti ada produk yang dibawa kerumah dikenakan sangsi Rp 70.000,- tiap sak jagung gelondong kering. Petani hanya berkewajiban untuk mengelola tanaman sedangkan yang berhak memungut hasilnya adalah perusahaan.

Penentuan harga dilakukan secara fluktuatif sesuai perkembangan harga jagung pipilan kering di pasar Surabaya yang dimuat koran Surabaya Post dan

Jawa Post yang terbit saat panen. Patokan yang dipakai adalah sebagai berikut: untuk varietas jenis D-P ditetapkan 75-80 % dari harga pipilan di surat kabar. Untuk varietas jenis C-P dan F-P ditetapkan 110 % dari harga pipilan di surat kabar. Dengan demikian harga ini tidak dapat diperkirakan dan berfluktuasi sesuai perkembangan harga pasar.

Perusahaan memberikan kesan bahwa petani tetap tertarik untuk mengikuti program ini. Resiko memang menjadi kendala dan tantangan. Akan tetapi kemudahan dan manfaat yang dapat diraih menjadi alasan tersendiri bagi petani untuk tetap mengikutinya. Ini ditunjukkan dari data yang ada bahwa, sampai dengan tahun 1999 pergantian kontrak telah berlangsung selama 10 periode. Dari 17.5 % petani yang diamati telah melakukan kontrak kerja selama 10 kali, 9 kali (42.86%), 8 kali (22.86%), 7 kali (11.43%), 6 kali (tidak ada) dan 5 kali (5,71 %). Dengan demikian petani yang telah melakukan penangkaran banyak diminati petani yang berpengalaman.

5.3.5 Pengalaman Petani: Macam Inovasi dan Asal Inovasi

"Pak SG" tokoh masyarakat

Dulu seandainya oleh pemerintah petani tidak dipaksa menggunakan teknologi yang baru, para petani mungkin tidak akan maju seperti sekarang. Seandainya petani diberi kesempatan untuk memilih mungkin mereka tetap menggunakan inovasi yang lama atau setidaknya inovasi yang baru perkembangannya akan tersendat.

Waktu itu petani masih fanatik terhadap jenis padi yang rasanya enak dan pulen. Umur tanaman juga lebih lama, bahkan bisa mencapai 4.5 sampai 5 bulan. Padi jenis baru umurnya lebih pendek 3.5 sampai 4 bulan. Mulanya cara panennya dirasakan lebih susah karena tinggi tanaman lebih pendek sehingga harus memakai arit. Dulu petani terbiasa memakai ani-ani. Rasa nasi juga kurang enak ("pero" = bahasa Jawa). Karena hal-hal inilah maka pada mulanya petani banyak yang menolaknya. Namun karena adanya anjuran dari pak camat dan pak lurah bahwa varietas unggul baru ini merupakan program pemerintah yang harus dipatuhi, akhirnya petani mau mengikuti. Toh akhirnya hasilnya juga baik. Secara bertahap varietas yang diterima petani mengalami perubahan. Makin lama makin baik. Padi IR-21/IR-22

yang semula sangat peka terhadap hama wereng kemudian diganti dengan varietas unggul tahan wereng (VUTW). Rasa beras makin lama makin enak sesuai selera petani. Hal-hal inilah yang akhirnya mendorong petani dengan mudah mengadopsi inovasi yang didifusikan oleh pemerintah (PPL).

Ini berbeda dengan pertama kali diadakannya Bimas Jagung. Saat itu sedikit sekali petani yang menolak program tersebut. Hasilnya memang terbukti lebih baik dari inovasi sebelumnya atau mungkin juga karena mereka sudah berpengalaman dengan program Bimas padi. Bahkan sampai saat ini hampir tiap waktu varietas yang ditanam petani selalu mengalami perubahan karena memang banyak sponsor dari berbagai perusahaan yang datang sendiri menawarkan bibit yang terbaru. Di lapangan dapat dilihat ada blok-blok tanah tertentu yang menanam varietas Pioneer tetapi di blok yang lain menanam BISI atau C-3 dari Sang Hyang Sri.

Dalam mengadopsi inovasi, petani juga merasakan adanya kemudahan karena PPL rajin datang dan menemui petani. Bahkan sampai malam hari mereka masih mau datang. Mereka seakan sudah menyatu

dengan petani. Semua pelayanan dari pemerintah sudah mencukupi bahkan seperti dimanja. Selama ada rekomendasi dari PPL dan Pak Lurah, kredit usaha tani mudah didapat. Bibit mudah dibeli bahkan ada yang gratis. Di samping itu resiko usaha juga rendah. Seandainya terjadi puso karena bencana alam kredit bisa ditanggung pemerintah. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa petani yang nakal juga tetap ada. Diantaranya pengembalian kredit ada yang terlambat.

Kini inovasi apa saja boleh digunakan petani. Bibit unggul bisa diperoleh dari miliknya sendiri, dari tetangga, beli di pasar (kios) yang sudah berlabel (sertifikat) atau bahkan dapat diperoleh dari mitra kerja yang sengaja melakukan kerjasama dengan petani. Hanya saja untuk jagung hibrida, jika petani memakai bibit yang diperoleh dari hasil tanamannya sendiri biasanya resikonya juga besar karena kegagalan panen kemungkinan besar. Biasanya dari segi kualitas bibit yang berasal dari mitra kerja produktivitasnya lebih baik. Beli benih di pasar yang telah berlabel produktivitasnya juga baik. Tetapi bibit yang diperoleh dari teman atau

kenalan, pada umumnya produktivitasnya lebih rendah. Namun ada petani yang tidak mempermasalahkan. Yang penting bisa memproduksi.

Kredit tidak harus berasal dari pemerintah, karena kredit dari pemerintah memang lebih susah terutama menyangkut prosedur. Pihak swasta juga sudah menawarkan dengan prosedur yang lebih mudah walaupun akhirnya harus mematuhi peraturan yang dibuat perusahaan. Petani tidak perlu lagi di paksa. Semua terserah kemauan petani. Oleh karena itu resiko juga menjadi tanggung jawab pribadi petani.

Petani mempunyai banyak pilihan. Usaha tani bisa dilakukan secara mandiri atau secara kemitraan dengan pengusaha. Petani yang mandiri segala danya dan pemasarannya termasuk pilihan inovasi yang di unggulkan ditentukan sendiri. Biasanya petani yang sedemikian dilakukan oleh petani yang sudah mampu dan tidak mau terikat dengan pihak lain. Bagi petani yang lain ada yang masih menginginkan kemitraan dengan pengusaha. Berdasar pengalaman yang dirasakan petani dan ini agak memberatkan bagi petani adalah mengenai resiko dan kewajiban petani

yang harus ditaati sesuai isi yang tertera dalam surat perjanjian. Walaupun kebutuhan input lebih mudah, namun segi resikonya sangat besar. Kegagalan usaha tetap menjadi tanggungan petani sebesar kredit yang pernah dipinjamnya. Perusahaan sangat tidak fleksibel terhadap segala kerugian yang diderita petani. Bahkan jika kewajiban ini tidak terpenuhi petani akan mendapat sanksi.

Perlakuan penyuluh terhadap petani juga mengalami perubahan. Pada awalnya sikap penyuluh terhadap petani berlaku adil. Kini sikap sedemikian mulai meluntur. Biasanya petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan (Pioneer) lebih diperhatikan daripada petani yang melakukan usaha secara mandiri. Sikap yang sedemikian ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena sejak dahulu penyuluh ini sudah kenal dan akrab dengan mereka. Bahkan diantara mereka (petani) sudah berpengalaman. Potensi petani ini yang kemudian dimanfaatkan oleh penyuluh sehingga tugas penyuluh menjadi lebih ringan.

5.4 Karakteristik Petani Jagung

Bahasan tentang karakteristik petani hanya di

fokuskan pada luas tanah garapan, status sosial-ekonomi dan pengalaman bertani. Luas tanah garapan tidak di dasarkan pada pemilikan tanah tetapi oleh luas penguasaan lahan atau kemampuan mengontrol tanah garapan. Bisa jadi petani yang sedemikian tidak memiliki tanah garapan, tetapi yang tersirat di dalamnya mereka dapat mengatur apa yang harus di tanam, kapan harus menanam dan lain sebagainya. Demikian sebaliknya, bisa jadi mereka secara yuridis formal adalah pemilik atas tanah yang bersangkutan, namun secara faktual mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun tanah tersebut miliknya sendiri. Segala sesuatu yang terkait pengelolaan lahan tersebut harus tergantung pada pihak yang lain. Atas dasar pertimbangan itulah, maka pengelolaan tanah di dasarkan pada luas garapan sebagai indikator.

Dari Tabel 5.4 ini dapat digambarkan bahwa jika penggarapan tanah dipakai sebagai dasar utama bagi petani dalam kegiatan usahanya, maka 90 % dari petani yang diamati hanya mempunyai luas garapan di bawah 0.5 Ha, dengan rata-rata luas tanah garapan 0.45 Ha.

Tabel 5.4 Frekuensi Distribusi Penggarapan Tanah di Sumber Pucung (n=30)

Interval (Ha)	Frekuensi(%)
0.0 < 0.5	90
0.5 < 1.0	10
1.0 < 1.5	0
1.5 < 2.0	0
2.0 < 2.5	0
	100

Yang lebih memprihatikan, petani yang mempunyai tanah di atas satu hektar hampir tidak ada. Faktor penduga sempitnya tanah garapan di dataran rendah ini karena makin padatnya jumlah penduduk. Situasi ini diperburuk oleh adanya fragmentasi tanah garapan.

Rata-rata pengalaman sebagai petani jagung sudah 12.6 tahun. Faktor lain yang ikut mendukung pengalaman bertani ini adalah bahwa petani sudah sering berkomunikasi dengan pejabat pemerintah baik melalui penyuluhan maupun pelatihan pertanian. Keikutsertaan petani dalam program Bimas, Insus maupun Supra Insus banyak membantu petani mengenal inovasi baru. Terlebih lagi dengan keikutsertaan petani dalam program penangkaran bibit jagung hibrid-

da, komunikasi mereka dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pioneer semakin lebih intensif.

Tabel 5.5 Frekuensi Distribusi Pengalaman Bertani di Sumber Pucung

Interval (tahun)	Frekuensi (%)
0 < 5	0
5 < 10	30
10 < 15	23.33
15 < 20	33.33
20 < 25	13.33
	100

Berdasar statusnya, 60 % dari petani yang diamati adalah petani murni, dalam arti adalah mereka yang sepenuhnya berasal dan bekerja sebagai petani tanpa ada jabatan atau sumber ekonomi lain yang menyertainya (Tabel 5.6).

Tabel 5.6 Frekuensi Distribusi Status Petani di Sumber Pucung

Interval	Frekuensi (%)
Petani Biasa	60.00
Petani-Pegawai/Pamong	3.33
Petani-Pedagang	23.33
Petani-pegawai-pamong-pedagang	13.33
	100

Petani yang mempunyai pekerjaan rangkap sebagai pamong desa ataupun pegawai negeri jumlah

nya juga terbatas (3.33%). Sebaliknya, petani yang mempunyai usaha ganda sebagai pedagang ternyata lebih banyak 23.3 % dan 13.33 %.

BAB 6

BAB 6

BAHASAN TERHADAP DIFUSI INOVASI

6.1 Kendala dalam Difusi Inovasi

Sampai kini untuk mengembangkan inovasi, tersedianya modal bagi petani tetap menjadi kendala utama. Kehadiran pengusaha seperti yang terjadi di Tulungrejo ternyata tidak dapat memecahkan masalah kurangnya permodalan yang dihadapi petani. Sebaliknya, kehadiran pengusaha justru melahirkan permasalahan baru dengan adanya ketimpangan dalam kesetaraan usaha.

Sebaliknya, pemerintah juga ternyata kurang jeli. Walaupun dana pembangunan telah tersedia ternyata program yang dilakukan kurang memperhatikan apa yang menjadi minat petani untuk mengusahakan kentang. Akibatnya modal yang semula oleh pemerintah ditujukan untuk pengembangan usaha peternakan, ternyata oleh petani dialihkan kembali untuk perusahaan komoditas kentang.

Ini menunjukkan bahwa, adanya intervensi dari pemerintah dalam mendifusikan suatu inovasi dapat mengakibatkan terjadinya dampak lebih lanjut. Harga inovasi yang seharusnya murah, dengan adanya intervensi pemerintah malah menjadi lebih mahal. Inovasi usaha ternak sapi perah melahirkan diversifikasi antara usaha peternakan dan komoditas kentang. Koperasi juga timbul namun orientasi petani tetap pada pasar. Pola pertanian tradisional juga beralih menjadi pola pertanian komersial. Yang menjadi prioritas bagi petani komersial adalah tersedianya inovasi yang sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi di pasar. Keadaan ini menjadi mudah berkembang jika didukung oleh adanya peluang pasar, harga yang sesuai dengan harapan petani di samping tersedianya sarana produksi.

Di Sumber Pucung sempitnya tanah garapan menjadi kendala dalam pengembangan inovasi. Dengan luas tanah garapan yang sempit (kurang dari 0.5 Ha) sulit untuk dibayangkan, bagaimana komoditas pertanian dapat lebih di intensifkan lagi. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan, amatlah sulit untuk

dapat meningkatkan pendapatan petani jika luas garapannya dibawah dari setengah hektar. Apalagi dimasa mendatang terdapat peluang, terjadinya fragmentasi tanah akan terus berlanjut sehingga tanah pertanian akan semakin lebih menyempit lagi.

Kelangkaan tanah ini telah menjadi keprihatinan yang tidak pernah berhenti. Tahun 1930, de Vries (1972:13) telah melaporkan dan menyatakan keprihatinannya atas pemilikan tanah rata-rata di Jawa yang tinggal 0.86 Ha. Kalau kini luas garapan tinggal 0.40 Ha tentunya masalah tanah ini akan semakin berat apalagi harus juga menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat.

6.2 Menyimak Inovasi yang Bersumber dari Pengusaha

Kasus yang terjadi Pioner dan Indofood cukup menarik untuk dibahas. Dimensi struktural selain menonjol juga bervariasi. Bahkan pengusaha dalam menggunakan kekuatan struktur pasar amat besar. Oleh pasar negara tidak lagi diberlakukan sebagai "pesaing". Perannya justru dimanfaatkan untuk mendorong kekuatan pasar. Walaupun pada sisi yang lain negara dapat menjadi penyeimbang antara kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat.

Dengan menggunakan fenomena difusi memberikan makna, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan adopsi tidak semata-mata karena peran pemerintah dan pengusaha semata, tetapi keberadaan petani sebagai masyarakat juga ikut menentukan. Oleh karenanya, keterkaitan dari ketiga struktur tersebut dapat menciptakan kesetaraan dan dalam kepentingan yang sama walaupun kadarnya berbeda.

Kasus yang terjadi di Pioneer dan Indofood walaupun memberikan manfaat positif bagi perekonomian masyarakat, namun baik pengusaha maupun pemerintah sebagai sumber inovasi masih mempunyai kesan menafikan masyarakat dengan membatasi independensinya yang secara tradisional telah menjadi kultur petani. Pengusaha hanya memberikan kemudahan petani untuk mengikuti kegiatan agro-bisnis, sedangkan lembaga petani yang ikut serta menunjang kegiatan tersebut diabaikan. Kelemahan ini juga ditunjukkan oleh adanya dependensi petani pada pengusaha. Bahkan pengusaha menciptakan monopoli dan oligopoli pasar sehingga menciptakan terjadinya pasar tertutup.

Hasil pengamatan ini nampaknya terdapat keselarasan dengan Bachriadi (1995:152) pada model *contract farming* yang melahirkan ketergantungan petani pada pengusaha sebagai pemilik modal. Namun bedanya pada saat pra-produksi antara negara, petani dan pengusaha dapat melakukan terjadinya interdependensi di antara ketiganya.

Hubungan antara pengusaha dengan petani jika ditinjau secara horizontal, secara kasat mata nampaknya pengusaha memberi kesempatan bagi petani untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. Secara informal kemudian dikoordinasikan ke dalam oligopoli dan secara formal melalui monopoli.

Integrasi secara vertikal dilakukan dengan asosiasi bisnis. Secara informal pengusaha melakukan sistim kontrak yang terpadu. Asosiasi vertikal yang mengorganisir perusahaan hulu dan perusahaan hilir di dalam satu rangkaian mata rantai produktif, walaupun dalam bisnis pada umumnya jarang terjadi, namun dalam agribisnis juga timbul. Akibatnya, organisasi vertikal perusahaan walaupun berada di dalam sektor yang berbeda namun dapat digabungkan di dalam rantai

produktip yang sama. Demikian halnya jika produk dari perusahaan yang didiversifikasi tidak memiliki hubungan secara teknologi. Organisasi yang di diversifikasi ini, oleh perusahaan tetap dipertahankan secara informal melalui ikatan personal yang seringkali dipaksakan oleh pemilik saham silang. Kelompok pengusaha yang melakukan diversifikasi ini umumnya tergabung dalam korporasi konglomerat. Pada tahapan berikutnya perusahaan memusatkan diri pada korporasi besar yang dipadukan secara vertikal melalui koordinasi dan kepemilikan saham.

Tipe organisasi perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah adalah perusahaan atau korporasi yang mampu dan berhasil melakukan interaksi dengan pejabat negara guna melakukan kesepakatan dan kebijaksanaan yang mewakili kepentingan publik. Cara yang dilakukan Pioner (kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan petani) ini ternyata memperoleh hasil yang lebih baik karena mengikut sertakan kepentingan publik. Adopsi inovasi bertumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan Indofood yang hanya

mengandalkan adanya kerjasama antara petani dengan pengusaha.

Hanya saja hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pemerintah daerah di tingkat lokal, bukanlah karena kemampuan pengusaha melakukan intervensi di dalam menentukan pejabat pemerintah daerah yang diinginkan pengusaha. Akan tetapi hubungan harmonis ini lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor ketidak sengajaan. Oleh karenanya, kerjasama ini juga tergantung pada penunjukan individu pejabat pemerintah.

Akibatnya, independensi pasar tidak menentu. Interdependensi ini mulai berkembang ketika petani yang tergabung dalam kelompok tani ikut dilibatkan dalam pertemuan secara rutin, formal dan transparan antara pemerintah, pengusaha dan petani.

Kelompok tani ini nampak penting karena dapat memperkuat posisi tawar-menawar (*bargaining-position*), melakukan fungsi pertukaran dan interdependensi. Kelompok tani ini juga memberikan bahan pertimbangan dan bahkan dapat memaksa pemerintah atau pengusaha untuk memberikan sanksi bagi petani yang tidak disiplin. Independensi kelompok tani

juga memperlancar difusi informasi, jaringan kerja dan negosiasi. Pemerintah juga menempatkan dan memperbantukan aparatnya di kelompok tani guna mendorong terjadinya harmonisasi hubungan timbal balik dan kemudahan arus informasi.

Adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah dari perspektif konservatif yang semula difusi inovasi menjadi alat kekuasaan dan kepentingan politik pemerintah, menuju perspektif liberal yang mengandalkan kekuatan ekonomi (mekanisme pasar), sangat dirasakan manfaatnya bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Liberalisasi perdagangan dipakai sebagai strategi guna menghadapi persaingan dengan pengusaha domestik yang di proteksi. Jika demikian, maka keuntungan yang diterima petani karena adanya proteksi akan merupakan kerugian bagi pengusaha. Hal ini juga berarti, adanya subsidi dari pemerintah yang diterima petani, merupakan kerugian bagi pengusaha.

Jadi, adanya kebijaksanaan subsidi akan merupakan kerugian bagi pemberi subsidi tetapi merupakan keuntungan bagi penerima subsidi. Jika terjadinya keuntungan ataupun kerugian yang di

derita petani disebabkan oleh adanya pengaruh subsidi, maka kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah *less zero-sum*. Situasi yang sedemikian ini jika berkelanjutan akan mendorong terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dan pengusaha di satu pihak dan pemerintah dengan petani di pihak yang lain.

Konflik ini hanya terhindari jika masing-masing pihak berperilaku arif dan berpikir secara jernih (*prudent*). Pemberian subsidi disatu pihak tidak ditujukan untuk memberikan efek terjadinya kerugian bagi pemberi subsidi. Sebaliknya, pemberian subsidi tersebut harus diberikan makna, disamping untuk lebih memperkuat bagi yang menerima subsidi juga secara tidak langsung maupun secara langsung peningkatan kekuatan penerima subsidi akan memperkuat akumulasi kekuatan pemberi subsidi. Oleh karena itu, subsidi yang diberikan akan saling memperkuat satu sama lain.

Jadi pengusaha yang melakukan liberalisasi usaha, bisa mendorong liberalisasi petani. Pengusaha dapat independen untuk mengakses pasar, tentunya dengan sentuhan pemerintah. Pemerintah

juga melakukan kompetisi dengan pengusaha dan memberikan subsidi bagi petani ataupun perusahaan yang berkinerja baik dan efisien. Tekanan kompetitif bisnis tidak hanya berasal dari pasar tetapi juga berasal dari negara. Oleh karenanya maka negara juga independen.

Manfaat kompetitor dari negara, bukan saja diterima oleh pengusaha yang mendiversifikasikan usahanya, akan tetapi pengusaha juga terdorong melakukan monopoli. Jadi manfaat dari liberalisasi mendorong pengusaha mampu untuk menguasai inovasi, produksi dan pemasarannya, serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

6.3 Implikasi Mekanisme Difusi Inovasi dan Reposisi Pengusaha

Dalam melakukan kerjasama, peran petani tidak sepenuhnya dalam independen. Pada proses pra-produksi posisi petani independen karena mampu melakukan tawar-menawar dengan pihak perusahaan sehingga di antara keduanya terikat dalam hubungan yang saling membutuhkan (interdependensi). Di satu sisi perusahaan membutuhkan lahan untuk areal usaha. Adapun di sisi yang lain, walaupun petani

mempunyai tanah, akan tetapi teknologi dan modal yang dikuasainya masih terbatas sehingga mereka membutuhkan modal dan inovasi.

Dalam tahap berikutnya (proses produksi dan pasca produksi) petani menjadi dependen terhadap kepentingan perusahaan. Petani sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan tawar menawar. Segala kegiatan yang dilakukan harus tunduk dan taat kepada keputusan perusahaan, termasuk di dalamnya macam inovasi apa yang diusahakan, kapan harus diusahakan, kemana harus menjualnya serta berapa harga jual yang di terima. Kesemuanya harus menyesuaikan dengan persyaratan yang telah disepakati dalam surat perjanjian.

Adapun dinas pertanian dan pemerintah daerah, walaupun bertindak sebagai sumber inovasi segala kebijaksanaannya menyesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Penyebabnya, orientasi perusahaan sebagai penyedia inovasi adalah bisnis dimana macam, kualitas, kuantitas dan waktu kapan perusahaan memperoleh hasil, telah ditentukan sesuai kepentingan bisnis. Dengan keadaan sedemikian maka pengusaha bersifat independen.

Peran perusahaan tidak sekedar bertindak sebagai institusi ekonomi dengan cara menyediakan input atau memasarkan produk petani. Perusahaan juga bertindak sebagai motivator dan dinamisator bagi petani guna melakukan gerakan perubahan dari orientasi yang berpola usaha tani (*peasant*) menjadi pola perusahaan pertanian (*farmer*). Sebagai akibatnya, aktivitas petani tidak lagi berorientasi untuk memperoleh produk, tetapi segala sesuatunya telah menjadi berorientasi kepada permintaan pasar. Oleh karenanya, peran perusahaan tidak lagi sekedar sekedar motivator inovasi fisik, tetapi juga ikut berperan sebagai motivator inovasi yang bersifat ekonomis.

Inovasi sebagai ide yang dianggap baru, jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya lebih menguntungkan. Nilai tambah komoditas jagung hibrida setiap hektar sebesar Rp 1.214.988,- dan IBCR (*incremental benefit cost ratio*) 1.80 jika dibanding inovasi jagung sebelumnya. Adapun nilai tambah pada komoditas wortel (C-1) sebesar Rp 527.264,- dengan IBCR 1.22. Angka kuantitatif ini mempunyai makna bahwa dengan inovasi baru telah

terjadi peningkatan manfaat sebesar 80 % untuk komoditas jagung dan peningkatan sebesar 22 % untuk komoditas wortel.

Ketergantungan perusahaan terhadap input (inovasi), pasar lokal dan internasional dan kesaling-tergantungan (interdependensi) antara petani sebagai pengguna inovasi, perusahaan sebagai penyedia sumber inovasi serta pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pengatur kebijakan secara lokal nampak menonjol.

Hubungan kerjasama antara pengusaha dan petani dengan mengikutsertakan pemerintah berdampak positif terhadap peningkatan adopsi. Ini ditunjukkan oleh tingkat adopsi rata-rata pada program Pioner (0.81 %) yang lebih tinggi daripada program Indofood yang hanya 0.74 % (Tabel 6.1). Jadi walaupun rata-rata luas perusahaan lahan di Indofood (0.65 Ha) lebih besar daripada rata-rata luas perusahaan lahan di Pioneer (0.45 Ha) adalah sangat tidak berarti jika tingkat adopsi ternyata lebih rendah. Lebih-lebih lagi jika ternyata antara peningkatan adopsi di Pioneer berkorelasi nyata dengan peningkatan produktivitas

($r=0.93$) dan adanya kerjasama di Indofood berkorelasi yang sangat nyata dengan peningkatan produktivitas ($r=0.69$).

Tabel 6.1 Perbedaan antara Kerjasama Negara-Pasar-Masyarakat dan Kerjasama Pasar-Masyarakat

Uraian	N-P-M	P-M	Uji beda
A. UMUM			
Lokasi	Dataran rendah	Dataran tinggi	
Komoditas	Jagung	Wortel	
Pengusaha	Pioneer	Indofood	
B. KHUSUS			
Tingkat adopsi(%)	0.81	0.74	Z=3.12
Produktivitas	3.66	14.58	
Korelasi adopsi dengan Produktivitas	0,93	0.69	

Catatan: N-P-M (Pemerintah-Pengusaha-Petani)
P-M (Pengusaha- Petani)
Petani)

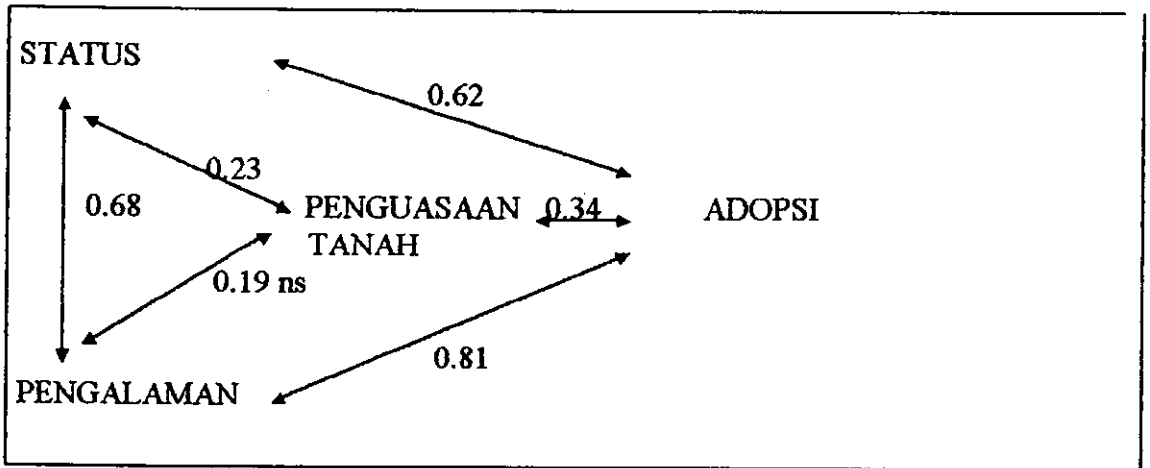
Angka-angka ini memberi indikasi bahwa adanya keikut-sertaan pemerintah dalam kerjasama antara petani dengan pengusaha seperti yang ada pada program Pioner telah mendorong petani untuk meningkatkan adopsinya. Ini juga dibuktikan oleh adanya korelasi yang nyata antara tingkat adopsi

dengan produktivitas pada program Pioneer dan pada program Indofood.

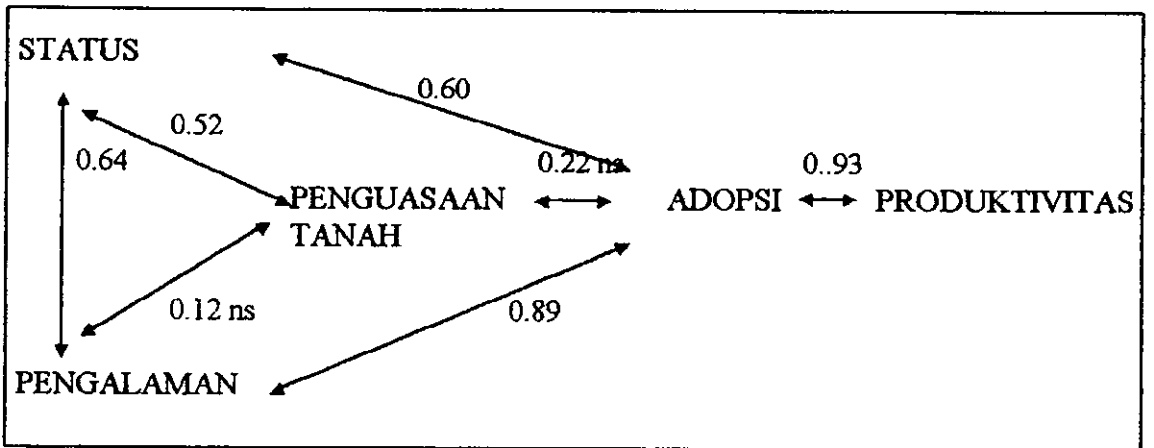
Makna yang terkandung dalam angka ini adalah membenarkan hipotesis pertama bahwa adanya jalinan kerjasama antara kepentingan ekonomi pengusaha dan kepentingan politik pemerintah yang besar dapat meningkatkan adopsi dan produktivitas. Hal ini patut diduga karena diantara ketiganya saling mendukung dan saling tergantung.

Keberadaan perusahaan walaupun mempunyai inovasi dan modal tidak akan cukup berarti jika tidak memiliki lahan. Adanya lahan dan kesediaan petani yang dapat menjalankan proses produksi sangat dibutuhkan. Ini juga memberi arti bahwa tujuan secara ekonomis tidak akan berdiri secara mutlak. Oleh karena itu maka kepentingan sosial juga harus dipertimbangkan. Disini di antara ketiganya saling tergantung dan saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkan modal dan teknologi yang lebih produktif. Adapun pemerintah membutuhkan mitra dari pengusaha yang dapat memfasilitasi kebutuhan petani.

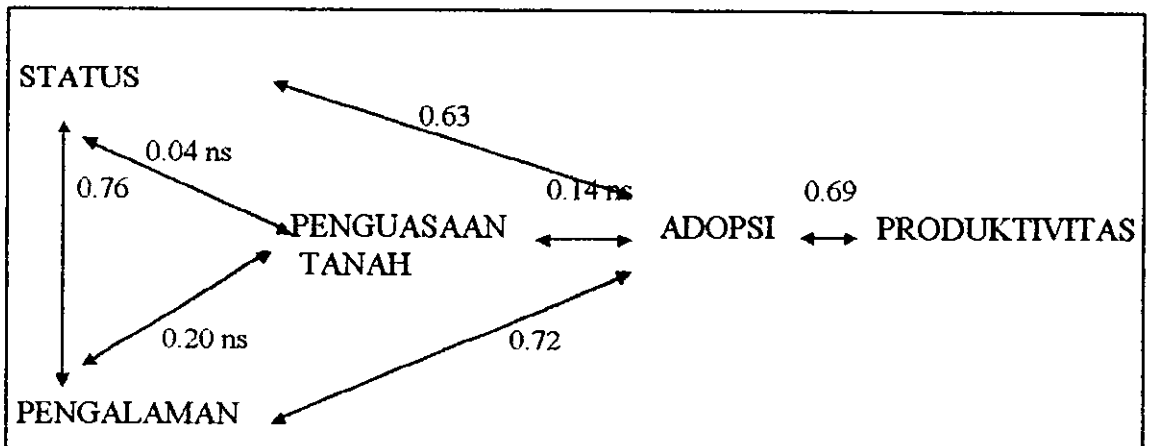
Gambar 6.1.A Korelasi antar Faktor terhadap Adopsi Inovasi



Gambar 6.1.B Korelasi antar Faktor terhadap Adopsi Inovasi pada Pola Pioneer



Gambar 6.1.C Korelasi antar Faktor terhadap Adopsi Inovasi pada Pola Indofood



Jika salah satu di antara ketiga variabel tersebut tidak berfungsi maka peningkatan adopsi yang diharapkan juga akan mengalami gangguan. Sebaliknya di Indofood, rendahnya tingkat adopsi diduga karena kurang dilibatkannya pemerintah baik dalam keterkaitannya dengan petani maupun dengan perusahaan.

Selain faktor kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan petani dapat mempengaruhi adopsi inovasi, juga faktor petani sebagai pengguna inovasi seperti penguasaan lahan ($r=0.34$), pengalaman sebagai petani ($r=0.81$) dan status petani ($r=0.62$) ikut serta menentukan tingkat adopsi (Gambar 6.1.a)

Di Pioneer, faktor petani yang mempengaruhi adopsi adalah pengalaman bertani ($r=0.89$) dan status petani ($r=0.60$). Akan tetapi pengaruh luas tanah garapan ($r=0.22$) secara statistik tidak signifikan (Gambar 6.1.b). Adapun di Indofood, faktor endogen petani yang berpengaruh terhadap adopsi adalah luas tanah garapan ($r=0.14$ ns) namun tidak signifikan, pengalaman bertani ($r=0.72$) dan status petani ($r=0.63$) ikut serta menentukan

tingkat adopsi (Gambar 6.1.c). Adanya pengaruh luas lahan yang tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat adopsi diduga karena pengaruh model penentuan tingkat adopsi yang hanya di dasarkan pada rasio antara luas lahan yang menggunakan inovasi baru dengan seluruh luas lahan yang dikuasainya. Model ini merupakan salah satu kelemahan yang perlu pengkajian lebih lanjut.

Jika dari ketiga karakteristik petani (luas penggarapan lahan, pengalaman bertani dan status yang dimiliki petani di korelasikan, maka dapat diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara luas tanah garapan petani dengan status petani ($r=0.23$). Demikian juga antara luas tanah garapan dengan pengalaman bertani ($r=0.19$). Hanya saja antara pengalaman bertani dengan status yang menyertainya terdapat korelasi yang signifikan ($r=0.68$) (Tabel 6.2).

Ini memberi indikasi, bahwa pada petani yang telah berpengalaman akan terjadi alih status dari petani murni menjadi petani yang selain memperoleh pendapatan dari sektor pertanian juga melakukan

pekerjaan yang lain apakah sebagai pengusaha atau juga sebagai pamong desa. Sebaliknya, terjadinya perubahan terhadap luas garapan, baik pengalaman dan status petani tidak akan terjadi perubahan.

Tabel 6.2 Matrik Korelasi Luas lahan, Status Petani dan Pengalaman Bertani pada Petani di Tulungrejo dan Sumber Pucung

	Luas Tanah	Status	Pengalaman
Luas tanah	-	0.23	0.19ns
Status	0.23	-	0.68
Pengalaman	0.19ns	0.68	-

Jika antara petani yang melakukan kerjasama dengan Pioneer dan kerjasama dengan Indofood di perbandingkan, terdapat perbedaan korelasi diantara ketiganya. Di Pioneer, status petani berkorelasi signifikan dengan luas tanah garapan ($r=0.52$) maupun dengan pengalaman bertani ($r=0.64$). Adapun antara pengalaman bertani dengan luas tanah garapan tidak terdapat korelasi ($r=0.12$)(Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Matrik Korelasi Luas lahan, Status Petani dan Pengalaman Bertani pada Petani Yang Mengusahakan Komoditas Jagung

	Luas Tanah	Status	Pengalaman
Luas tanah	-	0.52	0.12ns
Status	0.52	-	0.64
Pengalaman	0.12ns	0.64	-

Sebaliknya Di Indofood (Tabel 6.4), status petani hanya berkorelasi signifikan dengan pengalaman bertani ($r=0.76$). Adapun luas tanah garapan, tidak berkorelasi dengan pengalaman bertani ($r=0.20$) maupun dengan status petani ($r=0.04$).

Tabel 6.4 Matrik Korelasi Luas lahan, Status Petani dan Pengalaman Bertani pada Petani Yang Mengusahakan Komoditas Hortikultura

	Luas Tanah	Status	Pengalaman
Luas tanah	-	0.04ns	0.20ns
Status	0.04ns	-	0.76
Pengalaman	0.20ns	0.76	-

Adopsi terhadap inovasi yang didistribusikan ternyata juga bervariasi. Namun demikian, ditinjau secara umum distribusi adopsi inovasi menyebar secara normal. Umumnya adopsi inovasi yang terbanyak terdistribusi antara skor 0.70 sampai dengan 0.90. Adapun tingkat adopsi rata-rata petani adalah sebesar 0.77. (Tabel 6.5)

Tingginya adopsi di Sumber Pucung dapat diduga terkait dengan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi petani ketika melakukan akad kerjasama dengan pihak perusahaan. Akibat dari pola

perusahaan yang berorientasi bisnis harus diikuti oleh petani, maka petanipun harus menyesuaikan dengan pola dan aturan yang ada dalam perusahaan. Agar hal tersebut tercapai, maka bimbingan dari pemerintah maupun perusahaan bersifat intensif dan ketat. Dampak positif dari adanya kerjasama antara petani dengan pihak perusahaan ini adalah meningkatnya adopsi petani.

Tabel 6.5 Frekuensi Distribusi Adopsi Inovasi di Sumber Pucung dan Tulungrejo

Interval (%)	Frekuensi (%)		
	SumberPucung	Tulungrejo	Rata-Rata
0.6 < 0.7	3.33	3.33	3.33
0.7 < 0.8	46.67	73.33	60.00
0.8 < 0.9	33.33	23.00	28.33
0.9 < 1.0	6.67	-	3.33
1.0	10.0	-	5.00
	100	100	100.

Sebaliknya tingkat adopsi petani di dataran tinggi ternyata lebih rendah. Ada dugaan lebih rendahnya tingkat adopsi ini karena pihak perusahaan lebih memberikan kebebasan bagi petani untuk melakukan kreativitasnya sendiri dalam usaha tani. Karena belum sadarnya petani akan pentingnya

makna disiplin terhadap inovasi, maka akibatnya pola usahanya disesuaikan dengan kemampuan petani.

Jika dari kedua lokasi yang diamati di bandingkan, tingkat adopsi petani di dataran rendah (0.80) masih lebih tinggi daripada tingkat adopsi petani di dataran tinggi yang hanya 0.74 (Tabel 6.1).

Dalam uji statistik (pada lampiran 1) juga dapat dibuktikan bahwa jumlah peringkat adopsi (*Sum of ranks*) yang bekerjasama dengan Pioneer = 1126.5 (pada sampel petani $n_1 = 30$) dan jumlah peringkat adopsi (*Sum of ranks*) yang bekerjasama dengan Indofood = 703.5 (pada sampel petani $n_2 = 30$). Dengan menggunakan kaidah pengujian pada Z hitung = 3.127 maka dapat disimpulkan bahwa antara kedua pola tersebut dimana Pioneer menggunakan pola kerjasama antara pengusaha, petani dan pemerintah dan Indofood dengan pola kerjasama hanya antara pengusaha dan petani, secara statistik memang terdapat perbedaan yang sangat nyata.

6.4 Timbulnya Dominasi Pengusaha

Secara empirik dominasi pengusaha ditunjukkan ketika di Indofood harga wortel ditentukan secara

sepihak oleh perusahaan sedangkan semua produk yang diperoleh petani juga wajib dijual kepada perusahaan. Pada perusahaan Pioneer, produk benih jagung hibrida yang dihasilkan petani hanya dihargai 25 % diatas harga jual jagung konsumsi, bukan sebagai jagung bibit yang harganya 8 kali lipat dari harga jagung konsumsi. Seandainya karena situasi yang memaksa, sehingga bibit yang diperoleh disisihkan (tidak dilaporkan kepada perusahaan), maka hasilnya tetap juga tidak akan produktif. Ini dikarenakan masih adanya perlakuan (*treatments*) khusus yang sengaja dirahasiakan dan tidak akan diberikan sepenuhnya kepada petani. Teknologi yang dirahasiakan tersebut mempunyai nilai tambah dan nilai ekonomis tinggi. Ini ditunjukkan dalam surat perjanjian pasal 6 yang menyatakan:

"Jika pihak kedua (petani) membawa pulang hasil panen maka pihak kedua akan dikenakan denda Rp70.000 per-sak jagung dan hasil panen tetap disita oleh pihak pertama".

Secara kasat-mata petani memang memiliki usaha yang dilakukan di tanahnya sendiri. Namun hal ini tidaklah cukup berarti karena secara tidak kasatmata pula petani tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk menguasainya. Dalam pasal 2

disebutkan:

"Seluruh pertanaman, benih jantan maupun betina serta produk yang diperoleh adalah milik pihak pertama".

Akibatnya petani bekerja secara mekanis dalam arti segala sesuatunya harus tunduk dan patuh terhadap perintah dan aturan perusahaan. Hak petani hanya sebatas bekerja dan memperoleh kesempatan kerja di atas tanah miliknya sendiri, bukan mengatur dan menguasai usahanya. Kegiatan usaha terikat dengan perjanjian kontrak kerjasama yang disodorkan perusahaan dengan disaksikan pejabat pemerintah setempat tanpa memberi kesempatan pada tiap petani untuk melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar ini hanya dilakukan oleh perwakilan petani atau pemimpin kelompok yang tidak selamanya diketahui dan disepakati oleh anggota kelompoknya.

Mekanisme terjadinya proses tawar-menawar hanya berlandaskan pada asumsi pengusaha. Menurut pendapat pengusaha dikatakan bahwa, suara ketua kelompok pada dasarnya sudah mewakili suara seluruh anggota. Namun demikian, dalam prakteknya yang terjadi justru kebalikannya. Acap kali terjadi

suara ketua kelompok yang mewakili tidak mampu dan tidak mau menyuarakan kepentingan anggota kelompok. Sebaliknya, yang disampaikan ketua kelompok justru suara untuk kepentingan pribadi. Suara ini dipakai sebagai alat oleh pengusaha untuk mempengaruhi anggotanya. Akibatnya, netralitas dan independensi masyarakat tani mengalami distorsi.

6.5 Dampak Kerjasama Pemerintah, Pengusaha, dan Petani

Fenomena lain menunjukkan bahwa selama berlangsungnya difusi inovasi, antara pemerintah, pengusaha dan petani selalu melakukan pertukaran ide dan pertukaran informasi. Interaksi ini terjadi karena pengusaha memanfaatkan kultur dan memadukan kepentingan yang saling mendukung. Petani mempunyai potensi dalam pengalaman berusaha tani. Secara umum, petani telah memahami terhadap karakteristik komoditas yang didifusikan pengusaha. Fluktuasi musim dan hama tanaman telah dikuasai berdasar pengalaman sebelumnya, walaupun dalam hal yang spesifik masih terdapat beberapa hal yang masih belum sepenuhnya dikuasai. Pengusaha juga mempunyai kekuatan untuk menyimak peluang pasar,

ketersediaan modal dan penguasaan inovasi. Oleh masyarakat, pejabat pemerintah masih diperlakukan sebagai panutan yang disegani serta pula dipandang sebagai masyarakat kelas elit yang mampu untuk mengakses ke pengusaha.

Oleh karena kepercayaan petani kepada pengusaha dan pemerintah bersifat kohesif, perkembangan berikutnya walaupun selama difusi inovasi terselip adanya dominasi pengusaha dan eksploitasi yang berjalan secara halus, namun petani tidak dapat merasakannya. Hal lain juga disebabkan karena pejabat pemerintah dan pengusaha yang mempunyai kultur yang lebih tinggi, mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam mendifusikan inovasi dan berkomunikasi dengan petani. Akibatnya, dengan difusi yang secara matematis bermakna mendistribusikan sebagian kekuasaan pengusaha kepada petani sehingga mengurangi sebagian kekuasaan pengusaha, namun secara tidak kasat mata justru yang terjadi sebaliknya, yaitu adanya akumulasi kekuasaan pada pengusaha yang semakin besar. Oleh karenanya, dengan adanya difusi inovasi dapat berbanding lurus dengan akumulasi kekuasaan.

Semakin banyak inovasi itu didifusikan maka semakin besar pula kekuasaan pengusaha yang akan diperoleh. Sebaliknya apabila sebagai aktor tidak mampu untuk mendifusikan inovasi, maka kekuasaannya juga akan lebih kecil.

Fenomena akumulasi kekuasaan ini terjadi karena oleh pengusaha itu sendiri inovasi tidak sertamerta akan sepenuhnya didifusikan kepada masyarakat. Bahkan ada tendensi, pada hal-hal tertentu akan ada upaya untuk melakukan pembatasan dan pencegahan agar difusi inovasi dari pengusaha kepada masyarakat tidak akan berlangsung secara sempurna. Ini dimaksudkan agar inovasi tetap dikuasai pengusaha.

Konsep (Rogers dan Shoemaker, 1971:102) yang menyatakan bahwa inovasi harus memberikan hasil yang riil memang telah terbukti. Namun makna yang ada di dalamnya menjadi kabur karena pengusaha menciptakan terjadinya ketergantungan petani pada perusahaan yang memang menjadi obsesi dan tolok ukur keberhasilan perusahaan.

Kemampuan dan kecepatan petani untuk mengadopsi tidak terlepas dari kemampuan

komunikator, baik yang dilakukan perusahaan maupun penyuluh pertanian lapangan (PPL). Keterlibatan PPL di lapangan, tidak berjalan secara otomatis dalam kerjasama dengan perusahaan. Negosiasi perusahaan dengan dinas pertanian setempat tetap dilakukan untuk mencari dan memperoleh penyuluh yang profesional. Dasar pertimbangannya didasarkan prinsip bisnis. Jabatan sebagai penyuluh tidak dijadikan sebagai alat ukur bagi perusahaan. Namun yang lebih diutamakan adalah profesionalisme sebagai penyuluh, keakraban dan kemampuan untuk memotivasi serta yang lebih utama adalah memiliki jiwa bisnis.

Ini dilakukan agar penyuluh mengikuti irama perusahaan dan bekerjasama demi kepentingan pengusaha. Oleh karenanya maka pihak perusahaan mempunyai independensi dalam merekrut dan menentukan PPL untuk bekerjasama. Kerjasama ini juga dilakukan secara formal maupun informal dengan Pemerintah Daerah (Camat dan Kepala Desa). Selain demi kepentingan praktis guna memperoleh kemudahan dari pemerintah daerah, kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya konflik dan kontradiksi dengan norma yang berlaku di masyarakat atau kemungkinan terjadinya penentangan dari pemerintah karena adanya kepentingan yang kontradiktif dan masyarakat merasa dirugikan. Oleh karenanya tugas pengusaha selain terkait dengan usaha bisnis juga memberikan motivasi untuk meyakinkan pemerintah maupun petani.

Dengan orientasi pendekatan sedemikian, pejabat pemerintah telah terkonstruksi oleh perusahaan bahwa inovasi yang ditawarkan adalah yang terbaik dan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pasar. Adanya kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap inovasi yang ditawarkan, karena perhatian pengusaha atau pejabat pemerintah terfokus pada individu atau tokoh yang dianggap mewakili individu. Dengan adanya keputusan yang kurang mempertimbangkan kondisi riil dan struktur masyarakat, maka yang nampak adalah terjadinya kepatuhan semu. Petani terikat kontrak yang tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyatakan alternatifnya. Kreativitas masyarakat menjadi terbelenggu. Akibatnya, nilai inovasi itu sendiri akhirnya dapat dipertanyakan, karena masih

adanya kesenjangan antara manfaat yang diterima pengusaha dengan yang dirasakan petani.

Dengan difusi inovasi ini, sekilas perusahaan banyak membantu petani dengan cara memberi alternatif inovasi terbaru bahkan dengan menyediakan modal dan jaminan pemasaran. Namun yang tersirat adalah, petani telah terbawa kedalam jerat dan pengaruh kekuasaan serta dependen kepada perusahaan. Jadi keberhasilan difusi inovasi dari perusahaan ke petani karena disertai adanya dominasi pada tingkat tertentu.

6.6 Rangkuman

Mekanisme dan substansi difusi inovasi akan terkait dengan pilihan kebijaksanaan pembangunan yang berlaku pada konteks zaman itu. Kebijaksanaan pembangunan di Indonesia sejak di undangkannya UU nomor 12 /1992 yang dominan adalah liberalisasi ekonomi bukan nasionalisme ekonomi seperti yang terjadi pada era 50-an. Kini pengusaha maupun petani diberi kebebasan untuk memperoleh inovasi maupun mendifusikannya secara mandiri tanpa adanya keterikatan dengan kepentingan dan kebijaksanaan pemerintah.

Dengan merujuk pada konteks zaman dan kilas sejarah ini berarti bahwa apa yang diusahakan pengusaha maupun petani akan selalu memperhatikan dan menyesuaikan dengan konteks ekonomi politik pemerintah yang berlaku pada saat itu.

Kebijaksanaan pemerintah yang melakukan liberalisasi ekonomi dimanfaatkan secara optimal oleh Indofood dengan tidak melibatkan pemerintah dalam kegiatannya. Prinsip yang dipakai adalah, kegiatan produksi ditujukan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok usaha (korporasi). Dengan alasan yang sedemikian, perusahaan bertindak secara otonom dan efisien dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah tidak perlu dilibatkan karena akan mempengaruhi privatisasi pengusaha. Dengan tidak adanya intervensi pemerintah perusahaan menjadi independen dan terhindar dari tekanan struktural pemerintah. Dengan didukung situasi petani yang saat itu tidak mempunyai pegangan dan kekuatan (inovasi dan peluang usaha) memberi peluang bagi pengusaha agar petani mendukung kepentingan pengusaha dengan cara modal dan resiko ditanggung sendiri oleh petani.

Kebijaksanaan yang terjadi di Pioneer berlaku sebaliknya. Karena perusahaan berkepentingan terhadap kelangsungan usaha, terutama terkait dengan pemenuhan permintaan pasar dan pengamanan modal yang ditanamkan di petani, maka intervensi pemerintah sangat diharapkan sebagai mediator untuk mengamankan kebijakan perusahaan. Dalam posisi sedemikian pemerintah berada di tengah-tengah antara 2 kepentingan. Pada satu sisi untuk mengamankan kebijakan ekonomi pengusaha. Pada sisi yang lain, sebagai institusi politik negara berkewajiban memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi pemerintah ini menjadi penyeimbang antara 2 kekuatan yaitu kekuatan pasar yang kapitalis dan masyarakat yang pluralistik. Pemerintah menginginkan agar seluruh potensi dinamik kapitalis yang ada, dipakai untuk menciptakan kemakmuran. Sementara dipihak yang lain dapat dipakai untuk mempertahankan tingkat keamanan dan keadilan bagi masyarakat.

Hal-hal yang perlu dihindari dari intervensi pemerintah ini adalah, jangan sampai penciptaan

kebijaksanaan publik yang dilakukannya melampaui batas konstitusional yang dimilikinya. Ini dikarenakan adanya pandangan dari teoriwan pilihan publik yang mengingatkan, kekuasaan pemerintah jangan sampai "disewa" untuk lebih membela kepentingan pengusaha.

Dalam hal timbulnya dominasi pengusaha, selayaknya pemerintah bersikap netral dalam arti tidak memihak kelompok kepentingan sesuai doktrin pemerintah yang dimilikinya yaitu administratur pemerintah yang bersih (*clean goverment*) dan membela masyarakat yang tidak berdaya. Faktanya kekuasaan pemerintah telah dikuasai kepentingan ekonomi pengusaha. Untuk menghindari adanya akumulasi kekuasaan pengusaha, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong kekuatan politik yang berlainan dengan kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi dimaksud adalah untuk memperkuat kekuatan pasar sedangkan kekuatan politik untuk memperkuat kekuatan masyarakat (ekonomi dan politik) yang bersaing dan kompetitif.

Tentunya untuk memadukan konsep ekonomi kapitalis dan individualis dengan konsep masyarakat

yang lebih egaliter tidaklah mudah. Pemerintah harus membebaskan suasana kompetisi dalam pasar, agar legitimasi pemerintah dari pasar menjadi tujuan egaliter. Ini bisa dicapai jika pemerintah yang aktif dan pasar yang dinamis serta independen dapat membungkus tatanan budaya dan moral sehingga kepentingan masyarakat dan pengusaha dalam kelembagaan terjamin. Tanpa budaya, moral, ekonomi atau politik, masyarakat akan menjadi liar dan diombang-ambingkan kepentingan perusahaan.

Upaya ini terwujud jika peran pemerintah dalam urusan ekonomi dikurangi. Pemerintah juga tidak dilibatkan untuk mendistribusikan kesetaraan dan kemakmuran. Pemerintah hanya terpusat pada kebijakan untuk memperoleh efisiensi dengan melakukan regulasi yang menghambat dinamisme pasar. Akibatnya peran pemerintah yang akan menjadi alat kepentingan pengusaha dapat dikurangi. Sebaliknya, reduksi terhadap aktivitas pemerintah akan menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah.

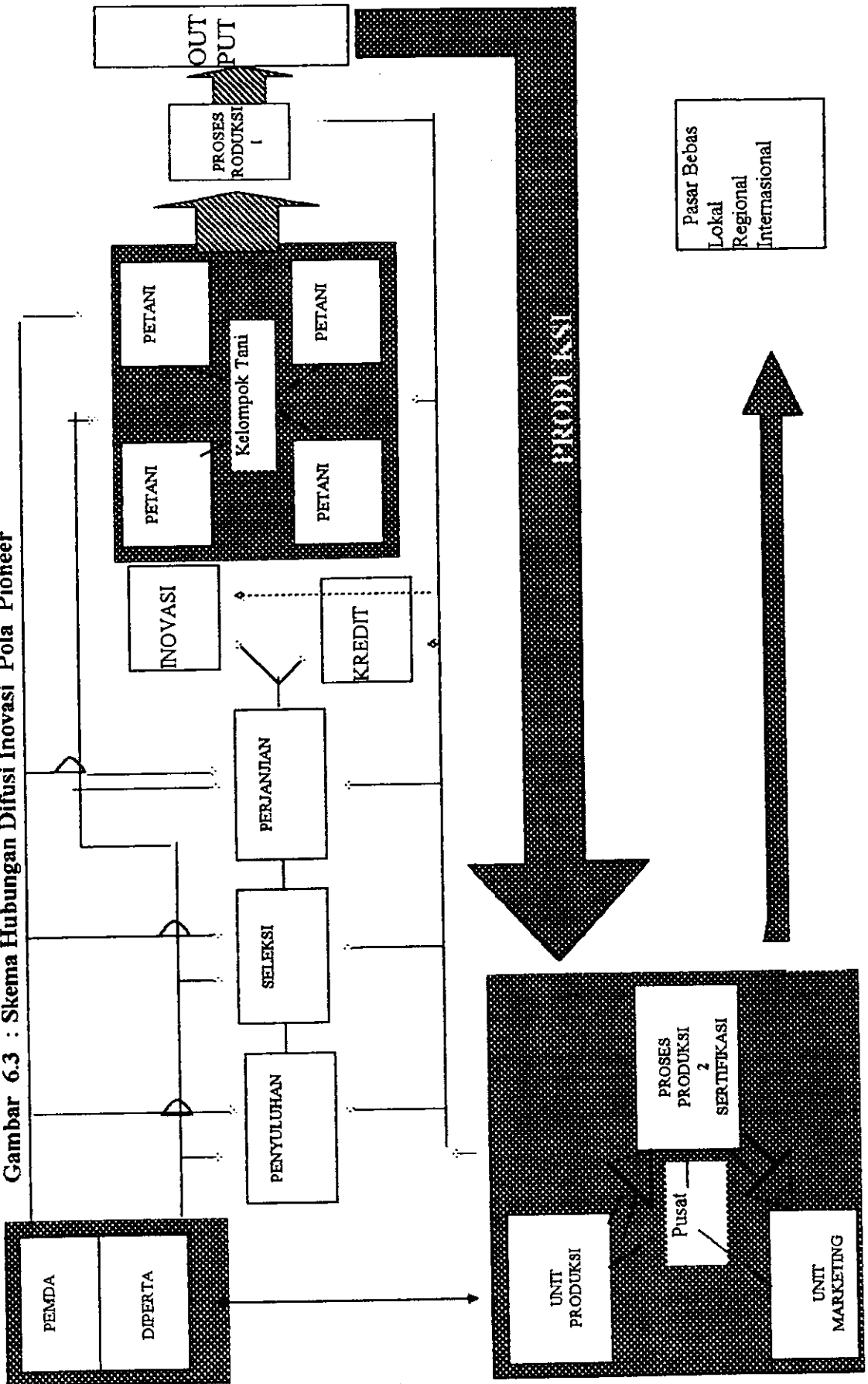
Dari rangkuman ini ditarik kesimpulan bahwa: Ditinjau dari perspektif liberal, difusi inovasi memberi dukungan untuk mempertahankan dominasi

kapitalisme dengan bertameng demi memajukan masyarakat. Aspek eksploitatif disembunyikan dibawah pengayoman sistim produksi kapitalis. Akibat dominasi kapitalisme, difusi yang secara matematis bermakna mendistribusikan sebagian kekuasaan pengusaha kepada petani secara tidak kasat mata justru yang terjadi sebaliknya, yaitu adanya akumulasi kekuasaan pada pengusaha yang semakin besar. Oleh karenanya, dengan adanya difusi inovasi dapat berbanding lurus dengan akumulasi kekuasaan. Semakin banyak inovasi itu didifusikan maka semakin besar pula kekuasaan pengusaha yang akan diperoleh. Sebaliknya apabila sebagai aktor tidak mampu untuk mendifusikan inovasi, maka kekuasaannya juga akan lebih kecil.

Namun demikian, pendekatan difusi masih melakukan pembenaran adanya intervensi politik dan manipulasi negara terhadap masyarakat yang bersembunyi di balik strategi pemberian bantuan. Legitimasi ini sangat bernilai dan perlu dipertahankan karena perspektif difusionisme adalah untuk mengimbangi kelemahan dalam perspektif liberal.

Pengusaha yang melakukan kerjasama dengan petani, kemudian pemerintah diikut sertakan untuk melakukan intervensi, maka hasil yang diperoleh akan lebih baik daripada pengusaha yang hanya melakukan kerjasama dengan petani tanpa mengikut sertakan peran pemerintah.

Gambar 6.3 : Skema Hubungan Difusi Inovasi Pola Pioneer



BAB 7

BAB 7**POSISI NEGARA, PASAR DAN MASYARAKAT****7.1 Posisi Masyarakat**

Pola pertanian yang dilakukan secara intensif melalui pola kerjasama pemerintah-pengusaha-petani di Pioneer dengan difusi multi arah, maupun pola pertanian intensif melalui pola kerjasama pengusaha-petani di Indofood dengan difusi dwi arah, secara diametral sangat berbeda dengan sistem Bimas maupun perkebunan inti rakyat dalam tebu rakyat intensifikasi (TRI) dengan difusi eka arah. Dalam sistim Bimas maupun TRI, pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah melalui sistim komando berdasar legalitas otoritas pemerintah. Petani hanya diperlakukan sebagai objek kegiatan. Partisipasi petani sangat terbatas. Kadangkala semu atau bahkan tidak ada partisipasi sama sekali. Seandainya, secara kasat mata adanya partisipasi masih nampak terjadi, yang nampak di permukaan adalah terjadinya partisipasi dalam bentuk khusus

yaitu partisipasi yang dipaksakan melalui mobilisasi. Partisipasi sedemikian tidak dilandasi atas dasar persuasi dan kesadaran seperti tertuang dalam prinsip difusi.

Dalam sistem ini terdapat adanya 3 tahapan yaitu tahapan pra-produksi, tahapan proses produksi dan tahapan pasca-produksi, dimana petani pada tiap tahapan tersebut petani mempunyai posisi yang berbeda. Pada tahapan pra-produksi petani bersifat independen untuk melaksanakan kegiatan pertaniannya. Termasuk didalamnya petani bebas memilih macam usaha yang diinginkan, apakah akan dilakukan secara mandiri atau akan dilakukan secara bekerjasama dengan pengusaha. Pengusaha walaupun mempunyai dan menguasai inovasi, maupun pemerintah yang karena wewenangnya mempunyai otoritas wilayah, tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada petani agar mau menanam komoditas tertentu. Hanya saja, jika hal tersebut dianggap sangat penting demi kepentingan yang lebih luas, maka pemerintah melakukan persuasi agar petani dengan kesadarannya sendiri mau mengikuti program yang di tawarkan pemerintah.

Pada tahapan pra-produksi ini posisi petani

kepengurusannya tidak memperoleh dan memiliki kekuatan efektif bagi kepentingan petani di samping juga tidak mendapat legitimasi dari petani sebagai anggota organisasi.

Dampak lebih lanjut dari kebijaksanaan ini adalah, bahwa dalam pembentukan organisasi di masyarakat akan timbul 2 sistem: yaitu adanya sistem semi-independen (bebas terkendali) di mana petani memperoleh kebebasan dalam menentukan komoditas pilihannya. Akan tetapi jika petani ingin berpartisipasi dengan pengusaha yang mempunyai aktivitas bisnis dalam produksi pertanian, ia tidak mempunyai kebebasan lagi karena harus mengikuti berbagai persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Sebaliknya, dalam sistem semi-dependen. Walaupun petani diberi kebebasan untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan pengusaha, tetapi tidak punya hak dan juga tidak punya kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Dengan terjadinya sistem semi-dependen dan semi independen di kalangan petani, posisi pengusaha mempunyai peran penting. Pengusaha mempunyai kekuasaan untuk menentukan komoditasnya sendiri

sesuai peluang pasar. Bahkan pengusaha diperkenankan untuk mengatur bidang usaha yang dipilih sesuai kepentingannya. Di samping itu pengusaha dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh dukungan serta pertanggungjawaban pemerintah agar program yang diajukan terealisasi.

Pada tahapan proses produksi dan pasca produksi (pemasaran), petani tidak lagi independen. Segala kegiatannya mengikuti dan dependen terhadap kepentingan perusahaan. Termasuk di dalamnya jenis inovasi dan bagaimana teknik memprosesnya. Munculnya ketidakbebasan bagi petani ini disebabkan, karena pihak perusahaan mempunyai standar baku yang harus dipatuhi petani sesuai perjanjian yang di sepakati. Sangsi kepada petani diberlakukan apabila terjadi penyimpangan dalam perjanjian. Namun demikian bagi petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan walaupun dalam bentuk perjanjian yang tidak verbal, mereka tetap mematuhi kesepakatan tersebut, karena adanya keterikatan petani pada tanggung jawab moral dan budaya sungkan.

Transformasi dari sistem dependen (wajib tanam) - semi dependen - semi independen dan independensi tidak dilihat dari seberapa banyak petani bebas untuk berusaha. Ukurannya didasarkan pada nilai kompetitif komoditas yang diusahakan. Matrikulasi posisi negara, pasar dan masyarakat lokal dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1 Matrikulasi Posisi Negara, Pasar dan Masyarakat Lokal

	NEGARA	MASYARAKAT			PASAR
		Pra.P.	Pros.P.	Pas.P	
NEGARA	—	Interdependensi Independen (Patner / Mitra)			Interdependensi (Patner/Mitra)
MASYARAKAT					
Pra.P	Interdependensi	—			Interdependensi
Pros.P	Semi Independen dan		—		Dependen
Pas. P	Semi Dependen			—	Dependen
PASAR	Interdependensi Independen Partner / Mitra	Interdependensi Independen Independen			—

Catatan : Pra.P = Pra-produksi
 Pros.P = Proses Produksi
 Pas.P = Pasca Produksi

Pengamatan selanjutnya tentang difusi inovasi tidak bisa semata-mata dipahami akibat berkurangnya kekuasaan otonomi yang otoritarian dari pemerintah dalam memaksakan kehendaknya kepada masyarakat yang tidak berdaya. Peningkatan produksi melalui peningkatan adopsi inovasi, juga tergantung pada konteks dan sifat hubungan yang berbeda antara negara dengan pengusaha, negara dengan masyarakat dan pengusaha dengan masyarakat.

Yang diharapkan petani dalam independensi adalah bagaimana petani memperoleh kebebasan untuk menjalankan usaha, adanya jaminan untuk memperoleh peningkatan nilai ekonomis dari penggunaan inovasi baru disertai adanya upaya peningkatan usaha serta dapat terhindar dari kesenjangan sosial. Dalam benak petani tidak pernah terpikirkan bagaimana mereka memperoleh hak politis sebagai masyarakat ditinjau dari keseimbangan usaha. Masyarakat lokal hanya menginginkan posisi dan mempunyai kedudukan yang sederajat dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara serta mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai kepentingannya. Adapun

pemerintah hanya dituntut untuk bisa melaksanakan kewajibannya dengan memberikan berbagai alternatif pilihan bagi masyarakat. Jadi yang dituntut petani adalah persamaan hak dan tanggung jawab. Dengan adanya independensi berarti masyarakat menginginkan kebebasan untuk bisa mengatur dirinya sendiri sebagai hak individu dalam kehidupan bernegara di samping adanya kebebasan untuk dapatnya berkesempatan mengatur pihak lain.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong masyarakat lokal menginginkan adanya independensi. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah faktor intern masyarakat yang bersifat ekonomis, kebebasan sosial dan otonomi masyarakat. Pembentukan kelompok sangat dirasakan manfaatnya untuk mengurangi dan sebagai alat penyeimbang dominasi pemerintah dan pengusaha yang terlalu besar.

Di sisi yang lain timbulnya minat independensi ini sebagai dampak dari difusi inovasi sendiri. Sebagai mana diutarakan Rogers (1971:20) bahwa dengan adanya difusi inovasi diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Jika ini yang terjadi, maka difusi inovasi akan berdampak

positip terhadap peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu masyarakat akan semakin kuat.

Namun, jika ditinjau dari kepentingan sumber inovasi (negara dan pengusaha), adanya difusi inovasi kepada masyarakat dipandang mempunyai efek negatif. Adanya akumulasi kekuatan dan dukungan dari kelompok masyarakat akan bisa menjadi ancaman bagi dominasi pemerintah maupun pengusaha. Hal ini disebabkan karena pada posisi ini, adanya kemampuan pemerintah maupun pengusaha mendifusikan inovasinya juga berarti memperkuat posisi masyarakat, disamping untuk memperkuat kekuasaan pemerintah maupun pengusaha itu sendiri. Namun, jika keterlibatan pemerintah dan pengusaha berlangsung terlalu lama, yang selanjutnya melahirkan dependensi inovasi, adanya difusi inovasi juga dikuatirkan akan menjadi penghambat bagi independensi masyarakat.

Implikasi dari posisi petani dalam konstelasi difusi inovasi di bidang pertanian ini adalah, masyarakat tani sebagai bagian dari masyarakat lokal mempunyai posisi yang lemah ketika berhadapan dengan negara dan pasar.

Fenomena ini serupa dengan pengalaman yang juga terjadi di Afrika. Akibat peninggalan sejarah penjajahan di masa lampau, situasi yang terjadi pada saat ini membawa implikasi rumit dalam era globalisasi, terutama terkait dengan kekurangan tradisi solid pluralistik. Akibatnya, tradisi yang pluralistik dan demokratis melemah, disamping memang tidak adanya institusi yang demokratis (Rasheed, 1997:127). Namun demikian, di Afrika ini masih terdapat pengecualian terutama yang terjadi di Zimbabwe dan Kenya yang oleh Bates (Burges, 1997:127) disebut *urban bias* karena terjadinya transformasi pedesaan. Penyebabnya, di kedua negara tersebut telah terjadi adanya perubahan dari dominasi negara penjajah menjadi dominasi pergerakan nasional melalui pembangunan pedesaan. Petani didorong agar mempunyai kemampuan untuk melakukan pemasaran sendiri di samping juga mendorong terbentuknya asosiasi di kalangan petani yang didasarkan pada kesamaan kelompok minat.

Yang menjadi permasalahan lebih lanjut dari keberadaan posisi petani ini adalah, bagaimana *memberdayakan* peran petani sebagai masyarakat

lokal, melalui saluran yang demokratis dan partisipatif agar mampu menghadapi negara dan pasar dalam posisi yang seimbang. Permasalahan posisi ini akan tetap menjadi wacana, karena secara sistematis hubungan antara negara dan pasar dengan masyarakat lokal dalam hal inovasi pertanian belum seimbang, dalam arti pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pasar sangat kuat agar inovasi yang didifusikan dapat di adopsi. Kepentingan pasar terlalu dominan menekan kepentingan masyarakat tani dan kurang kondusif untuk memberdayakan petani. Petani sendiri sangat fragmentaris dalam menentukan pilihan kepentingannya. Di samping itu, posisi masyarakat lokal berada pada ranah periferial. Jika posisi petani tercipta dalam kondisi yang terdistribusi secara seimbang, maka secara kontekstual hubungan negara dan pasar dengan masyarakat lokal dapat menuju pada otonomi relatif. Demikian juga, jika peran negara dan pasar dapat direduksi sedemikian rupa oleh masyarakat lokal, maka peran masyarakat menjadi penyeimbang kekuatan pasar tanpa menimbulkan terjadinya konflik.

Perdebatan perlunya pemberdayaan masyarakat agar independen tetap menjadi wacana yang aktual. Faktor yang mempengaruhi independesinya berasal dari diri masyarakat itu sendiri, dari pemerintah maupun pasar. Unsur pemerintah yang dapat mempengaruhi adalah: pejabat yang memerintah, keterpengaruhan pejabat negara oleh masyarakat dan pertarungan kekuasaan di kalangan elit pejabat. Adapun kekuatan masyarakat lokal dapat diperkokoh jika ada upaya peningkatan kerjasama dan partisipasi di antara masyarakat itu sendiri.

Tantangan kedepan dalam pengembangan teoretik dan praktis adalah bagaimana mencari jalan yang terbaik untuk keberlanjutan hubungan ketiganya yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya kegagalan negara akan meningkatkan peran masyarakat. Sesuatu yang sama mungkin dikatakan bahwa kekuatan pasar akan terjadi jika ada pengaturan dari pemerintah. Jadi karena antara negara, pasar dan masyarakat sama-sama mempunyai potensi untuk saling mengisi dalam bersinergi, kesemuanya merupakan tantangan yang perlu dilakukan.

7.2 Posisi Negara

Ketika pejabat pemerintah ditanyakan bagaimana peran negara dalam masyarakat dan dalam kehidupan sosial, jawabannya hampir seragam bahwa pemerintah mempunyai andil dan peran yang sangat besar dan bahkan banyak menentukan kehidupan masyarakat. Tetapi, ketika pertanyaan yang sama disampaikan kepada masyarakat maka diperoleh jawaban yang beragam mulai yang ekstrem: sangat besar perannya, biasa-biasa saja, tidak tahu, diam, bahkan ada yang menyatakan tidak ada gunanya (tidak punya peran sama sekali). Namun, ketika ditanyakan bagaimana selayaknya peran negara dalam kehidupan sosial? Baik pejabat pemerintah maupun masyarakat, jawabannya beragam mulai dari yang menginginkan peran besar sampai kepada perlunya peran yang terbatas saja.

Masyarakat pada umumnya tetap menginginkan peran pemerintah yang lebih besar. Ini dimaksudkan agar petani tetap memperoleh pelayanan, proteksi dan bantuan (subsidi) dari pemerintah yang sifatnya non-komersial. Bahkan sedapat mungkin kalau bisa bersifat gratis. Menurut pandangan

masyarakat, tugas pemerintah adalah memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Ini berbeda dengan jawaban pengusaha. Mereka menginginkan agar peran pemerintah secara terbatas saja. Yang tersirat dari jawaban pengusaha ini adalah agar pengusaha mempunyai kebebasan dalam menentukan sikapnya. Jika ini yang terjadi, maka kekuatan proses produksi tergantung dari mekanisme kekuatan pasar. Akibatnya, kemungkinan terjadinya eksploitasi bahkan dominasi dari yang kuat terhadap yang lemah seperti tertuang dalam mazhab *free market liberalism* dapat dibenarkan keberadaannya. Ini tentunya akan mendapat tantangan dari mazhab *nationalis populis* maupun mazhab *organic stateism*.

Tantangan ini juga ditunjukkan oleh jawaban pejabat pemerintah yang ternyata kontradiktif dengan jawaban pengusaha. Pada level pejabat pemerintah yang lebih atas, mengharapkan adanya keterlibatan pemerintah dengan porsi yang lebih besar. Adapun pejabat pemerintah pada level bawah, mengharapkan keterlibatan peran pemerintah yang terbatas saja.

Secara teoretis, selayaknya pemerintah dapat melindungi dan dapat merangkul masyarakat secara keseluruhan, termasuk di dalamnya pasar atau pengusaha selaku masyarakat. Peran negara adalah tidak selayaknya jika hanya memihak pengusaha, dengan cara memarginalkan kepentingan masyarakat demi kepentingan kelompok pengusaha.

Realitas di lapangan menunjukkan, bahwa pemerintah ternyata tidak konsisten. Pada tahap awal (pra-produksi) mulanya pemerintah bersifat netral dan independen. Akan tetapi pada tahap berikutnya pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pasar. Bahkan pemerintah dijadikan alat oleh kelompok pengusaha demi memenuhi kepentingannya. Inilah kemudian yang oleh penganut *Marxian*" dikatakan bahwa, negara dijadikan alat bagi kelas yang dominan. Negara ibarat panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis secara menyeluruh. Jika diibaratkan bangunan, negara hanyalah bangunan atas (supra struktur) yang sekedar dijadikan variabel penyerta dari perubahan bangunan bawah (infra struktur) yang mendasarinya. Dengan demikian, sebagai alat dari pengusaha, kekuasaan

negara perlu diabadikan (*status quo*) guna dapat melindungi kepentingan pengusaha seperti halnya negara mengabadikan kekuasaannya atas masyarakat.

Perbedaan persepsi tentang bagaimana semestinya posisi yang dimainkan negara, banyak dipengaruhi oleh pemikiran konservatif dimana peran negara yang sangat besar adalah sangat diperlukan guna melakukan penetrasi, membentuk, mengubah bahkan merestrukturisasi dan mengarahkan nilai yang ada serta memenuhi keinginan masyarakat. Ini berarti negara punya peran deterministik, independen dan menentukan kehidupan sosial. Sebaliknya, posisi masyarakat lokal akan lebih banyak bersifat dependen daripada sebagai variabel independen. Oleh karena itu maka negaralah yang secara essential mempunyai otoritas dan sekaligus menjadi sumber legitimasi, bukan masyarakat. Akibatnya, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali harus bersedia menerima eksistensi negara dengan segala konsekwensinya.

Independensi pemerintah direalisasikan dalam wujud intervensi jika hal ini dianggap penting untuk mempercepat difusi inovasi. Peran yang dilakukan

pemerintah mencakup regulasi wilayah dimana inovasi akan didifusikan, memberikan pelayanan publik, termasuk di dalamnya menyediakan sarana pendukung seperti tenaga teknis, tenaga penyuluh, menyediakan sarana produksi, membantu mencari kredit guna mendorong kegiatan usahatani serta memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa modal yang ditanamkan di daerah kekuasaannya adalah dijamin keamanannya serta dapat memberikan keuntungan.

Yang penting bagi pemerintah daerah adalah, bagaimana mengamankan kebijaksanaan dan target yang ditentukan dari hirarki pemerintahan di atasnya. Bagaimana *food security* terealisasi sehingga menjamin hak ekonomi dan hajat hidup orang banyak dengan disertai peningkatan kesejahteraan serta terhindar dari kesenjangan sosial.

Apabila target ini telah terpenuhi, maka legitimasi pemerintah di mata rakyat akan semakin besar. Pengaturan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan individu juga diperlukan sesuai peran negara yang melindungi kepentingan masyarakat.

Selayaknya, antara pemerintah dan pengusaha melakukan ikatan "otonomi melekat" (*embedded autonomy*) yang efektif berdasarkan preferensi independen. Namun demikian, nampaknya di antara keduanya (pemerintah dan pengusaha) tidak ada yang murni mandiri. Antara yang satu dengan yang lainnya terikat dalam saling ketergantungan (*interdependensi*).

Pemerintah daerah tidak dapat melakukan kegiatan secara independen karena keterikatannya terhadap sentralisasi kebijaksanaan pada hirarki kekuasaan di atasnya. Penunjukan birokrat di tingkat lokal walaupun telah menyesuaikan dengan perubahan dan liberalisasi pasar, bukanlah Weberian di mana terdapat independensi dalam penentuan pejabat pemerintah. Mekanismenya, pemerintah pada hirarki lebih atas menetapkan kebijaksanaan guna pengembangan pertanian. Selanjutnya pejabat pemerintah pada hirarki jabatan yang lebih atas, menunjuk pejabat lokal tanpa memisahkannya dengan struktur birokratis yang sebelumnya bekerja di pemerintahan. Penunjukan pejabat yang dimaksud, lebih didasarkan pada struktur birokrasi dan karir,

bukan karena autoritarianisme yang disesuaikan dengan perubahan pasar. Penunjukan ini lebih memiliki tujuan untuk mengelola kemungkinan timbulnya kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karenanya birokrat yang teknokrat dan inovatif merupakan sarana interaksi yang berhasil di antara pengusaha dan pemerintah yang selanjutnya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan adopsi inovasi.

Ini berbeda dengan pengusaha yang mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan desentralisasi. Walaupun diakui, dalam hal tertentu sentralisasi kebijaksanaan tetap ditaati. Namun demikian, pengusaha juga tidak melakukan kegiatan usaha secara mandiri karena keterikatannya pada birokrasi pemerintah. Baru setelah adanya kerjasama dan sinergi kebijaksanaan di antara keduanya (pemerintah dan pengusaha) untuk saling memberdayakan, maka peningkatan adopsi inovasi yang diharapkan terealisasi.

Kedudukan dan peran pejabat pemerintah yang berbeda ternyata membutuhkan kapasitas birokrat yang berbeda pula. Penunjukan pejabat birokrasi

yang berasal dari rekrutmen, jika ditinjau dari kepentingan perusahaan, seharusnya pejabat pemerintah yang ditunjuk tersebut dapat sesuai dengan harapan perusahaan. Ini disebabkan karena adanya kesediaan perusahaan untuk memberikan insentif tambahan bagi pejabat pemerintah yang ditunjuk pada wilayah yang menjadi kegiatannya. Namun apa yang terjadi. Walaupun harapan ini merupakan cara yang terbaik jika ditinjau dari kepentingan perusahaan, harapan tersebut tidak terealisasi sepenuhnya karena penunjukan pejabat pemerintah tidak selamanya selaras dengan kepentingan perusahaan.

Landasan empiris ini semakin memantapkan posisi negara sebagai independen variabel. Pemerintah bukan hanya sekedar berfungsi memperhatikan minat masyarakat, tetapi juga mengakomodasikan minat pengusaha terhadap inovasi yang dibutuhkan, yang kemudian dipakai menjadi landasan pijakan kebijaksanaan. Walaupun demikian fenomena ini juga menunjukkan bahwa negara tidak memosisikan masyarakat sebagai dependen variabel.

Perlunya pejabat yang berkompeten, melekat dan

otonom serta mampu melakukan intervensi guna pengembangan ekonomi masyarakat, mendapat dukungan dari Osborne (1994:195) tentang perlunya para birokrat yang mempunyai jiwa enterpreuner yaitu bahwa setiap pejabat pemerintah harus mempunyai jiwa wirausaha di dalam segala kegiatannya sebagai birokrat. Hal yang senada juga di ungkapkan Evans (Schneider,1998:105) karena kompetensi birokrasi telah sesuai dengan tema *world development report*. Kondisi yang otonom ini perlu dipertahankan oleh pejabat pemerintah dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis, inovatif, kolusif dan kohesif dengan pengusaha serta menghindari dari hal-hal yang bersifat kontradiktif. Di samping itu, birokrasi Weberian juga menciptakan korporasi melekat yang selanjutnya memberikan otonomi bagi negara. Korporasi melekat dalam pengertian identitas kelompok, memberikan landasan bagi preferensi "statis" dan berkemampuan untuk melawan persuasi kapitalis.

7.3 Posisi Pengusaha

Munculnya pengusaha nasional maupun inter-

nasional untuk melakukan difusi inovasi di kalangan masyarakat lokal, juga dikarenakan adanya faktor endogen pengusaha yang independen. Di antara faktor-faktor tersebut adalah adanya kemampuan pengusaha untuk melakukan eksploitasi, adanya kemampuan manajerial serta kemampuan pengusaha untuk mengakses pasar.

Independensi yang dilakukan pengusaha adalah untuk memperoleh jaminan aktivitas guna meningkatkan usaha dan pendapatannya sehingga privatisasi dan keberlangsungan usaha terjamin. Jika ukuran pasar dipakai sebagai faktor yang dependen, maka kemampuan untuk mengakses ke pasar maupun kemampuan untuk menguasai pasar ini, kurang banyak dikuasai masyarakat lokal, walaupun masyarakat lokal itu sendiri sudah ber-orientasi komersial.

Ini ditunjukkan pada kasus yang terjadi pada petani di Tulungrejo, ketika petani memperoleh kredit untuk usaha peternakan. Realisasi yang terjadi, petani bukannya mengembangkan usaha peternakan seperti yang tertera dalam kegiatan program, tetapi yang dikembangkan adalah kembali ke komoditas tradisional semula (kentang) yang pernah

berkembang dan menjadi andalan sebelumnya.

Di sisi yang lain, terlambatnya masyarakat lokal menjadi pengusaha, karena subsidi yang diterima dari pemerintah sering kali tidak sinambung, kecuali di bidang kredit sarana produksi. Peningkatan produksi yang diperoleh seringkali tidak diikuti jaminan adanya pasar yang memadai. Adapun orientasi masyarakat lokal masih berciri dan berorientasi pada produk, bukan pada permintaan dan peluang pasar seperti halnya yang dilakukan pengusaha.

Pengusaha dalam melakukan diversifikasi usaha adalah bersifat rasional. Ini dilakukan untuk merespon kondisi pasar yang tidak sempurna (modal dan resiko). Oleh karenanya Schneider (1999:114) ber-argumentasi, perkembangan perusahaan pada abad 20, nantinya akan tergantung pada kemampuan untuk mengadopsi inovasi asing . Oleh karena itu agar supaya usaha tersebut lebih menguntungkan, maka para pengusaha perlu menguasai tentang pemahaman ekonomi. Pemahaman terhadap perkembangan perusahaan tidak semata berdasarkan pertimbangan teknis semata, tetapi pertimbangan secara sosial bahkan

politis perlu dilakukan secara terintegrasi.

Pengusaha dalam hubungannya dengan pemerintah maupun masyarakat, memosisikan diri untuk tidak mengenal "demi kebaikan bersama" yang di dasarkan pada kebiasaan, nilai budaya maupun pada ideologis pemerintah. Walaupun diakui bahwa dalam hal-hal tertentu kebiasaan, nilai budaya maupun ideologis tertentu juga memberikan hasil yang baik dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai sesuatu baik untuk dilakukan secara bersama-sama.

Kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah dan masyarakat, hanyalah didasarkan pada kepentingan. Adanya kepentingan ekonomis mempengaruhi penentuan keputusan pengusaha untuk melakukan kerjasama. Akibatnya negara tidak dapat memaksakan nilai ideologis tertentu yang dianggap sebagai kepentingan bersama. Pandangan pengusaha adalah percaya diri akan kemandirian. Dalam benak pengusaha telah terpateri jiwa kemampuan untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Oleh karenanya yang diharapkan pengusaha adalah, peran negara tidak perlu terlalu besar, cukup kecil saja dan hanya terbatas pada peran untuk melindungi masyarakat,

mencegah kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak adil dan menciptakan kepastian administratif serta melaksanakan pelayanan publik seperti penyediaan sarana produksi dan fasilitas publik. Dalam keadaan demikian, peran ini sudah selayaknya dilakukan pemerintah. Pengusaha tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya baik ditinjau dari segi ketersediaan tenaga, kemampuan, pengalaman maupun pembiayaan. Oleh karenanya pengusaha menempatkan negara sebagai variabel independen.

Walaupun secara teoretis pelayanan umum menjadi tanggung jawab pemerintah, nampaknya pandangan yang sedemikian tetap mengandung kelemahan. Seandainya pengusaha mempunyai kemampuan untuk membiayainya secara mandiri, tugas negara tetap berat oleh karena harus menanggung biaya pelayanan lain yang tidak sedikit. Untuk itu negara harus mempunyai pendapatan yang besar. Di negara majupun yang menganut filsafat liberal, peran pemerintah tetap menonjol dalam kehidupan sosial.

Peranan pemerintah juga amat besar baik dalam bentuk pengaturan kebijaksanaan umum, maupun dalam

bentuk operasional guna mendorong intervensi pengusaha nasional maupun internasional bersedia menanamkan modalnya. Peran pemerintah ini sangat nyata. Adanya kesediaan aparat pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha mendorong digantikannya bisnis tradisional, yang kemudian menciptakannya menjadi bisnis baru.

Namun demikian pengusaha menyadari, jika pemerintah terlalu intervensionis dan atau tidak memberikan adanya kenyamanan secara politis, atau kurang adanya kestabilan dalam kebijaksanaannya, maka dalam situasi sedemikian pengusaha sangat rentan terhadap ketidak pastian usaha. Tindakan selanjutnya, pengusaha terdorong melakukan diversifikasi resiko dengan cara melakukan kekuatan tawar-menawar kepada pemerintah. Jadi, berkembangnya diversifikasi perusahaan hanya sebagai strategi ofensif untuk meningkatkan pengaruh terhadap pejabat negara yang membuat keputusan.

Korporasi pengusaha yang melakukan diversifikasi usaha, memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi. Penyebabnya, masing-masing

anggota kelompok memadukan dan mengembangkan keahliannya dalam teknologi yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya industri awal yang relatif lebih cepat dengan biaya lebih rendah.

Argumen di atas merupakan jawaban mengapa proses adopsi masyarakat di Pioneer lebih tinggi dari pada di Indofood. Salah satu di antaranya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong dan melakukan kerjasama dengan perusahaan (Pioneer). Termasuk di antaranya dalam pemberian jasa pelayanan tersebut, memberikan fasilitas di dalam penyediaan lahan petani, pengaturan lokasi usaha dan jasa-jasa lainnya baik yang dilakukan selama proses pra-produksi, selama proses produksi maupun selama pasca produksi.

Ini berbeda dengan kerjasama Indofood dengan petani yang kurang melibatkan pemerintah. Akibat yang tidak terelakkan, perkembangan perusahaan pada suatu periode tertentu akan relatif terhambat, kurang dinamik bahkan menimbulkan ketidakpastian dalam proses produksi seperti adanya ketidak-sediaan petani untuk selalu melakukan kerjasama ataupun pada waktu-waktu tertentu petani melakukan

pergantian komoditas.

Implikasinya, pengusaha baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang dilakukan secara mandiri pada setiap wilayah akan bervariasi. Pengusaha tidak saja mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat teknis semata. Pertimbangan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat setempat perlu dipakai sebagai bahan acuan. Adapun pejabat negara selayaknya juga melakukan intervensi guna mendorong timbulnya organisasi bisnis.

Pengusaha yang menguasai sumber inovasi dengan jiwa liberalnya cenderung lebih progresif dan independen dalam difusi inovasi. Pengusaha yang mendapat dukungan dari pemerintah mempunyai independensi untuk menguasai sektor ekonomi ketika berhadapan dengan masyarakat. Akan tetapi pada masyarakat, penguasaan sektor ekonomi ini tidak dapat berlaku sama. Oleh karenanya pada konteks tertentu posisi masyarakat menjadi variabel yang independen, namun pada konteks yang lain berubah menjadi dependen terhadap kebijaksanaan pemerintah maupun pengusaha.

Untuk mencegah agar supaya posisi masyarakat

dapat konsisten, faktor internal (kondisi sosial ekonomi) masyarakat sebagai pengguna inovasi perlu diperhatikan. Di samping itu, faktor eksternal (sumber inovasi) yaitu pemerintah dan pasar itu sendiri yang ikut serta mempengaruhi proses independensi masyarakat tidak perlu terlalu dominan. Kegagalan petani melakukan independensi dalam kegiatan usaha ini, terjadi karena adanya difusi yang dipaksakan (*coersif*). Pola difusi inovasi secara paksaan ini dilakukan secara terselubung. Di samping itu pula, faktor pengusaha juga mempunyai kemampuan untuk melakukan tekanan pada negara.

Oleh karenanya, untuk melihat rendahnya adopsi tidak saja hanya dilihat dari faktor internal (masyarakat) saja tanpa mempertimbangkan berbagai faktor eksternal (pemerintah dan pasar) yang juga sangat berpengaruh. Timbulnya agribisnis (Pioneer maupun Indofood) telah pula mengubah tatanan masyarakat yang telah ada dan kemudian masyarakat dituntut untuk memberikan respon terhadap kebijaksanaan perusahaan. Tuntutan dimaksud termasuk kesiapan para petani untuk menuju *mainstreem* pasar

bebas. Jika hal ini sampai terlambat, maka akan terulang kembali terjadinya kesenjangan akibat difusi inovasi.

Tantangan bagi pengusaha dalam menghadapi pasar bebas adalah efisiensi usaha, kemampuan melakukan daya saing dan nilai tukar produksi serta tuntutan untuk selalu ber-orientasi pada nilai tambah. Masyarakat lokal walaupun sudah mulai komersial, akan tetapi masih ber-orientasi kepada penambahan modal. Sementara pengusaha sudah ber-orientasi pada nilai tambah (keuntungan dan manfaat). Orientasi pada nilai tambah ini hanya akan menciptakan produk berkualitas jika didukung oleh inovasi yang memadai. Oleh karenanya, peningkatan adopsi tidak semata-mata karena peningkatan inovasi yang bersifat material, akan tetapi juga variabel non-material (rekayasa sosial) khususnya sikap mental, motivasi dan budaya pengusaha maupun petani ikut serta menentukan. Sikap mental ini dapat dibangun dari budaya *indogenous* yang potensial untuk menjadi budaya modern yang cocok dalam iklim pasar.

Demikian pula, pengertian pasar tidak harus

dimaknai secara material (fisik maupun ekonomis) tetapi juga perlu dimaknai secara budaya. Artinya sesuatu aktivitas yang melahirkan masyarakat berbudaya pasar meskipun masyarakat tersebut bergerak di bidang pertanian. Oleh karena itu, pemahaman tentang sinergi antara faktor material dan faktor non-material akan menjadi sangat penting.

7.4 Pembahasan terhadap Posisi Negara, Pasar dan Masyarakat

Dengan memperhatikan posisi dari pemerintah, pasar dan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa: difusi inovasi walaupun tidak mempunyai bentuk tetapi mempunyai kemampuan untuk menguasai. Demikian juga walaupun difusi inovasi itu abstrak, tetapi merupakan fakta sosial dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap nyata sehingga merupakan fenomena yang bersifat *inter subjective* yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia (Ritzer, 1992:17).

Disinilah makna difusi inovasi sebagai sistem produksi, mempunyai kekuatan yang tidak simetris. Pengendalinya bukan hanya sekedar aktor dalam pasar

domestik pada suatu wilayah teritorial negara. Seringkali, pasar global yang tidak mempunyai kewarganegaraanpun ikut terlibat dalam percaturan didalamnya.

Keikutsertaan pengusaha tidak sekedar mengandalkan potensi untuk berebut pengaruh secara politis. Yang lebih penting bagi pengusaha adalah dalam rangka memanfaatkan kekuatan struktural pasar untuk mengendalikan inovasi, dimana, berapa banyak dan kapan harus menginvestasikannya. Disamping itu, kekuatan dalam mengendalikan pasar, pengusaha seringkali bersifat eksklusif khususnya dalam rangka mobilitas modal dan penguasaan pasar. Pengusaha mempunyai akses dan memperoleh peluang untuk menempatkan modalnya di berbagai sistem produksi yang saling bersaing dan bahkan sangat beragam. Oleh karenanya, isyarat adanya dukungan maupun isyarat munculnya penolakan terhadap struktur pasar yang tidak bersuara ini, mempunyai kekuatan yang khas dan harus diperhatikan oleh negara.

Argumen ini tidak untuk mengabsahkan bahwa kekuatan material dari pasar amat penting dan strategis. Negara masih mempunyai kemampuan relatif

dan berbeda-beda untuk mengimbangi tekanan dan kekuatan struktural pasar. Sebagaimana yang terjadi pada kasus lokal, pejabat pemerintah masih mempunyai akses dan kemampuan untuk mengontrol pasar melalui pemberian perizinan. Masalahnya, kesempatan seperti itu langka dan bahkan bisa dijadikan alat dan peluang kolusi antara individu pejabat pemerintah dengan pengusaha.

Alternatif yang ditawarkan adalah: ketika masyarakat mempunyai kemampuan melakukan tawar-menawar dan pasar berada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena tidak mempunyai lahan pertanian, negara dapat memanfaatkan otoritasnya untuk membela hak istimewa pengusaha. Akan tetapi jika pasar berada pada posisi yang dominan, maka pemerintah perlu melakukan regulasi untuk membela kepentingan masyarakat. Disinilah peran negara untuk mengintervensi selaku alat penyeimbang antar dua kekuatan yang saling berbeda kepentingannya bersifat fleksibel dan bisa di akomodir.

Pengusaha yang menguasai pasar ini, merupakan produk dari kapitalisme, yang menganut prinsip rasionalitas pasar. Dalam konteks ini, ciri utama

yang dimiliki pasar adalah tercapainya tujuan dalam efisiensi usaha dan maksimasi keuntungan. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan tukar-menukar secara individual di samping juga melakukan persaingan.

Walaupun independensi pasar belum sepenuhnya berlaku, namun kekuatan modal dan pasar telah mulai nampak. Oleh karenanya intervensi pemerintah dengan cara ikut serta melakukan penyuluhan dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha nampaknya diabsahkan guna melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara kohesi sosial yang telah ada.

Kekuatan pengusaha ini ditentukan oleh inovasi. Salah satu penyebabnya, karena pengusaha dituntut untuk memenuhi permintaan inovasi yang semakin meningkat. Secara mandiri, pengusaha belum mampu memenuhi permintaan pasar tersebut, kecuali jika melakukan kemitraan dengan petani.

Disinilah dilema mulai timbul. Jika masyarakat menguasai inovasi ini secara mandiri, berarti petani terlepas dari ketergantungannya pada pengusaha. Agar kekuasaan tetap berada di tangan pengusaha, upaya yang dilakukan pengusaha selalu

berupaya agar tetap menfokuskan terciptanya ketergantungan petani pada inovasi. Untuk hal tersebut kekuatan untuk mengontrol organisasi produksi selalu di perlukan.

Secara khusus, kekuasaan yang dimiliki pengusaha juga masih tergantung dari kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan standar yang ditentukan perusahaan guna menghindari ketidakpastian. Tentunya, semakin rendah kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan standar baku, dan semakin tingginya kemungkinan ketidak pastian, maka kontrol terhadap masyarakat juga akan semakin besar. Jika perlu dilakukan secara sentralisasi. Ini juga berarti sentralisasi kekuasaan pengusaha untuk menghindari resiko juga lebih besar.

Pioneer walaupun pola pasarnya tertutup dengan persaingan yang tidak terlalu ketat, faktor kepercayaan tentang kualitas inovasi yang ditawarkan kepada konsumen di pasar bebas tetap menjadi prioritas. Dengan demikian, pengawasan pengusaha terhadap masyarakat yang melakukan mitra guna menghasilkan inovasi yang diharapkan juga semakin ketat. Sebaliknya pada Indofood, dimana produk

yang diperoleh demi kepentingan kelompok bisnisnya sendiri, maka pengawasan perusahaan terhadap masyarakat relatif lebih longgar. Keadaan inilah yang mendorong masyarakat memberi penilaian, bahwa prosedur di Indofood lebih sederhana daripada perusahaan Pioneer yang melakukan kerjasama dengan pemerintah. Dengan demikian maka pola pemasaran merupakan titik kritis. Sebagaimana diutarakan Martin (1993:199-200):

" Sebagai penjaga pintu gerbang, bagian penjualan menyadari pentingnya pengiriman cepat, perbaikan kualitas produk atau kualitas produk baru serta harga barang yang dijual karena variabel tersebut. Bagian penjualan juga menyadari relatif pentingnya variabel tersebut pada bagian lain yang juga ikut menentukan nilai-nilai bagi variabel tersebut. Lagi pula bagian penjualan mampu mengubah nilai variabel tersebut karena bagian inilah yang menetapkan harga, menentukan pasar mana yang akan dikelola, pelayanan yang diberikan serta perubahan-perubahan produk yang harus dilakukan."

Fenomena ini memberi indikasi, adalah kurang bijaksana dan terlalu naif jika selalu menganggap penilaian dari kacamata pemerintah dan masyarakat lebih penting. Adapun konteks berdasar pertimbangan manajerial pengusaha di abaikan.

Pengusaha masih memerlukan pertimbangan berbagai kemungkinan faktor strategis pasar. Agar strategi pasar ini terpenuhi, bisa saja pengusaha menerapkan kekuasaannya dengan cara pemaksaan, pengaruh maupun otoritas. Legalitas otoritas ini acapkali dipergunakan, karena pengusaha telah ditunjuk secara legal oleh pemegang saham, sehingga ia independen untuk bertindak dalam batas kompetensi sebagai manajer sesuai peraturan.

Jadi, pengusaha yang kapitalis ini pada hakekatnya juga birokratis. Akan tetapi, struktur birokratis tersebut lebih beraneka-ragam dan fleksibel. Prosesnyapun acapkali tidak jelas dan kurang rutin. Adapun pola kekuasaan yang dipunyai, juga tidak terlalu eksklusif. Oleh karenanya, faktor utama yang mempengaruhi kekuasaan pengusaha adalah posisi dan kondisi pasar.

Dampak perubahan kondisi pasar terhadap dominasi inovasi menunjukkan, bahwa struktur masyarakat menjadi lebih tergantung pada sumber inovasi. Sebagai konsekwensinya, adalah terjadinya ketimpangan dalam kekuasaan dimana pengusaha lebih dominan dari pada masyarakat.

Keadaan ini ternyata nampak kontradiktif dengan teori difusi yang idealis, dimana informasi inovasi secara otomatis selalu didifusikan oleh sumber kepada penggunanya. Teori difusi ini nampaknya telah menafikan nilai material inovasi sebagai unsur yang mempunyai nilai ekonomis. Bahkan, teori difusi juga menafikan terjadinya hubungan dependensi. Penyampaian informasi dianggapnya sebagai suatu proses yang tidak mempunyai nilai ekonomis serta tidak melihat adanya perilaku pengusaha yang memerlukan pamrih dari masyarakat.

Bagaimanapun juga, dengan adanya hubungan dependensi, akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk kehilangan kesempatan untuk bertukar informasi tentang ketidak pastian. Oleh karenanya, masyarakat tidak akan mengetahui informasi-informasi apa yang disembunyikan atau informasi yang dipertukarkan. Sejauhmana inovasi yang dibutuhkan masyarakat, hanya diperoleh dari monopoli pengusaha daripada sumber inovasi yang lain, maka difusi inovasi merupakan faktor yang menentukan dependensi dan oleh karena itu pula terjadi hubungan kekuasaan.

Perubahan kondisi pasar juga mempengaruhi strategi pengusaha untuk melepaskan dependensi masyarakat. Alasannya, terjadinya perubahan dalam penyediaan inovasi yang baru akan mempengaruhi penyediaan inovasi yang lama. Bahkan jika masyarakat ingin menukar inovasi dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya. Sebaliknya untuk memperoleh inovasi yang lebih baru untuk memperolehnya semakin memerlukan pentingnya informasi. Walaupun pengalaman sebelumnya dapat diandalkan, namun informasi mutakhir tetap semakin penting yang juga berakibat terhadap terjadinya pola hubungan ketergantungan yang baru. Dengan demikian maka, semakin meningkatnya tekanan terhadap kebutuhan inovasi, membuat perpaduan antar struktur dilakukan dalam situasi saling ketergantungan (interdependensi).

Akibat posisi pengusaha yang sedemikian, maka hubungan antara pasar dan negara dilakukan secara simbiosis. Institusi politik negara yang secara otonom mempengaruhi, juga dipengaruhi oleh institusi ekonomi. Dengan demikian sumber kekuasaan di antara institusi keduanya dapat dipindahkan,

dipertukarkan dan digabungkan sehingga menjadi lebih kuat dalam bentuk sinergi.

Namun, aktivitas pengusaha dalam mengakses ke negara tidak selalu menentukan. Keberhasilan pengusaha masih ditentukan oleh adanya interdependensi dengan kepentingan pejabat negara. Pengusaha mempunyai sumber materi (inovasi) dalam artian sebagai aktor pelaku ekonomi. Sementara pejabat negara menjalankan fungsi untuk menjaga dan memelihara pembenaran ideologis dan tatanan sosial serta bertindak sebagai perantara jika terjadi konflik antar kelompok.

Disisi yang lain, pejabat negara sebagai individu juga membutuhkan materi dan penghargaan. Oleh karenanya interdependensi yang seimbang antara pejabat negara dengan pengusaha selain tergantung dari tujuan institusi, juga kepentingan dan tujuan individu ikut menentukan. Bahkan dalam konteks tertentu, komitmen demi tercapainya kepentingan pejabat pemerintah secara individu dengan mengorbankan kepentingan negara akan memperbesar kekuasaan pengusaha .

Jadi respon pemerintah terhadap pasar berbeda-beda. Hal tersebut selain tergantung dari dominasi kapital, juga masih tergantung pada perlakuan pelayanan pengusaha terhadap pejabat pemerintah. Dengan demikian, hubungan interdependensi ini merupakan fenomena yang aktual dalam masyarakat kontemporer.

Implikasi hubungan antara pasar dan negara dapat dipakai untuk menjelaskan model pembangunan. Pembangunan yang berhasil, tidak selalu ditentukan oleh dominasi kekuasaan negara secara *top-down* dalam menentukan pilihan kebijaksanaan yang terbaik. Yang terpenting dalam hubungan ini adalah adanya jaringan ikatan antara kepentingan publik dan kepentingan privat yang dapat menghambat dominasi otonomi negara tetapi dapat meningkatkan kemampuan negara di dalam kinerja ekonomi.

Akhirnya, hubungan interdependensi antara negara dan pasar amat kompleks. Hal ini tergantung konteks dari tujuan pribadi, kelompok maupun institusi. Distribusi kekuasaan politik institusi negara tidak dapat dianggap sebagai akibat langsung dari sikap pribadi pengusaha selaku aktor,

tetapi juga tergantung dari kelompok pasar. Jadi, arti penting kepentingan pengusaha secara ekonomis, lebih dominan daripada kepentingan negara yang secara politis demi kepentingan masyarakat. Namun pola hubungan di antara keduanya adalah pola hubungan interdependensi dan tidak sepenuhnya dominasi dan subordinasi.

Ringkasnya, kapitalisme kontemporer tidak didominasi oleh kekuasaan pengusaha yang liberal dan berorientasi pada ekonomi pasar ataupun kekuasaan pemerintah yang kohesif dan berorientasi ekonomi sentralistik. Tetapi, tidak juga oleh kemauan rakyat sebagai mana difahami oleh mazhab pluralistik yang radikal.

7.5 Rangkuman

Difusi inovasi itu mempunyai peran ganda. Pada satu sisi mempercepat arus inovasi yang sekaligus meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Ini berarti sebagian kekuasaan pengusaha didistribusikan kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi lebih kuat. Akan tetapi kekuatan masyarakat ini menjadi ancaman bagi negara dan pengusaha.

Disisi yang lain, difusi inovasi tidak harus dimaknai dengan mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat yang berarti mengurangi kekuasaan sumber inovasi. Sebaliknya kedudukan negara dan pengusaha diperkuat dan diperkokoh karena kemampuannya mengakumulasi kekuasaan melalui inovasi. Jika akumulasi kekuasaan ini berlangsung lama dan masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah maka difusi menghambat independensi masyarakat. Oleh karenanya fungsi difusi tergantung konteks dimana proses sedang berlangsung.

Difusi inovasi walaupun abstrak tetapi mempunyai kemampuan untuk menguasai. Kekuatannya tidak bersifat simetris. Kekuatannya bukan hanya berasal dari pasar lokal tetapi juga pasar internasional ikut serta mempengaruhinya. Ini kontradiktif dengan teori difusi yang idealis yang menafikan nilai material inovasi dan adanya dependensi yang akhirnya melahirkan kekuasaan.

Intervensi negara dalam difusi inovasi bukan sekedar memberikan pelayanan umum dan melindungi masyarakat. Negara juga berupaya untuk memperkuat kepentingan ekonomi pengusaha dan menjaga

keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Pemerintah juga berupaya meningkatkan legitimasinya.

Pada posisi ini fungsi pemerintah deterministik bagi masyarakat walaupun tidak sepenuhnya mandiri ketika berhadapan dengan pasar. Oleh karenanya antara negara dan pasar terjadi hubungan interdependensi. Pengusaha menyadari perlunya tanggung jawab sosial kepada negara dan masyarakat. Namun, hubungan yang terjadi tidak berorientasi kepada nilai budaya dan idealisme tetapi berlandaskan kepada kepentingan ekonomis.

Pada tahap pra-produksi hubungan petani dengan pengusaha bersifat independen dan diantara keduanya terdapat saling ketergantungan. Namun pada tahap produksi dan pasca-produksi pengusaha menciptakan ketergantungan bagi petani. Termasuk di dalamnya ketergantungan inovasi, permodalan dan pemasaran karena pengusaha telah menciptakan monopoli dan oligopoli sehingga tercipta pasar tertutup. Akibatnya posisi pengusaha lebih dominan daripada petani.

Disini nampak, walaupun secara kasat mata pengusaha telah mendistribusikan kekuasaannya

melalui difusi inovasi, justru yang laten adalah terjadinya akumulasi kekuasaan. Oleh karena itu difusi inovasi berbanding lurus dengan akumulasi kekuasaan.

Kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomis. Hanya saja terjadinya hubungan yang harmonis ini bukan karena kemampuan pengusaha melakukan intervensi kepada pemerintah akan tetapi karena ketidak sengajaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa adanya sinergi antara kepentingan ekonomi pengusaha, kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan politik negara dapat meningkatkan kepentingan ketiganya dapat diterima. Ini tidak berarti masyarakat menjadi independen dan mandiri. Sebaliknya, dependensi masyarakat kepada pasar tetap besar.

Ditinjau dari posisi masyarakat, petani yang di dalam pola difusi inovasi sebelumnya (Bimas maupun TRI) diberlakukan sebagai objek karena kegiatannya harus mengikuti pola kebijaksanaan pemerintah, kini mereposisikan diri menjadi subjek (aktor) yang ikut serta menentukan inovasi yang akan dipakai.

Setidaknya-tidaknya pada tahap pra-produksi, petani sudah mempunyai kekuatan untuk melakukan "tawar-menawar" dengan pengusaha. Fenomena ini berbeda dengan ekspektasi perspektif liberal yang beranggapan bahwa masyarakat di posisikan sebagai aktor yang belum mempunyai tujuan tersendiri. Namun demikian pada tahapan proses produksi berikutnya, posisi masyarakat kembali lagi sesuai dengan ekspektasi perspektif liberal. Dengan posisi yang tidak independen ini, masyarakat kembali menyesuaikan dan mematuhi peraturan yang dibuat pengusaha.

Intervensi pemerintah yang diharapkan berlangsung secara minimal nampak nyata jika pemerintah sama sekali tidak dilibatkan dalam proses produksi. Intervensi pemerintah tidak hanya berlangsung di masyarakat tetapi juga terjadi di perusahaan dengan tujuan intervensi yang berbeda. Intervensi ini tidak hanya sekedar dilakukan secara minimal. Pemerintah sudah memposisikan diri sebagai aktor yang berada ditengah-tengah antara masyarakat dan pengusaha. Tujuannya adalah untuk memadukan dan menyeimbangkan antara kepentingan

pengusaha dan kepentingan masyarakat. Dengan posisi yang sedemikian maka dampak sosial antara 2 kepentingan yang kontradiktif dapat dieleminir sekecil mungkin.

Liberalisme pengusaha dengan tidak mengikutsertakan pemerintah dalam kegiatan usahanya merupakan senjata ideologik guna menyingkirkan kekuasaan birokratik negara. Cara ini dipakai sebagai benteng untuk menghindari berkembangnya intervensi negara menjadi kekuasaan politik.

Walaupun perspektif liberal mendukung dan menghargai privatisasi pengusaha yang berorientasi pada profit dan efisiensi namun karena adanya faktor eksternal, perusahaan perlu melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam proses produksi. Ini tidak berarti pasar telah gagal dalam menentukan posisinya. Faktor kepentingan pengusaha yang lebih besar dan jangka panjang dapat menjadi bahan pertimbangan, karena hal ini juga terkait dengan skala usaha dan teknologi. Perilaku yang hanya mementingkan egoisme perusahaan dalam pasar, dengan membenturkannya dengan struktur yang lain (pemerintah dan masyarakat) yang juga mempunyai

kepentingan yang sama melahirkan tekanan kompetisi dan ketidakstabilan pasar. Jadi politikasi ekonomi hanya dilakukan jika pemerintah bersikap adil (arif) dalam mengatasi kepentingan masyarakat.

Persamaan lain dengan ekspektasi perspektif liberalis juga nampak ketika masyarakat mendukung kepentingan pengusaha dan pemerintah. Masyarakat mempunyai penilaian bahwa inovasi yang baru, secara ekonomi akan lebih efisien daripada teknologi tradisional. Terhadap program pemerintah juga ada kesan moral jika dapat bekerjasama dengan pemerintah dapat berarti masyarakat ikut serta punya andil dalam membangun negara.

Ekspektasi liberal yang menginginkan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan pasar masih belum terwujud. Khususnya kesetaraan di dalam memperoleh kesempatan dan kebebasannya dari ketergantungan pada pasar. Kesetaraan hanya terjadi antar pengusaha (korporasi) dan antara pengusaha dengan pemerintah. Walaupun demikian dalam beberapa hal pengusaha lebih bersifat independen terhadap negara.

BAB 8

BAB 8**MELEMAHNYA DOMINASI POSISI:
NEGARA, PASAR DAN MASYARAKAT**

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana menempatkan fenomena difusi inovasi dalam konstelasi hubungan antara negara, pasar dan masyarakat. Uraian ini diawali dari perdebatan secara teoretik terhadap fenomena yang terjadi. Selanjutnya, dipaparkan temuan teoretik apa dalam kerangka hubungan negara, pasar dan masyarakat pada perspektif ekonomi politik.

8.1 Perdebatan Posisi Negara, Pasar dan Masyarakat

Dalam proses produksi (ekonomi), pemerintah maupun pengusaha lebih memosisikan independen ketika berhadapan dengan masyarakat. Namun demikian negara tidak memosisikan masyarakat sebagai dependen variabel maupun subordinasi dari negara.

Fenomena ini mempunyai makna bahwa kinerja dan kepentingan masyarakat memberi andil bagi kepentingan negara dan pengusaha. Jika hal ini ditarik ke dalam level yang lebih makro dan dalam argumen perspektif ekonomi politis yang liberal,

preferensi masyarakat dan tindakan kolektif yang menyertainya sangat akomodatif pada kepentingan ekonomi negara dan pengusaha, jauh melebihi kepentingan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya lebih memperhatikan dirinya sendiri dan mampu bertindak secara otonom serta efisien guna memenuhi kepentingannya belum terwujud. Demikian juga, dependensi masyarakat belum terbebas karena adanya tekanan yang tidak kasat mata melalui akad kontrak dengan pengusaha. Adapun dalam hal kesetaraan perekonomian, pemerintah lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengusaha.

Mobilitas difusi inovasi dalam kerangka hubungan negara, pengusaha dan masyarakat dari sudut pandang yang sosietaI nampak lebih eksklusif. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang dalam konsep *Rogers* mempunyai kemampuan untuk mengendalikan preferensi dan tindakan negara serta pasar, dalam proses difusi inovasi ternyata tidak nampak. Oleh karenanya, pengamatan terhadap apa yang dilakukan negara dan pasar serta bagaimana struktur masyarakat yang pada akhirnya menjadi sub-

ordinasi struktur pasar akan menjadi lebih penting.

Dari perspektif liberal klasik, pemerintah belum bisa menjadi "bemper" (*safeguard*) yang tegas guna melindungi kepentingan masyarakat. Justru sebaliknya, pemerintah dijadikan alat guna melindungi *privilege* pengusaha dan mendorong masyarakat mau bekerjasama. Namun demikian dalam hal pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya penyediaan sarana produksi, kehadiran pemerintah telah mendapat respon dari masyarakat. Negara yang terjaring dalam perspektif konservatif ini dalam pengamatan Schneider (1998:117), memang seringkali terjadi di negara-negara Asia Tenggara dan Amerika latin yang mempunyai sistem otoriter, dimana kekuasaan negara secara politis lebih otonom .

Secara teoretis tuntutan dari perspektif liberal adalah, bahwa sumber utama kinerja sumber inovasi adalah terletak diluar negara yaitu preferensi pasar. Sebagaimana dikemukakan Clark (1991:106):

"Pemerintah dapat mempunyai fungsi yang terbaik jika tidak banyak memerintah. Minimasi peran pemerintah dan laissez fair ini di-landasi pandangan bahwa timbulnya pemerintah

itu karena adanya kontrak sosial dari individu yang rasional dan mempunyai kepentingan. Jadi pemerintah hanyalah "wasit" untuk melindungi individu. Namun demikian dalam hal pelayanan publik kehadiran pemerintah tetap diperlukan"

Walaupun demikian, penilaian dalam pendekatan sosietaI ini akan tetap menimbulkan perdebatan. Adalah tidak akan berlaku secara adil dan bijaksana seandainya dalam perdebatan ini tidak dipertimbangkan dalam implikasi teoretik berikutnya.

Tantangan secara teoretis terhadap perspektif liberalis ini berasal dari studi bisnis di mana peran modal bersifat mobil. Jika pengusaha berlaku kaku di dalam pemaknaan demi kepentingan bisnis, kemudian selalu bersikap independen untuk menentukan keputusannya serta pengusaha mampu menyiapkan modalnya secara mandiri, maka pengusaha akan berusaha mengurangi kapasitas negara sebagai aktor. Keikutsertaan negara dalam kebijaksanaan bisnis dianggap sebagai penghambat mobilitas pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berpandangan minor terhadap intervensi negara.

Padahal secara umum, dalam preferensi bisnis, stabilitas dan profitabilitas ekonomis

serta tindakan kolektif yang menyertainya, tidak selamanya disebabkan mobilitas modal. Oleh karena itu dalam pandangan *Evan dan Amsden* (Schneider: 1998: 117) isu mobilitas modal yang dipakai untuk mengurangi peran negara sebagai aktor tidak dapat dipakai sebagai jaminan.

Bagi pemerintah yang berlandaskan perspektif liberal, secara politis pengendalian mobilitas modal tetap diperlukan guna dipakai sebagai alat pengontrol dan penyeimbang negara atas dominasi pengusaha. Pengendalian yang dilakukan negara ini dimaksudkan, agar supaya mobilitas modal ini tidak dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan yang dikuatirkan secara dominan akan memihak pengusaha.

Pengendalian terhadap inovasi strategis, khususnya penyediaan benih jagung hibrida sebagai pilot proyek nasional yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha asing (international breeder), intervensi negara tetap diperlukan. Alasannya, benih diasumsikan sebagai "barang publik" yang tidak mungkin tersedia secara gratis di pasar. Akan tetapi demi memenuhi kepentingan nasional barang tersebut harus tersedia

di pasar. Dengan adanya asumsi inovasi pertanian sebagai barang publik, maka intervensi negara dalam pengendalian inovasi dibenarkan.

Pengendalian terhadap kredit yang diperoleh petani, semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan petani. Ini dimaksudkan agar modal yang ditanamkan pengusaha, termasuk juga produk yang diperoleh tidak sirna di tangan petani ataupun hanya terakumulasi demi kepentingan pengusaha. Mekanisme pengendalian ini dilakukan karena adanya kemampuan dari pemerintah untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan pengusaha maupun petani. Dengan cara demikian, maka pemerintah mendorong masuknya pengusaha menanamkan investasinya, disamping kemungkinan terjadinya pelarian modal (*capital flight*) dan diversifikasi resiko dengan menanamkan modalnya di tempat lain dihindari.

Hubungan relasional yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan petani nampak berdampak positif dan lugas. Walaupun otoritas pemerintah dalam konteks tertentu tetap ditonjolkan guna menekan independensi pengusaha maupun masyarakat,

pengusaha merasa tanpa sedikitpun dikurangi hak dan kekuasaannya.

Tantangan terhadap perspektif liberal yang berpandangan *free market liberalism* ini juga muncul dari posisi negara. Dengan reposisi yang sedemikian, negara akan membaca dan mempertimbangkan preferensi dan perilaku pengusaha serta mempertimbangkan organisasi pasar dalam interaksinya dengan pemerintah. Bagi negara justru merasa tidak mendapat hambatan dan terhalang oleh keberadaan faktor ekonomi seperti mobilitas modal. Hal ini karena negara dalam pandangan ini hanya dikonstruksi sebagai register pasif. Negara sekedar institusi yang hanya akan dipakai untuk mengatur bilamana diperlukan. Dengan demikian negara juga tidak akan melakukan intervensi terhadap perkembangan pasar. Sebaliknya, negara akan bersikap akomodatif terhadap perkembangan yang ada di masyarakat. Adapun pasar hanya akan diatur oleh keseimbangan 2 kekuatan, dimana permintaan dan penawaran saling berinteraksi.

Ini akan bertolak belakang jika perspektif konservatif (Clark,1991:79) dipakai sebagai acuan.

Dalam perspektif ini, pasar akan lebih bernuansa menyetujui terhadap peran negara yang lebih besar. Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur serta memaksakan kehendaknya terhadap mekanisme pasar.

Jadi, otonomi dan kapasitas negara adalah fungsi langsung dari pengembangan sektor usaha. Jika pengusaha mendominasi komoditas ekspor, maka negara akan berkewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan inovasi. Pada tahapan selajutnya, negara juga akan memperoleh tambahan pajak dan pendapatan yang berhubungan dengan sektor usaha ini. Jika ini yang terjadi, maka perusahaan juga berhak mendapatkan adanya tambahan pelayanan publik (*public service*) dari negara.

Dalam kajian sosietaI, preferensi pengusaha dapat di deduksi dari struktur aktiva di dalam perekonomian. Jika aktiva pengusaha signifikan dalam perekonomian negara, maka pemerintah akan bersikap akomodatif terhadap preferensi pengusaha. Oleh karena itu, preferensi pemerintah untuk menerima dan bersikap akomodatif terhadap preferensi pengusaha akan lebih besar.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa pengusaha ketika berhadapan dengan pemerintah walaupun berpotensi untuk independen namun posisi tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan. Pengusaha akan tetap memposisikan untuk menyesuaikan dan akomodatif terhadap kebijaksanaan pemerintah, terutama jika hal tersebut terkait dengan berbagai faktor yang akan mendorong ataupun menghambat keberlanjutan perusahaan. Dampak lebih lanjut dari adanya variasi tindakan ini, antara pemerintah dan pengusaha mendorong terjadinya interdependensi di antara keduanya. Hal ini juga akan mempunyai dampak terhadap pembentukan preferensi kapitalis dan peluang perspektif secara teoretis.

8.2 Terciptanya Sinergi antara Negara, Pasar dan Masyarakat

Karakteristik terjadinya hubungan antara negara, pasar dan masyarakat selama berlangsungnya difusi inovasi, pada akhirnya menuju terciptanya sinergi di antara ketiganya . Secara bertahap proses yang terjadi diawali oleh adanya fenomena pertukaran, kemudian melakukan interdependensi dan akhirnya terjadi sinergi.

Temuan menuju terciptanya sinergi antara negara, pasar dan masyarakat ini nampaknya lebih moderat daripada konsep dikotomi negara-pasar atau negara-masyarakat. Dalam kajian difusi tidak hanya sekedar mengaktualisasikan terjadinya difusi inovasi dari sumber inovasi ke pengguna inovasi atau bahkan hanya terciptanya dominasi kekuasaan dari pasar ke masyarakat. Dampak dari difusi inovasi itu sendiri ternyata juga menciptakan terjadinya proses yang berkelanjutan. Diantaranya adalah adanya pertukaran inovasi dari pasar ke masyarakat juga menciptakan terjadinya perubahan perilaku pasar. Adapun dengan terjadinya interdependensi diantara ketiga variabel, keputusan pemerintah juga mengalami penyesuaian dan perubahan. Akhirnya dengan terciptanya sinergi antara negara, pasar dan masyarakat, maka di antara ketiganya akan saling mendukung dan saling memberdayakan untuk memperoleh manfaat yang paling optimal.

8.2.1 Pertukaran Inovasi dan Interdependensi Inovasi

Selama difusi inovasi berlangsung, arus

informasi ternyata tidak berjalan searah yang dimulai dari sumber inovasi ke pengguna inovasi. Akan tetapi, arus informasi juga berlangsung dari 2 arah secara bolak balik. Pengguna inovasi selain memberikan respon untuk menerima, juga memberikan respon untuk menolak ataupun menyempurnakan terhadap inovasi yang didifusikan. Dengan arus informasi yang sedemikian, maka masyarakat dapat memberikan umpan balik kepada sumber inovasi. Terjadinya arus umpan balik inovasi tersebut merupakan prinsip dasar dan salah satu bentuk awal dari terjadinya pertukaran inovasi.

Jadi, difusi inovasi pada awalnya merupakan elemen dasar dari terjadinya pertukaran. Selanjutnya, dengan terjadinya pertukaran inovasi dijadikan sebagai elemen dasar demi terciptanya interdependensi. Ini terjadi karena antara sumber inovasi dan pengguna inovasi memerlukan adanya saling ketergantungan guna memenuhi kepentingannya. Dengan demikian, pertukaran inovasi merupakan variabel independen untuk menjelaskan terjadinya interdependensi. Berlangsungnya pertukaran inovasi yang diikuti dengan pemberian kredit, subsidi dan

bahkan proteksi serta penyediaan pasar yang semakin banyak dan luas, juga mensifatkan hubungan antara negara, pasar dan masyarakat yang semakin tinggi guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, walaupun kesepakatan dengan mengadakan pertukaran inovasi antara sumber inovasi dan pengguna inovasi ini nampak mudah, akan tetapi kemudian secara praktis tetap mengalami hambatan. Di antara kendala tersebut adalah bagaimana merujuk ketiga kepentingan yang tidak selamanya selaras dan bahkan kontradiktif. Juga bagaimana agar supaya masyarakat dengan secara persuasif dapat menyetujui terhadap inovasi yang didifusikan oleh pasar.

Mekanisme terjadinya pertukaran inovasi diawali ketika pengusaha bersama pejabat pemerintah bekerjasama yang secara persuasif meyakinkan petani guna menawarkan kerjasama. Kemudian menginformasikan mengenai inovasi yang diharapkan pasar, apa manfaatnya bagi masyarakat, subsidi apa yang akan diberikan dan bagaimana mekanismenya. Untuk hal tersebut apa yang menjadi kepentingan petani juga ditampung sebagai bahan pertimbangan. Pengusaha

maupun pejabat pemerintah berusaha menangkap terhadap apa yang dapat di dengar maupun yang tidak dapat di dengar dari petani. Setelah terjadinya pertukaran informasi, baru kemudian dilakukan berbagai pertimbangan berdasar skala prioritas. Kesepakatan antara petani dan pengusaha direalisasikan dengan surat perjanjian yang diketahui pejabat pemerintah sebagai fasilitator. Petani secara informal diajarkan disiplin, sedangkan perusahaan mengintrodukir inovasi.

Selama pemantauan, pengusaha dan pejabat pemerintah selalu mengakses informasi dari petani. Di samping itu, secara otonom pengusaha di izinkan membuat keputusan. Informasi ini diakui tidak mudah, karena adanya peluang bagi petani untuk memberikan informasi yang tidak akurat terutama terkait dengan kinerja. Oleh karenanya, penilaian terhadap kinerja petani tidak dilakukan secara absolut, tetapi dilakukan dengan cara membandingkannya dengan petani lain yang juga bekerjasama dengan perusahaan dalam bentuk produktivitas. Cara ini nampak efisien dan sukar untuk dikelabui petani.

Dalam hal terjadi penyimpangan, pengusaha dan pejabat pemerintah dapat menjatuhkan hukuman. Pada tahapan ini legitimasi dan kredibilitas pemerintah maupun pengusaha di uji. Sangsi dilakukan dengan cara mengganti peserta yang bermasalah atau memberikan insentif berupa paket tambahan bagi peserta yang mempunyai kinerja baik. Ini cukup efektif karena petani cukup menanggapinya melebihi insentif yang lain.

Perkembangan berikutnya, ternyata adanya pertukaran inovasi telah melahirkan terjadinya interdependensi antara pemerintah, pasar dan masyarakat. Apabila diperbandingkan dengan pertukaran, fenomena interdependensi lebih kompleks dan lebih interaktif. Prinsip dasar yang membedakannya adalah, pada model pertukaran terjadinya hubungan antara sumber inovasi dan pengguna inovasi bersifat sepihak, spesifik dan dalam jangka waktu yang pendek. Pada model interdependensi lebih bersifat umum dan berlangsung dua arah. Jadi, prinsip pertukaran walaupun merupakan elemen interdependensi masih menekankan terjadinya pertukaran difusi inovasi, fleksibilitas dan

renegosiasi antara dikotomi sumber inovasi dan pengguna inovasi. Oleh karenanya dalam pertukaran inovasi terselip pengertian sempit untuk memantau.

Difusi inovasi yang mengalir melalui interdependensi, memiliki manfaat tambah bagi pengusaha. Petani mengizinkan pengusaha dan pejabat pemerintah untuk memperoleh informasi guna mengkalkulasi efisiensi yang diperoleh petani. Bagi petani, kesediaan untuk bekerjasama secara disiplin dan adanya kesediaan untuk melakukan pertukaran, dijadikan sarana untuk melakukan tawar-menawar dengan pengusaha. Walaupun diakui, pengusaha tetap sebagai aktor yang dominan dalam keputusannya.

Interdependensi juga memberikan keleluasaan bagi kelompok tani maupun asosiasi petani untuk melakukan negosiasi dan renegosiasi secara kontinyu dengan pemerintah dan pengusaha tentang tujuan serta kebijaksanaan yang akan dilakukan. Jadi, interdependensi tidak saja merangsang kesediaan petani sebagai pengguna inovasi tetapi juga memberikan umpan balik kepada pejabat pemerintah dan pengusaha. Dengan demikian interdependensi juga bisa membeberkan dan memecahkan masalah dalam

hubungan kausal. Hubungan ini akhirnya selaras dengan pendapat *Evans* (Schnieder, 1998:108) bahwa adanya hubungan antara pemerintah dan pelaku bisnis terdapat korelasi yang signifikan dengan peningkatan kinerja ekonomi di satu pihak dan teknologi informasi di pihak yang lain.

Manfaat lain dari adanya interdependensi adalah dalam penentuan strategi bisnis. Pengusaha diperkenankan untuk mengambil alih peran pemerintah apabila hal tersebut memang dianggap lebih efisien. Jika seandainya pengusaha merasa kurang berpengalaman di bidang pelatihan dan penyuluhan serta kurang profesional dalam pembuatan kebijaksanaan, pengusaha masih dapat meminta bantuan pejabat pemerintah untuk memotivasi petani. Karena pejabat pemerintah ini pada akhirnya diwujudkan di dalam jaringan dominasi pengusaha, maka pejabat pemerintah yang sedemikian akan lebih moderat di dalam merekomendasi kebijaksanaannya yang mendukung kepentingan pengusaha.

Ini tidak berarti karir kapitalisme telah diwujudkan di dalam birokrasi ekonomi, dimana pengusaha diberi posisi membuat kebijaksanaan

secara otonom di dalam pemerintahan. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu dari karir pelayanan sipil yang diwujudkan ke dalam jaringan bisnis.

Persoalannya adalah apakah yang akan terjadi ketika pengusaha mampu mengubah perilaku pejabat pemerintah yang ditunjuk. *Silva* (Schneider, 1998: 118) berpandangan:

" Pejabat yang diangkat serta bertindak demi kepentingan perusahaan, maka perilaku pejabat di dalam bisnis (perusahaan) itu bervariasi sesuai dengan sifat dari perusahaan."

Kesimpulan yang diperoleh dari pandangan ini adalah, bahwa variasi dalam inter-dependensi inovasi tidak saja tergantung dari kepentingan pengusaha, tetapi juga pemerintah dan masyarakat ikut sebagai penentu.

Fase perkembangan inilah yang kemudian oleh Gramsci (Simon, 1999: 34) disebut sebagai perkembangan dari fase ekonomi-korporasi menuju fase hegemonik. Pada fase pertama, pengusaha memposisikan sejajar dengan posisi pemerintah maupun posisi masyarakat. Mereka menyadari kepentingan masing-masing diantara mereka. Pengusaha merasa belum perlu bergabung untuk mewujudkan solidaritasnya

terhadap pemerintah dan masyarakat. Fase selanjutnya, kesadaran pengusaha akan kepentingan bersama mulai timbul, namun masih dalam bidang ekonomi. Masalah negara sudah mulai diperhatikan, walaupun sebatas memperoleh persamaan politik. Fase ketiga, terwujudnya kesadaran bahwa kepentingan pengusaha (ekonomi) adalah juga demi kepentingan masyarakat.

Perjuangan pengusaha tidak lagi sekedar terfokus dalam tataran korporasi sebagai institusi ekonomi namun juga universal dengan memposisikan sebagai institusi politik yang akhirnya tercipta hegemoni dari struktur pasar yang kuat terhadap struktur yang lemah.

8.2.2 Sinergi antara Negara, Pasar dan Masyarakat

Pada bagian akhir ini sampailah pada pengkajian yang paling penting tentang hubungan negara, pasar dan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Tugas utama yang masih tertinggal dan tidak mudah, namun harus dipecahkan adalah permasalahan tentang bagaimana hubungan yang terjadi sehingga mekanisme persaingan kekuasaan bahkan adu kekuatan berdasar konflik kepentingan antara negara, pasar dan masyarakat di hindari.

Sebaliknya, fakta sosial menuju tercapainya keteraturan (order) sosial yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan terealisasi.

Dalam bentuk umum, kekuatan struktural difusi inovasi terletak pada aktor pasar, bukan pada aktor masyarakat. Untuk kasus yang spesifik (pertanian) kunci pertimbangannya terletak pada kemampuan pengusaha untuk melakukan kegiatan proses produksi, di lokasi mana pemerintah maupun masyarakat tidak mampu melakukan kegiatan usahanya. Intervensi pemerintah sebagai aktor hanya berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat. Peran pemerintah bukan sekedar mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat tetapi juga membangun sumberdaya manusia dan infra-struktur serta melakukan negosiasi dengan pemodal global untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian pendekatan yang menitik beratkan pada pasar untuk melakukan difusi inovasi kepada masyarakat sangat logis. Dengan pendekatan ini, juga membantu mengapa antara negara dan pasar selain melakukan kompetisi dalam hubungannya dengan masyarakat juga menjawab mengapa diantara ketiga

struktur melakukan sinergi.

Pengusaha selain mempunyai potensi ekonomi juga mempunyai kemampuan melakukan mobilitas modal. Penggunaan kekuatan strukturalnya tidak hanya dapat dipakai untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Kekuatan struktur pasar, juga mendorong munculnya perdebatan secara teoretis dan ideologis tercapainya *positive-sum* yaitu terjadinya peningkatan kekuatan akibat adanya keterpaduan antara negara, pasar dan masyarakat. Paling tidak dengan cara ini kepentingan dari ketiga struktur dapat dipadukan.

Fenomena difusi menunjukkan bahwa antara negara, masyarakat dan pasar saling terikat dan saling memberdaya satu sama lain. Interaksi di antara ketiganya menciptakan kekuatan di kedua belah pihak. Kekuatan saling memberdaya ini sangat penting karena pemerintah mempunyai tugas ganda. Pemerintah selain mendorong terciptanya transformasi ekonomi, juga secara politis mendorong terciptanya pembangun masyarakat secara serentak. Di satu sisi untuk membangun ekonomi yang kuat, negara memerlukan kekuatan agar mampu mengontrol

kelompok kepentingan. Adapun di sisi yang lain, secara ekonomis negara harus mampu menumbuhkan pasar dan secara politis harus mampu menumbuhkan kekuatan masyarakat.

Dengan adanya sinergi, pasar dan masyarakat berkesempatan untuk saling memberdaya guna memperkuat negara. Keikut-sertaan pasar tidak dengan mengurangi peran negara dan melemahkan kekuatan infra-struktur masyarakat. Sebaliknya, kebersamaan dan kesepakatan antara negara, pasar dan masyarakat menjadi lebih efisien demi pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi, pasar yang kuat saling terkait dengan masyarakat serta kekuatan negara yang berdaya lenting secara lugas.

Terjadinya sinergi ini muncul di kala pengusaha menyadari, bahwa masyarakat sebetulnya mempunyai kekuatan yang dapat dipakai untuk melakukan tawar-menawar. Akibat adanya pola pemikiran yang sedemikian, kekuatan dan partisipasi masyarakat perlu dihargai. Selanjutnya, pasar menjadi lebih terbuka terhadap kekuatan masyarakat.

Bagaimana hal ini terjadi, mekanismenya dijelaskan sebagai berikut: Ketika petani membentuk

dan tergabung dalam kelompok tani, kekuatan pengusaha secara politis dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tidak mempunyai tanah sebagai modal utama. Kekuatan ekonomi pengusaha hanya terletak pada permodalan, penguasaan inovasi, jaringan pasar dan profesionalisme. Seandainya pemerintah melakukan intervensi dengan melakukan pemaksaan terhadap petani, atas dasar otoritas kekuasaannya dengan semata-mata untuk kepentingan politik, maka yang akan terjadi adalah adanya resistensi petani baik yang dilakukan secara fisik (manifes) maupun resistensi secara terselubung (laten). Nampaknya tidak ada pilihan lain bagi pasar kecuali untuk sementara waktu memenuhi sebagian dari tuntutan tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan jangka pendek masyarakat dan demi kepentingan jangka panjang pasar. Dengan demikian, tindakan pemerintah yang seakan bersifat akomodatif hanyalah untuk menyelamatkan pengusaha. Adapun pengusaha, membutuhkan bantuan pemerintah agar usahanya berlangsung secara sinambung.

Faktor politik dalam hubungannya dengan nilai dan ide yang dihayati masyarakat pertanian yang di

interpretasikan sebagai masyarakat lokal juga ikut mendukung. Diantaranya, kecenderungan masyarakat mematuhi pemerintah. Atas dasar pertimbangan ini, walaupun kepentingan faktor ekonomi berperan besar namun faktor politik ikut mempengaruhinya.

8.3 Implikasi Teoretik

Implikasi teoretik dari argumen sinergi ini adalah bahwa, mekanisme diadopsinya suatu inovasi itu dilakukan secara bertahap yang dimulai dari adanya interaksi antara negara dan pasar sebagai struktur sumber inovasi dan masyarakat lokal sebagai struktur pengguna inovasi. Terjadinya sinergi antar struktur karena adanya keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Diantaranya petani mempunyai potensi dalam hal pengalaman dalam berusahatani sedangkan pengusaha mempunyai kemampuan untuk menyimak peluang pasar dan permodalan. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang kohesif, walaupun di dalam inovasi terselip adanya dominasi kekuasaan yang tidak kasat mata, masyarakat tidak merasakannya secara riil. Akibatnya, difusi inovasi yang pada awalnya bermakna mendistribusikan sebagian

kekuasaan pasar kepada masyarakat sehingga kekuasaan pasar sebagai sumber inovasi berkurang, justru secara tidak kasat mata yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terjadinya pemusatan dan akumulasi kekuasaan yang lebih besar pada pasar. Oleh karenanya, dari temuan ini dapat menghasilkan suatu *proposisi 1* yang berbunyi:

"Terjadinya difusi inovasi akan berbanding lurus dengan akumulasi kekuasaan. Akibatnya, jika arus difusi inovasi yang dilakukan semakin kuat maka akan semakin besar pula kekuasaan yang akan diterima".

Makna dari temuan ini adalah, walaupun sekilas pengusaha banyak membantu masyarakat, namun yang tersirat di dalamnya adalah masyarakat akan terbawa kedalam pengaruh kekuasaan dan ketergantungan pada struktur pasar. Dengan demikian, difusi inovasi memberikan dukungan teoretis untuk mempertahankan dominasi kapitalis yang terselubung demi untuk memajukan masyarakat. Di sisi yang lain, difusi inovasi juga memberikan dukungan terhadap intervensi negara guna mengimbangi kekuatan kapitalis. Akibatnya, difusi inovasi mempunyai

makna ganda. Disamping mempercepat arus inovasi, juga menyebabkan terjadinya akumulasi kekuasaan. Jika akumulasi kekuatan ini berlangsung lama, maka dikuatirkan adanya difusi inovasi justru melahirkan terhambatnya independensi masyarakat.

Namun demikian, jumlah netto kekuatan yang ada di dalam masyarakat bukan lagi merupakan netto kekuatan yang statis, tetapi sudah menjadi netto kekuatan yang dinamis. Perpaduan kekuasaan yang dimiliki negara, pasar dan masyarakat lebih banyak bertujuan untuk saling menguntungkan (*mutually exclusive*), saling memadukan potensi, saling terikat dan saling memberdaya dari masing-masing struktur.

Berdasar temuan ini, jika dinyatakan dalam *proposisi 2* dapat berbunyi sebagai berikut :

" Jika dari ketiga struktur (negara, pasar dan masyarakat lokal) melakukan sinergi dengan upaya saling memberdaya dalam kekuatan yang berimbang, maka total kekuatan dari ketiga struktur tersebut akan bersifat dinamis sehingga menjadi positive-sum " .

Hubungan kekuasaan ini hanya akan berlaku zero-

sum, jika kekuasaan yang didistribusikan hanya menghasilkan keuntungan di satu pihak, tetapi dipihak yang lain mengakibatkan terjadinya kerugian.

Dengan adanya konsep kekuasaan berdasar *positive-sum* ini maka "nilai tambah" (*value added*) dalam proses ekonomi berlaku. Dukungan masyarakat terhadap pasar atau jika pasar menyesuaikan dengan kebijaksanaan negara, maka pasar akan memperoleh manfaat tambah. Oleh karenanya, total kekuasaan tidak lagi merupakan *zero-sum*, tetapi hubungan di antara ketiganya bisa mendapatkan manfaat dan kekuatan yang lebih besar (*positive-sum*).

Konsep kekuasaan ini hanya akan berlaku efektif jika distribusi kekuasaan yang dipergunakan adalah demi tujuan kolektif dan demi kepentingan ekonomis. Sebagaimana diutarakan Parson (Xu Wang, 1998:233) dalam kata-katanya:

" Oleh karenanya, kekuasaan itu adalah kemampuan yang digeneralisir untuk menjamin kinerja dari kewajiban yang mengikat unit-unit didalam suatu sistem organisasi kolektif, hanya jika kewajiban-kewajiban itu disahkan berdasarkan kepada tanggung jawab mereka pada tujuan kolektif. "

Akibat selanjutnya, konsekwensi dari temuan ini akan merupakan koreksi terhadap konsep kekuasaan dalam budaya Jawa tradisional seperti yang dikemukakan Anderson (1991:51) yang melahirkan konsep *zero-sum*. Dalam temuan teoretis ini juga sekaligus dapat menunjukkan, bahwa dalam masyarakat Jawa modern orientasi masyarakat sudah didasarkan pada kepentingan ekonomis. Bagaimana kekuasaan sebagai instrumen kepentingan politik dan kompetisi kelompok kurang diperhatikan. Peranan paksaan dan kekuatan yang dapat menciptakan kekuasaan serta sifat kekuasaan yang hirarkis dan distributif mulai diabaikan. Sebagaimana diutarakan Giddens (Xu Wang, 1998:234):

"Kapasitas transformatif tindakan manusia yang mengantara di dalam deretan kejadian, dapat merubah arah mereka".

Dalam temuan teoretis ini juga menunjukkan, bahwa kekuasaan terhadap orang lain tidak perlu meng-subordinasikan yang dikuasai dari yang menguasai. Walaupun di antara keduanya mungkin terjadi konflik, melalui kekuasaan yang di miliki-

nya harus mampu memadukan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak.

Kekuasaan ini dapat diperluas bilamana orang yang menjalin kerjasama memperoleh peningkatan kekuatan bersama. Oleh karena itu konsep kekuasaan "*positive-sum*" melahirkan pemberdayaan bersama antara negara, pasar dan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat dan pasar tidak harus melemahkan kekuasaan negara. Bahkan berkembangnya infrastruktur (lembaga sosial dan lembaga ekonomi) meningkatkan peran serta lembaga negara dalam melaksanakan tujuannya mendorong kepentingan sosial yang lebih besar.

Tampilnya masyarakat lokal dalam agribisnis secara menyolok berdampak positif terhadap otonomi dan kapasitas negara. Akibatnya, kekuasaan, otonomi dan kapasitas negara merupakan fungsi otonomi relatif dari pasar dan masyarakat lokal. Secara struktural, perkembangan di level sosietaI maupun negara memaksa terjadinya kerjasama. Bilamana masyarakat lokal dan pasar kuat maka kapasitas negara juga akan menjadi kuat.

Terjadinya interaksi antara negara, pasar dan

masyarakat lokal tidak perlu dipaksakan. Yang lebih dipentingkan adalah bagaimana cara mengatur pembagian kekuasaan pada masing-masing pihak secara adil dan diterima, walaupun dalam kadar yang berbeda. Kemungkinan terjadinya konflik tidak dapat dielakkan, disebabkan adanya kekuatan yang mungkin berlebih dari yang lain. Apabila hal ini terjadi, maka diperlukan adanya kearifan dan negosiasi serta pembagian kekuasaan melalui kesepakatan guna kepentingan bersama.

Namun demikian, walaupun secara optimistik pemberdayaan bersama ini bisa dibangun, secara umum kemungkinan timbulnya sinergi ini masih tergantung pada kemauan unsur sosial-politik dan sosial-ekonomi. Di satu sisi negara harus mampu memperkuat masyarakat lokal dengan cara memberi struktur kelembagaan secara otonom dan mendorong iklim usaha yang menguntungkan. Di sisi yang lain lembaga masyarakat dan dunia usaha yang kuat harus memainkan peran aktif untuk membantu negara.

Dilema yang akan dihadapi sinergi adalah, idealnya antara negara, pasar dan masyarakat memiliki kekuasaan yang seimbang dalam suatu

kekuatan *check and balance*, tanpa ada yang merasa berstatus sentral dan berstatus marginal. Dengan kekuatan demikian, diharapkan terwujudnya pasar yang merefleksikan kemauan dan atau berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dalam kondisi dimana pasar dirasakan terlalu dominan, tentu berakibat sebaliknya. Masyarakat merasa semakin di pinggirkan, bahkan berimplikasi pada dependensi masyarakat. Tingginya dominasi pasar berakibat timbulnya krisis partisipasi dari masyarakat. Konsekwensinya timbul benturan antara masyarakat dengan pasar. Negara terpaksa harus terlibat karena hal itu merupakan wewenangnya.

Dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berarti pula memberdayakan masyarakat, yang sangat berguna bagi kerjasama secara keseluruhan. Jika masyarakat tidak mempunyai keberdayaan yang cukup dan segalanya diatur oleh pasar, niscaya perimbangan kekuatannya akan menjadi timpang.

Adanya benturan antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha janganlah dianggap bahwa masyarakat sebagai oposan. Jika diartikan

sedemikian, maka akan sangat sulit untuk menemukan titik temu. Apalagi pada tahapan berikutnya sudah di landasi rasa sikap curiga. Akibat lebih lanjut yang akan dirasakan adalah sangat sulitnya mengadakan pendekatan secara dialogis. Oleh karena itu, adalah sangat bijaksana jika seandainya dalam mengkaji pasar yang dianggap otoriter dan melahirkan dependensi bagi petani, negara harus membantu petani untuk menganalisis mengapa pasar bertindak sedemikian. Jika tidak, maka masyarakat dengan serta merta akan menyudutkan pasar sebagai pihak yang otoriter.

Walaupun berdasar pertimbangan, sikap otoriter itu kurang baik, bukan mustahil masyarakat akan tetap mendukung sikap pasar yang sedemikian, jika hal tersebut memang diperlukan. Cara-cara represif ataupun pemaksaan (*coersif*) dalam situasi tertentu dapat juga diperlakukan untuk menjaga kualitas. Pasar memang perlu untuk menjual dan mempertahankan kesan yang baik (*image*), guna menghindari menurunnya kepercayaan konsumen. Pola sedemikian membutuhkan disiplin keras dan kuat yang mungkin dianggap baru bagi petani. Secara implisit situasi

sedemikian menjadi embrio bagi pasar maupun pemerintah untuk bersikap otoriter.

Argumentasi di atas bukanlah untuk melegitimasi atau mentolerir sikap pasar yang otoriter-represif. Karena apapun alasannya, pasar akan lebih baik jika memberlakukan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin partisipasi masyarakat. Sikap demikian akan menghasilkan kebijaksanaan yang senapas dengan aspirasi masyarakat. Apabila hasrat untuk berpartisipasi semakin terhalang, maka masyarakat cenderung bertindak di luar aturan kebersamaan.

Penyaluran aspirasi di luar kebersamaan ini bisa timbul, jika peran pasar terlalu dominan dan membatasi independensi masyarakat. Kemandekan juga terjadi, jika pemerintah dibungkam oleh kepentingan pasar karena sudah ternina bobokkan oleh elitis mereka. Akibatnya masyarakat mencari saluran alternatif. Cara ini dipandang efektif untuk menyalurkan aspirasinya karena dianggap tidak ada pilihan lain kecuali cara yang ekstrem berupa unjuk rasa.

Timbulnya sinergi antara negara, pasar dan

masyarakat lokal, pada dasarnya merupakan wujud perkembangan negara di dunia ketiga seperti yang dicetuskan oleh Evans (Budiman, 1996:113), tentang adanya persekutuan segitiga atau aliansi tripel antara pemodal asing, pemerintah dan borjuis lokal. Yang paling menarik dalam aliansi ini adalah pernyataan yang menyatakan:

"Meskipun negara berpihak pada modal asing, namun pada saat yang bersamaan, negara juga menekankan pada nasionalisme"

Oleh karena itu masuknya modal asing masih tetap diperlukan oleh negara agar supaya pemodal dan pengusaha asing tersebut dapat menanamkan investasinya. Bersamaan dengan munculnya pemodal, masuk juga teknologi dan pasar internasional.

Namun demikian pemerintah tidak dapat mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Jika masyarakat lokal ini diabaikan, masyarakat akan menuduh pemerintah hanya bekerja demi kepentingan pemilik modal (pengusaha). Jika ini yang terjadi maka pada gilirannya pemerintah akan kehilangan legitimasinya dari masyarakat. Untuk itu maka, pemerintah harus tetap menjaga independensinya agar tetap berkuasa (*status quo*). Dengan demikian

terjadinya sinergi yang oleh *Evans* disebut sebagai aliansi tripel atau persekutuan segitiga, pemerintah melakukan kerjasama dengan pemodal demi kepentingan ekonomi. Begitu juga, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat lokal di samping bersifat ekonomis, juga mengandung aspek politis.

8.4 Implikasi Praktis

Disadari, bahwa untuk merealisasikan dan mengaplikasikan sinergi tidaklah mudah. Akselerasi terjadinya perubahan ini hanya dicapai apabila dimulai dengan menata ulang pemerintah (*re-inventing government*). Pemerintahan yang bersifat otonomi adalah sangat diperlukan guna memperoleh pemerintahan yang mapan dan kuat sehingga tidak mudah untuk digoyahkan. Namun demikian, pemerintah bisa juga menjadi pusat sinisme apabila tidak efisien dan tidak produktif dengan mutu pelayanan yang sangat buruk. Untuk memecahkannya, dipergunakan konsep yang diajukan Osborne (1993:16) tentang pemerintahan wirausaha yakni dengan memasukkan semangat wirausaha kedalam jiwa birokrat. Oleh karenanya, pemerintahan harus di jalankan dengan logika wirausaha (*how the entrepreneurial spirit*

is transforming the public sector).

Sepuluh prinsip yang perlu ditata ulang menurut pemikiran *Osborne* adalah : (1) Perlunya dibentuk pemerintahan katalistik yang lebih mengutamakan pemberian pengarahan daripada pemberian pelayanan. Pelayanan jasa publik sebaiknya diproduksi dan disediakan oleh sektor non publik. Sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai perumus kebijaksanaan dan pengarah saja. (2) Perlunya pemerintahan yang dimiliki oleh masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan daripada pemberian pelayanan pada masyarakat. Jadi, masyarakat harus diberdayakan agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Juga ketergantungan masyarakat pada pemerintah harus dikurangi. (3) Perlunya pemerintahan yang kompetitif dengan menginjeksi semangat bersaing dalam pemberian pelayanan. Monopoli layanan oleh pemerintah harus diakhiri, diganti persaingan layanan oleh lembaga non-pemerintah. Cara persaingan ini akan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan mutu pelayanan. (4) Pemerintah perlu memiliki misi yang jelas. Aparat pemerintah diberi kebebasan

untuk berkreatif dalam mencapai misi yang disepakati. (5) Pemerintahan harus berorientasi pada hasil dengan mengutamakan anggaran untuk membiayai hasil dan bukan pada masukan. (6) Pemerintahan berorientasi pada pelanggan dengan berusaha memberikan kepuasan bagi pengguna jasa pemerintah. (7) Pemerintah wirausaha harus menghasilkan pendapatan, bukan semata-mata menghabiskan anggaran. (8) Pemerintahan yang antisipatif mengutamakan pencegahan daripada pengobatan. Pencegahan timbulnya masalah lebih diutamakan dari pada penyelesaian masalah. (9) Pemerintahan desentralisasi meninggalkan hierarki, menuju partisipasi dan team kerja. Kewenangan diberikan kepada aparat paling bawah pada lini terdepan dengan masyarakat. Jenjang organisasi disederhanakan menuju struktur organisasi yang datar. (10) Pemerintahan berorientasi pada pasar, dimana berbagai perubahan di dorong melalui pasar. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sedapat mungkin perlu dihindari, kemudian digantikan oleh kekuatan pasar dalam menjalankan fungsi pelayanan.

Untuk mencapai konsep yang diajukan di atas

diperlukan beberapa tahapan. Langkah yang dilakukan adalah: perlunya kesediaan untuk melakukan re-introspeksi dan dengan jujur menerima kenyataan yang ada. Kemudian harus ada komitmen bahwa penataan ulang diperlukan.

Implikasi praktis berikutnya, diperlukan adanya alternatif model ekonomi politik yang berwatak sosial, dimana tatanan ekonomi menyesuaikan dengan tatanan sosial. Walaupun tata ekonomi menghargai penguasaan perorangan, pertukaran bebas atas barang dan jasa, pengembangan inisiatif dan daya inovatif serta kreasi yang gemilang, namun tatanan ekonomi yang manusiawi dan sosialistik tetap diperlukan. Oleh karenanya perlu adanya sinergi antara kebebasan penguasaan aset ekonomi dengan mekanisme pasar.

Mekanisme pasar perlu dikendalikan oleh sentuhan *invisible hand* manusia. Undang-undang yang mengatur dan mengendalikan mekanisme pasar dipakai sebagai alat, agar kekuasaan yang diatur kapitalisme dan liberalisme tidak terjerumus ke dalam sistem seperti dikuatirkan Winters

(1999:viii) yang melahirkan dependensi yang mengerikan, buas dan kejam. Pengendalian mekanisme pasar ini dalam konsep Lampert (1994:58) dikenal dengan mekanisme pasar yang bercirikan dan berwatak sosial dimana kegiatan pelaku ekonomi yang berlandaskan kepentingan individu diseimbangkan dengan kepentingan masyarakat (pemerataan).

Secara politis, pengelolaan ekonomi dilakukan bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Namun karena penguasaan terhadap sumber ekonomi tersebut berbeda, maka berakibat peluang tindakannya juga akan berbeda. Jadi adalah logis jika penguasaan ekonomi tidak terkonsentrasi pada pemerintah, pengusaha atau masyarakat.

Secara ekonomis inovasi sebagai barang publik perlu diatur oleh keputusan otoritarian pemerintah. Keputusan ini merupakan instrumen untuk merancang tatanan politik, ekonomi dan sosial dalam mengeluarkan aturan hukum. Jika ini diatur, akibatnya inovasi publik tidak akan menarik bagi pengusaha karena volume dan mutunya ditentukan oleh negara. Terkecuali jika inovasi tersebut merupakan barang publik yang eksklusif. Namun karena secara

kuantitas barang yang ditawarkan terbatas, maka harganya menjadi tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan.

Intervensi negara melahirkan paksaan dan otoriter. Jika kesepakatan didasarkan kepentingan pluralis, meskipun di dalamnya terdapat adanya paksaan, tetapi tidak sepenuhnya otoriter. Kesepakatan yang dilakukan secara demokratis, pengawasannya diserahkan kepada pengawasan publik demi menjaga agar masyarakat berperan secara baik.

Kekuasaan ekonomi pengusaha perlu diregulasi. Jika kekuasaan ekonomi ini tidak diawasi pemerintah kekuatannya akan sangat berbahaya. Pengusaha sebagai pengendali inovasi mengeksploitasi dan memaksakan kehendaknya kepada masyarakat atau menempatkan masyarakat di luar kompetisi yang sebenarnya. Jika kekuasaan ekonomi ini tidak diikuti oleh pengawasan yang memadai maka terdapat kecenderungan menjadi akumulasi kekuasaan yang amat besar. Bahkan secara relatif, kekuasaan ekonomi mudah ditransformasikan ke kekuasaan politik. Dengan demikian kekuasaan ekonomi tumbuh subur jika

pemerintah dan politisi gagal menciptakan aturan.

Intervensi pemerintah yang terlalu dalam, untuk menguasai perekonomian secara sentralistik dapat berakibat kefatalan. Walaupun kekuasaan pengusaha dan kekayaan pribadi tidak muncul, namun kekuasaan karena kepribadian dan masalah lainnya akan lebih berat. Namun demikian kekuasaan negara untuk mengintervensi bukanlah hal yang negatif. Masalahnya adalah dengan cara apa dan untuk tujuan apa kekuasaan intervensi tersebut digunakan. Bagaimanapun juga jika ada kekuasaan ekonomi yang mengarah untuk menentang keinginan masyarakat, maka kekuasaan yang terkonsentrasi di negara semakin besar. Akibatnya kesempatan bagi masyarakat semakin terbatas.

Dengan pertimbangan di atas konsep ekonomi pasar sosial berada di tengah-tengah antara kapitalisme ekonomi pasar yang liberal dengan ekonomi sentralistik negara yang totaliter. Arahnya adalah menuju terciptanya tatanan ekonomi dan kemasyarakatan yang setara, adil, liberal serta secara ekonomi efisien. Tujuannya melakukan kombinasi antara perlindungan hukum, tatanan

ekonomi yang liberal dan berideologi keadilan serta keamanan sosial. Di dalamnya terdapat kombinasi antara kebebasan dan keadilan. Jadi tatanan konsep ini berupaya menggabungkan antara kebebasan bertindak berdasar persaingan ekonomi dan kemajuan sosial serta mengamankan diri melalui efisiensi ekonomi pasar.

Ekonomi pasar menjadi landasan untuk menciptakan sistem proteksi yang konprehensif. Hak dasar manusia yang menginginkan kebebasan secara otonom dihargai. Oleh karenanya desentralisasi kebijakan ekonomi sangat diperlukan. Dengan demikian kegiatan ekonomi ditempatkan dibawah pengendalian ekonomi pasar.

Masalahnya, kondisi produksi termasuk di dalamnya penawaran dan permintaan barang pertanian mempunyai ciri khas sehingga diperlukan tatanan khusus. Agar pembentukan harga yang bebas dapat memadai, maka pasar memerlukan keluwesan. Inilah yang tidak dipunyai dalam pasar pertanian. Sumberdaya alam dan proses produksi di luar kemampuan produsen. Akibatnya kemampuan produk pertanian untuk menanggapi fluktuasi harga dan permintaan

sangat tidak elastis yang menyebabkan sebagian besar pasar pertanian tersingkir dari pasar produk komersial. Lagi pula produk pertanian sangat rentan terhadap pengendalian struktur disamping volume produk pertanian tersebut memang terbatas.

Akibat kurang luwesnya produksi pertanian dan terbatasnya permintaan secara alami, maka kedudukan produk pertanian di pasar lebih lemah dibanding sektor ekonomi yang lain. Oleh karena alasan yang sedemikian maka adalah absah jika diadakan regulasi dan proteksi terhadap produk pertanian. Subsidi pertanian tidak dapat dihapuskan karena petani tidak dapat menghadapi persaingan global tanpa ada penghasilan pengganti dari sumber non-pertanian. Jika tanpa penghasilan pengganti, resiko menghilangnya pertanian skala menengah dan kecil akan meningkat. Ini akan mengganggu kebijakan pasar sosial. Jadi subsidi pertanian itu dibenarkan sebagai kompensasi atas peran sosial petani.

8.5 Rangkuman

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian bab ini adalah: jika independensi masyarakat selalu

dikorbankan demi kepentingan ekonomis pengusaha, maka dimasa berikutnya pihak perusahaan akan sulit untuk menumbuhkan korporatisme masyarakat sebagai mitra usaha. Jika debirokratisasi masyarakat berkembang, dimana independensi masyarakat diaktifkan maka perencanaan yang bermodel *bottom-up* secara politis akan mendapat dukungan dari masyarakat bawah. Gaya sentralistis dan dominasi pasar pada jangka panjang tidak akan mempunyai basis akar yang luas karena marginalisasi masyarakat akan melahirkan kerawanan.

Konsep sinergi dapat dipakai sebagai salah satu alternatif dan sebagai alat konseptual untuk mendorong terjadinya transformasi ekonomi dan politik. Kata kunci yang dipakai adalah interaksi antara negara, pasar dan masyarakat untuk mau melakukan kesepakatan. Oleh karenanya, diantara ketiganya harus diberdayakan bersama dan kekuasaannya harus berimbang.

Sinergi merupakan strategi yang akan bermanfaat baik di level lokal maupun nasional. Bahkan dapat berkembang menjadi jalur alternatif menuju liberalisasi. Argumen ini membawa pandangan yang

optimistik untuk memecahkan masalah kemandekan, kebuntuhan dan batasan interaksi yang saling memaksa antara negara, pasar dan masyarakat lokal. Kesemuanya tergantung dari independensi, kemauan, keterampilan, kesempatan dan keakraban para pengusaha dan elite pemerintah dengan kekuatan riil di masyarakat.

BAB 9

BAB 9

KESIMPULAN

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Difusi inovasi yang di dalamnya terlibat adanya proses produksi dan adopsi inovasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara internal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berkorelasi dengan tingkat adopsi. Adapun struktur eksternal yang mempengaruhi adopsi inovasi masyarakat adalah keterlibatan negara dan pasar.

Teori difusi yang berlandaskan prinsip teori modernisasi banyak membantu memahami dan memecahkan masalah pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan modernisasi, kreatifitas masyarakat menjadi meningkat dan secara simultan juga menyediakan kesempatan-kesempatan baru.

Implikasi teoretik temuan ini, jika kemudian ditinjau dari analisis ekonomi politik termasuk dalam kategori yang berperspektif konservatif (Clark, 1991:79) dimana kepentingan politik negara

sangat ditonjolkan sebagai panglima. Negara diperlakukan sebagai aktor pembangunan menuju terciptanya *status-quo*. Negara yang didukung mekanisme kekuasaan politik dituntun oleh ideologi statis. Oleh karenanya, negara dipandang mampu untuk melakukan intervensi guna mendominasi kekuasaan. Sebaliknya, mekanisme kepentingan ekonomi masyarakat dinafikan karena dikhawatirkan dapat merusak kestabilan dan kohesi masyarakat.

Difusi inovasi juga memunculkan berbagai masalah sosial baru yang tidak pernah diramalkan sebelumnya. Diantaranya adalah, memberi peluang terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi yang baru. Yang menonjol dalam temuan ini adalah:

Terjadinya difusi inovasi akan berbanding lurus dengan akumulasi kekuasaan. Akibatnya, jika arus difusi inovasi yang dilakukan semakin kuat maka akan semakin besar pula kekuasaan yang akan diterima

Timbulnya masalah dalam difusi inovasi ini karena penggunaan asumsi. *Pertama*, masyarakat sebagai pengguna inovasi dianggap mempunyai sifat yang pasif dan statis. Adapun negara sebagai

sumber inovasi diasumsikan mempunyai sifat yang dinamis. Dengan asumsi yang sedemikian, maka di dalam teori modernisasi, difusi inovasi itu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu maka pemerintah di posisikan sebagai aktor yang aktif melakukan difusi inovasi. *Kedua*, penggunaan asumsi negara yang berada dalam posisi netral sehingga posisi negara condong kepada posisi *status-quo*. Adapun pada saat yang sama, pengaruh struktural eksternal yang berpengaruh terhadap kewenangan negara kurang dipertimbangkan.

Penggunaan asumsi ini mendorong munculnya kritikan dari teori dependensi yang menganggapnya teori modernisasi ini kurang peka terhadap konteks struktural baik yang bersifat domestik maupun internasional. Dikotomi adanya sumber inovasi dan pengguna inovasi ini dalam teori struktur menjadi sebuah wacana. Di dalamnya akan terkait dengan masalah dominasi dan sub-ordinasi yang selanjutnya memberi peluang terjadinya konflik kepentingan. Sebagaimana dikatakan Kim (1994:60): keterbelakangan bukanlah merupakan proses yang evolusioner. Keterbelakangan merupakan suatu turunan dari

konteks struktural yaitu dependensi dan eksploitasi dari negara maju ke negara pinggiran.

Atas pertimbangan di atas, maka teori difusi tersebut perlu ditinjau ulang dan disempurnakan, yang pada gilirannya membutuhkan berbagai perspektif alternatif.

Secara epistemologis, teori difusi tidak semata menganut mazhab idealisme negara yang persuasif seperti halnya *Rogers dan Shoemaker*. Di dalam teori difusi juga mengandung aspek materialisme dari konsep *Marx* tentang adanya struktur yang menguasai sumber inovasi yaitu negara dan pasar dan struktur yang dikuasai yaitu pengguna inovasi (masyarakat). Akibat adanya dikotomi struktur yang sedemikian maka, dalam difusi inovasi faktor dominasi dan kekuasaan akan menjadi menonjol.

Jika teori struktur dipakai sebagai pengurai analisis, maka konsep difusi dari *Rogers dan Shoemaker* memberi indikasi untuk mendukung adanya dominasi kapitalis terhadap masyarakat. Namun demikian, walaupun pemegang posisi yang dominan mempunyai kekuasaan yang kasat mata, akan tetapi secara tidak kasat mata pula, yang dikuasai merasa

tidak dirugikan. Bahkan, yang dikuasai merasa diuntungkan karena adanya kerjasama dengan pengusaha dan pemerintah, masyarakat merasa memperoleh nilai tambah.

Demikian halnya jika ekonomi politik dipakai sebagai metode pendekatan, maka dalam perspektif liberal klasik teori difusi juga memberikan legitimasi terhadap intervensi negara guna mengimbangi dominasi pasar dan melindungi masyarakat.

Dalam difusi inovasi pertanian, posisi negara ternyata tidak sepenuhnya independen, seperti yang tercantum dalam ekspektasi perspektif konservatif dimana negara sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Namun demikian, negara juga tidak semata-mata ber-orientasi demi kepentingan pengusaha. Peran negara bersikap akomodatif dan kompromistis dengan memadukan berbagai aspek kepentingan yang beragam di antara ketiga kepentingan yaitu negara, pasar dan masyarakat. Jika seandainya di dalam kelompok pengusaha ataupun kelompok masyarakat terdapat kelompok dominan yang akan mempengaruhi kebijakan negara, hal tersebut

sifatnya hanya sementara. Kebijakan negara akan ditentukan oleh kristalisasi berbagai kepentingan. Artinya, walaupun negara di satu sisi akan dipengaruhi dan memihak pada pengusaha, akan tetapi di sisi yang lain pada konteks yang bersamaan juga menekankan pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa: terjadinya pola *organic state* yang didominasi oleh independensi kekuasaan otoritas negara, pola *free market liberalism* yang didominasi oleh independensi kekuatan pasar maupun *populis pluralistik* atas dasar posisi masyarakat yang independen, secara mutlak tidak nampak secara signifikan.

Temuan yang menonjol adalah:

Dalam difusi inovasi, walaupun pasar merupakan struktur yang dominan namun tidak menunjukkan mendominasi struktur negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi antara negara, pasar dan masyarakat adalah hubungan interdependensi yang pada akhirnya memunculkan terjadinya sinergi dari ketiga struktur. Jika negara, pasar dan masyarakat melakukan sinergi dengan upaya saling memberdaya

dalam kekuatan yang berimbang, maka total kekuatan dari ketiga struktur akan bersifat dinamis sehingga menjadi positive-sum

Dengan sinergi yang memprioritaskan adanya kebersamaan antara negara, pasar dan masyarakat secara filosofis dapat dibenarkan. Namun demikian jika ditinjau dari pandangan sosiologis, faktor kepentingan material masih tetap menonjol. Oleh karena itu, nampaknya perspektif liberal masih lebih bisa diterima walaupun dengan beberapa kekurangan karena adanya posisi yang tidak berjalan dengan semestinya.

9.2 Implikasi Teoretik

Jika kemudian hubungan antara negara, pasar dan masyarakat didekati dengan analisis ekonomi politik maka hubungan interdependensi dan terjadinya sinergi ini pada dasarnya termasuk dalam kategori berperspektif liberal modern (Clark, 1991: 119). Karakteristik hubungan interdependensi yang mendukung kategori perspektif liberal modern adalah: peran pemerintah sebagai aktor berada di jalan tengah antara kekuatan kapitalis dan kekuatan

populis pluralis. Pada satu konteks menggunakan potensi dinamik kapitalis, tetapi pada konteks yang lain mempertahankan tingkat keamanan dan keadilan masyarakat. Keterlibatan intervensi pemerintah (walaupun terbatas) hanyalah untuk mengeleminir deviasi pasar yang menciptakan persaingan tidak sempurna, oligopoli dan monopoli serta faktor eksternal yang lain sehingga akumulasi kekuasaan pengusaha dapat ditekan seminimal mungkin. Demikian juga jika produk yang dihasilkan merupakan barang publik, harga tidak stabil, dan adanya ketidak setaraan serta fluktuasi harga pasar yang merugikan masyarakat, maka intervensi pemerintah tetap dapat diabsahkan.

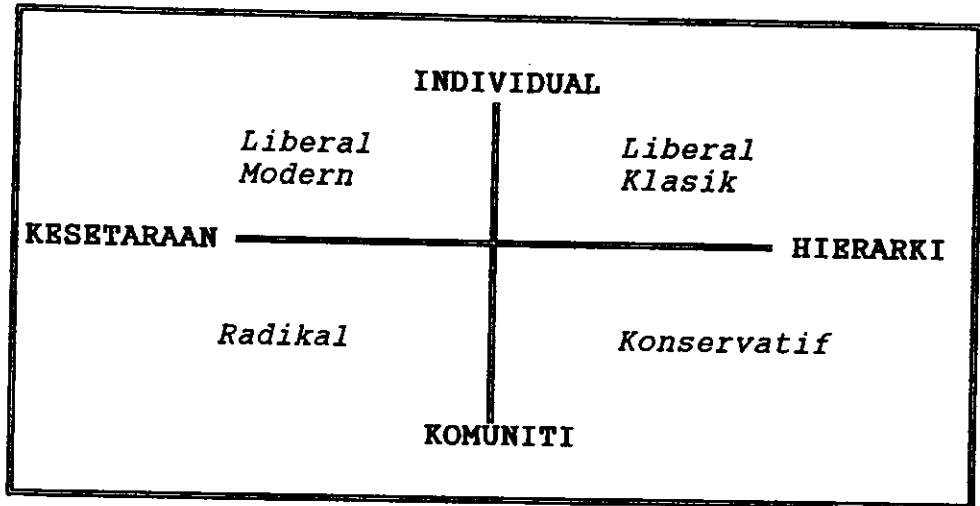
Perspektif liberal modern ini mempunyai komitmen terhadap kesetaraan dan individualisme. Independensi individual tetap memperhatikan harkat dan martabat manusia guna menjamin kelancaran ekonomi. Dengan adanya prasyarat kesetaraan setiap orang diberi kesempatan mengembangkan kapasitasnya selaku individu.

Dalam perspektif liberal modern ini struktur negara, pasar dan masyarakat merupakan elemen-

elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Adanya perubahan dalam suatu elemen akan menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen yang lain. Dengan demikian maka pada azasnya semua struktur dalam masyarakat itu adalah fungsional bagi struktur yang lain.

Posisi hubungan negara, pasar dan masyarakat ini jika dilihat dari perspektif ekonomi politik dapat dilihat pada gambar 9.1 . Jika masyarakat menginginkan interdependensi, terjadinya sinergi dapat dipandang sebagai pusat dari proses sosial. Dengan adanya sinergi akan tercapai kesepakatan menuju tertib sosial (*social-order*) bahwa adanya gerakan antar struktur akan terfokus kepada hubungan untuk kepentingan material. Namun jika antar struktur terjadi ketidak sepakatan, tidak perlu dimaknai sebagai suatu konflik, tetapi dianggap sebagai wujud adanya ketidaksatuan (*deviasi*) dalam merespon dan mengukur standar nilai. Jadi terjadinya ketidak seimbangan antar struktur tidak perlu dinafikan karena hal tersebut bukanlah satu-satunya cacat social order.

Gambar 9.1 Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Politik



Sumber : Clark (1991:36)

9.3 Implikasi Aksiologis

Terdapat tendensi, pemikiran hubungan sinergi antara negara, pasar dan masyarakat ini hanya akan diminati oleh penganut perspektif liberalisme, karena hasilnya untuk membangun sosial-order. Akan tetapi bagi penganut perspektif konservatif yang berpegang pada *status-quo*, pemikiran ini mungkin kurang menarik karena dianggapnya sebagai suatu ancaman (*threat*). Demikian halnya bagi penganut perspektif radikal juga tidak akan menarik, karena

intervensi pemerintah hanya akan menguntungkan kapitalis yang diinterpretasikan pada pengusaha.

Transformasi ke arah tercitanya sinergi antara negara, pasar dan masyarakat ini menjadi tuntutan perlunya akselerasi guna menghindari dominasi kekuasaan di antara ketiganya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pola transformasi diperlukan adanya kemauan dan kearifan dari semua pihak dengan memperhatikan aspek struktur sosial dan budaya yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi serta tidak menimbulkan kekuatiran terjadinya alienasi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O'G, 1991. Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa, dalam Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Anonimous, 1997. Inpres No. 5 tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.
- _____, 1998. Inpres No.5 tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Inpres No.5 tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.
- Ashby, Jacqueline A. and Louise Sperling, 1995. Institutionalizing Participatory, Client-Driven Research and Technology Development in Agriculture, *Development and Change* 26(4) October :753-770.
- Bachriadi Dianto, 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*, Yayasan Akatiga, Bandung.
- Benad, A., 1993. Penggunaan Inovasi Baru: Studi Kasus Revolusi Hijau di Sumatra Barat, dalam Planck, A. *Sosiologi Pertanian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Berger, P.L., B. Berger, H., H. Kellner, 1988. Pluralis Dunia Kehidupan Sosial, dalam Evers, Hans-Dieters, *Teori Masyarakat: Proses Peradaban Dalam Sistem Dunia Modern*, Yayasan Obor, Jakarta, 35-52 pp.
- Birkhaeuser D., R.E. Evenson, G. Feder, 1991. The Economic Impact of Agricultural Extension : A Review, *Economic Development and Cultural Change* 39(3) April:607-650.
- Boeke, J.H., 1983. *Prakapitalisme Di Asia*, Sinar Harapan, Jakarta,

- Budiman, Arief, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta.
- , 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta.
- Burgess, Stephen F., 1997. Smallholder Voice and Rural Transformation, *Comparative Politics* 29(2) January: 127-149.
- Clark, Barry, 1991. *Political Economy: A Comparative Approach*, First Edition, Praeger, New York.
- Collier, William L., Soentoro, Gunawan Wiradi dan Makali, 1974. Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa, *Prisma* 3(6), Desember : 13-30, LP3ES, Jakarta.
- Collier, William L., Kabul Santoso, Soentoro dan Rudi Wibowo, 1996. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan Di Jawa*, Yayasan Obor Indonesia.
- Desai, Ashok V., 1990. Recent Technology Imports into India: Results of a Survey, *Development Change* 21(4) October: 723-749.
- Evers, Hans Dieters, 1988. *Teori Masyarakat: Proses Peradaban Dalam Sistem Dunia Modern*, Yayasan Obor, Jakarta,
- Lampert, Heinz, 1994. *Ekonomi Pasar Sosial*, disunting oleh Kastorius Sinaga, Puspa Swara, Jakarta.
- Luke, T.W., 1995. *New World Order or Neo-World Orders: Powers, Politics and Ideology in Informationalizing Glocalities in Featherstone, Mike, Scott Lash and Roland Robertson, Global Modernities*, Sage Publication Ltd., London.
- Feder G., L.J. Lau and R.H. Slade, 1987. Does Extension Pay? The Training and Visit System in Northwest India, *Amer. J. Agr. Econ* 62(3) August: 676-686.

- Forbes, Dean K., 1986. *Geografi Keterbelakangan: Sebuah Survai Kritis*, LP3ES, Jakarta.
- Fleur, Melvin De, 1995. *Teori-Teori Komunikasi Massa Kontemporer, dalam Depari, Eduard dan Collin Mac Andrews, Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 3-15.
- Geertz, Clifford, 1976. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Giessen, A.B., 1993. *Struktur Sosial Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna di Asia Tenggara: Contoh Indonesia (Jawa), dalam Planck, A. Sosiologi Pertanian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Gordon, Scott, 1991. *The History and Philosophy of Sosial Science*, Routledge, London and New York.
- Hayami, Yusiro dan Masao Kikuchi, 1987. *Dilemma Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Pedesaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hikam, Muhammad AS, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta.
- Hooogvelt, Anke M.M., *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* disadur oleh Alimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- De Janvry, A., E. Sadoulet and E. Thorbecke, 1993. *State, Market and Civil Organization: New Theories, New Practices, and Their Implications for Rural Development*, *World Development* 21(4):565-575.
- Kanto, Sanggar, 1998. *Mobilitas Tenaga Kerja dari Desa ke Kota: Studi tentang Faktor Penyebab, Proses dan dampak Mobilitas non Pertanian di Dua Pedesaan Kabupaten Malang*, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

- Karim, M.Rusli, 1997. *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian, Asal-Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Jogyakarta.
- Kennedy, Paul, 1993. *Preparing For The Twenty First Century*, Harper Collins Publisher, London.
- Kim, Hyung Kook, 1994. *Between State and Market: Development Dynamics in East Asian Capitalism*, *Asian Perspectives* 18(1):57-88.
- Kusumahadi, D., 1996. *Usaha Sapi Perah Oleh Masyarakat Petani Hortikultura di Wilayah Batu : Suatu Studi tentang Konsekwensi Sosial dalam Adopsi dan Difusi Teknologi Pertanian. Disertasi, Pasca Sarjana Unair, Surabaya.*
- Lauer, Robert H., 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lionberger, H.F., 1968. *Adoption of New Ideas and Practices*, The Iowa University Press, Iowa.
- Luke, T.W., 1995. *New World Order or Neo-World Orders: Powers, Politics and Ideology in Informationalizing Glocalities in Featherstone, Mike, Scott Lash and Roland Robertson, Global Modernities*, Sage Publication Ltd., London.
- Martin, Roderick, 1993. *Sosiologi Kekuasaan*, diterjemahkan oleh Herry Joediono, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mas'ood, Mochtar, 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jogyakarta.
- , 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jogyakarta.
- Mustafa, Z., 1990. *Panduan Microstat: Untuk Mengolah Data Statistik*, Andi Offset, Jogyakarta.

- Osborne, D., and T. Gaebler, 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, A Plume Book, New York.
- Parel, C.P., G.C. Caldito., P.L. Ferrer, G.G. Guzman., C.S. Sinsiogo, R.H. Tan. (tanpa tahun). *Sampling Design and Procedures*, ADC, New York.
- Pieterse, J.N., 1995. Globalization as Hybridization in Featherstone, Mike, Scott Lash and Roland Robertson, *Global Modernities*, Sage Publication Ltd., London.
- Rasheed, Sadiq, 1995. The Democratisation Process and Popular Participation in Africa: Emerging Realities and the Challenges Ahead, *Development and Change* 26(2) April: 333-354.
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Press, Jakarta.
- Robertson, R., 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity in Featherstone, Mike, Scott Lash and Roland Robertson, *Global Modernities*, Sage Publication Ltd., London.
- Rogers, E.M. and F.F. Soemaker, 1971. *Communication of Innovation*, Macmillan, New York.
- Rogers, Everett M., 1989. Komunikasi dalam Pembangunan: Memudarnya Model Dominan dalam Rogers, Everett M. (Editor) *Komunikasi Dan Pembangunan : Perspektif Kritis*, diterjemahkan Dasmur Nurdin, LP3ES, Jakarta, 148-169 pp.
- Sanderson, Stephen K., 1993. *Sosiologi Makro. Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Schneider, Ben Ross, 1998. Business-Government Relation and Development, *Comparative Politics* 31(1) October: 101-122.

- Shingi, Prakash M., and B. Mody., 1989. Kesenjangan Akibat Pengaruh Komunikasi dalam Rogers, Everett M. (Editor) Komunikasi Dan Pembangunan : Perspektif Kritis, diterjemahkan Dasmur Nurdin, LP3ES, Jakarta, 90-116 pp.*
- Simon, Roger., 1999. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Bae-haqi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Smale M., R.E. Just and H.D. Leathers, 1994. Land Allocation in HYV Adoption Models, *Amer. J. Agr. Econ* 76(3) August: 535-546.
- Soewardi H., 1976. Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian Terutama Padi. *Disertasi*, Gajah Mada Press, Jokjakar
- Surbakti, Ramlan, 1993. Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara Dengan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik* 14: 3-19.
- Thorbecke, Erik, 1993. Impact of State and Civil Institution on the Operation of Rural Market and Non Market Configuration, *World Development* 21(4): 591-605.
- de Vries, E., 1972. *Masalah-Masalah Petani Jawa*, Bhratara, Jakarta.
- Waters, Malcolm, 1994. *Modern Sociological Theory*, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Wesson, Robert, 1988. *Politics Individual and State*, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
- Wright, Charles R., 1985. *Sosiologi Komunikasi Massa*, disunting oleh Jalaluddin Rachmad, Remadja, Bandung.
- Xu Wang, 1999. Mutual Empowerment of State and Society: Its Nature, Conditions, Mechanisms, and Limits, *Comparative Politics* 31(2) January: 231-249.

Zeitlin, Irving M., 1995. Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer, UGM Press, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1.**Penentuan Contoh Responden****Metode : Equal Allocation Method****(Metode alokasi sama)****Tahap 1. :**

$$n = \frac{L \sum N_h^2 S_h^2}{N^2 d^2 / Z^2 + \sum N_h S_h^2}$$

$$n_h = n / L$$

L = lapisan (strata)**N = Populasi****S_h = Ragam lapisan (varians)****n_h = Sampel tiap lapisan****Z = Nilai keterandalan (tabel Z)****d = Proporsi yang dapat diterima (%)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Ir. Sumartono SU
 2. NIP : 030174651
 3. Tempat / Tgl lahir : Bangkalan, 22 Desember 1950
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 5. Agama : Islam
 6. Status : Kawin
 7. Nama Orang Tua
 Bapak : A. Rachman Eman Sastraprawira
 (Alm.)
 Ibu : Moani
 8. Nama Isteri : Sri Redjeki
 9. Nama Anak : Sita Anisa Martasari
 Aisha Martakusuma Dewi
 Aziza Martalestari
 9. Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
 10 Pekerjaan : Dosen
 11 Alamat Kantor : UPN "Veteran" Surabaya
 Jl. Gunung Anyar Rungkut
 Surabaya (60294)
 Telp. 031-8706369
 Fax . 031-8706372
 12. Alamat Rumah : Rungkut Asri Utara 31
 Surabaya (60293)
 Telp.031-8700113

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Dasar dan Menengah
 Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun, di Bangkalan (1962)
 SMP Negeri I di Bangkalan (1965)

 SMA Negeri I Jurusan Ilmu Pasti dan
 Ilmu Alam (PASPAL) di Bangkalan (1969)

 2. Pendidikan Tinggi
 Sarjana Muda Pertanian . Tahun 1975
 Sarjana Pertanian PTPN , Tahun 1980
 Akte Mengajar V- Univ. Terbuka, Tahun 1985
 Pascasarjana Univ.Brawijaya- Univ. Gajah Mada
 (Jurusan Ekonomi Pertanian), Tahun 1987

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Surabaya (1980- sekarang)
2. Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Unair (1983-1985)
3. Dosen Luar Biasa Universitas Bangkalan (1983-1985)
4. Dosen Luar Biasa Univ. Wijaya Putra (1983-1985)
5. Dosen Luar Biasa Institut Manajemen Bisnis Indonesia (IMBI) 1991-1994

IV. Riwayat Jabatan

1. Kasie Lab.Statistik Fakultas Pertanian UPN (1980-1983)
2. Ka.Sie Lab Sosiologi, Fakultas Pertanian (1983-1990)
2. Sekretaris Jurusan Sosek Fakultas Pertanian UPN (1990-1994)
3. Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat UPN (1994-1999)

V. Keanggotaan Profesi

1. Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI)
Komisariat Surabaya
2. Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PERHIPPTANI)
Komisariat Surabaya

VI. Pengalaman Profesi

- 1 Courtpart Rendel Parkman Consultant Engineer pada Arakundo-Jambu Aye Irrigation and Flood Control Project , di Langsa Aceh Timur (1982)
- 2 Team Peneliti East Java Upland Agricultural Project (Kerjasama Badan Litbangtan- Ford Foundation), 1985-1987
- 3 Team Peneliti Pengembangan Dacrah Rawan di Madura (1990-1995)

VII. Kursus/Latihan/ Penataran

1. Penataran P4 , Tingkat Propinsi , 1982
2. Penataran Kewaspadaan Tingkat Nasional, 1990
3. Kursus Manajemen Produksi dan Operasi di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1992

VIII. Karya Ilmiah

1. Karya Penelitian
1990 Analisis Ekonomi Proyek Konservasi Lahan Kering:
Kasus Malang Selatan

- 1991 Perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang
- 1991 Masalah Petani dan Upaya Penanganannya: Kajian Petani Lahan Kering di DAS Brantas Hulu
- 1992 Pecubah Penggeser Fungsi Produksi: Kajian Tebu Lahan Kering
- 1994 Pembinaan Kecamatan Kritis, Minus dan Terbelakang di Sampang
- 1994 Model Estimasi Fungsi Produksi dan Kendala Dalam Aplikasi: Pendekatan Ekonometrika
- 1995 Produktivitas Varietas Ubi Jalar pada Beberapa Lokasi di Mojokerto

2. Penulisan Buku

- 1995 Pengantar Ekonomi Makro